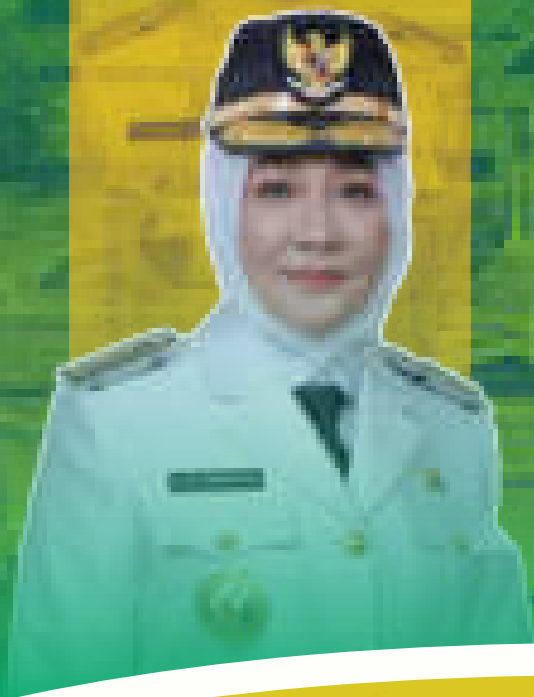




LKPJ 2024

BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BERAU



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh,



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan bimbingan dan tuntunan-Nya jualah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sesuai pedoman tersebut LKPJ berisi informasi tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yang dilengkapi dengan capaian kinerja daerah sebagai tolak ukur atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2022-2026.

Melalui LKPJ Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat berperan sebagai bahan informasi setra evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2024. Masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan bagi perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Berau terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang capaian keberhasilan yang telah dicapai, melainkan juga memuat kekurangan yang ada sehingga dapat dijadikan motivasi serta pembelajaran untuk meningkatkan kinerja dalam rangka membangun Kab. Berau yang lebih baik dan berdaya saing tinggi.

Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2024 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Berau. Hal ini merupakan wujud implementasi inovasi dan kolaborasi yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, DPRD Kabupaten Berau dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau secara luas.

Patut disadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang. Oleh karena itu, catatan-catatan strategis, saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Berau merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Berau. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Kabupaten Berau pada masa yang akan datang.

Demikian laporan ini, kami sampaikan sebagai Keterangan Pertanggung Jawaban pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan sebagai bahan evaluasi untuk pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya. Semoga segala upaya kita dalam mengemban tugas-tugas mendapatkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Amin.

Tanjung Redeb, Februari 2025

BUPATI BERAU

Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR HUKUM	2
1.3. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.....	7
1.4. GAMBARAN UMUM DAERAH	10
1.4.1. Data Geografis, Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	11
1.4.2. Potensi Pengembangan Wilayah	19
1.4.3. Wilayah Rawan Bencana.....	49
1.4.4. Data Demografi	52
1.4.5. Jumlah Aparatur Sipil Negara	70
1.4.6. Kondisi Ekonomi.....	73
1.5. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN	81
1.6. REALISASI BELANJA MENURUT BELANJA.....	85
1.7. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT PEMBIAYAAN	98
 BAB II PENJABARAN APBD	 100
2.1. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN APBD	103
2.1.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapat	104
2.1.2. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	104
2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	106
2.2. PENGELOLAAN PENJABARAN APBD.....	106
2.2.1. Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah	107
2.2.2. Perubahan Anggaran Belanja Daerah.....	115
2.2.3. Perubahan Anggaran Pembiayaan.....	124
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH	
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	127
3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	127
3.1.1. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	127
3.1.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	234
3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan Yang Tidak Berkaitan Dengan Dasar	337
3.1.4. Pelaksanaan Urusan Pilihan	377
3.1.5. Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	480

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	604
3.2.1. Kebijakan Strategi	604
3.2.2. Arah Kebijakan.....	609
3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	641
3.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	647
3.5. KANDALA-KENDALA DAN SOLUSI PERMASALAH	660
3.6. PENGHARGAAN KAB. BERAU TAHUN 2023	662
 BAB IV PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	 677
 BAB V PENUTUP.....	 687
 LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR 1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Berau Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2020-2024.....	75
GAMBAR 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Tahun 2020-2024	79
GAMBAR 1.3 Tren Perekonomian Kabupaten Berau Tahun 2020-2024.....	80
GAMBAR 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026	610



DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 1.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Kampung di Kab.Berau	12
TABEL 1.2 Luas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Di Kab. Berau.....	15
TABEL 1.3 Nama dan Panjang Sungai Menurut Kecamatan	16
TABEL 1.4 Rata-Rata Suhu dan Kelembapan Udara di Kab. Berau.....	17
TABEL 1.5 Jumlah Curah Hujan Hari Hujan Menurut Bulan di Kab. Berau...	18
TABEL 1.6 Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas Dan Produksi Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman Di Kab. Berau.....	20
TABEL 1.7 Luas Panen, Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Di Kab. Berau	21
TABEL 1.8 Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kab. Berau (Kg).....	22
TABEL 1.9 Produksi Unggas Menurut Jenis Unggas Di Kab. Berau (Kg).....	22
TABEL 1.10 Produksi Telur Unggas Menurut Jenis Unggas Di KaB. Berau (Kg).....	24
TABEL 1.11 Jumlah Produksi Perkebunan Karet, Lada, Kakao, Kopi, dan Kelapa Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman di Kab. Berau (Ton).....	25
TABEL 1.12 Jumlah Produksi Perkebunan Kelapa Sawit, Pala, Nilam, Kemiri, Cengkeh Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman di Kab. Berau (Ton)	26
TABEL 1.13 Luas Tanaman Karet, Lada, Kakao, Kopi, dan Kelapa Perkebunan Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman di Kab. Berau (Ha)	28
TABEL 1.14 Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, Pala, Nilam, Kemiri, Cengkeh Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman di Kab. Berau (Ha)	29
TABEL 1.15 Jumlah Pekerja Perkebunan Karet, Lada, Kakao, Kopi, dan Kelapa Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (Orang)	30
TABEL 1.16 Jumlah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit, Pala, Nilam, Kemiri, Cengkeh Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (Orang)	31
TABEL 1.17 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Dan Subsektor di Kab. Berau (Ton)	33
TABEL 1.18 Produksi dan Nilai Produksi Menurut Jenisnya di Perikanan Laut Berau	34
TABEL 1.19 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Menurut Jenisnya di Umum Kab. Berau	36

TABEL 1.20 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan Dan Jenis Budidaya Kab. Berau	37
TABEL 1.21 Produksi Perikanan di Kab. Berau.....	38
TABEL 1.22 Golongan Pertambangan Kab. Berau	39
TABEL 1.23 Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Wisatawan Nusantara Menurut Bulan di Kab. Berau	42
TABEL 1.24 Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata	42
TABEL 1.25 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kab. Berau	43
TABEL 1.26 Benda Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Di Kab. Berau	44
TABEL 1.27 Jumlah Objek Wisata Menurut Kecamatan Kab.Berau	47
TABEL 1.28 Jumlah Penduduk KK Menurut Kec. di Kab.Berau	52
TABEL 1.29 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan di Kab. Berau.....	52
TABEL 1.30 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia 0 – 9 Tahun Berdasarkan Kecamatan Kab. Berau	54
TABEL 1.31 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Berdasarkan Kecamatan Kab. Berau 10-19 Tahun	55
TABEL 1.32 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Berdasarkan Kecamatan Kab. Berau 20-29 Tahun	56
TABEL 1.33 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Berdasarkan Kecamatan Kab. Berau 30 – 39 Tahun	57
TABEL 1.34 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Berdasarkan Kecamatan i Kab. Berau 40-49 Tahun	58
TABEL 1.35 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Berdasarkan Kecamatan Kab. Berau 50 – 59 Tahun	59
TABEL 1.36 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Berdasarkan Kecamatan Kab. Berau 60-69 Tahun	60
TABEL 1.37 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Berdasarkan Kecamatan Kab. Berau 70-> 75 Tahun	61
TABEL 1.38 Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Di Kab. Berau.....	62
TABEL 1.39 Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Di Kab. Berau.....	62
TABEL 1.40 Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Di Kab. Berau.....	63
TABEL 1.41 Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Di Kab. Berau.....	63
TABEL 1.42 Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Di Kab. Berau.....	64
TABEL 1.43 Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Di Kab. Berau.....	64

TABEL 1.44 Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Di Kab. Berau.....	65
TABEL 1.45 Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Di Kab. Berau.....	65
TABEL 1.46 Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Di Kab. Berau.....	66
TABEL 1.47 Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Di Kab. Berau.....	66
TABEL 1.48 Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Di Kab. Berau.....	67
TABEL 1.49 Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Di Kab. Berau.....	67
TABEL 1.50 Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Di Kab. Berau.....	68
TABEL 1.51 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kab. Berau	68
TABEL 1.52 Distribusi Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan.....	69
TABEL 1.53 Jumlah Kab. PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia.....	71
TABEL 1.54 Jumlah Kab. PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan di Berau	72
TABEL 1.55 Jumlah Kab. PNS Jenis Kelamin dan Golongan di Berau	73
TABEL 1.56 Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Pendapatan Daerah Kab. Berau Tahun Anggaran 2022 – 2024 (Rp. Miliar)	82
TABEL 1.57 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Berau Tahun 2024	83
TABEL 1.58 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Berau Tahun 2024	84
TABEL 1.59 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Pendapatan Transfer Kab. Berau Tahun 2024	85
TABEL 1.60 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah Kab. Berau Tahun 2024.....	85
TABEL 1.61 Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Belanja Kab. Berau Tahun Anggaran 2022 – 2024	86
TABEL 1.62 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Daerah Kab. Berau Tahun 2024.....	87
TABEL 1.63 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Daerah Kab. Berau Tahun 2024.....	88
TABEL 1.64 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Modal Kab. Berau Tahun 2024.....	89
TABEL 1.65 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Tidak Terduga Kab. Berau Tahun 2024	90

TABEL 1.66 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Transfer Kab. Berau Tahun 2024.....	91
TABEL 1.67 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar Kab. Berau Tahun 2024.....	92
TABEL 1.68 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Pelayanan Non Dasar Kab. Berau Tahun 2024.....	94
TABEL 1.69 Tingkat Capaian dan Proporsi Belanja Urusan Pilihan Kab. Berau Tahun 2024.....	96
TABEL 1.70 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Pendukung/Penunjang dan Pengawasan Tahun 2024.....	98
TABEL 1.71 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Pembiayaan dan Pengeluaran, Penunjang, Pengawasan Kab. Berau Tahun 2024...	99
TABEL 2.1 Kinerja Keuangan Daerah (Realisasi Pendapatan Daerah) Kab. Berau Tahun 2022-2024 (Milyar).....	107
TABEL 2.2 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Berau Tahun 2023	113
TABEL 2.3 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Berau Tahun 2024	114
TABEL 2.4 Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kab Berau Tahun 2022- 2024 (Milyar)	116
TABEL 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Kab. Berau Tahun 2024.....	119
TABEL 2.6 Anggaran dan Realiasi OPD Urusan Wajib dan Pilihan 2024	121
TABEL 2.7 Anggaran dan Realiasi Anggaran OPD Tahun 2024 Pelaksana Urusan Penunjang	122
TABEL 2.8 SiLPA Daerah Kab. Berau Tahun 2024.....	126
TABEL 3.1 Jumlah OPD Penyelenggara Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kab. Berau Tahun 2024.....	127
TABEL 3.2 Laporan Realisasi Anggaran OPD Penyelenggara Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kab. Berau Tahun 2024	128
TABEL 3.3 Jumlah OPD Penyelenggara Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kab. Berau Tahun 2024.....	234
TABEL 3.4 Laporan Realisasi Anggaran OPD Penyelenggara Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kab. Berau Tahun 2024	235
TABEL 3.5 Jumlah OPD Penyelenggara Urusan Pilihan Berkaitan dengan Pelayanan di Kab. Berau Tahun 2024	337
TABEL 3.6 Laporan Realisasi Anggaran OPD Penyelenggara Urusan Pilihan Berkaitan dengan Pelayanan di Kab. Berau Tahun 2024.....	338
TABEL 3.7 Jumlah OPD Penyelenggara Urusan Pilihan Berkaitan dengan Pelayanan di Kabupaten Berau Tahun 2024	377

TABEL 3.8 Laporan Realisasi Anggaran OPD Penyelenggara Urusan Pilihan Berkaitan dengan Pelayanan di Kabupaten Berau Tahun 2024	378
TABEL 3.9 Jumlah OPD Penyelenggara unsur pendukung dan Urusan Pemerintahan Berkaitan dengan Pelayanan di Kab. Berau Tahun 2024	480
TABEL 3.10 Laporan Realisasi Anggaran OPD Penyelenggara unsur pendukung dan Urusan Pemerintahan Berkaitan dengan Pelayanan di Kab. Berau Tahun 2024	481
TABEL 3.11 Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Penyelenggara unsur pendukung dan Urusan Pemerintahan Berkaitan dengan Pelayanan di Kab. Berau Tahun 2024	516
TABEL 3.12 Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah	605
TABEL 3.13 Goal SDGs tentang Sosial, Lingkungan, Ekonomi, dan Hukum dan Tata Kelola.....	614
TABEL 3.14 Penghargaan Keberhasilan OPD Kab. Berau Tahun 2023.....	624
TABEL 3.15 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.....	626
TABEL 3.16 Goal SDGs tentang Sosial, Lingkungan, Ekonomi, dan Hukum dan Tata Kelola	658
TABEL 3.17 Penghargaan Keberhasilan OPD Kab. Berau Tahun 2024.....	663

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat publik dituntut untuk dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggung- jawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan mencakup capaian pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian dalam setiap urusan pemerintahan. Selain itu, laporan ini juga memuat kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh kepala daerah beserta implementasinya, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD dari tahun

anggaran sebelumnya. Adapun hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan meliputi capaian tugas pembantuan dalam urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan di atasnya, serta capaian tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya. Sebagai bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penyusunan LKPJ merujuk pada kebijakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, serta penyempurnaan kebijakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Berau telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang tahun 2024 memasuki tahun ke empat pelaksanaannya. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) juga didasarkan pada kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau. Kebijakan-kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara Bupati Kabupaten Berau dan DPRD Kabupaten Berau. LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah Berau kepada DPRD Berau dalam rapat paripurna, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, DPRD Berau akan membahas LKPJ tersebut dan menerbitkan rekomendasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi dari DPRD Berau ini akan ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah Berau sebagai bahan perencanaan dan penganggaran untuk tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, serta dalam penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan kebijakan strategis lainnya.

1.2. DASAR HUKUM

Kabupaten Berau adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang pada awalnya merupakan daerah bentukan sementara atau dengan sebutan Swapraja yang diberikan hak-hak otonomi daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 186/OPBI/92/14 tanggal 14 Agustus 1950.

Daerah bentukan sementara Kabupaten Berau tersebut tidak memiliki landasan hukum secara yuridis yang menimbulkan kendala-kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah otonom, sehubungan dengan perkembangan ketatanegaraan yang demokratis serta desakan-desakan dari masyarakat diseluruh daerah Provinsi Kalimantan yang telah menyelenggarakan persiapan pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan Daerah Otonom yang setingkat dengan Kabupaten, sehingga Pemerintah Pusat segera menetapkan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Daerah Otonom di Kalimantan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.

Pemerintah Pusat membentuk secara resmi Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonomi Kabupaten Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan, dengan pembagian Kalimantan wilayah timur menjadi 3 (tiga) Daerah Istimewa yang meliputi:

1. Daerah Istimewa Kutai yang terdiri dari Kawedanan Kutai Selatan, Kutai Timur, Kutai Tengah, Kutai Barat, Kutai Ulu dan Sendawan;
2. Daerah Istimewa Berau yang terdiri dari Kawedanan Gunung Tabur dan Sambaliung;
3. Daerah Istimewa Bulongan yang terdiri dari Bulongan, Tarakan Tanah Tidung dan Apok Kayan.

Adapun pembentukan 3 (tiga) Daerah Kutai, Berau dan Bulongan sebagai Daerah Istimewa dikarenakan ke 3 (tiga) Daerah tersebut memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yaitu bahwa Sultan Kutai dan Sultan Bulongan sebagai Kepala Swapraja menguasai seluruh daerah di wilayah Swapraja Kutai dan Swapraja Bulongan yang sekarang dibentuk sebagai Daerah Istimewa, sedangkan Daerah Istimewa Berau dikarenakan ke 2 (dua) Swapraja Gunung Tabur dan Sambaliung menyetujui pembentukan sebagai 1 (satu) Daerah Istimewa.

Daerah Istimewa Berau dipimpin oleh Kepala Daerah Istimewa yang pertama kali dijabat oleh Sultan Muhammad Aminuddin dengan pusat Pemerintahan Daerah Istimewa Berau berkedudukan di Tanjung Redeb. Sultan Muhammad Aminuddin memerintah sampai dengan adanya peraturan peralihan dari Daerah Istimewa menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Berau. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 menyebabkan Daerah Istimewa Berau berubah menjadi Daerah Tingkat II Berau dan termasuk dalam cakupan wilayah Propinsi Kalimantan Timur dari pembagian wilayah Propinsi Kalimantan. Daerah Tingkat II Berau dipimpin oleh Sultan Aji Raden Muhammad Ayub yang menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau yang pertama dan menetapkan Kota Tanjung Redeb sebagai Pusat Pemerintahan Daerah Tingkat II Berau.

Pada tahun 1999 Daerah Tingkat II Berau berubah menjadi Kabupaten Berau dengan wilayah yang terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan yaitu Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, Kelay, Segah, Pulau Derawan, Talisayan dan Biduk-Biduk namun kemudian terjadi penambahan Kecamatan Teluk Bayur yang merupakan gabungan sebagian wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung dan Gunung Tabur. Selanjutnya, pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Tabalar dan Kecamatan Maratua serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biatan yang menyebabkan terjadi penambahan Kecamatan yaitu Kecamatan Tabalar yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Sambaliung dan Talisayan, Kecamatan Maratua yang merupakan bagian dari Kecamatan Pulau Derawan, dan

Kecamatan Batu Putih yang merupakan bagian dari Kecamatan Biduk-Biduk, dan Kecamatan Talisayan serta Kecamatan Biatan yang merupakan bagian Kecamatan Tabalar. Sehingga sampai dengan saat ini wilayah Kabupaten Berau terbagi menjadi 13 (tiga belas) Kecamatan yang terdiri dari wilayah Kecamatan Sekitar Kota, Kecamatan Pedalaman dan Kecamatan Pesisir.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Berau telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahun 2021-2026 yang implementasinya setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau setiap tahun anggaran merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran merupakan *progress report* atas hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun dan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Sedangkan mengenai muatan LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan: (a). Arah kebijakan umum pemerintahan daerah; (b). Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; (c). Penyelenggaraan urusan

desentralisasi; dan (d). Penyelenggaraan tugas pembantuan; serta, e). Penyelenggaraan tugas umum.

Terbitnya Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu adanya akuntabilitas, efektifitas efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat (publik), penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan prinsip akuntabilitas, LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam suatu Rapat Paripurna DPRD, kemudian dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Hasil pembahasan internal tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. Keputusan DPRD tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penyusunan LKPJ Kepala daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2006 - 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Berau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
14. Peraturan Bupati Berau Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH KABUPATEN BERAU 2021 – 2026

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama 5 (lima) tahun pelaksanaan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung

pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Visi juga merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju Pemerintah Kabupaten Berau dalam menjalankan amanat publik, yang digali bersama dari nilai-nilai luhur yang mampu menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki menuju apa yang ingin diwujudkan. Visi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara berkelanjutan”**. Visi tersebut memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam beberapa misi pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam di bawah ini:

1). Maju

Maju adalah suatu kondisi yang dalam banyak hal lebih baik dari kondisi yang ada saat ini. Berau yang Maju berarti kondisi masyarakat Berau yang lebih baik, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban.

2). Sejahtera

Sejahtera pada dasarnya memiliki lingkup yang luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Untuk dapat hidup sehat, damai dan senang diperlukan perbaikan pada berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pembangunan ekonomi tapi juga fungsi-fungsi pembangunan lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sejahtera yang dimaksud dalam visi ini adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat di mana masyarakatnya dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang lebih baik dan layak, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan dan ketertiban. Sejahtera tidak semata-mata dilihat dari layak dan membaiknya tingkat pendapatan

masyarakat di masa depan, tapi juga dilihat dari aspek-aspek yang lain seperti kemudahan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan dan politik.

3). Sumber Daya Manusia yang Handal

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah daerah. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu daerah. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah daerah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut. Demi mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026, maka Sumber Daya Manusia perlu dipersiapkan secara matang dan berkelanjutan. SDM yang handal dapat terwujud dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 bertekad membentuk SDM yang handal sebagai pondasi dari keberhasilan pembangunan yang di cita-citakan.

4). Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

Sekalipun konsep pembangunan yang dijalankan di Kab. Berau selama ini, dirasakan telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yang didorong oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, dalam kenyataannya belum mampu menekan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Berau. Konsep pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada pemanfaatan sumberdaya tidak terbarukan (unrenewable resources) di sektor Pertambangan tidak lagi bisa dipertahankan dalam jangka panjang dan karenanya perlu dilakukan transformasi ekonomi ke pemanfaatan sumberdaya ekonomi terbarukan (renewable resources) seperti Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, Pariwisata, dan UMKM.

Dengan konsep ini, maka pemanfaatan sumberdaya ekonomi akan lebih dapat dirasakan secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Dengan konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan diharapkan sumber daya alam akan

dapat dinikmati untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang.

Visi Kabupaten Berau periode 2021-2026 menitikberatkan pada pembentukan sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia yang handal akan memudahkan Kabupaten Berau dalam pemulihan ekonomi sehingga bisa tercipta masyarakat yang sejahtera dan maju. Arah pemulihan ekonomi Kabupaten Berau tetap dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki akan tetapi dengan konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan bisa tercipta dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.
- 2) Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan.
- 4) Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

1.4. GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN BERAU

Gambaran umum daerah Kabupaten Berau dapat diperinci dalam 3 (tiga) sub bagian yaitu: (1).Kondisi Geografis Daerah, (2).Gambaran Umum Demografis, dan (3).Kondisi Ekonomi. Sebagai Berikut :

1.4.1. Data Geografis, Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a) Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Berau Merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang berada tidak jauh dari Garis Khatulistiwa. Kabupaten Berau terletak antara 116° Bujur Timur sampai dengan 119° Bujur Timur dan 1° Lintang Utara sampai dengan 2°33' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Berau secara administrasi mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara
- Sebelah Timur dibatasi oleh laut Sulawesi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Barat

Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Berau merupakan Kabupaten terluas ke 5 (lima) setelah Kabupaten Kutai Kartanegara serta dibagi menjadi 13 (tiga belas) Kecamatan, 10 Kelurahan dan 100 Kampung. Adapun Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan, Kelurahan dan



Kampung di Kabupaten Berau dapat dilihat pada Peta Wilayah Kabupaten Berau Gambardan Jumlah dan Nama Kecamatan, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Berau dapat dilihat. Sedangkan 13 (Tiga belas) Kecamatan tersebut adalah Kelay dengan Ibu Kota Sido Bangen, Talisayan dengan Ibu Kota Talisayan, Tabalar dengan Ibu Kota Tubaan, Biduk-Biduk dengan Ibu Kota Biduk-Biduk, Pulau Derawan dengan Ibu Kota Tanjung Batu, Maratua dengan Ibu Kota Maratua Teluk Harapan, Sambaliung dengan Ibu Kota Sambaliung, Tanjung Redeb dengan Ibu Kota Tanjung Redeb, Gunung Tabur dengan Ibu Kota Gunung Tabur, Segah dengan Ibu Kota Tepian Buah, Teluk Bayur dengan Ibu Kota Teluk

Bayur, Batu Putih dengan Ibu Kota Batu Putih, dan Biatan dengan Ibu Kota Biatan Lempake. dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

TABEL 1.1

Jumlah dan Nama Kecamatan, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Berau

Kode	Nama Wilayah Administrasi		
	Kecamatan	Kelurahan	Kampung
64,03	13	10	100
64.03.01	1. Kelay	-	14
64.03.01.2001			1.Merabu
64.03.01.2002			2.Panaan
64.03.01.2003			3.Merapun
64.03.01.2004			4.Muara Lesan
64.03.01.2005			5.Merasa
64.03.01.2006			6.Lesan Dayak
64.03.01.2007			7.Long Beliu
64.03.01.2008			8.Long Duhung
64.03.01.2009			9.Long Lamcin
64.03.01.2010			10. Long Keluh
64.03.01.2011			11.Long Pelay
64.03.01.2012			12.Mapulu
64.03.01.2013			13.Long Sului
64.03.01.2014			14.Sido Bangen
64.03.02	2. Talisayan	-	10
64.03.02.2002			1.Dumaring
64.03.02.2003			2.Talisayan
64.03.02.2014			3.Campur Sari
64.03.02.2015			4.Bumi Jaya
64.03.02.2016			5.Tunggal Bumi
64.03.02.2017			6.Sumber Mulya
64.03.02.2019			7.Suka Murya
64.03.02.2020			8.Purna Sari Jaya
64.03.02.2022			9.Eka Sapta
64.03.02.2023			10.Capuak
64.03.03	3. Sambaliung	1	13
64.03.03.2001			1.Long Lanuk
64.03.03.2002			2.Tumbit Dayak
64.03.03.2004			3.Inaran
64.03.03.2005			4.Pegat Bukur
64.03.03.2006			5.Rantau Panjang
64.03.03.2007			6.Suaran
64.03.03.2008			7.Pilanjau
64.03.03.2009			8.Pesayan
64.03.03.2010			9.Sei Bebanir Bangun
64.03.03.2011			10.Gurimbang
64.03.03.2012			11.Sukan Tengah

Kode	Nama Wilayah Administrasi		
	Kecamatan	Kelurahan	Kampung
64.03.03.1013		1. Sambaliung	
64.03.03.2014			12.Tanjung Perangat
64.03.03.2015			13.Bena Baru
64.03.04	4. Segah	-	13
64.03.04.2001			1.Long La'ai
64.03.04.2002			2.Punah Segah
64.03.04.2003			3.Long Ayap
64.03.04.2004			4.Long Ayan
64.03.04.2005			5.Punan Malinau
64.03.04.2006			6.Punan Mahkam
64.03.04.2007			7.Gunung Sari
64.03.04.2008			8.Pandan Sari
64.03.04.2009			9.Bukit Makmur
64.03.04.2010			10.Harapan Jaya
64.03.04.2011			11.Tepian Buah
64.03.04.2012			12.Batu Rajang
64.03.04.2013			13.Siduung Indah
64.03.05	5. Tanjung Redeb	6	-
64.03.05.1003		1.Sungai Bedungun	
64.03.05.1004		2.Tanjung Redeb	
64.03.05.1005		3.Bugis	
64.03.05.1006		4.Gayam	
64.03.05.1007		5. Karang Ambun	
64.03.05.1008		6. Gunung Panjang	
64.03.06	6. Gunung Tabur	1	10
64.03.06.2001			1.Tasuk
64.03.06.2002			2.Birang
64.03.06.1003		1.Gunung Tabur	
64.03.06.2004			3.Maluang
64.03.06.2005			4.Samburakat
64.03.06.2006			5.Sambakungan
64.03.06.2007			6.Merancang Ulu
64.03.06.2008			7.Merancang Ilir
64.03.06.2009			8.Pulau Besing
64.03.06.2010			9.Melati Jaya
64.03.06.2011			10.Batu-Batu
64.03.07	7. Pulau Derawan	-	5
64.03.07.2001			1.Pegat Batumbuk
64.03.07.2002			2.Teluk Semanting
64.03.07.2003			3.Tanjung Batu
64.03.07.2004			4.PulauDerawan
64.03.07.2009			5.Kasai
64.03.08	8. Biduk-Biduk	-	6
64.03.08.2001			1.Biduk-Biduk
64.03.08.2002			2.Pantai Harapan

Kode	Nama Wilayah Administrasi		
	Kecamatan	Kelurahan	Kampung
64.03.08.2003			3.Tanjung Prepat
64.03.08.2004			4.Teluk Sumbang
64.03.08.2008			5.Teluk Sulaiman
64.03.08.2009			6.Giring-Giring
64.03.09	9. Teluk Bayur	2	4
64.03.09.2001			1.Tumbit Melayu
64.03.09.1002		1.Teluk Bayur	
64.03.09.1003		2.Rinding	
64.03.09.2004			2.Labanan Jaya
64.03.09.2005			3.Labanan Makmur
64.03.09.2006			4.Labanan Makarti
64.03.10	10. Tabalar	-	6
64.03.10.2002			1.Tabalar Muara
64.03.10.2003			2.Tubaan
64.03.10.2004			3.Tabalar Ulu
64.03.10.2005			4.Semurut
64.03.10.2006			5.Buyung-Buyung
64.03.10.2007			6.Harapan Maju
64.03.11	11. Maratua	-	4
64.03.11.2001			1.Ma. Bohe Silian
64.03.11.2002			2.Ma. Payung-Payung
64.03.11.2003			3.Ma. Teluk Alulu
64.03.11.2004			4.Ma. Teluk Harapan
64.03.12	12. Batu Putih	-	7
64.03.12.2001			1.Tembudan
64.03.12.2002			2.Kayu Indah
64.03.12.2003			3.Batu Putih
64.03.12.2004			4.Lobang Kelatak
64.03.12.2005			5.Ampen Medang
64.03.12.2006			6.Balikukup
64.03.12.2007			7.Sumber Agung
64.03.13	13. Biatan	-	8
64.03.13.2001			1.Biatan Ulu
64.03.13.2002			2.Biatan Ilir
64.03.13.2003			3.Karangan
64.03.13.2004			4.Biatan Lempake
64.03.13.2005			5.Manunggal Jaya
64.03.13.2006			6.Biantan Bapinang
64.03.13.2007			7.Biatan Baru
64.03.13.2008			8.Bukit Makmur Jaya

Sumber : RTRW Kab.Berau Tahun 2016-2036

b) Luas Wilayah

Kabupaten Berau memiliki luas wilayah $\pm 36.962,37 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari daratan $\pm 22.232,53 \text{ Km}^2$ dan lautan $\pm 14.729,85 \text{ Km}^2$ sepanjang 12 mil dari garis pantai pulau terluar. Luas wilayah Kabupaten Berau dirinci menurut Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kelay seluas $6.556,54 \text{ Km}^2$ atau sekitar 17,74% dari luas wilayah keseluruhan, dan yang paling kecil adalah Kecamatan Tanjung Redeb dengan luasan $24,41 \text{ Km}^2$ atau 0,07% dari luas wilayah secara keseluruhan. Adapun secara rinci Pembagian Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

TABEL 1.2
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Berau

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase (%)
1.	Kelay	6.556,54	17,74
2.	Talisayan	1.624,57	4,40
3.	Tabalar	1.837,34	4,97
4.	Biduk Biduk	2.429,97	6,57
5.	Pulau Derawan	4.423,99	11,97
6.	Maratua	5.616,26	15,19
7.	Sambaliung	2.163,37	5,85
8.	Tanjung Redeb	24,41	0,07
9.	Gunung Tabur	1.963,32	5,31
10.	Segah	5.241,29	14,18
11.	Teluk Bayur	316,98	0,86
12.	Batu Putih	3.573,30	9,67
13.	Biatan	1.192,03	3,22
Jumlah		36.963,37	100,00

Sumber : RTRW Kabu.Berau Tahun 2016-2036

c) Topografis

Kabupaten Berau memiliki kondisi topografi wilayah yang cukup bervariasi. Topografi secara umum dapat digambarkan melalui bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Topografi wilayah daratan Kabupaten Berau banyak berbentuk gugusan bukit yang terdapat hampir diseluruh Kecamatan, terutama Kecamatan Kelay yang membentang perbukitan Batu Kapur yang memiliki panjang hampir mencapai 100 Km². Dengan kondisi topografi seperti itu, maka Kabupaten Berau memiliki potensi sumber daya alam

yang cukup kaya seperti batu bara, batu kapur, kayu hutan, rotan, dan hasil hutan lainnya.

Kabupaten Berau memiliki 21 sungai besar yang merupakan sumber vital bagi penduduk dan ekosistem sekitarnya. Sungai Kelay merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Berau. Mengalir dari pegunungan sekitar Gunung Mantan sepanjang 254 Km² sampai pada pertemuan dengan Sungai Segah membentuk Sungai Berau di Tanjung Redeb. Sungai Segah sendiri panjangnya sekitar 152 Km² dimana Hulu sungai berada di sekitar Gunung Kundas. Sedangkan Sungai Tanian Buku di Kecamatan Talisayan merupakan Sungai yang terpendek dengan panjang 12 Km².

Adapun Nama dan Panjang Sungai Menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :

TABEL 1.3
Nama dan Panjang Sungai Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Sungai	Panjang (Km)
1.	Kelay	Kelay	254
		Long Gie	49
		Lesan	64
		Tawon	59
2.	Talisayan	Sulaiman	23
		Dumaring	49
		Tanian Buku	12
		Lumbungan	18
3.	Tabalar	Tabalar	49
4.	Sambaliung	Suaran	19
		Inaran	22
		Bental	58
5.	Gunung Tabur	Berau	292
		Lati	43
		Birang	58
		Sambarata	39
6.	Segah	Segah	152
		Malinau	58
		Pura	72
		Siagung	38
		Siduung	83

Sumber : Perda Berau RTRW Nomor 9 Tahun 2017

d) Iklim

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Berau memiliki Iklim Tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Sedangkan musim Penghujan terjadi pada bulan Novembersampai dengan bulan april.

Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi peralihan pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa, maka iklim di Kabupaten Berau juga dipengaruhi oleh angin Muson Barat pada Nopember - April dan Angin Muson Timur pada Mei - Oktober.

Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kabupaten Berau kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan waktu yang jauh lebih panjang.

e) Suhu dan Kelembaban

Suhu udara suatu tempat ditentukan oleh tinggi dan rendahnya daerah tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum, Sepanjang tahun 2024 Kabupaten Berau beriklim panas dengan suhu rata-rata 26,50-28,00 °C dengan suhu terendah adalah 21,50 °C dan tertinggi 36,20 °C. Selain sebagai daerah tropis dengan hutan yang luas, di tahun 2024 rata-rata kelembaban udara di Kabupaten Berau antara 89 Persen. Adapun Rata-Rata Suhu dan Kelembapan Udara di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut :

TABEL 1.4
Rata-Rata Suhu dan Kelembapan Udara Selama Tahun 2024
di Kabupaten Berau

No	Bulan	Suhu Udara			Kelembapan Udara		
		Temperature (°C)			Humadity (%)		
		Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
1.	Januari	35,50	21,30	26,50	100,00	47,00	89,00
2.	Februari	34,50	22,40	26,50	100,00	52,00	89,00
3.	Maret	35,20	22,20	26,90	100,00	52,00	89,00

4.	April	36,40	22,10	26,90	100,00	46,00	88,00
5.	Mei	36,90	23,00	27,30	100,00	50,00	88,00
6.	Juni	35,90	23,40	27,50	100,00	49,00	87,00
7.	Juli	36,50	22,20	27,50	100,00	46,00	86,00
8.	Agustus	36,20	23,00	28,00	100,00	43,00	83,00
9.	September	36,60	21,90	27,90	100,00	40,00	84,00
10.	Oktober	36,20	23,20	28,10	100,00	45,00	84,00
11.	November	37,00	23,20	27,50	100,00	46,00	87,00
12.	Desember	36,20	22,60	27,40	100,00	49,00	89,00

Sumber : BMKG Kab.Berau, Tahun 2024

f) Curah Hujan

Curah hujan sepanjang tahun 2024 di Kabupaten Berau cukup tinggi. Kita dapat melihatnya dari catatan curah hujan dan jumlah hari hujan bulanan sepanjang tahun 2024. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 248,9 mm³ dan curah hujan terendah selama tahun 2023 terjadi pada bulan Juni yaitu 95,9 mm³. Adapun Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.5 sebagai berikut :

TABEL 1.5

Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan selama Tahun 2024 di Kabupaten Berau

No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan (Hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (jam)
1.	Januari	253,00	25,00	3,00
2.	Februari	241,10	23,00	3,00
3.	Maret	166,70	26,00	3,30
4.	April	206,60	27,00	4,60
5.	Mei	325,50	26,00	4,60
6.	Juni	97,00	23,00	5,40
7.	Juli	117,30	21,00	5,10
8.	Agustus	257,20	24,00	5,60
9.	September	327,30	23,00	5,60
10.	Oktober	108,90	21,00	6,00
11.	November	132,50	28,00	5,00
12.	Desember	198,40	24,00	4,40

Sumber : BMKG Kab.Berau Tahun 2024

1.4.2. Potensi Pengembangan Wilayah

1.4.2.1. Potensi Pertanian

Sektor Pertanian merupakan peluang terbesar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di perkampungan. Untuk meningkatkan daya saing Pertanian, akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan Industri Primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna meningkatkan nilai tambah produksi hasil pertanian serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi Pertanian dari hulu ke hilir untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan optimalisasi kualitas mutu, produk, komoditas, sumber daya manusia (SDM) aparatur dan non aparatur serta sarana serta sarana dan prasarana pertanian.

Pertanian merupakan mata pencaharian dari sebagian besar masyarakat daerah ini. Sebagai daerah dengan luas wilayah yang besar dan bentuk serta ketinggian lahan yang khas maka pertanian dapat berkembang dengan baik di daerah ini. Sektor Pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Berau antara lain Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.

Secara umum, pada tahun 2023 untuk tanaman pangan, meskipun luas tanam mengalami penurunan dari 24.756 Ha pada tahun 2020, menjadi 22.298,6 Ha pada tahun 2023, namun luas panen dan produksi mengalami peningkatan. Dengan produktivitas yang stabil. Luas panen naik dari 22.512,7 Ha pada tahun 2023 menjadi 22.035,4 Ha pada tahun 2024, dan Produksi turun dari 103.615,0 Ton pada tahun 2023 menjadi 102.928,0 Ton pada tahun 2024 sedangkan produktivitas pada tahun 2023 tetap stabil diangka 631,6 Kw/Ha. Sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2023 Komoditas Jagung memiliki luas tanam, luas panen dan jumlah produksi terbesar diantara komoditas tanaman pangan lain yaitu dengan luas tanam sebesar 10.950,3 Ha dengan luas panen sebesar 10.340,0 Ha dengan produksi 56.355,9 Ton. Sedangkan komoditas yang memiliki jumlah produktivitas terbesar di tahun 2024 ada pada komoditas ubi kayu, yaitu sebesar

287,20 Kw/Ha. Adapun Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas dan Produksi Tanaman Pangan dapat dilihat pada tabel 1.6 sebagai berikut :

TABEL 1.6

Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas Dan Produksi Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman Tahun 2023 & 2024 di Kabupaten Berau

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Padi Sawah	2.873,1	2.623,1	3.866,3	3.366,3	15.040,0	17.040,0
2.	Padi Ladang	4.426,5	3.126,5	7.0409,4	6.8109,4	21.339,0	20.321,0
3.	Jagung	9.267,4	7.213,1	10.576,6	8.951,30	63.131,0	48.785
4.	Kedelai	5,0	21,0	7,5	32,00	13,0	46,41
5.	Kacang Tanah	41,9	36,8	46,6	142,10	50,0	183,17
6.	Kacang Hijau	10,5	10,5	8	19,00	5,0	10,80
7.	Ubi Kayu	80,8	80,8	80,8	109,40	2.921,0	3141,70
8.	Ubi Jalar	31,7	31,7	31,7	58,50	421,0	1079,63

Sumber : DTPHP Kab.Berau, 2024

Sedangkan untuk tanaman sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Berau, Luas panen, Luas Tanam, dan produksi mengalami penurunan. Sedangkan Produktivitas mengalami peningkatan. Luas panen turun dari 22.512,7 Ha pada tahun 2023 menjadi 22.035,4 Ha pada tahun 2024 dan produksi turun dari 103.615,0 Ha pada tahun 2024 menjadi 102.928,0 Ha pada tahun 2023 sedangkan produktivias meningkat dari 627,8 Kw/Ha pada tahun 2023 menjadi 631,6 Kw/Ha.

Adapun Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.7 sebagai berikut;

TABEL 1.7
Luas Panen, Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan tahun 2023-
2024 di Kabupaten Berau

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)		Produksi (Kuintal)	
		2023	2024	2023	2024
1.	Bawang Daun	10,55	62	702,73	1,227
2.	Bawang Merah	6,50	7	391,00	391
3.	Bayam	15,10	132	716,50	5.003
4.	Buncis	100,00	21	874,00	986
5.	Cabai Besar	1,25	39	60,00	1.659
6.	Cabai Rawit	41,90	205	695,00	5.821
7.	Jamur	0	1.792	73,10	105
8.	Kacang Panjang	19,35	111	536,70	5.421
9.	Kangkung	165,64	150	7413,30	6.339
10.	Kembang Kol	5	5	9	9
11.	Ketimun	18,13	80	539,10	4.347
12.	Kubis	4,05	2	8	6
13.	Melon	-	1	0	14
14.	Petsai/Sawi	90,33	82	565,20	3.029
15.	Semangka	69,00	46	7.025,00	3.372
16.	Terong	14,05	86	754,50	9.821
17.	Tomat	71,81	64	2.879,55	3.205

Sumber : DTPHP Kab.Berau, 2024

1.4.2.2. Potensi Peternakan

Jumlah produksi ternak di Kabupaten Berau terdiri dari 3 (tiga) jenis ternak yaitu sapi potong, kambing dan babi. Potensi peternakan di Kabupaten Berau pada umumnya mengalami peningkatan pada tahun 2024, namun hal tersebut hanya terjadi pada produksi ternak jenis sapi yaitu dari 12.237 Kg pada tahun 2023 menjadi 11.948 Kg pada tahun 2024. Untuk produksi ternak jenis kuda mengalami peningkatan dan kambing mengalami peningkatan. Ternak jenis kuda

dari 5 Kg pada tahun 2023 menjadi 8 Kg pada tahun 2024 dan ternak jenis kambing mengalami peningkatan dari 12.410 Kg tahun 2023 menjadi 12.410 Kg pada tahun 2024. Adapun Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.8 sebagai berikut :

TABEL 1.8
Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak Tahun 2023 & 2024 di
Kabupaten Berau (Kg)

No	Jenis Ternak	2023 (Kg)	2024 (Kg)
1.	Sapi	12.237	11.948
2.	Kuda	5	8
3.	Kambing	12.410	12.410
4.	Babi	2.517	2.621
5.	Kerbau	958	961

Sumber : DTPHPKab.Berau ,2024

Jumlah produksi ternak di Kabupaten Berau terdiri dari 3 (tiga) jenis ternak yaitu Ayam Ras Pedaging Ayam Lokal, Itik. Potensi peternakan Unggas di Kabupaten Berau pada umumnya mengalami penurunan pada tahun 2024, namun, hal tersebut hanya terjadi pada produksi Ayam ras daging yaitu dari 274.407 Kg pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 260.385 Kg pada tahun 2024. Untuk produksi ternak ayam petelur mengalami penurunan dan ayam buras mengalami penurunan. Ternak jenis Ayam petelur dari 221.144 Kg pada tahun 2023 menjadi 180.847 Kg pada tahun 2024 dan ternak jenis itik mengalami penurunan dari 25.778 Kg tahun 2023 menjadi 23.989 Kg pada tahun 2024. Tabel 1.9 produksi unggas di Kabupaten Berau, sebagai berikut;

TABEL 1.9
Produksi Unggas Menurut Jenis Unggas Tahun 2023 & 2024 di
Kabupaten Berau (KG)

No	Jenis Unggas	2023 (Kg)	2024 (Kg)
1.	Ayam Ras Pedaging	274.407	260.385
2.	Ayam Petelur	221.144	180.847
3.	Ayam Buras	205.798	189.899
4.	Itik	25.778	23.989

Sumber : DTPHP Kab. Berau ,2024

Untuk Ternak jenis unggas yang dibudidayakan di Kabupaten Berau terdiri dari 3 (tiga) jenis unggas yaitu ayam ras pedaging, ayam, ayam lokal dan itik. Pada tahun 2023, produksi telur ayam ras petelur mencapai 2.117.670 butir, yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 2.224.898 butir. Peningkatan ini menunjukkan bahwa produksi telur ayam ras petelur di Kabupaten Berau tumbuh seiring dengan permintaan pasar yang meningkat atau adanya efisiensi dalam sistem pemeliharaan unggas tersebut. Produksi telur ayam lokal pada tahun 2023 tercatat sebesar 170.832 butir, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 189.718 butir. Meskipun ada kenaikan produksi, angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan produksi telur ayam ras petelur, namun tetap menunjukkan adanya potensi pasar untuk telur ayam lokal. Produksi telur itik pada tahun 2023 tercatat sebanyak 144.442 butir, dan meningkat menjadi 161.728 butir pada tahun 2024. Meskipun terdapat peningkatan, produksi telur itik juga tetap berada di bawah produksi telur ayam ras petelur dan telur ayam lokal.

Namun demikian, ini menunjukkan bahwa sektor peternakan itik di Kabupaten Berau juga mengalami perkembangan. Secara keseluruhan, meskipun produksi telur ayam ras petelur menunjukkan peningkatan yang signifikan, telur ayam lokal dan telur itik mengalami kenaikan yang lebih moderat, yang mungkin disebabkan oleh permintaan pasar yang lebih stabil atau faktor-faktor lainnya seperti keterbatasan dalam peningkatan populasi unggas tersebut. Adapun Produksi Unggas Menurut Jenis Unggas di Kabupaten Berau dan Produksi Telur

Unggas Menurut Jenis Unggas di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.10 sebagai berikut:

TABEL 1.10
Produksi Telur Unggas Menurut Jenis Unggas Tahun 2023 & 2024
di Kabupaten Berau (KG)

No	Produksi Telur	2023 (Kg)	2024 (Kg)
1.	Telur Ayam Ras Petelur	2.117.670	2.224.898
2.	Telur Ayam Lokal	170.832	189.718
3.	Telur Itik	144.442	161.728

Sumber : DTPHP Kab. Berau ,2024

1.4.2.3. Potensi Perkebunan

Jenis-jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Berau terdiri dari karet, lada, kakao, kelapa dalam, dan kelapa sawit. Wilayah terbesar dari luas perkebunan ditanami kelapa sawit. Kelapa sawit tetap menjadi komoditas perkebunan utama di Kabupaten Berau. Pada tahun 2024, produksi kelapa sawit mencapai 2.223.826,19 Ton dalam bentuk tandan buah segar (TBS), yang dihasilkan dari luas perkebunan seluas 139.013,14 Hektar pada tahun 2023. Kelapa sawit mendominasi sektor perkebunan di wilayah ini, dengan kontribusi yang sangat besar terhadap produksi pertanian. Produksi kelapa dalam pada tahun 2024 tercatat mencapai 3.482,74 Ton, yang dihasilkan dari luas perkebunan seluas 2.447,17 Hektar. Kelapa dalam menjadi salah satu komoditas penting di Kabupaten Berau dengan produksi yang cukup signifikan meskipun lebih kecil dibandingkan dengan kelapa sawit. Produksi lada pada tahun 2024 mencapai 827,02 Ton dari luas perkebunan 1.581,05 Hektar. Lada menempati posisi sebagai komoditas perkebunan terbesar ketiga di Kabupaten Berau dengan produksi yang relatif stabil dan berpotensi untuk terus berkembang.

Pada produksi karet mencapai 5.208,24 Ton pada tahun 2024, yang menjadikannya komoditas utama dalam sektor perkebunan di Kabupaten Berau. Karet merupakan produk unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, terutama untuk industri pengolahan karet di dalam dan luar daerah. Pada lada tercatat menghasilkan 2.056,50 Ton pada tahun 2024.

Komoditas ini menjadi salah satu produk perkebunan yang berpotensi besar, mengingat lada memiliki pasar ekspor yang stabil. Kabupaten Berau dapat memanfaatkan kondisi ini untuk mengembangkan sektor perkebunannya lebih lanjut.

Pada produksi kakao mencapai 1.037,00 Ton pada tahun 2024. Meskipun tidak sebesar karet dan lada, kakao tetap menjadi komoditas penting yang dapat dimanfaatkan untuk industri pengolahan cokelat. Hal ini membuka peluang bagi Kabupaten Berau untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk kakao.

Produksi kopi hanya tercatat 48,00 Ton, menjadikannya komoditas dengan produksi terkecil di antara yang lainnya. Meskipun demikian, kopi tetap memiliki potensi pasar domestik yang dapat dikembangkan lebih lanjut, baik dalam hal kualitas maupun inovasi produk olahan kopi.

Pada produksi kelapa tercatat sebanyak 2.310,17 Ton, yang menunjukkan kontribusi signifikan dalam sektor perkebunan. Kelapa memiliki banyak manfaat, baik dalam bentuk produk olahan seperti minyak kelapa, kopra, maupun produk konsumsi lainnya. Potensi pasar domestik dan ekspor dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa di daerah ini.

Adapun Produksi Perkebunan pada tahun 2024 menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Berau serta Luas Tanaman Perkebunan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman dapat dilihat pada tabel 1.11 sebagai berikut :

TABEL 1.11

Jumlah Produksi Perkebunan Karet, Lada, Kakao, Kopi, dan Kelapa Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Tahun 2024 di Kabupaten Berau (Ton)

No	Kecamatan District	Karet (Ton)	Lada (Ton)	Kakao (Ton)	Kopi (Ton)	Kelapa (Ton)
1.	Kelay	194,08	7,7	63,18	-	23,92
2.	Talisayan	58,081	100,89	20,86	0,668	65,475
3.	Tabalar	-	150,9	18,6	-	31,6
4.	Biduk-Biduk	-	43,65	-	0,96	640,17
5.	Pulau Derawan	0,85	92	4,62	-	53,795
6.	Maratua	-	-	-	-	540,3
7.	Sambaliung	16,3	279,7	296,71	0,46	31,52
8.	Tanjung Redeb	-	-	-	-	30,96
9.	Gunung Tabur	2,8	253,7	64,86	2,66	181,16

10.	Segah	76,8	11,26	90,34	-	26,26
11.	Teluk Bayur	39,44	21,12	8,7	-	85,72
12.	Batu Putih	29,15	38,58	15,36	0,96	61,12
13.	Biatan	5,2	326,5	17,64	2,8	22,24
Jumlah		5.208,24	2.056,50	1.037,00	48,00	2.310,17

Sumber : Dinas Perkebunan Berau ,2024

Pada produksi kelapa sawit merupakan yang terbesar dengan total 2.959.829,82 Ton. Hal ini menunjukkan bahwa kelapa sawit tetap menjadi komoditas utama di Kabupaten Berau, dengan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian daerah. Perkebunan kelapa sawit mencakup sebagian besar lahan perkebunan, yang menunjukkan pentingnya sektor ini dalam pergerakan ekonomi lokal. Pada produksi pala tercatat sebanyak 16,1 Ton. Meskipun angkanya kecil dibandingkan dengan kelapa sawit, pala tetap merupakan komoditas yang memiliki nilai jual tinggi, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Kabupaten Berau dapat memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan ekspor hasil perkebunan pala.

Tidak ada produksi nilam yang tercatat pada tahun 2024 (0 Ton), yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi pasar, kurangnya pengembangan, atau kendala dalam sektor budidaya nilam di daerah tersebut. Pada produksi kemiri tercatat 0,94 Ton. Komoditas ini memiliki pasar yang terbatas, tetapi dengan pengembangan yang tepat, kemiri dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani di Kabupaten Berau, terutama dalam industri pengolahan makanan dan kosmetik. Produksi cengkeh tercatat 1,43 Ton. Seperti kemiri, cengkeh adalah komoditas yang memiliki potensi pasar internasional, terutama di industri rempah-rempah. Kabupaten Berau dapat berupaya meningkatkan produksi dan kualitas cengkeh untuk memenuhi permintaan pasar.

TABEL 1.12

Jumlah Produksi Perkebunan Kelapa Sawit, Pala, Nilam, Kemiri, Cengkeh Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman Tahun 2024 di Kabupaten Berau (Ton)

No	Kecamatan District	Kelapa Sawit (Ton)	Pala (Ton)	Nilam (Ton)	Kemiri (Ton)	Cengkeh (Ton)
1.	Kelay	610.930,29	-	-	-	-
2.	Talisayan	200.664,12	0	-	-	-
3.	Tabalar	16.897,21	-	-	-	-
4.	Biduk-Biduk	895,69	11,7	-	0,12	0,9
5.	Pulau Derawan	82.401,62	0	-	-	-
6.	Maratua	-	-	-	-	-
7.	Sambaliung	10850,3	-	-	-	-
8.	Tanjung Redeb	-	-	-	-	-
9.	Gunung Tabur	160.958,54	0	-	0,82	0,8
10.	Segah	678.296,06	-	-	-	-
11.	Teluk Bayur	52.948,59	0	-	-	-
12.	Batu Putih	440.846,09	2,8	-	-	-
13.	Biatan	258.328,79	1,6	-	-	-
Jumlah		2.959.829,82	16,1	0	0,94	1,43

Sumber : Dinas Perkebunan Berau ,2024

Pada karet menguasai area terluas dengan 5.208,24 Ha. Ini mencerminkan dominasi sektor perkebunan karet di Kabupaten Berau, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Perkebunan karet membutuhkan lahan luas untuk produksi yang optimal. Lada menempati area seluas 2.056,50 Ha. Meskipun luasnya lebih kecil dibandingkan dengan karet, lada tetap menjadi komoditas perkebunan yang penting, terutama dengan potensi pasar ekspor yang menjanjikan. Luas perkebunan kakao mencapai 1.037,00 Ha.

Kakao menjadi komoditas penting meskipun dengan luas lahan yang lebih kecil, mengingat permintaan pasar untuk produk olahan coklat yang terus meningkat. Kopi hanya membutuhkan lahan 48,00 Ha, yang menunjukkan bahwa sektor ini masih dalam tahap pengembangan. Meskipun demikian, kopi tetap memiliki potensi pasar domestik dan internasional. Kelapa ditanam di lahan seluas 2.310,17 Ha. Dengan banyaknya produk olahan kelapa yang memiliki potensi pasar baik domestik maupun ekspor, kelapa menjadi komoditas yang cukup penting meskipun tidak sebesar karet.

Secara keseluruhan, Kabupaten Berau memiliki berbagai komoditas perkebunan dengan penggunaan lahan yang cukup beragam. Peningkatan

kualitas dan pengelolaan yang tepat untuk masing-masing komoditas akan meningkatkan daya saing dan hasil ekonomi yang lebih baik.

TABEL 1.13

Luas Tanaman Perkebunan Karet, Lada, Kakao, Kopi, dan Kelapa Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Tahun 2024 di Kabupaten Berau (Ha)

No	Kecamatan District	Karet (Ha)	Lada (Ha)	Kakao (Ha)	Kopi (Ha)	Kelapa (Ha)
1.	Kelay	2.069,30	8	128	-	22
2.	Talisayan	1.511,20	196	18	17	61
3.	Tabalar	18	167	30	-	79
4.	Biduk-Biduk	28	68	0	9	1.401,00
5.	Pulau Derawan	17	112	26	-	108
6.	Maratua	-	-	0	-	256
7.	Sambaliung	321	469,1	457,3	26	36,8
8.	Tanjung Redeb	-	-	0	-	15,37
9.	Gunung Tabur	64	711	139	8	45
10.	Segah	306	33	126	-	55
11.	Teluk Bayur	225	65,5	36,5	0,5	88
12.	Batu Putih	92,5	85	11	7	156
13.	Biatan	48	684	32	13	67
Jumlah		5.208,24	2.056,50	1.037,00	48,00	2.310,17

Sumber : Dinas Perkebunan Berau ,2024

Pada kelapa sawit mendominasi penggunaan lahan dengan total 21.661,80 Ha, yang mencerminkan peran penting sektor perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian Kabupaten Berau. Kelapa sawit terus menjadi komoditas utama dengan luas lahan yang sangat besar, memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Luas lahan untuk perkebunan pala adalah 266,00 Ha, yang menunjukkan bahwa pala merupakan komoditas penting meskipun tidak sebesar kelapa sawit. Potensi pasar untuk pala cukup besar, dan Kabupaten Berau memiliki peluang untuk meningkatkan hasil produk pala melalui peningkatan teknik budidaya dan pengelolaan yang baik.

Tidak ada area lahan yang digunakan untuk menanam nilam (0 Ha) pada tahun 2024. Ini mungkin disebabkan oleh penurunan permintaan atau pengabaian sektor nilam, atau kurangnya perhatian pada budidaya tanaman ini di daerah tersebut. Kemiri ditanam di lahan seluas 4,5 Ha. Meskipun area ini terbilang kecil, kemiri memiliki potensi pasar domestik yang cukup baik, terutama untuk kebutuhan industri pangan dan kosmetik. Luas lahan untuk perkebunan cengkeh

adalah 7,00 Ha. Cengkeh memiliki potensi pasar yang baik, terutama untuk industri rempah-rempah, namun dengan luas yang terbatas ini, pengelolaan yang lebih baik dan peningkatan kualitas dapat membantu memperbesar kontribusi sektor ini. Secara keseluruhan, Kabupaten Berau memiliki sektor perkebunan yang sangat bergantung pada kelapa sawit, dengan peluang untuk mengembangkan sektor lain seperti pala, kemiri, dan cengkeh untuk meningkatkan diversifikasi dan daya saing di pasar domestik dan internasional.

Secara keseluruhan, sektor perkebunan di Kabupaten Berau masih sangat bergantung pada **kelapa sawit** sebagai komoditas utama, yang mendominasi penggunaan lahan dan memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah. Namun, ada peluang yang cukup besar untuk mengembangkan komoditas lain seperti **pala**, **kemiri**, dan **cengkeh** untuk meningkatkan diversifikasi sektor pertanian dan memperbesar daya saing di pasar domestik maupun internasional.

TABEL 1.14

Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, Pala, Nilam, Kemiri, Cengkeh Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Tahun 2024 di Kabupaten Berau (Ha)

No	Kecamatan <i>District</i>	Kelapa Sawit	Pala	Nilam	Kemiri	Cengkeh
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1.	Kelay	34.699,48	-	-	-	-
2.	Talisayan	14.442,19	1	-	-	-
3.	Tabalar	1.220,00	-	-	-	-
4.	Biduk-Biduk	700,92	179	-	0,5	1,5
5.	Pulau Derawan	9.871,38	4,5	-	-	-
6.	Maratua	-	-	-	-	-
7.	Sambaliung	900,00	-	-	-	-
8.	Tanjung Redeb	-	-	-	-	-
9.	Gunung Tabur	7.249,00	4	-	4	5
10.	Segah	42.178,17	-	-	-	-
11.	Teluk Bayur	2.008,00	-	-	-	-
12.	Batu Putih	19.261,74	140,2	-	-	-
13.	Biatan	13.713,36	44,5	-	-	-
Jumlah		21.661,80	266,00	0	4,5	7,00

Sumber : Dinas Perkebunan Berau ,2024

Karet dan kelapa menunjukkan jumlah petani yang sangat besar, yang mencerminkan dominasi sektor ini dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Berau. Karet memiliki kontribusi besar dalam perekonomian daerah, sementara kelapa memiliki banyak manfaat dan potensi pasar yang dapat diperluas. Sebanyak 2.787 orang terlibat dalam budidaya karet. Ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan karet memiliki kontribusi besar terhadap lapangan kerja di Kabupaten Berau. Pekerjaan ini juga memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. 2.593 orang terlibat dalam budidaya lada. Meskipun jumlah petani lada sedikit lebih rendah dibandingkan dengan karet, lada tetap menjadi komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan petani di daerah ini. Sebanyak 872 orang terlibat dalam budidaya kakao. Meskipun lebih kecil dibandingkan karet dan lada, jumlah petani kakao tetap menunjukkan potensi sektor ini untuk berkembang, terutama dengan meningkatnya permintaan produk olahan coklat. Hanya 88 orang yang terlibat dalam budidaya kopi. Sektor kopi menunjukkan keterlibatan yang lebih rendah, mungkin karena kopi belum menjadi komoditas unggulan di daerah ini, meskipun memiliki potensi pasar domestik dan internasional yang bisa dikembangkan. 2.995 orang terlibat dalam budidaya kelapa, yang menunjukkan bahwa kelapa merupakan salah satu komoditas yang memiliki banyak petani yang terlibat, mencerminkan pentingnya sektor ini dalam perekonomian lokal.

TABEL 1.15

Jumlah Pekerja Perkebunan Karet, Lada, Kakao, Kopi, dan Kelapa Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Tahun 2024 di Kabupaten Berau (Orang)

No	Kecamatan District	Karet (Orang)	Lada (Orang)	Kakao (Orang)	Kopi (Orang)	Kelapa (Orang)
1	Kelay	684	16	133	-	28
2	Talisayan	770,00	365	30	11	302
3	Tabalar	33	173	50	-	316
4	Biduk-Biduk	27	36	-	3	793
5	Pulau Derawan	30	60	4	-	150
6	Maratua	-	-	-	-	251
7	Sambaliung	212	292	255	-	117
8	Tanjung Redeb	-	-	-	-	12
9	Gunung Tabur	37	436	93	26	163
10	Segah	702	123	153	-	179
11	Teluk Bayur	120	48	68	1	290

12	Batu Putih	75	98	25	9	167
13	Biatan	97	946	61	38	227
Jumlah		2.787	2.593	872	88	2.995

Sumber : Dinas Perkebunan Berau ,2024

Kelapa sawit tetap menjadi sektor yang mendominasi dengan jumlah petani terbesar (12.127 orang). Hal ini mencerminkan betapa pentingnya kelapa sawit bagi perekonomian Kabupaten Berau. Namun, perhatian terhadap pengelolaan yang berkelanjutan harus terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sektor ini, memberikan banyak lapangan pekerjaan dan menjadi komoditas unggulan dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Sebanyak 507 orang terlibat dalam budidaya pala. Pala merupakan komoditas penting meskipun jumlah petaninya lebih sedikit dibandingkan dengan kelapa sawit. Potensi pasar untuk pala cukup besar, baik untuk pasar domestik maupun ekspor, dan pengembangan sektor ini dapat meningkatkan pendapatan petani.

Tidak ada petani yang terlibat dalam budidaya nilam (0 orang) pada tahun 2024. Ini bisa jadi akibat dari penurunan minat atau berkurangnya pengembangan sektor nilam di daerah ini, meskipun nilam memiliki potensi pasar yang cukup baik. Sebanyak 11 orang terlibat dalam budidaya kemiri. Meskipun jumlah petaninya sedikit, kemiri tetap menjadi komoditas dengan permintaan pasar yang baik, terutama di sektor pangan dan kosmetik. Sebanyak 4 orang terlibat dalam budidaya cengkeh. Cengkeh adalah komoditas dengan jumlah petani yang paling sedikit, namun tetap memiliki nilai jual tinggi terutama untuk industri rempah-rempah. Secara keseluruhan, Kabupaten Berau memiliki sektor kelapa sawit yang sangat dominan, namun sektor lain seperti pala, kemiri, dan cengkeh memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan diversifikasi dan perekonomian daerah.

TABEL 1.16
Jumlah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit, Pala, Nilam, Kemiri, Cengkeh
Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Tahun 2024
di Kabupaten Berau (Orang)

No	Kecamatan District	Kelapa Sawit	Pala	Nilam	Kemiri	Cengkeh
		(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)
1	Kelay	1.762	-	-	-	-
2	Talisayan	1.345	1	-	-	-
3	Tabalar	277	-	-	-	-
4	Biduk-Biduk	0	268	-	1	2
5	Pulau Derawan	630	5	-	-	-
6	Maratua	-	-	-	-	-
7	Sambaliung	640	-	-	-	-
8	Tanjung Redeb	-	-	-	-	-
9	Gunung Tabur	141	2	-	10	2
10	Segah	1.835	-	-	-	-
11	Teluk Bayur	449	-	-	-	-
12	Batu Putih	4.032	140	-	-	-
13	Biatan	1.016	91	-	-	-
Jumlah		12.127,00	507	0	11	4

Sumber : Dinas Perkebunan Berau ,2024

1.4.2.4. Potensi Perikanan

Perikanan merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Berau. Sebagai daerah yang memiliki perairan yang cukup luas, menjadikan Kabupaten Berau sebagai Penghasil perikanan yang cukup besar. Produksi perikanan laut meningkat dari 23.164,26 Ton pada tahun 2023 menjadi 24.481,47 Ton pada tahun 2024, menunjukkan adanya peningkatan dalam produksi ikan laut di Kabupaten Berau. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor peningkatan hasil tangkapan atau perkembangan teknologi di sektor perikanan laut. Produksi perikanan umum juga mengalami kenaikan, dari 1.776,82 Ton pada tahun 2023 menjadi 1.842,46 Ton pada tahun 2024. Meskipun kenaikan ini lebih kecil dibandingkan dengan perikanan laut, sektor ini tetap memberikan kontribusi penting terhadap total produksi perikanan. Secara keseluruhan, produksi perikanan meningkat dari 28.836,97 Ton pada tahun 2023 menjadi 29.783,81 Ton pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan sektor perikanan di Kabupaten Berau secara keseluruhan. Sektor perikanan laut dan umum keduanya menunjukkan angka yang stabil dan meningkat, mencerminkan pentingnya sektor ini dalam

perekonomian lokal. Adapun Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan dan sub sektor di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.17 sebagai berikut;

TABEL 1.17
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor
Tahun 2024 di Kabupaten Berau

No	Kecamatan	Perikanan Laut (Ton)		Perikanan Umum(Ton)		Jumlah(Ton)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Kelay	6.181,31	6.526,05	-	-	6.181,31	6.526,05
2.	Talisayan	1.423,71	1.453,00	-	-	1.423,71	1.453,00
3.	Tabalar	995,26	1.001,57	-	-	995,26	1.001,57
4.	Biduk-Biduk	923,85	944,82	-	-	923,85	944,82
5.	Pl. Derawan	3.432,08	3.554,68	-	-	3.432,08	3.554,68
6.	Maratua	3.012,55	3.220,00	-	-	3.012,55	3.220,00
7.	Sambaliung	1.392,47	1.404,55	-	-	1.392,47	1.404,55
8.	Tg. Redeb	669,46	699,58	500,80	510,29	1.170,26	1.209,87
9.	Gn. Tabur	2,958,99	2.997,00	518,84	531,03	3.477,83	3.528,03
10.	Segah	589,12	601,01	213,49	220,67	802,61	821,68
11.	Teluk Bayur	200,84	216,56	292,06	314,16	492,9	530,72
12.	Batu Putih	-	-	97,35	95,08	97,35	95,08
13.	Biatan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		23.164,26	24.481,47	1.776,82	1.842,46	28.836,97	29,783,81

Sumber : Dinas Perikanan Berau ,2024

Untuk jenis perikanan laut tahun 2024 terdapat sebanyak 20 jenis ikan dengan total estimasi nilai mencapai Rp. 505.143.785, yang diantaranya merupakan tujuan pasar ekspor yaitu kepiting, bawal, kakap, kerapu dan udang lobster. Dengan komoditas udang sebagai produksi dan nilai yang tinggi diantara jenis ikan lain, yaitu 2.529,91 Ton dengan nilai Rp. 132.463.240. Adapun Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut menurut Jenisnya di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.18 sebagai berikut:

TABEL 1.18
Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Laut Menurut Jenisnya
Tahun 2024 di Berau

No.	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai (Rp.)
1.	Alu-Alu / Barakuda	290,51	3.631.375
2.	Bambangan	555,96	22.238.440
3.	Baronang	260,98	7.829.460
4.	Bawal Hitam	562,74	22.509.560
5.	Bawal Putih	552,74	52.509.825
6.	Belanak	393,25	11.010.944
7.	Cumi-Cumi	402,55	14.089.250
8.	Ekor Kuning	257,73	3.866.010
9.	Gerot-Gerot	230,18	6.329.923
10.	Gulamah	369,74	3.882.260
11.	Gurita	53,54	1.472.433
12.	Kakap Batu	85,74	1.929.173
13.	Kakap Putih	514,09	19.278.375
14.	Kapas-Kapas	183,85	2.206.236
15.	Kembung	1.389,55	34.738.825
16.	Kepiting	594,00	13.364.955
17.	Kerang Dara	80,21	802.100
18.	Kerapu Karet	132,23	6.214.622
19.	Kuniran / Biji Nangka	228,79	4.919.050
20.	Kurisi	218,30	2.619.624
21.	Kuro / Senangin	193,62	5.324.440
22.	Kuwe	854,52	29.908.270
23.	Layang	907,08	15.873.830
24.	Layur	103,66	2.228.690
25.	Lencam (Hypselopecterus)	115,32	1.729.740
26.	Lobster	11,46	2.292.600

No.	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai (Rp.)
27.	Manyung	114,81	2.296.240
28.	Pari	393,42	3.147.360
29.	Peperek / Bete-Bete	26,67	133.335
30.	Rajungan	286,08	11.443.120
31.	Selanget	475,61	7.609.696
32.	Selar Bentong	6,24	93.615
33.	Selar Kuning	901,49	13.522.290
34.	Selar Papan	233,33	3.499.905
35.	Sotong	210,58	4.948.630
36.	Sunglir	128,73	1.930.905
37.	Swanggi / Mata Besar	29,88	298.770
38.	Talang-Talang	260,57	3.908.535
39.	Tembang	882,19	2.646.579
40.	Tenggiri	317,49	12.699.680
41.	Teri	2.935,36	102.737.565
42.	Teripang	108,84	13.060.200
43.	Tetengkek	75,53	641.997
44.	Tongkol Komo	756,80	13.244.018
45.	Tongkol Krai	619,02	10.832.815
46.	Tuna	158,76	4.365.873
47.	Udang Grago	1.670,96	29.241.748
48.	Udang Jerbung	1.253,24	112.791.780
49.	Udang Putih	1.230,90	129.244.710
Jumlah		22.618,82	777.139.372

Sumber : Dinas Perikanan Berau ,2024

Sedangkan, untuk produksi perikanan umum pada tahun 2024 terdapat 9 jenis ikan dengan total estimasi nilai adalah sebesar Rp. 43.160.350. Dengan komoditasi udang galah menjadi produksi dan nilai tertinggi yaitu 308,12 Ton

dengan nilai Rp. 24.649.600. Hal ini didukung juga oleh luasan sungai berau dan kualitas airnya yang masih relatif baik. Adapun Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Umum menurut Jenisnya di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.19 sebagai berikut :

TABEL 1.19
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Umum
Menurut Jenisnya Tahun 2024 di Kabupaten Berau

No.	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai (Rp.)
1.	Baung	216,26	6.487.920
2.	Gabus	203,32	6.099.480
3.	Kakap Putih ; Baramundi	119,79	4.791.720
4.	Lais	209,47	10.473.450
5.	Lampan	219,34	5.520.875
6.	Patin	344,26	13.770.360
7.	Udang Galah	358,79	32.291.100
Jumlah		1.671,23	79.434.905

Sumber : Dinas Perikanan Berau ,2024

Untuk rumah tangga perikanan (RTP) budidaya terbagi menjadi 5 (lima) jenis yang terdiri dari Budidaya Laut (Jaring Apung), Tambak, Kolam, Keramba, dengan jumlah 1.996 RTP, Kegiatan perikanan budidaya tahun 2024 masih didominasi sebagian besar oleh kegiatan budidaya kolam dan tambak dengan jumlah RTP sebanyak kolam 1.052 RTP dan tambak 770 RTP, kemudian budidaya karamba sebanyak 60 RTP. Hal ini disebabkan komoditas tawar dan payau mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk peningkatan kelembagaan dan ekonomi di sekitar sentra kawasan, karena berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan perikanan di Kabupaten hanya dibatasi untuk pengembangan air tawar. Adapun Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.20 sebagai berikut :

TABEL 1.20
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan Dan Jenis
Budidaya Tahun 2024 di Kabupaten Berau

No.	Kecamatan	Tambak (RTP)	Kolam (RTP)	Keramba (RTP)	Keramba Jaring Apung (RTP)	Total
1	Pulau Derawan	669	17	-	-	686
2	Maratua	-	-	-	27	27
3	Talisayan	10	32	-	60	102
4	Biatan	10	6	-	-	16
5	Tabalar	33	-	-	-	33
6	Biduk-Biduk	-	-	-	17	17
7	Batu Putih	-	6	-	10	16
8	Gunung Tabur	-	242	12	-	254
9	Sambaliung	48	336	-	-	384
10	Tanjung Redeb	-	122	48	-	170
11	Teluk Bayur	-	268	-	-	268
12	Segah	-	14	-	-	14
13	Kelay	-	9	-	-	9
Jumlah		770	1052	60	114	1.996

Sumber : Dinas Perikanan Berau ,2024

Produksi perikanan di Kabupaten Berau terdiri dari 6 jenis yaitu penangkapan perikanan laut, penangkapan perairan umum, budidaya tambak, budidaya laut, budidaya kolam dan budidaya keramba. Secara umum jumlah produksi perikanan mengalami peningkatan di tahun 2024 sehingga mencapai angka 29.783,81 Ton dari tahun sebelumnya yaitu 28.836,97 Ton.

Adapun secara rinci Produksi Perikanan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.21 sebagai berikut :

TABEL 1.21
Produksi Perikanan Tahun 2024 di Kabupaten Berau

No	Jenis Produksi	2023 (Ton)	2024 (Ton)
1.	Penangkapan Perikanan Laut	24.481,47	24.481,47
2.	Penangkapan Perairan Umum	1.776,82	1.842,46
3.	Budidaya Air Payau/Tambak	2.322,97	2.335,45
4.	Budidaya Kolam	564,05	529,2
5.	Budidaya Keramba	64,63 104,81	170,42
6.	Keramba Jaring Apung	39,64	141,60
Jumlah		28.836,97	29.783,81

Sumber : Dinas Perikanan Berau ,2024

1.4.2.5. Potensi Pertambangan

Kabupaten Berau memiliki beragam formasi geologi yang mengandung berbagai macam jenis mineral dan batubara yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan peta geologi regional lembar Tanjung Redeb 1918, lembar Muara Lasan 1917, lembar Longbia 1818, lembar Muarawahau 1817 dan lembar Talisayan 1916 (P3G Bandung, 1995), Kabupaten Berau terdiri dari 26 (dua puluh enam) formasi batuan dan alluvium berumur Kuartar. Dari 26 formasi batuan tersebut terdiri atas 21 (duapuluh satu) formasi batuan sedimen tersier, 2 (dua) diantaranya berupa batuan gunung api yaitu batuan gunung api muda terdiri dari lava andesit-basalt, aglomerat, breksi gunung api dan tufa serta batuan gunung api Jelai terdiri dari breksi gunungapi, batupasir tufaan dan tufa yang setempat disisipi oleh lapisan batubara, batuan ini diterobos oleh retas-retas andesit, 1 (satu) sumbat retas berupa granit, 1 (satu) batuan granit dan 1 (satu) batuan ofiolit yang terdiri dari peridotit, serpentinit, habsburgit, wherlit, piroksen, gabro dan basal. Komoditas-komoditas yang berpotensi terdapat pada formasi-formasi tersebut yang ada di Kabupaten Berau sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.22 berikut :

TABEL 1.22
Golongan Pertambangan Tahun 2024 Kabupaten Berau

No	Golongan Komoditas	Jenis Komoditas	Sebaran (Kec)
1.	Mineral Logam	Emas, Galena, Seng	Kelay, Segah, Tabalar
2.	Mineral Bukan Logam	Pasir kuarsa, dolomite, kalsit, batu gamping untuk semen dan ciay	Gunung Tabur, Pulau Derawan dan Segah
3.	Batuan	Granit, gronodiorit, andesit, tanah urug, kristal kuarsa, kerikil sunga, batu kali, sirtu, tanah urukan setempat, batu gamping, pasir laut.	Kelay dan Segah
4.	Batubara	Batubara	Gunung Tabur, segah, telur bayur, sambaling, Tanjung Redeb, dan Kelay

Sumber: BPS, Berau Dalam Angka Kab. Berau, 2025

Penyebaran komoditas logam secara umum berada di bagian hulu Kabupaten Berau yang terlewati oleh jalur metalogen yang ditandai dengan adanya batuan-batuan beku intrusif bersifat granitik dan batuan ekstrusif bersifat andesitik. Secara umum, sebaran komoditas logam ini meliputi wilayah Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay. Logam emas di beberapa tempat di hulu Sungai Segah dan Kelay telah dimanfaatkan oleh penduduk setempat dengan penambangan tradisional.

Komoditas lain yang telah dimanfaatkan adalah batugamping sebagai material bahan bangunan, tanah urug, pasir, sirtu dan kerikil sungai yang digunakan untuk material konstruksi dan bahan bangunan. Komoditas-komoditas ini sangat diperlukan terutama dalam menunjang perkembangan ibukota Tanjung Redeb dan wilayah-wilayah lain yang telah mengalami perkembangan wilayah yang sangat pesat. Komoditas-komoditas ini merupakan kelompok/golongan komoditas batuan (dahulu, kita mengenalnya sebagai bahan galian golongan C). Komoditas batugamping di wilayah Kabupaten Berau berpotensi sangat baik untuk bahan baku industri semen yang tersebar pada Formasi Tendeatu, Formasi Lembak dan Formasi Domaring.

Komoditas-komoditas diatas dapat dikelola oleh badan-badan usaha baik swasta maupun daerah/Negara melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk wilayah administrasi kabupaten/kota termasuk pemberian perizinannya dilaksanakn oleh Bupati/Walikota. Namun, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan tersebut dilimpahkan ke Pemerintahan Provinsi terhitung sejak 02 Oktober 2014.

1.4.2.6. Potensi Pariwisata

Kabupaten Berau dikenal sebagai daerah wisata alam bawah laut, tidak hanya oleh wisatawan domestik tetapi juga wisatawan mancanegara. Tempat wisata yang menjadi daya tarik wisatawan adalah terutama Pulau Derawan,



Pulau Maratua dan gugusan-gugusan pulau kecil disekitarnya. Bertambahnya akomodasi diiringi dengan bertambahnya kunjungan wisatawan. Pertumbuhan kunjungan wisatawan di Berau terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan mencapai 141.843, terdiri dari 85 orang Wisman dan 141.398 orang Wisnus. Kemudian pada tahun 2024, angka tersebut meningkat drastis menjadi 397.337 orang, dengan mayoritas berasal dari wisatawan dalam negeri. Terus meningkat pada tahun 2023 mencapai 1.666 Orang.

Salah satu obyek wisata yang sudah terkenal dan mendunia adalah Pulau Derawan, keindahan pemandangan bawah lautnya menjadikan pulau ini salah satu tujuan pada diver dari seluruh penjuru dunia. Selain Pulau Derawan, destinasi tujuan wisatawan lainnya adalah Pulau Maratua yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang menyimpan berbagai macam pesona alam yang berbeda

untuk setiap pulaunya. Salah satunya adalah Pulau Kakaban yang terkenal dengan danau yang dipenuhi ubur-ubur tidak berbisa.

Pembangunan sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dalam struktur perekonomian. Selain itu, dengan semakin berkembangnya daerah wisata, akan menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi masyarakat di sekitarnya sehingga pendapatan masyarakat juga meningkat. Sektor pariwisata Kabupaten Berau sangatlah potensial dan dapat menjadi daerah utama tujuan wisata di Kalimantan Timur. Beberapa tempat dan jenis wisata di Kabupaten Berau yang menjadi daya tarik wisata saat ini terdiri dari wisata alam, sejarah dan budaya serta Religi, dll.

Kabupaten Berau kaya akan keindahan alam, mulai dari keindahan wisata bahari yang terkenal di Indonesia sampai ke mancanegara, kawasan hutannya yang masih terbentang luas di wilayah pedalaman, keindahan seni dan budaya lokal serta kreativitas masyarakatnya. Kabupaten Berau menjadikan wisata bahari di Pulau Derawan sebagai salah satu objek wisata andalan yang masuk dalam daftar World's 100 Best Beaches dirilis oleh situs CNN.com serta menduduki peringkat ke-63 pantai terbaik dunia. Adapula Pulau Kakaban yang berbentuk menyerupai angka "9". Bagian melingkarnya di sebelah utara merupakan atoll atau batu karang berbentuk cincin dan memiliki laguna. Luas Pulau Kakaban adalah sekitar 774,20 Hektar. Pulau Kakaban memiliki keunikan alam seperti yang halnya ditemui di pulau-pulau yang berada di Republik Pulau Mikronesia, Tenggara Laut Pasifik. Terdapat danau air payau yang terletak di tengah Pulau Kakaban. Danau Kakaban telah ditetapkan sebagai kawasan warisan dunia (World Nature Heritage Area) pada tahun 2004 oleh UNESCO.

Pulau Kakaban dilindungi dari kerusakan yang dapat dilakukan oleh manusia sehingga Wisatawan dan masyarakat setempat tidak diperbolehkan untuk menginap di pulau tersebut. Banyak peneliti yang datang untuk melakukan penelitian mengenai Danau Kakaban yang unik dan menakjubkan dimana banyak ditemukan spesies baru. Selain itu, di wilayah pedalaman, terbentang di antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur seluas

800.000 Hektar Kawasan karst Sangkulirang-Mangkahaliat yang merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan total area sekitar 170.000 Hektar dengan ketinggian sampai 1.100 meter. Total terdapat 240 goa dengan 30 goa berisikan peninggalan pra sejarah berupa lukisan dan peninggalan purbakala lainnya, dimana lukisan tangan diperkirakan berumur 9.800 tahun.

Karst Sangkulirang-Mangkahaliat menyimpan ekosistem unik dan langka. Karena itulah, pada tahun 1999, oleh para ahli karst internasional yang tergabung dalam IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) menetapkan karst ini sebagai 10 besar kawasan karst langka. Di wilayah pesisir Kabupaten Berau, pada Tahun 2016 destinasi wisata Labuan Cermin yang terletak di Kecamatan Biduk-Biduk menjadi salah satu prioritas Wisata Unggulan karena keunikan airnya yang terdiri dari 2 rasa yaitu air tawar di permukaan dan di kedalaman ± 4 meter air asin. Di Kecamatan Tabalar terdapat Wisata Air Panas Pemapak yang mengandung belerang yang tinggi. Kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Berau menjadi anugerah istimewa bagi para wisatawan baik dari Nusantara maupun Mancanegara.

Adapun jumlah tamu asing dan tamu domestik menurut bulan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.23 sebagai berikut;

TABEL 1.23

Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara pada tahun 2024 di Kabupaten Berau

No	Bulan	Wisatawan Mancanegara (Orang)	Wisatawan Nusantara (Orang)
1.	Januari	52	43.642
2.	Februari	75	24.926
3.	Maret	114	44.474
4.	April	115	10.476
5.	Mei	117	71.837
6.	Juni	110	44.818
7.	Juli	161	58.408
8.	Agustus	150	24.799
9.	September	160	77.061
10.	Oktober	128	10.874
11.	November	110	39.986
12.	Desember	348	98.753
Jumlah		2.294	552.920

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau ,2024

Meningkatnya kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kabupaten Berau tak lepas dari peran pemerintah dan sektor swasta. Sebagai satu kesatuan dalam pembangunan sektor pariwisata serta banyaknya kegiatan yang berskala nasional dan internasional yang diadakan. Hal tersebut tentunya perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai yang merupakan faktor penunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Berau. Dimana jumlah sarana dan prasarana semakin bertambah sebagaimana kebutuhan di lapangan. Adapun jumlah sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.24 sebagai berikut

TABEL 1.24
Jumlah Sarana Dan Prasarana Penunjang Pariwisata Tahun
2023 & 2024 Kabupaten Berau

No	Jenis Sarana & Prasarana	2023 (Unit)	2024 (Unit)
1.	Akomodasi	390	391
2.	Rumah Makan	154	196
3.	Karaoke	26	26
4.	Agen Perjalanan	62	62
5.	Penyewaan Alat Selam	12	16
6.	Hiburan Dan Rekreasi	10	14
7.	Salon	19	19
8.	Impresariat	8	8

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Berau ,2024

Pemerintah Kabupaten Berau juga memiliki beberapa penyelenggaraan event/festival seni dan budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Berau. Adapun Penyelenggaraan Festival seni dan budaya di Kabupaten Berau Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.25 sebagai berikut :

TABEL 1.25
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2024 di Kabupaten Berau

No	Nama Kegiatan
1.	Pemilihan Duta Wisata dan Duta Budaya
2.	Bakudung Batiung (Kampung Tumbit Dayak)
3.	Lomba Lagu Daerah untuk SLTA
4.	Hari Jadi Kabupaten Berau dan Kota Tanjung Redeb
5.	Lomba Kuliner Tradisional (Ancur Paddas, Puncak Rasul)

6.	Pesta Adat Buang Naas (Kampung Talisayan)
7.	Festival Tari Tradisional dan Kuliner (Tanjung Batu)
8.	Milad Kampung (Kampung Suaran)
9..	Maratua Jazz Dive and Fiesta
10.	Festival Jagung Batutung Bakulit (Kampung Samburakat)
11.	Maglami-Lami Bajau (Kampung Tanjung Batu)
13.	Pemilihan Duta Pariwisata Tingkat Nasional
14.	Pesta Budaya Meja Panjang (Kampung Merasa)

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Berau ,2024

Kabupaten Berau juga memiliki benda situs dan kawasan cagar budaya yang sudah dilestarikan sebagai bukti bahwa Kabupaten Berau kaya akan wisata sejarah yang dapat ditelusuri Keberadaannya. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Berau sangat peduli dan serius dengan kelestarian benda situs dan kawasan cagar budaya dengan memberikan dana khusus dalam 1 (satu) Progam Kegiatan rutin pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Adapun Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada dan sudah dilestarikan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.26 sebagai berikut:

TABEL 1.26

Benda Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Tahun 2024 di Kabupaten Berau

No	Nama Benda, Situs dan Cagar Budaya di Kabupaten Berau	Nama Benda, Situs dan Cagar Budaya Yang Sudah Dilestarikan	Lokasi
1.	Museum Gunung Tabur	Museum Gunung Tabur	Gunung Tabur
2.	Keraton Sambaliung	Keraton Sambaliung	Sambaliung
3.	Museum Siraja	Museum Siraja	Teluk Bayur
4.	Koleksi Benda Cagar Budaya Di Museum Batiwakkal	Koleksi Benda Cagar Budaya Di Museum Batiwakkal	Gunung Tabur
5.	Koleksi Benda Cagar Budaya Di Keraton Sambaliung	Koleksi Benda Cagar Budaya Di Keraton Sambaliung	Sambaliung
6.	Koleksi Benda Cagar Budaya Di Museum Siraja	Koleksi Benda Cagar Budaya Di Museum Siraja	Teluk Bayur
7.	Makam Atap Seng	Makam Atap Seng	Sambaliung
	- Sultan M. Hadi Jalaluddin	- Sultan M. Hadi Jalaluddin	
	- Sultan M. H. Bayanuddin	- Sultan M. H. Bayanuddin	
	- Sultan M. Kaharuddin	- Sultan M. Kaharuddin	
8.	Makam Sultan M. Adil Jalaluddin	Makam Sultan M. Adil Jalaluddin	Jl.Aminuddin/ Borobudur Tanjung Redeb
9.	Makam Sultan M. Salehuddin	Makam Sultan M. Salehuddin	Jl.Aminuddin/ Borobudur Tanjung Redeb

No	Nama Benda, Situs dan Cagar Budaya di Kabupaten Berau	Nama Benda, Situs dan Cagar Budaya Yang Sudah Dilestarikan	Lokasi
10.	Makam Sultan Asyik Syarifuddin	Makam Sultan Asyik Syarifuddin	Jl.Aminuddin/ Tanjung Redeb
11.	Makam Kubah - Syech M. Ali Junaidi Al Banjari	Makam Kubah - Syech M. Ali Junaidi Al Banjari	Tanjung Redeb
	Makam Sultan M. Aminuddin	Makam Sultan M. Aminuddin	Sambaliung
12.	Makam Marhum Di Bangun Sultan M.Zainal Abidin	Makam Marhum Di Bangun Sultan M.Zainal Abidin	Sambaliung
13.	Makam Sultan Amiril Mukminin	Makam Sultan Amiril Mukminin	Sambaliung
14.	Rumah Tua Rumah Kayu Milik Agus Hairudin, Se	Rumah Tua Rumah Kayu Milik Agus Hairudin, Se	Gunung Tabur
15.	Makam Sultan Achmad Maulana Muhammad Chalifatullah	Makam Sultan Achmad Maulana Muhammad Chalifatullah	Gunung Tabur
16.	Makam Belanda	Makam Belanda	Teluk Bayur
17.	Kamar Bola/Ball Room	Kamar Bola/Ball Room	Teluk Bayur
18.	Pelabuhan Batu Bara Masa Belanda	Pelabuhan Batu Bara Masa Belanda	Teluk Bayur
19.	Makam Keramat Syarif Husen	Makam Keramat Syarif Husen	Derawan
20.	Makam Kuda, Ligadung Makalli	Makam Kuda, Ligadung Makalli	Derawan
21.	Makam Saba'ani	Makam Saba'ani	Derawan
22.	Sisa Bangunan Pabrik Penggergajian Masa Belanda	Sisa Bangunan Pabrik Penggergajian Masa Belanda	Biduk - Biduk
23.	Gedung Bioskop Belanda		Teluk Bayur
24.	Masjid Kuno/Masjid Jami	Masjid Kuno/Masjid Jami	Gunung Tabur
25.	Surau Keraton Sambaliung	Surau Keraton Sambaliung	Sambaliung
26.	Tugu Prasasti Tulisan Arab Dan Bugis (Lontara)	Tugu Prasasti Tulisan Arab Dan Bugis (Lontara)	Sambaliung
27.	Rumah Kepala Tua		Tumbit Dayak, Teluk Bayur
28.	Makam Puan Sipanaik		Teluk Bayur
29.	Makam Di Goa Batu		Kampung Merasa
30.	Sumur Tua		Pulau Derawan
31.	Benda-Benda Kuningan (Rumah Tangga)		Sambaliung
32.	Makam Bandit Dipattung		Gunung Tavyr
33.	Makam Raja Gunung Tabur Pertama (Aji Kuning Gazi Mahyuddin)		Teluk Bayur
34.	Makam Raja Alam	Makam Raja Alam	Batu Putih
35.	Makam Syekh Haji Abd Karim		Sukan, Sambaliung
36.	Makam Keramat		Maratua

No	Nama Benda, Situs dan Cagar Budaya di Kabupaten Berau	Nama Benda, Situs dan Cagar Budaya Yang Sudah Dilestarikan	Lokasi
37.	Kawasan Karst Puncak Ketepu Kampung Merabu		Kelay
38.	Gua Panyau Kampung Merabu		Kelay

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Berau ,2024

Selain keseriusan Pemerintah Kabupaten Berau dalam menjaga dan memelihara benda situs dan kawasan cagar budaya, Bupati Berau telah menetapkan beberapa Kampung dengan masing-masing keistimewaan berdasarkan kriteria tertentu dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Berau, meliputi:

- Penetapan Kampung Merabu Kecamatan Kelay sebagai Kampung Peninggalan Prasejarah
- Penetapan Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung sebagai Kampung Budaya
- Penetapan Kampung Bebanir Bangun Kecamatan Sambaliung sebagai Kampung Adat

Diharapkan dengan keberadaan dan penetapan Kampung tersebut diatas, mampu menarik minat masyarakat Berau umumnya untuk lebih aktif dan kreatif memanfaatkan keunikan daerahnya masing-masing guna meningkatkan capaian kunjungan wisatawan pada tahun yang akan datang.

Objek wisata merupakan prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Berau. Objek wisata tersebar di seluruh 13 Kecamatan Kabupaten Berau, baik objek wisata yang menjadi destinasi unggulan maupun yang baru dikaji dan ditemukan oleh para pencinta alam Kabupaten Berau. Adapun Jumlah Objek Wisata menurut Kecamatan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.27 sebagai berikut:

TABEL 1.27
Jumlah Objek Wisata Menurut Kecamatan Tahun 2024 di
Kabupaten Berau

No	Kecamatan	Jumlah Objek Wisata	
		2023 (OW)	2024 (OW)
1	Tanjung Redeb	15	15
2	Gunung Tabur	10	10
3	Sambaliung	11	12
4	Teluk Bayur	14	14
5	Kelay	27	27
6	Segah	13	13
7	Tabalar	9	9
8	Biatan	3	4
9	Talisayan	12	12
10	Batu Putih	17	17
11	Biduk-Biduk	25	25
12	Pulau Derawan	47	47
13	Maratua	85	85
Jumlah		223	224

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Berau ,2024

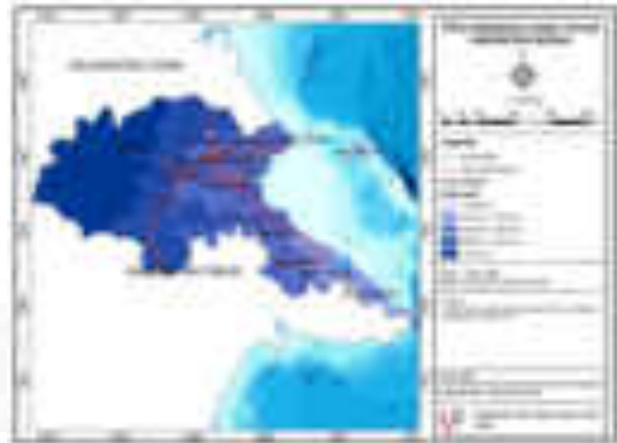
1.4.2.7. Pengembangan Wisata Berbasis Perekonomian

Prioritas pembangunan Kabupaten Berau difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di bidang agrobisnis dan pariwisata. Pembangunan bidang lainnya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan potensi dan permasalahan khusus yang ada di Kabupaten Berau. Terkait pariwisata, berdasarkan RTRW Kabupaten Berau Tahun 2016-2036, pengembangan pariwisata dilakukan melalui perwujudan kawasan pariwisata, yakni: (1) Pengembangan penyediaan fasilitas pariwisata; (2) Pengembangan promosi pariwisata; (3) Pengembangan pusat-pusat oleh-oleh khas daerah; (4) Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar obyek pariwisata; serta (5) Pengembangan kapasitas kelembagaan pariwisata. Adapun wisata yang dikembangkan di Kabupaten Berau meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan/binaan manusia. Berikut masingmasing wisata yang dikembangkan beserta lokasinya:

- 1) Pengembangan Wisata Alam, mencakup:
 - a) Pengembangan Wisata Bahari, terletak di Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Maratua; Kecamatan Biduk-Biduk; Kecamatan Batuputih, dan Kecamatan Talisayan.
 - b) Pengembangan Wisata Sejarah, terletak di Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Tanjung Redeb; dan Kecamatan Teluk Bayur.
 - c) Pengembangan Wisata Alam/Ekowisata, terletak di Kecamatan Kelay dan Kecamatan Segah.
- 2) Pengembangan Wisata Budaya, mencakup:
 - a) Wisata Budaya Banua, terletak di Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung.
 - b) Wisata Budaya Dayak, terletak di Kecamatan Kelay dan Kecamatan Segah.
 - c) Wisata Budaya Bajau, terletak di Kecamatan Derawan dan Kecamatan Maratua.
- 3) Pengembangan Wisata Buatan/Binaan Manusia, mencakup:
 - a) Wisata Buatan/Binaan Tangab dan Danau Tumbit di Kecamatan Teluk Bayur.
 - b) Wisata Buatan/Binaan Bendungan Merancang, Sungai Ulak di Kecamatan Gunung Tabur.
 - c) Wisata Buatan/Binaan Air panas Biatan di Kecamatan Biatan
 - d) Wisata Buatan/Binaan Makam Raja Alam di Kecamatan Batu Putih; dan
 - e) Wisata Buatan/ Binaan Arung jeram di Kecamatan Kelay dan Segah.

1.4.3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana, baik alam maupun lainnya, merupakan suatu kejadian yang meningkatkan rasa cemas dan khawatir yang diiringi oleh kerugian materiil maupun moral/psikologis. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan daerah harus mampu memberikan gambaran terkait



statistik bencana yang akan menjadi bahan dalam merumuskan program penanggulangan bencana pada periode pembangunan saat ini. Berau merupakan kawasan yang didominasi oleh litologi yang memiliki kekompakan tanah yang cukup rendah, hal ini disebabkan oleh formasi geologi yang menyusun sebagian besar wilayah ini merupakan formasi dengan batuan penyusun adalah batuan sedimen sehingga cenderung rentan terhadap gerak massa batuan. Pemetaan daerah rawan bencana tanah longsor di Berau ini memiliki manfaat untuk mengidentifikasi dampak dari bencana sehingga dapat diminimalisir dan dilakukan mitigasi yang bersifat preventif terhadap daerah dengan kategori tingkat risiko tinggi.

Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi milimeter (mm) di atas permukaan horizontal. Curah hujan merupakan salah satu aspek terpenting dalam mengontrol suatu kondisi litologi tertentu agar tidak terjadi gerakan massa batuan yang ekstrem. Data curah hujan ini bersumber dari Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS). Data ini diperoleh dalam skala kabupaten untuk rata-rata pada sepanjang tahun 2020. Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station Data (CHIRPS) adalah kumpulan data curah hujan kuasi-global selama 30+ tahun. CHIRPS menggabungkan citra satelit beresolusi 0,05° dengan data stasiun in-situ untuk membuat rangkaian waktu curah hujan grid untuk analisis tren dan pemantauan

kekeringan musiman. Sebaran curah hujan di Kabupaten Berau. Data curah hujan diatas menggambarkan bahwa semakin mendekati pantai atau laut maka curah hujannya tergolong rendah dan sebaliknya karena pada Wilayah Segah dan Kelay topografi wilayahnya adalah berbukit dengan elevasi yang rata-rata tinggi. Artinya bahwa pada area yang memiliki curah hujan yang tinggi serta elevasi kawasan yang tinggi tersebut tergolong memiliki risiko longsor yang cukup tinggi.

1.4.3.1. Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor

Setelah dilakukan analisis, didapatkan peta risiko longsor secara makro untuk Wilayah Kabupaten Berau, untuk tahapan selanjutnya kemudian skala diperkecil untuk analisis pada sepanjang jaringan jalan arteri dan kolektor. Peta risiko longsor Kabupaten Berau hasil analisis skoring dan pembobotan berdasarkan Permen PU No. 22/PRT/M/2007. Secara umum, area-area yang teridentifikasi sebagai area yang rawan longsor adalah di sekitar Kecamatan Tanjung Redeb dan Teluk Bayur.

Hal ini selain dikontrol oleh curah hujan yang cenderung sedang menuju ke tinggi, di area ini juga didominasi oleh penggunaan lahan berupa permukiman penduduk yang artinya bahwa tekanan terhadap massa tanah juga cenderung cukup tinggi dan pada suatu ketika dapat berpotensi terjadi gerakan massa batuan. Selain itu pada area menuju Kecamatan Segah teridentifikasi juga terdapat beberapa area yang rawan longsor, hal ini cenderung dikontrol akan kondisi litologi disana berupa formasi batuan sedimen dan juga curah hujan yang tinggi serta adanya beberapa lereng yang memiliki kemiringan yang cukup tinggi. Disamping itu, pada jalur pesisir Kabupaten Berau menuju Kecamatan Talisayan dan juga Biduk-biduk, cenderung berada pada kategori tidak rawan, yang mana selain curah hujannya cenderung rendah, litologi batuan disana juga didominasi oleh batuan karst atau batuan kapur yang cukup keras dengan kandungan tanah yang rendah. Artinya bahwa kemungkinan terjadinya longsor pada kawasan ini cukup rendah.

1.4.3.2. Wilayah Rawan Bencana Banjir

Titik sebaran kejadian banjir yang terjadi ditahun 2023 dan 2024 dibandingkan dengan peta zonasi kerentanan dengan cara dioverlay, hasil overlay dapat dilihat pada gambar disamping. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan



bahwa, dari 17 data titik banjir yang terjadi ditahun 2023 dan 2024, didapatkan semua data titik aktual banjir masuk ke dalam area kelas rawan. luasan peta pendugaan tingkat kerawanan banjir Kabupaten Berau menunjukkan Kabupaten Berau didominasi dengan kelas kerawanan Sedang yaitu seluas 8725,56 km² atau sebesar 40,16% dari luas wilayah Kabupaten berau, yang mendominasi dibagian sebelah utara, Tenggara dan beberapa wilayah bagian selatan, kemudian kelas kerawanan kurang rawan menjadi tingkat kerawanan yang mendominasi ke dua dengan luas wilayah 5820,76 km² atau sekitar 26,79% yang area sebarannya dibagian timur dan bagian selatan. Untuk kerawanan tidak rawan yaitu seluas 3596,39 km² atau 16,55% dan kelas rawan seluas 3402,08 km² atau 15,66%.

1.4.3.3. Wilayah Rawan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran lahan merupakan peristiwa yang terjadi setiap musim kemarau. Kebakaran lahan meskipun berulang tetapi masih saja belum dapat diatasi secara maksimal. Penyebab kebakaran lahan lebih pada faktor manusia. Aktivitas penyiapan lahan, pembalakan liar, dan faktor kesengajaan lainnya telah menyebabkan kebakaran menjadi semakin meluas. Melalui Mitigasi kebakaran lahan, diharapkan kebakaran dapat dikurangi, yaitu melalui program restorasi, yang meliputi pembasahan, revegetasi dan revitaliasi ekonomi masyarakat.

1.4.4. Data Demografi

1.4.4.1. Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk merupakan salah satu dari karakteristik demografi yaitu dari proses kelahiran, kematian, datang dan pindah (migrasi) penduduk yang disebut mutasi penduduk. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Berau mencapai angka 299,005 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 129,240 KK. Kecamatan Tanjung Redeb merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan jumlah penduduk sebesar 87,326 jiwa, dimana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Tanjung Redeb merupakan ibukota dari Kabupaten Berau dengan pusat pemerintahan dan perekonomian yang berada di Kecamatan ini sedangkan Kecamatan Maratua merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil dengan jumlah penduduk sebesar 4,521 jiwa, dimana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Maratua tergolong Kecamatan Sangat Terpencil yang dapat ditempuh dengan menggunakan jalur laut dan jalur udara.

Adapun Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.28 sebagai berikut :

TABEL 1.28

Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Menurut Kecamatan
Tahun 2024*) di Kabupaten Berau

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk	
			DUK (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Kelay	2,156	6,523	2.45
2.	Talisayan	5,338	16,208	6.08
3.	Sambaliung	14,729	42,226	15.83
4.	Segah	5,742	16,074	6.03
5.	Tanjung Redeb	54,710	87,326	27.49
6.	Gunung Tabur	9,998	28,920	10.84
7.	Pulau Derawan	4,560	13,546	5.08
8.	Biduk Biduk	2,292	7,509	2.82
9.	Teluk Bayur	11,439	33,047	12.39
10.	Tabalar	2,474	7,592	2.85
11.	Maratua	1,177	4,521	1.47
12.	Batu Putih	2,900	8,967	3.36
13.	Biatan	2,925	8,851	3.32
Jumlah		129,240	299,005	20,55

Sumber Data : Disdukcapil semester I Tahun 2024

*data sementara

1.4.4.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk Kabupaten Berau menurut jenis kelamin dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki diantara seratus penduduk perempuan. Jika dilihat perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, Kabupaten Berau memiliki penduduk laki-laki yang lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Hal tersebut juga terjadi di setiap Kecamatan di Kabupaten Berau dimana angka rasio jenis kelamin mencapai lebih dari 100. Rasio jenis kelamin Kabupaten Berau pada tahun 2024 adalah sebesar 134 yang berarti terdapat 134 orang laki-laki diantara 100 orang perempuan. Kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terbesar adalah Kecamatan Segah yang mencapai 123, sedangkan Kecamatan Maratua memiliki jumlah rasio jenis kelamin yang relatif paling kecil jika dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yaitu sebesar 102.

Adapun Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.29 sebagai berikut :

TABEL 1.29
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2024 *) di Kabupaten Berau

NO	NAMA KECAMATAN	DAK KABUPATEN BERAU TAHUN 2024			
		Laki- Laki(Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Duk(Jiwa)	Sex Ratio
1.	Kelay	3,514	3,009	6,523	117
2.	Talisayan	8,544	7,664	16,208	111
3.	Sambaliung	22,596	19,630	42,226	115
4.	Segah	8,857	7,217	16,074	123
5.	Tanjung Redeb	38,218	35,108	73,326	109
6.	Gunung Tabur	15,720	13,200	28,920	119
7.	Pulau Derawan	7,141	6,405	13,546	111
8.	Biduk Biduk	3,838	3,671	7,509	105
9.	Teluk Bayur	17,523	15,524	33,047	113
10.	Tabalar	4,017	3,575	7,592	112
11.	Maratua	1,978	1,943	3,921	102
12.	Batu Putih	4,739	4,228	8,967	112
13.	Biatan	4,708	4,143	8,851	114
Jumlah		158.927	140.078	299.005	113,46

Sumber Data : Disdukcapil semester I Tahun 2024

*data sementara

1.4.4.3. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia

Karakteristik Jumlah Penduduk menurut Struktur Usia di Kabupaten Berau pada tahun 2023 terbagi menjadi 16 (enam belas) jenis usia, dimana jumlah penduduk di Kabupaten Berau yang terbanyak di usia 10-14 Tahun dengan jumlah penduduk 26,409 Jiwa yang terbagi dalam jumlah laki-laki 13,519 jiwa dan jumlah perempuan 12,890 jiwa. Sedangkan yang paling terkecil di usia > 74 Tahun dengan jumlah penduduk 2,018 jiwa yang terbagi dalam jumlah laki-laki 1.929 Jiwa dan jumlah perempuan 900 jiwa.

Pada kelompok usia 0-4 tahun, jumlah penduduk terbesar tercatat di Tanjung Redeb dengan 3.207 laki-laki dan 2.991 perempuan, total 6.198 orang. Kecamatan Sambaliung mengikuti dengan 1.923 laki-laki dan 1.599 perempuan, total 3.522 orang. Sementara itu, Kelay memiliki jumlah penduduk 0-4 tahun yang lebih kecil, dengan 238 laki-laki dan 230 perempuan, total 468 orang. Pada kelompok usia 5-9 tahun, Tanjung Redeb kembali mencatatkan angka terbesar dengan 3.131 laki-laki dan 2.621 perempuan, total 5.752 orang. Diikuti oleh Sambaliung dengan 1.661 laki-laki dan 1.261 perempuan, total 2.922 orang. Kecamatan Biatan memiliki jumlah penduduk usia 5-9 tahun yang lebih kecil, dengan 345 laki-laki dan 347 perempuan, total 692 orang. Pada jumlah total penduduk di Kabupaten Berau pada kedua kelompok usia ini mencapai 22.756 orang untuk usia 0-4 tahun dan 14.103 orang untuk usia 5-9 tahun. Jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan di sebagian besar kecamatan, meskipun distribusi jenis kelamin bervariasi. Adapun Komposisi Jumlah Penduduk menurut Struktur Usia berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.30 sebagai berikut

TABEL 1.30
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia 0 – 9 Tahun Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2024 *) di Kabupaten Berau

No	Kecamatan	0-4 Thn (Jiwa)			5-9 Thn (Jiwa)		
		LK	PR	Σ	LK	PR	Σ
1.	Kelay	238	230	468	314	298	612
2.	Talisayan	692	652	1,344	842	830	1,672
3.	Sambaliung	1,923	1,807	3,730	2,183	2,051	4,234
4.	Segah	660	578	1,238	884	777	1,661
5.	Tanjung Redeb	3,207	2,991	6,198	3,820	3,493	7,313
6.	Gunung Tabur	1,445	1,242	2,687	1,558	1,484	3,042
7.	Pulau Derawan	536	500	1,036	752	757	1,509
8.	Biduk Biduk	333	318	651	410	391	801
9.	Teluk Bayur	1,574	1,482	3,056	1,708	1,633	3,341
10.	Tabalar	314	307	621	390	403	793
11.	Maratua	158	151	309	198	200	398
12.	Batu Putih	376	350	726	507	486	993
13.	Biatan	345	347	692	538	440	978
Jumlah		11,801	10,955	22,756	14,104	13,243	27,347

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan,2024

Pada kelompok usia 10-14 tahun, jumlah penduduk terbanyak tercatat di Tanjung Redeb dengan 3.757 laki-laki dan 3.567 perempuan, total 7.324 orang. Kecamatan Sambaliung mengikuti dengan jumlah penduduk 2.091 laki-laki dan 1.959 perempuan, total 4.050 orang. Sementara itu, Kelay memiliki jumlah penduduk 360 laki-laki dan 345 perempuan, total 705 orang, menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk usia 10-14 tahun yang lebih kecil. Di kelompok usia 15-19 tahun, Tanjung Redeb kembali mencatatkan angka terbesar dengan 3.313 laki-laki dan 2.981 perempuan, total 6.295 orang, diikuti oleh Sambaliung yang memiliki 1.874 laki-laki dan 1.735 perempuan, total 3.609 orang. Sebaliknya, kecamatan Biatan memiliki jumlah penduduk usia 15-19 tahun yang lebih kecil dengan 439 laki-laki dan 437 perempuan, total 876 orang. dapat dilihat pada tabel 1.31 sebagai berikut ;

TABEL 1.31
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia 10-19 Tahun Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024 *) di Kabupaten Berau

No	KECAMATAN	10-14 Thn (Jiwa)			15-19 Thn (Jiwa)		
		LK	PR	Σ	LK	PR	Σ
1.	Kelay	360	345	705	273	248	521
2.	Talisayan	837	792	1,629	640	598	1,238
3.	Sambaliung	2,091	1,959	4,050	1,676	1,649	3,325
4.	Segah	785	739	1,524	678	571	1,249
5.	Tanjung Redeb	3,757	3,567	7,324	3,131	2,964	6,095
6.	Gunung Tabur	1,412	1,363	2,775	1,169	1,052	2,221
7.	Pulau Derawan	732	702	1,434	594	557	1,151
8.	Biduk Biduk	399	393	792	348	344	692
9.	Teluk Bayur	1,597	1,521	3,118	1,274	1,221	2,495
10.	Tabalar	427	374	801	335	294	629
11.	Maratua	203	210	413	195	201	396
12.	Batu Putih	480	493	973	380	333	713
13.	Biatan	439	432	871	345	305	650
Jumlah		13,519	12,890	26,409	11,038	10,337	21,375

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

Pada kelompok usia 20-24 tahun, Sambaliung mencatatkan jumlah penduduk terbanyak, dengan 2.346 laki-laki dan 1.894 perempuan, total 4.240 orang. Diikuti oleh Tanjung Redeb yang memiliki 3.420 laki-laki dan 3.037 perempuan, total 6.457 orang. Kecamatan Kelay memiliki jumlah yang lebih kecil, dengan 311 laki-laki dan 259 perempuan, total 570 orang. Pada kelompok usia 25-29 tahun, Sambaliung kembali mencatatkan angka terbesar, dengan 2.057 laki-laki dan 1.714 perempuan, total 3.771 orang. Diikuti oleh Tanjung Redeb yang memiliki 2.966 laki-laki dan 2.628 perempuan, total 5.594 orang. Kecamatan Kelay mencatatkan jumlah penduduk usia 25-29 tahun yang lebih kecil, dengan 267 laki-laki dan 248 perempuan, total 515 orang. Pada jumlah total penduduk di Kabupaten Berau pada kedua kelompok usia ini mencapai 24.502 orang untuk usia 20-24 tahun dan 12.394 orang untuk usia 25-29 tahun. Jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan. dapat dilihat pada tabel 1.32 sebagai berikut ;

TABEL 1.32
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia 20-29 Tahun Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024 *) di Kabupaten Berau

No	KECAMATAN	20-24 Thn (Jiwa)			25-29 Thn (Jiwa)		
		LK	PR	Σ	LK	PR	Σ
1.	Kelay	311	259	570	267	248	515
2.	Talisayan	723	683	1,406	727	668	1,395
3.	Sambaliung	2,346	1,882	4,228	2,087	1,774	3,861
4.	Segah	821	633	1,454	854	687	1,541
5.	Tanjung Redeb	3,420	3,037	6,457	3,289	2,979	6,268
6.	Gunung Tabur	1,686	1,238	2,924	1,543	1,163	2,706
7.	Pulau Derawan	671	570	1,241	535	477	1,012
8.	Biduk Biduk	317	326	643	306	275	581
9.	Teluk Bayur	1,689	1,290	2,979	1,611	1,334	2,945
10.	Tabalar	367	322	689	312	270	582
11.	Maratua	175	167	342	135	166	301
12.	Batu Putih	423	365	788	337	321	658
13.	Biatan	398	383	781	391	359	750
Jumlah		13,347	11,155	24,502	12,394	10,721	23,115

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

Pada kelompok usia 30-34 tahun, Sambaliung mencatatkan jumlah penduduk terbanyak, dengan 1.954 laki-laki dan 1.703 perempuan, total 3.657 orang. Diikuti oleh Tanjung Redeb, yang memiliki 844 laki-laki dan 701 perempuan, total 1.545 orang. Kecamatan Kelay memiliki jumlah yang lebih kecil, dengan 289 laki-laki dan 243 perempuan, total 532 orang. Pada kelompok usia 35-39 tahun, Tanjung Redeb kembali mencatatkan angka terbesar, dengan 1.315 laki-laki dan 1.336 perempuan, total 2.651 orang. Sambaliung mencatatkan 1.166 laki-laki dan 1.295 perempuan, total 2.461 orang. Kecamatan Kelay memiliki jumlah penduduk usia 35-39 tahun yang lebih kecil, dengan 236 laki-laki dan 250 perempuan, total 546 orang. Pada jumlah total penduduk di Kabupaten Berau pada kedua kelompok usia ini mencapai 22.773 orang untuk usia 30-34 tahun dan 10.775 orang untuk usia 35-39 tahun. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang di sebagian besar kecamatan, meskipun di beberapa kecamatan, perempuan sedikit lebih dominan, dapat dilihat pada tabel 1.33 sebagai berikut ;

TABEL 1.33
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia 30 – 39 Tahun Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024 *) di Kabupaten Berau

No	KECAMATAN	30-34 Thn (Jiwa)			35-39 Thn (Jiwa)		
		LK	PR	Σ	LK	PR	Σ
1.	Kelay	289	243	532	296	250	546
2.	Talisayan	693	667	1,360	729	703	1,432
3.	Sambaliung	1,954	1,703	3,657	1,842	1,636	3,478
4.	Segah	844	701	1,545	745	650	1,395
5.	Tanjung Redeb	2,995	2,991	5,986	3,131	3,035	6,166
6.	Gunung Tabur	1,325	1,160	2,485	1,261	1,107	2,368
7.	Pulau Derawan	539	520	1,059	570	544	1,114
8.	Biduk Biduk	266	291	557	325	278	603
9.	Teluk Bayur	1,569	1,401	2,970	1,456	1,411	2,867
10.	Tabalar	314	291	605	303	302	605
11.	Maratua	173	150	323	160	169	329
12.	Batu Putih	328	335	663	414	352	766
13.	Biatan	379	352	731	388	341	729
Jumlah		11,668	10,805	22,473	11,620	10,778	22,398

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

Pada kelompok usia 40-44 tahun, Sambaliung mencatatkan jumlah penduduk terbanyak, dengan 1.693 laki-laki dan 1.472 perempuan, total 3.165 orang. Diikuti oleh Tanjung Redeb, yang memiliki 3.120 laki-laki dan 2.931 perempuan, total 6.051 orang. Kecamatan Kelay memiliki jumlah yang lebih kecil, dengan 292 laki-laki dan 261 perempuan, total 553 orang. Pada kelompok usia 45-49 tahun, Tanjung Redeb kembali mencatatkan angka terbesar, dengan 2.664 laki-laki dan 2.004 perempuan, total 4.668 orang. Sambaliung mencatatkan 1.265 laki-laki dan 1.019 perempuan, total 2.284 orang. Kecamatan Kelay memiliki jumlah penduduk usia 45-49 tahun yang lebih kecil, dengan 267 laki-laki dan 236 perempuan, total 503 orang. Pada jumlah total penduduk di Kabupaten Berau pada kedua kelompok usia ini mencapai 21.175 orang untuk usia 40-44 tahun dan 9.775 orang untuk usia 45-49 tahun. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang di sebagian besar kecamatan, meskipun perempuan sedikit lebih dominan di beberapa kecamatan, dapat dilihat pada tabel 1.34 sebagai berikut ;

TABEL 1.34
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia 40-49 Tahun Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024 *) di Kabupaten Berau

No	KECAMATAN	40-44 Thn (Jiwa)			45-49 Thn (Jiwa)		
		LK	PR	Σ	LK	PR	Σ
1.	Kelay	292	261	553	296	197	493
2.	Talisayan	659	521	1,180	597	460	1,057
3.	Sambaliung	1,693	1,472	3,165	1,563	1,271	2,834
4.	Segah	706	586	1,292	649	460	1,109
5.	Tanjung Redeb	3,120	2,931	6,051	2,664	2,406	5,070
6.	Gunung Tabur	1,249	1,032	2,281	1,017	794	1,811
7.	Pulau Derawan	622	570	1,192	535	398	933
8.	Biduk Biduk	289	270	559	223	224	447
9.	Teluk Bayur	1,426	1,260	2,686	1,166	997	2,163
10.	Tabalar	282	253	535	292	228	520
11.	Maratua	146	131	277	111	87	198
12.	Batu Putih	377	359	736	347	300	647
13.	Biatan	356	312	668	315	278	593
Jumlah		11,217	9,958	21,175	9,775	8,100	17,875

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

Pada kelompok usia 50-54 tahun, Sambaliung mencatatkan jumlah penduduk terbanyak dengan 1.274 laki-laki dan 994 perempuan, total 2.268 orang. Diikuti oleh Tanjung Redeb, yang memiliki 500 laki-laki dan 394 perempuan, total 894 orang. Kecamatan Kelay memiliki jumlah yang lebih kecil, dengan 204 laki-laki dan 129 perempuan, total 333 orang. Pada kelompok usia 55-59 tahun, Sambaliung kembali mencatatkan angka terbesar dengan 899 laki-laki dan 742 perempuan, total 1.641 orang. Tanjung Redeb memiliki 315 laki-laki dan 213 perempuan, total 528 orang. Kecamatan Kelay memiliki jumlah penduduk usia 55-59 tahun yang lebih kecil, dengan 152 laki-laki dan 101 perempuan, total 253 orang. pada jumlah total penduduk di Kabupaten Berau pada kedua kelompok usia ini mencapai 14.182 orang untuk usia 50-54 tahun dan 5.257 orang untuk usia 55-59 tahun. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cenderung seimbang, meskipun di beberapa kecamatan, perempuan sedikit lebih dominan, dapat dilihat pada tabel 1.35 sebagai berikut ;

TABEL 1.35
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia 50 – 59 Tahun Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024 *) di Kabupaten Berau

No	KECAMATAN	50-54 Thn (Jiwa)			55-59 Thn (Jiwa)		
		LK	PR	Σ	LK	PR	Σ
1.	Kelay	208	169	377	152	101	253
2.	Talisayan	474	424	898	347	280	627
3.	Sambaliung	1,274	954	2,228	799	587	1,386
4.	Segah	500	349	849	319	213	532
5.	Tanjung Redeb	2,192	1,822	4,014	1,487	1,218	2,705
6.	Gunung Tabur	826	617	1,443	483	370	853
7.	Pulau Derawan	420	291	711	257	194	451
8.	Biduk Biduk	207	168	375	145	138	283
9.	Teluk Bayur	958	716	1,674	632	481	1,113
10.	Tabalar	254	174	428	159	135	294
11.	Maratua	107	88	195	85	79	164
12.	Batu Putih	277	183	460	195	147	342
13.	Biatan	297	233	530	197	145	342
Jumlah		7,994	6,188	14,182	5,257	4,088	9,345

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

Pada kelompok usia 60-64 tahun, Tanjung Redeb mencatatkan jumlah penduduk terbanyak, dengan 931 laki-laki dan 748 perempuan, total 1.679 orang. Diikuti oleh Sambaliung, yang memiliki 559 laki-laki dan 418 perempuan, total 977 orang. Kecamatan Kelay memiliki jumlah penduduk 60-64 tahun yang lebih kecil, dengan 96 laki-laki dan 69 perempuan, total 165 orang. Pada kelompok usia 65-69 tahun, Tanjung Redeb kembali mencatatkan angka terbesar, dengan 929 laki-laki dan 748 perempuan, total 1.677 orang. Sambaliung mencatatkan 502 laki-laki dan 450 perempuan, total 952 orang. Kecamatan Kelay memiliki jumlah penduduk usia 65-69 tahun yang lebih kecil, dengan 65 laki-laki dan 101 perempuan, total 166 orang. Pada jumlah total penduduk di Kabupaten Berau pada kedua kelompok usia ini mencapai 6.075 orang untuk usia 60-64 tahun dan 3.700 orang untuk usia 65-69 tahun. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang di sebagian besar kecamatan, meskipun di beberapa kecamatan, perempuan sedikit lebih dominan, dapat dilihat pada tabel 1.36 sebagai berikut ;

TABEL 1.36
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia 60-69 Tahun Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024 *) di Kabupaten Berau

No	KECAMATAN	60-64 Thn(Jiwa)			65-69 Thn(Jiwa)		
		LK	PR	Σ	LK	PR	Σ
1.	Kelay	96	69	165	57	43	100
2.	Talisayan	257	188	445	171	98	269
3.	Sambaliung	550	408	958	289	208	497
4.	Segah	188	119	307	102	73	175
5.	Tanjung Redeb	931	748	1,679	582	462	1,044
6.	Gunung Tabur	330	245	575	185	153	338
7.	Pulau Derawan	170	124	294	102	81	183
8.	Biduk Biduk	110	109	219	74	72	146
9.	Teluk Bayur	363	327	690	244	205	449
10.	Tabalar	104	72	176	73	74	147
11.	Maratua	60	54	114	41	40	81
12.	Batu Putih	157	90	247	66	56	122
13.	Biatan	119	87	206	97	52	149
Jumlah		3,435	2,640	6,075	2,083	1,617	3,700

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

Pada kelompok usia 70-74 tahun, Tanjung Redeb mencatatkan jumlah penduduk terbanyak, dengan 615 laki-laki dan 522 perempuan, total 1.137 orang. Diikuti oleh Sambaliung, yang memiliki 160 laki-laki dan 144 perempuan, total 304 orang. Kecamatan Kelay memiliki jumlah penduduk 70-74 tahun yang lebih kecil, dengan 28 laki-laki dan 32 perempuan, total 60 orang. Pada kelompok usia lebih dari 75 tahun, Tanjung Redeb juga mencatatkan angka terbesar, dengan 321 laki-laki dan 285 perempuan, total 606 orang. Sambaliung mencatatkan 41 laki-laki dan 53 perempuan, total 94 orang. Kecamatan Kelay memiliki jumlah penduduk usia lebih dari 75 tahun yang lebih kecil, dengan 6 laki-laki dan 15 perempuan, total 21 orang. Pada jumlah total penduduk di Kabupaten Berau pada kedua kelompok usia ini mencapai 2.054 orang untuk usia 70-74 tahun dan 1.929 orang untuk usia lebih dari 75 tahun. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang di sebagian besar kecamatan, meskipun di beberapa kecamatan perempuan sedikit lebih dominan, dapat dilihat pada tabel 1.37 sebagai berikut ;

TABEL 1.37
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia 70->75 Tahun Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024 *) di Kabupaten Berau

No	KECAMATAN	70-74 Thn(Jiwa)			>75 Thn(Jiwa)		
		LK	PR	Σ	LK	PR	Σ
1.	Kelay	28	32	60	37	16	53
2.	Talisayan	88	49	137	68	51	119
3.	Sambaliung	160	144	304	166	125	291
4.	Segah	66	46	112	56	35	91
5.	Tanjung Redeb	266	236	502	226	228	454
6.	Gunung Tabur	111	86	197	120	94	214
7.	Pulau Derawan	59	68	127	47	52	99
8.	Biduk Biduk	43	29	72	43	45	88
9.	Teluk Bayur	130	112	242	126	133	259
10.	Tabalar	46	38	84	45	38	83
11.	Maratua	16	32	48	15	18	33
12.	Batu Putih	33	31	64	42	27	69
13.	Biatan	66	39	105	38	38	76
Jumlah		1,112	942	2,054	1,029	900	1,929

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

1.4.4.4. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan

Komposisi Jumlah Penduduk menurut Status Kegiatan/Pekerjaan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Berau pada tahun 2024 terbagi menjadi 89 (delapan puluh sembilan) status kegiatan/pekerjaan, dapat dilihat pada tabel 1.38 sebagai berikut :

TABEL 1.38
Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024*)

NO	KECAMATAN	BLM/ TDK BEKERJA (Jiwa)	RUMAH TANGGA (jiwa)	PELAJAR/ MAHASIS WA (Jiwa)	PENSI UNAN (Jiwa)	PEGAWAI NEGERI SIPIIL (Jiwa)	TENTARA NASIONAL INDONESIA (Jiwa)
1	Kelay	2.177	1.200	936	5	64	1
2	Talisayan	5.071	3.601	2.351	25	205	6
3	Sambaliung	14.005	8.820	6.917	81	567	11
4	Segah	5.230	3.157	2.250	18	109	3
5	Tanjung Redeb	23.245	13.975	13.042	493	2.911	110
6	Gunung Tabur	10.274	6.035	4.488	66	410	14
7	Pulau Derawan	4.460	3.124	2.010	9	107	7
8	Biduk Biduk	2.329	1.696	1.392	10	143	3
9	Teluk Bayur	10.770	7.074	5.127	102	609	332
10	Tabalar	2.525	1.689	1.123	6	54	0
11	Maratua	1.139	944	753	6	45	1
12	Batu Putih	2.898	1.994	1.392	5	63	0
13	Biatan	2.869	1.949	1.242	10	63	1

Jumlah	86.992	55.258	43.023	836	5.350	489

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

TABEL 1.39

Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024*) Di Kabupaten Berau

NO	KECAMATAN	KONSTRUKSI (Jiwa)	TRANSPORTASI (Jiwa)	KARYAWAN SWASTA (Jiwa)	KARYAWAN BUMN (Jiwa)	KARYAWAN BUMD (Jiwa)	KARYAWAN HONORER (Jiwa)
1	Kelay	1	2	372	1	1	62
2	Talisayan	6	0	917	10	3	148
3	Sambaliung	2	23	2.731	40	9	328
4	Segah	0	4	1.164	4		74
5	Tanjung Redeb	45	40	7.700	244	103	893
6	Gunung Tabur	5	22	2.321	16	16	238
7	Pulau Derawan	2	1	282	4	1	96
8	Biduk Biduk	0	1	153	2		79
9	Teluk Bayur	9	21	3.306	53	12	295
10	Tabalar	1	2	150	4	1	34
11	Maratua	0	0	101			51
12	Batu Putih	0	0	480	2		41
13	Biatan	0	4	396	3		70
Jumlah		86.992	71	120	20.073	383	146

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

TABEL 1.40

Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024*) di Kabupaten Berau

No	KECAMATAN	Buruh Harian Lepas (Jiwa)	Buruh Tani Perkebunan (Jiwa)	Buruh Nelayan Perikanan (Jiwa)	Buruh Peternakan (Jiwa)	Pembantu Rumah Tangga (Jiwa)	Tukang Cukur (Jiwa)
1	Kelay	62	95	0	0	1	0
2	Talisayan	185	123	24	1	5	1
3	Sambaliung	1.330	191	28	4	12	7
4	Segah	183	184	4	1	1	0
5	Tanjung Redeb	3.239	152	34	3	36	8
6	Gunung Tabur	644	170	16	2	7	1
7	Pulau Derawan	108	30	38	0	5	0
8	Biduk Biduk	144	22	13	0	3	0
9	Teluk Bayur	1.193	140	12	1	7	0
10	Tabalar	53	41	22	0	2	0
11	Maratua	16	5	27	0	0	0
12	Batu Putih	75	55	56	1	2	0
13	Biatan	71	102	4	0	0	0
Jumlah		86.992	7.303	1.310	278	13	81

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

TABEL 1.41
Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024*) di Kabupaten Berau

No	KECAMATAN	Buruh Harian Lepas (Jiwa)	Buruh Tani Perkebunan (Jiwa)	Buruh Nelayan Perikanan (Jiwa)	Buruh Peternakan (Jiwa)	Pembantu Rumah Tangga (Jiwa)	Tukang Cukur (Jiwa)
1	Kelay	62	95	0	0	1	0
2	Talisayan	185	123	24	1	5	1
3	Sambaliung	1.330	191	28	4	12	7
4	Segah	183	184	4	1	1	0
5	Tanjung Redeb	3.239	152	34	3	36	8
6	Gunung Tabur	644	170	16	2	7	1
7	Pulau Derawan	108	30	38	0	5	0
8	Biduk Biduk	144	22	13	0	3	0
9	Teluk Bayur	1.193	140	12	1	7	0
10	Tabalar	53	41	22	0	2	0
11	Maratua	16	5	27	0	0	0
12	Batu Putih	75	55	56	1	2	0
13	Biatan	71	102	4	0	0	0
Jumlah		7.303	1.310	278	13	81	17

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

TABEL 1.42
Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024*) di Kabupaten Berau

NO	KECAMATAN	TUKANG LISTRIK (Jiwa)	TUKANG BATU (Jiwa)	TUKANG KAYU (Jiwa)	TUKANG SOL SEPATU (Jiwa)	TUKANG LAS/ PANDAI BESI (Jiwa)	TUKANG JAHIT (Jiwa)
1	Kelay	0	4	5	0	0	0
2	Talisayan	0	8	26	0	1	0
3	Sambaliung	3	45	69	0	8	8
4	Segah	1	2	9	0	1	0
5	Tanjung Redeb	14	168	212	7	24	50
6	Gunung Tabur	0	20	62	1	2	9
7	Pulau Derawan	1	4	17	0	1	1
8	Biduk Biduk	0	11	48	0	3	3
9	Teluk Bayur	5	38	100	0	4	11
10	Tabalar	0	2	7	0	1	1
11	Maratua	0	5	11	0	0	0
12	Batu Putih	0	6	5	0	0	3
13	Biatan	0	3	3	0	2	2
Jumlah		24	316	574	8	47	88

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

TABEL 1.43
Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024*) di Kabupaten Berau

NO	KECAMATAN	TUKANG GIGI (jiwa)	PENATA RIAS (jiwa)	PENATA BUSANA (jiwa)	PENATA RAMBUT (jiwa)	MEKANIK (jiwa)	SENIMAN (jiwa)
1	Kelay	0	0	0	0	1	1
2	Talisayan	0	1	0	0	14	0
3	Sambaliung	1	3	0	4	42	2
4	Segah	0	0	0	0	10	0
5	Tanjung Redeb	1	8	4	10	161	6
6	Gunung Tabur	0	0	1	0	27	2
7	Pulau Derawan	0	0	0	0	0	0
8	Biduk Biduk	1	0	0	0	5	0
9	Teluk Bayur	1	0	0	4	54	0
10	Tabalar	0	0	0	0	3	0
11	Maratua	0	0	0	0	1	1
12	Batu Putih	0	0	0	0	2	0
13	Biatan	0	0	0	0	4	0
Jumlah		4	12	18	18	324	12

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

TABEL 1.44
Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024*) di Kabupaten Berau

NO	KECAMATAN	TABIB (jiwa)	RARAJI (jiwa)	PER. BUSANA (jiwa)	PENTERJEMAH (jiwa)	IMAM (jiwa)	PENDETA (jiwa)
1	Kelay	0	0	0	0	0	13
2	Talisayan	0	0	1	0	0	5
3	Sambaliung	0	1	0	0	3	22
4	Segah	0	0	0	0	2	18
5	Tanjung Redeb	0	0	1	0	16	19
6	Gunung Tabur	0	1	0	0	1	7
7	Pulau Derawan	0	0	0	0	1	0
8	Biduk Biduk	0	0	0	0	0	1
9	Teluk Bayur	0	0	0	0	2	4
10	Tabalar	0	0	0	0	0	5
11	Maratua	0	0	0	0	0	0
12	Batu Putih	0	0	0	0	0	6
13	Biatan	0	0	0	0	1	3
Jumlah		0	2	2	0	26	103

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau, *Data Pembersihan Semester II ,2024

TABEL 1.45
Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024*) di Kabupaten Berau

NO	KECAMATAN	PASTOR (Jiwa)	WARTA- WAN (Jiwa)	USTADZ/ MUBALIGH (Jiwa)	JURU MASAK (Jiwa)	PROMOTOR ACARA (Jiwa)	ANGGOTA DPR RI (Jiwa)
1	Kelay	0	0	0	0	0	0
2	Talisayan	1	1	3	0	0	0
3	Sambaliung	0	5	4	2	0	0
4	Segah	0	1	0	0	0	0
5	Tanjung Redeb	5	13	31	7	0	0
6	Gunung Tabur	0	2	1	1	0	0
7	Pulau Derawan	0	0	0	1	0	0
8	Biduk Biduk	0	0	0	1	0	0
9	Teluk Bayur	0	2	6	1	0	0
10	Tabalar	0	2	1	0	0	0
11	Maratua	0	0	0	0	0	0
12	Batu Putih	0	0	0	0	0	0
13	Biatan	0	0	1	0	0	0
Jumlah		6	26	47	13	0	0

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

TABEL 1.46
Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024*) di Kabupaten Berau

NO	KECAMATAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI (Jiwa)	ANGGOTA DPRD PROPINSI (Jiwa)	ANGGOTA DPRD KAB/ KOTA (Jiwa)	DOSEN (Jiwa)	GURU (Jiwa)	PILOT (Jiwa)
1	Kelay	0	0	0	0	48	0
2	Talisayan	0	0	1	1	96	0
3	Sambaliung	0	0	2	3	166	0
4	Segah	0	0	0	0	49	0
5	Tanjung Redeb	2	3	21	51	472	1
6	Gunung Tabur	0	0	2	0	82	0
7	Pulau Derawan	0	0	1	0	25	0
8	Biduk Biduk	0	0	1	1	31	0
9	Teluk Bayur	0	0	2	6	231	0
10	Tabalar	0	0	0	0	31	0
11	Maratua	0	0	0	0	18	0
12	Batu Putih	0	0	0	0	26	0
13	Biatan	0	0	0	0	53	0
Jumlah		2	3	30	62	1.328	1

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

TABEL 1.47

Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024*) di Kabupaten Berau

NO	KECAMATAN	PENGA CARA (Jiwa)	NOTA RIS (Jiwa)	ARSI TEK (Jiwa)	AKUN TAN (Jiwa)	KONSUL TAN (Jiwa)	DOKTER (Jiwa)
1	Kelay	0	0	0	0	0	1
2	Talisayan	0	0	0	0	0	4
3	Sambaliung	3	0	1	0	4	9
4	Segah	0	0	0	0	0	0
5	Tanjung Redeb	8	6	5	2	31	71
6	Gunung Tabur	0	0	0	0	1	2
7	Pulau Derawan	0	0	0	0	0	3
8	Biduk Biduk	2	0	0	0	0	0
9	Teluk Bayur	3	0	0	0	3	10
10	Tabalar	0	0	0	0	0	0
11	Maratua	0	0	0	0	0	0
12	Batu Putih	0	0	0	0	0	0
13	Biatan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		16	6	6	2	39	100

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

TABEL 1.48

Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024*) di Kabupaten Berau

NO	KECAMATAN	BIDAN (Jiwa)	PERAW AT (Jiwa)	APOTE KER (Jiwa)	PSIKIATER/ PSIKOLOG (Jiwa)	PENYIAR TELEVISI (Jiwa)	PENYIAR RADIO (Jiwa)
1	Kelay	7	5	0	0	0	0
2	Talisayan	14	16	4	0	0	0
3	Sambaliung	17	35	6	0	0	0
4	Segah	6	12	3	0	0	0
5	Tanjung Redeb	48	98	25	4	0	0
6	Gunung Tabur	9	21	2	0	0	0
7	Pulau Derawan	8	5	0	0	0	0
8	Biduk Biduk	5	10	0	0	0	0
9	Teluk Bayur	34	43	4	0	0	0
10	Tabalar	7	5	0	0	0	0
11	Maratua	2	5	0	0	0	0
12	Batu Putih	1	6	2	0	0	0
13	Biatan	8	6	0	0	0	0
Jumlah		166	267	46	4	0	0

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

TABEL 1.49
Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024*) Di Kabupaten Berau

NO	KECAMATAN	PELAUT (Jiwa)	PENELITI (Jiwa)	SOPIR (Jiwa)	PIALANG (Jiwa)	PARA NORMAL (Jiwa)	PEDAGANG (Jiwa)
1	Kelay	-	-	19	-	-	9
2	Talisayan	3	-	78	-	-	52
3	Sambaliung	7	-	178	-	1	137
4	Segah	1	-	36	-	-	15
5	Tanjung Redeb	25	-	362	-	1	742
6	Gunung Tabur	10	-	84	-	-	53
7	Pulau Derawan	1	-	18	-	-	10
8	Biduk Biduk	2	-	26	-	-	9
9	Teluk Bayur	4	-	170	-	-	224
10	Tabalar	1	-	16	-	-	12
11	Maratua	1	-	-	-	-	3
12	Batu Putih	5	-	29	-	-	12
13	Biatan	1	-	29	-	-	11
Jumlah		61	-	1.045	-	2	1.289

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

TABEL 1.50
Jumlah Penduduk Menurut Status Kegiatan/Pekerjaan Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2024*) di Kabupaten Berau

NO	KECAMATAN	PERANGKAT DESA (Jiwa)	KEPALA KAMPUNG (Jiwa)	BIARAWATI (Jiwa)	WIRASWASTA (Jiwa)	LAINNYA (Jiwa)
1	Kelay	15	14	-	142	285
2	Talisayan	9	10	-	281	432
3	Sambaliung	13	13	-	883	935
4	Segah	13	13	3	309	573
5	Tanjung Redeb	-	-	6	1.793	824
6	Gunung Tabur	9	10	-	473	1.124
7	Pulau Derawan	8	5	-	227	379
8	Biduk Biduk	10	6	-	76	86
9	Teluk Bayur	5	4	1	737	797
10	Tabalar	6	6	-	91	164
11	Maratua	2	4	-	28	62
12	Batu Putih	2	7	-	118	243
13	Biatan	10	8	-	132	306
Jumlah		90	100	10	5.290	6.210

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II ,2024

1.4.4.5. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Berau terbagi dalam 10 (sepuluh) jenis tingkat pendidikan dengan jumlah penduduk yang tertinggi berada pada tingkat pendidikan tidak/belum pernah sekolah dengan jumlah 71.026 jiwa, yang kedua berada pada tingkat pendidikan tamat SLTA/ sederajat dengan jumlah 51.531 jiwa dan yang ketiga berada pada jenis pendidikan tamat SD/ sederajat dengan jumlah 47.976 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Berau.

Adapun Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.51 sebagai berikut;

TABEL 1.51

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024*)
di Kabupaten Berau

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	GENDER(Jiwa)		JUMLAH (Jiwa)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Tidak/belum sekolah	36.689	34.337	71.026
2.	Tidak tamat SD/Sederajat	18.233	17.056	35.289
3.	Tamat SD	24.284	23.692	47.976
4.	SLTP/Sederajat	17.740	16.005	33.745
5.	SLTA/Sederajat	30.802	20.729	51.531
6.	Diploma I/II	553	673	1.226
7.	Akademi/Diploma III/S.Muda	1.117	1.740	2.857
8.	Diploma IV/Strata I	4.996	4.879	9.875
9.	Strata II	279	160	439
10.	Strata III	10	5	15
Jumlah		134.703	119.276	253.979

Sumber : Disduk & Capil Kab. Berau,

*Data Pembersihan Semester II, 2024

1.4.4.6. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2023, jumlah sementara kepadatan penduduk Kabupaten Berau adalah sebesar 280.998 Jiwa. Kecamatan Tanjung Redeb adalah daerah yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi yaitu 3295,65 Jiwa/Km². Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Tanjung Redeb memiliki luas wilayah yang paling kecil diantara kecamatan-kecamatan yang lainnya dengan perkembangan penduduk yang tinggi karena Kecamatan Tanjung Redeb juga sekaligus sebagai Ibu Kota

Kabupaten Berau. Sedangkan daerah yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kelay yakni hanya sebesar 0,01 jiwa per km2.

Adapun Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 1.52 sebagai berikut :

TABEL 1.52

Distribusi dan Kepadatan Penduduk Tahun 2024 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	DUK (Jiwa)	LUAS WILAYAH (Km2)	KEPADATAN (Jiwa / Km2)
1.	Kelay	7.255	6.556,54	1,11
2.	Talisayan	17.020	1.624,57	15,46
3.	Tabalar	7.917	1.837,34	5,94
4.	Biduk-Biduk	7.733	2.429,97	8,36
5.	Pulau Derawan	14.399	4.423,99	15,69
6.	Maratua	3.881	5.616,26	125,68
7.	Sambaliung	44.532	2.163,37	21,45
8.	Tanjung Redeb	74.976	24,41	3295,65
9.	Gunung Tabur	31.394	1.963,32	16,24
10.	Segah	17.942	5.241,29	3,44
11.	Teluk Bayur	34.960	316,98	112,94
12.	Batu Putih	9.519	3.573,30	10,64
13.	Biatan	9.470	1.192,03	9,93
Jumlah		280.998	36.963,37	0,01

Sumber : BPS Berau Dalam Angka 2024

1.4.5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau adalah sejumlah 4.546 orang, dan dengan jumlah terbanyak adalah laki laki yaitu 2.300 orang dan perempuan yaitu 2.246 orang. Jenjang Pendidikan terbanyak didominasi oleh D.IV/S.1 yaitu sebanyak 3.539 orang dan yg paling sedikit adalah jenjang S.3 yaitu 1 orang.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sampai tanggal 31 Desember Tahun 2024 menurut gender dan jenjang pendidikan. Pada kelompok usia 18-20, terdapat 252 PNS, namun tidak ada pembagian berdasarkan jenis kelamin. Mungkin ini adalah kelompok baru yang sedang memulai karir sebagai PNS di Kabupaten Berau. Di kelompok usia 21-30 tahun, jumlah PNS pria adalah 132, sementara jumlah PNS wanita adalah 225, dengan total 252 PNS. Ini

menunjukkan bahwa di kelompok usia muda ini, jumlah wanita yang bekerja sebagai PNS lebih banyak daripada pria. Untuk kelompok usia 31-40 tahun, jumlah PNS pria adalah 480 dan wanita 684, dengan total 1164 PNS. Ini adalah kelompok usia yang cukup dominan dalam struktur pegawai negeri, dengan jumlah wanita yang juga lebih banyak daripada pria. Pada kelompok usia 41-50 tahun, jumlah PNS pria adalah 1055 dan wanita 913, dengan total 1968 PNS. Kelompok ini memiliki jumlah PNS tertinggi, dengan pria masih mendominasi. Ini adalah kelompok usia yang berada pada puncak karir mereka dalam birokrasi. Untuk kelompok usia 51-60 tahun, jumlah PNS pria adalah 873 dan wanita 539, dengan total 1456 PNS. Meski jumlah PNS pada kelompok usia ini menurun, pria tetap mendominasi.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran tentang distribusi PNS berdasarkan usia dan jenis kelamin di Kabupaten Berau, dengan dominasi kelompok usia 41-50 tahun dan tren peningkatan jumlah wanita di kalangan PNS pada usia muda. dapat dilihat pada tabel 1.53 sebagai berikut :

TABEL 1.53

Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Tahun 2024 di Kab. Berau

USIA	PRIA (Jiwa)	WANITA (Jiwa)	TOTAL (Jiwa)
18-20	-	-	-
21-30	132	225	252
31-40	480	684	1164
41-50	1055	913	1968
51-60	873	539	1456
> 60	-	-	-

Sumber : BKPSDM Kab.Berau, 2024

Berdasarkan tabel yang diberikan, jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Berau dibagi berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Pada tingkat pendidikan SD, terdapat 34 PNS, dengan 27 pria dan 7 wanita. Di tingkat SMP, jumlah PNS mencapai 70, terdiri dari 77 pria dan 10 wanita. Pada tingkat SMA, terdapat 879 PNS, dengan 643 pria dan 236 wanita, menunjukkan dominasi pria di tingkat pendidikan ini. Untuk tingkat pendidikan Diploma I, hanya ada 13 PNS, dengan 7 pria dan 6 wanita. Pada tingkat Diploma II, jumlah PNS meningkat menjadi 76, terdiri dari 41 pria dan 35 wanita. Tingkat Diploma III mencatatkan jumlah PNS

yang cukup signifikan, yaitu 708, dengan 243 pria dan 465 wanita, menunjukkan bahwa wanita lebih dominan pada tingkat pendidikan ini.

Pada tingkat Diploma IV, terdapat 64 PNS, dengan 42 pria dan 22 wanita. Sementara itu, pada Strata 1 (S1), jumlah PNS mencapai 2321, dengan 1033 pria dan 1288 wanita, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan S1 memiliki dominasi jumlah PNS yang lebih besar dan lebih banyak wanita daripada pria. Di tingkat Strata 2 (S2), terdapat 380 PNS, dengan 201 pria dan 179 wanita, sementara di tingkat Strata 3 (S3) hanya ada 1 PNS, yang merupakan pria. Secara keseluruhan, mayoritas PNS di Kabupaten Berau memiliki pendidikan Strata 1, diikuti oleh Diploma III. Wanita cenderung lebih banyak mendominasi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti pada Diploma III dan Strata 1, sementara pria lebih dominan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah.

TABEL 1.54
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024 di Kabupaten Berau

TINGKAT PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	TOTAL
SD	27	7	34
SMP	77	10	70
SMA	643	236	879
Diploma I	7	6	13
Diploma II	41	35	76
Diploma III	243	465	708
Diploma IV	42	22	64
Strata 1	1033	1288	2321
Strata 2	201	179	380
Strata 3	1	0	1

Sumber : BKPSDM Kabupaten Berau, 2024

Pada Golongan I, jumlah PNS relatif sedikit, dengan 1 pria pada golongan I/b, 12 pria dan 5 wanita pada I/c, serta 39 pria dan 10 wanita pada I/d, dengan total 49 PNS pada golongan ini. Golongan II mencatatkan jumlah yang lebih tinggi, terutama pada kategori II/d yang memiliki 385 pria dan 164 wanita, total 549 PNS. Di kategori II/c, terdapat 153 pria dan 179 wanita, dengan total 332 PNS, menunjukkan keberagaman antara pria dan wanita.

Pada Golongan III, kategori dengan jumlah PNS terbesar, kategori III/d memiliki 428 pria dan 429 wanita, dengan total 857 PNS. Di kategori lainnya, seperti III/b dan III/c, jumlah wanita lebih dominan, yakni 488 wanita berbanding 363 pria di III/b, dan 391 wanita berbanding 297 pria di III/c. Secara keseluruhan, Golongan III memiliki keseimbangan antara pria dan wanita, namun wanita mendominasi pada kategori tertentu. Pada Golongan IV, terdapat 255 pria dan 210 wanita pada IV/a, yang merupakan jumlah terbesar pada golongan ini, sementara pada kategori IV/b, IV/c, dan IV/d, pria lebih mendominasi. Secara keseluruhan, Golongan IV memiliki 2 PNS di IV/d, yang mencerminkan posisi yang sangat terbatas. Jumlah total PNS di Kabupaten Berau adalah 4.546, dengan 2.300 pria dan 2.246 wanita. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan distribusi PNS yang relatif merata antara pria dan wanita, meskipun pria lebih dominan di golongan yang lebih tinggi, sementara wanita lebih banyak di golongan yang lebih rendah, seperti di Golongan III.

TABEL 1.55
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan
Tahun 2024 di Kabupaten Berau

GOLONGAN	PRIA	WANITA	TOTAL
GOLONGAN I			
I/a	-	-	-
I/b	1		1
I/c	12	5	17
I/d	39	10	49
GOLONGAN II			
II/a	40	6	46
II/b	100	37	137
II/c	153	179	332
II/d	385	164	549
GOLONGAN III			
III/a	389	406	795
III/b	363	488	851
III/c	297	391	688
III/d	428	429	857
GOLONGAN IV			
IV/a	255	210	465
IV/b	59	27	86
IV/c	17	9	26
IV/d	2	-	2
TOTAL	2.300	2.246	4.546

Sumber: BKPSDM Kabupaten Berau, 2024

1.4.6. Kondisi Ekonomi Daerah

1.4.6.1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Data PDRB Kabupaten Berau menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran memiliki perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian kecil produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik Kabupaten Berau digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir seperti rumah tangga, LNPR, dan pemerintah. Kemudian, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik yang masuk ke dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori serta sisanya sekaligus menjadi yang terbesar, dijual atau diekspor ke luar daerah Kabupaten Berau. Sebaliknya, untuk beberapa komoditas tertentu yang masih belum dapat diproduksi sendiri di dalam wilayah Kabupaten Berau maka perlu mendatangkan barang (melakukan impor) dari luar daerah Kabupaten Berau.

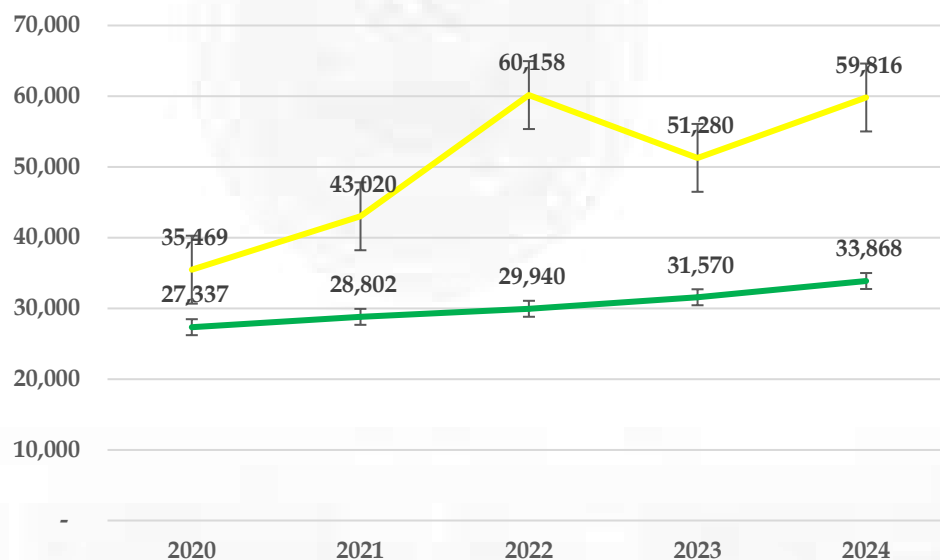
Tren PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) di Kabupaten Berau dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, kedua indikator PDRB menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam periode tersebut, meskipun dengan perbedaan laju pertumbuhan.

Pada PDRB ADHB, terlihat adanya kenaikan yang tajam dari 27.337 pada tahun 2020 menjadi 60.158 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencapai titik tertinggi di tahun 2024 dan kemudian sedikit menurun pada tahun 2023 (51.280) dan 2024 (59.816). Meskipun mengalami penurunan pada dua tahun terakhir, PDRB ADHB tetap menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang pesat, meskipun faktor harga yang berlaku berperan besar dalam fluktuasi tersebut. Sementara itu, PDRB ADHK menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih stabil, meskipun lebih rendah dibandingkan PDRB ADHB. Dari 27.337 pada tahun 2020, PDRB ADHK meningkat lebih lambat menjadi 33.868 pada tahun 2024. Peningkatan ini cenderung lebih moderat dan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis tanpa pengaruh fluktuasi harga yang tajam.

Grafik ini menggambarkan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh harga pasar (PDRB ADHB) dan pertumbuhan ekonomi yang lebih mencerminkan realitas ekonomi riil atau yang telah disesuaikan dengan harga konstan (PDRB ADHK). Peningkatan PDRB ADHB yang lebih cepat mencerminkan adanya inflasi atau perubahan harga, sementara PDRB ADHK menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2020-2024 dapat di lihat pada gambar berikut:

GAMBAR 1.1

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2024

Berdasarkan grafik yang menunjukkan tren PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Berau antara tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada kedua indikator tersebut, meskipun dengan laju pertumbuhan yang berbeda. PDRB ADHB menunjukkan fluktuasi yang lebih besar, dengan lonjakan yang tajam pada tahun 2022 mencapai 60.158, yang kemudian menurun sedikit pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh harga yang lebih tinggi terhadap ekonomi

Kabupaten Berau, yang mungkin dipengaruhi oleh sektor-sektor dengan komoditas yang mengalami peningkatan harga, seperti hasil pertambangan atau komoditas unggulan lainnya. Sementara itu, PDRB ADHK yang lebih stabil dengan peningkatan yang lebih moderat dari 27.337 pada tahun 2020 menjadi 33.868 pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Meskipun angkanya lebih rendah, PDRB ADHK menggambarkan kondisi ekonomi riil Kabupaten Berau, yang lebih berfokus pada sektor-sektor yang berkontribusi pada produksi barang dan jasa tanpa dipengaruhi oleh inflasi atau kenaikan harga.

Dampak ekonomi dari peningkatan PDRB ADHB ini mencerminkan adanya peningkatan dalam sektor-sektor tertentu yang mengalami lonjakan harga, yang bisa menunjukkan adanya peluang dalam sektor ekonomi seperti pertambangan, perkebunan, atau konstruksi. Namun, penurunan pada tahun 2023 dan 2024 bisa mengindikasikan adanya penurunan permintaan atau harga di beberapa sektor tersebut. Di sisi lain, peningkatan PDRB ADHK yang lebih stabil menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam pengelolaan inflasi atau kenaikan harga, ekonomi riil Kabupaten Berau menunjukkan kestabilan dalam produk domestik yang dihasilkan, yang dapat menjadi indikator keberlanjutan ekonomi di masa depan.

1.4.6.2. Struktur Ekonomi

Kontribusi yang diberikan oleh setiap komponen tiap tahunnya dapat menunjukkan peranan setiap komponen pengeluaran terhadap PDRB. Jika melihat komposisi komponen pembentuk PDRB yang memberikan kontribusi terbesar maka, dapat diketahui bahwa komponen ekspor netto yang berperan besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Berau menurut pengeluaran. Seperti diketahui, Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah utama penghasil batu bara di Provinsi Kalimantan Timur. Batu bara menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Berau, dimana sebagian besar hasil produksinya di jual ke luar daerah (ekspor).

Kontribusi ekspor neto terhadap perekonomian Kabupaten Berau menunjukkan tren yang cukup fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, kontribusi ekspor neto terhadap perekonomian Kabupaten Berau tercatat sebesar 58,91 persen, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 64,16 persen. Namun, meskipun kontribusi ekspor neto sempat mengalami peningkatan, sejalan dengan penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB lapangan usaha, kontribusi ekspor neto mengalami penurunan menjadi 63,15 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, kontribusi ekspor neto terus menurun menjadi 61,95 persen pada tahun 2023 dan 58,03 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, komponen pengeluaran untuk konsumsi akhir di Kabupaten Berau, meskipun masih tergolong rendah, menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Konsumsi akhir yang dimaksud mencakup konsumsi rumah tangga, konsumsi akhir lembaga non-profit rumah tangga (LNPRRT), dan konsumsi akhir pemerintah. Persentase pengeluaran untuk konsumsi akhir pada tahun 2020 tercatat sebesar 18,07 persen, kemudian menurun menjadi 16,03 persen pada tahun 2021, dan sedikit meningkat lagi menjadi 16,20 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, konsumsi akhir naik menjadi 16,86 persen, dan pada tahun 2024, angka tersebut meningkat menjadi 18,73 persen.

Pada tahun 2024, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Berau tercatat sebesar Rp 50.817 miliar, sementara PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp 33.868 miliar. Angka ini mencerminkan kondisi perekonomian Kabupaten Berau yang masih dipengaruhi oleh faktor harga, dengan kontribusi yang lebih besar dari sektor-sektor tertentu, namun juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam ekonomi riil, yang tercermin dalam PDRB ADHK.

1.4.6.3. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu lima tahun, terlihat peningkatan ekonomidi Kabupaten Berau dari sisi komponen pengeluaran, terutama dipicu oleh

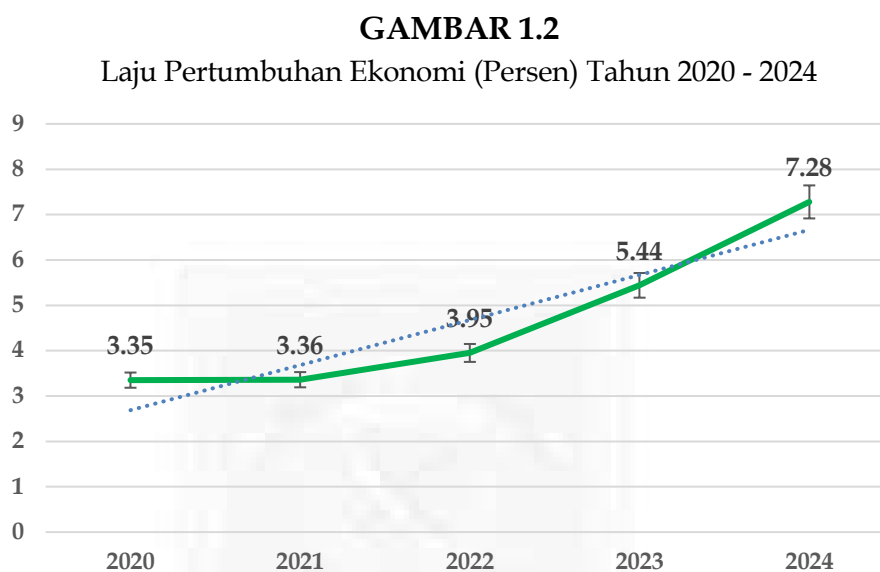
pertumbuhan komponen yang memiliki peranan besar yakni PMTB sebesar 3,59 persen dan konsumsi akhir rumah tangga sebesar 5,44 persen.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau tercatat sebesar 7,28 persen, yang menunjukkan percepatan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya tercatat 5,44 persen (selisih 1,84 persen). Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan, baik dari sektor-sektor domestik maupun sektor-sektor ekspor. Seluruh komponen pengeluaran akhir di Kabupaten Berau pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) menunjukkan pertumbuhan tertinggi, yakni 28,38 persen. Kenaikan yang signifikan pada komponen ini mengindikasikan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor-sektor publik seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pemerintah lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan terkecil, yaitu 4,33 persen dibandingkan dengan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2023.

Hampir semua komponen cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 202 kecuali perubahan inventori. Namun, hal itu berubah di saat pandemi muncul di Indonesia, dimana juga terjadi di Kabupaten Berau. Akibat adanya pandemi tersebut, maka terjadi pembatasan yang berkepanjangan, dan pemberlakuan kebijakan disegala sektor, tentunya mempengaruhi perekonomian Kabupaten Berau. Hampir semua komponen pembentuk PDRB pengeluaran baik itu konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi LNPR, konsumsi pemerintah, PMTB, maupun ekspor neto mengalami kontraksi pada 2024 seperti halnya pertumbuhan total PDRB.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha yang tertinggi selama setahun terakhir ditempati oleh sektor transportasi dan pergudangan, sektor administrasi pemerintahan serta sektor jasa pendidikan

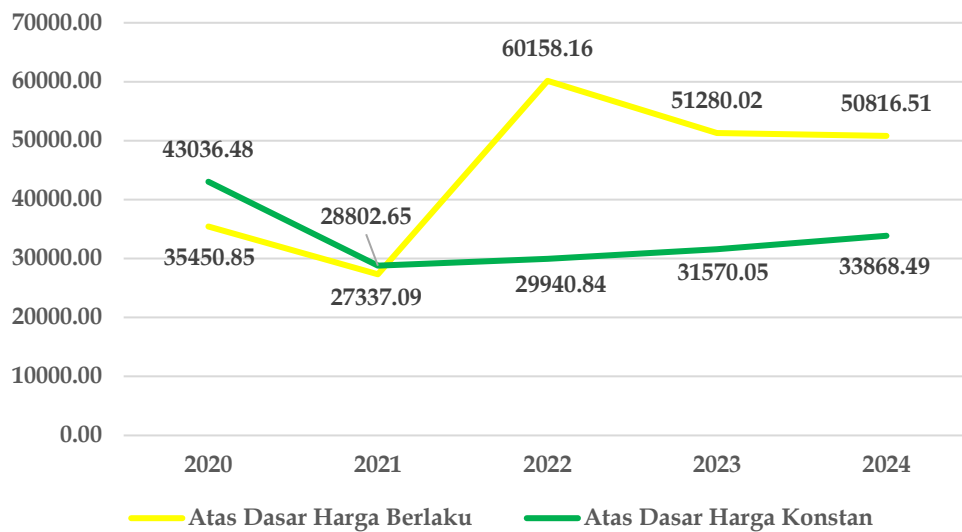
dengan kisaran pertumbuhan sebesar 20 persen, sebagaimana terlihat dalam gambar 1.2 dibawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Pada tahun 2020, terjadi penurunan pada PDRB Kabupaten Berau menjadi 3,35 persen. Namun, pada tahun 2021, perekonomian kembali mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 5,36 persen. Tren ini terus berlanjut, dan pada tahun 2022 hingga 2024, perekonomian Kabupaten Berau terus menunjukkan pertumbuhan positif yang stabil, dengan angka 3,95 persen pada tahun 2022 dan 5,44 persen pada tahun 2023. Kedua indikator ini mencerminkan pemulihan dan ekspansi ekonomi yang terus berkembang di Kabupaten Berau.

GAMBAR 1.3**Tren Perekonomian Kabupaten Berau Tahun 2020 – 2024**

Sumber : BPS, Berau 2024

Selanjutnya, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau menunjukkan tren yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, perekonomian Kabupaten Berau tumbuh sebesar 3,61 persen, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 3,35 persen. Pada tahun 2021, ekonomi Kabupaten Berau mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 5,36 persen. Namun, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan menjadi 3,95 persen. Meski demikian, pada tahun 2023, ekonomi Kabupaten Berau kembali menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,44 persen, mengindikasikan pemulihan yang stabil dan ekspansi ekonomi yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, meskipun mengalami beberapa fluktuasi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau tetap berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur, yang tercatat hanya 5,21 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2022, ekonomi Kalimantan Timur bahkan mengalami kenaikan yang lebih tinggi, mencapai 9,31 persen. Perekonomian Kabupaten Berau terus menunjukkan angka yang lebih baik meskipun ada tantangan global dan domestik.

Pada tahun 2023, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 51.280 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp 31.570 miliar. Kedua indikator PDRB ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja ekonomi yang signifikan, baik dari sisi harga yang berlaku maupun dari sisi ekonomi riil yang mencerminkan kondisi sektor-sektor produktif di Kabupaten Berau.

Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal dapat berpengaruh terhadap struktur perekonomian suatu daerah. Dari factor internal, perekonomian lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir di Kabupaten Berau sendiri. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

1.5. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
 - a). Pajak Daerah,
 - b). Retribusi Daerah,
 - c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - a). Transfer Pemerintah Pusat, dan
 - b). Transfer Antar Daerah.
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi:
 - a). Hibah,
 - b). Dana Darurat, dan

- c). Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Berau mengalami tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, meskipun tingkat capaian realisasi menunjukkan sedikit penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 2,86 triliun dan berhasil direalisasikan sebesar Rp 3,09 triliun, dengan tingkat capaian mencapai 108,16%. Tahun 2023, target meningkat signifikan menjadi Rp 4,38 triliun dan realisasi mencapai Rp 4,70 triliun, menghasilkan tingkat capaian sebesar 107,39%. Sementara itu, pada tahun 2024, target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) adalah sebesar Rp 6,11 triliun, dan realisasi pendapatan mencapai Rp 6,19 triliun dengan tingkat capaian sebesar 101,41%. Meskipun secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, capaian realisasi di tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023, yang sebelumnya mencapai 107,39%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan daerah terus meningkat, pencapaian terhadap target yang ditetapkan mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Tabel 1.56, sebagai berikut ;

TABEL 1.56

Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Pendapatan Daerah
Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 – 2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian
2022	2.855.997.021.850	3.089.141.958.432,92	108,16
2023	4.377.445.743.906	4.700.904.174.874,03	107,39
2024	6.107.982.827.838	3.194.026.383.086,08	101,41

Sumber : Bapenda Kabupaten Berau, 2024

Jika dilihat per-komponen penyusunnya, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Berau yang melebihi target tersebut disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2024 berhasil mencapai total realisasi sebesar 101,41 % dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh berbagai komponen pendapatan, dengan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatat tingkat capaian tertinggi sebesar 113,04%, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menggali sumber pendapatan daerah secara mandiri. Pendapatan Transfer, yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah dari pemerintah pusat maupun provinsi, tercatat memiliki tingkat realisasi sebesar 100%, lebih rendah dibandingkan PAD, yang mengindikasikan tidak adanya kendala dalam pencairan atau alokasi dana transfer.

Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar 255.98%, menunjukkan bahwa kontribusi dari sumber pendapatan ini masih relatif besar dibandingkan dengan komponen lainnya. Meskipun terdapat perbedaan tingkat capaian antar komponen pendapatan, secara keseluruhan, total realisasi pendapatan daerah tetap melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBD-P 2024. Berikut Tabel 1.57 pendapatan Daerah Kabupaten Berau;

TABEL 1.57
Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Pendapatan
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024

Komponen	Tingkat Capaian/ Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	113.04%
Pendapatan Transfer	100 %
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	255.98 %
Total	101,41%

Sumber: Bapenda Kabupaten Berau, 2024

Realisasi PAD yang menggembirakan ini disumbang oleh realisasi penerimaan yang melebihi target dari semua sub komponen penyusun PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2024 menunjukkan realisasi yang sangat baik dengan tingkat capaian mencapai 113,04% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini didorong oleh beberapa komponen utama, dengan Lain-lain PAD yang Sah mencatat tingkat capaian tertinggi sebesar 255.98%, menunjukkan bahwa sumber pendapatan ini mengalami lonjakan signifikan dan memberikan kontribusi besar terhadap total PAD. Pajak Daerah, sebagai salah satu sumber utama PAD, berhasil terealisasi sebesar 97,86%, mendekati target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang mencakup pendapatan dari investasi daerah, mencatat tingkat capaian sebesar 91,62%, menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pengelolaan aset daerah. Namun, realisasi Retribusi Daerah masih sangat rendah, hanya mencapai 16,37%, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan dari sektor ini. Meskipun terdapat ketimpangan antar komponen PAD, secara keseluruhan, kinerja pendapatan asli daerah Kabupaten Berau tetap menunjukkan hasil yang sangat positif dengan realisasi yang melebihi target. Berikut Tabel 1.58 pendapatan Daerah Kabupaten Berau;

TABEL 1.58
Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Berau Tahun 2024

Komponen	Tingkat Capaian/ Realisasi
Pajak Daerah	97,86%
Retribusi Daerah	16,37%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	91,62%
Lain-lain PAD yang Sah	269,60%
Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah	113.04 %

Sumber : Bapenda Kabupaten Berau, 2024

Pendapatan Transfer Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2024 mencatat tingkat capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Komponen utama dalam pendapatan transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, yang memiliki tingkat realisasi 100.74%, menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat belum sepenuhnya terealisasi sesuai target. Sementara itu, Pendapatan Transfer dari antar Daerah menunjukkan pencapaian, yakni 95,73%, yang berarti hampir seluruh dana transfer dari tingkat provinsi atau daerah lain telah diterima. Meskipun transfer dari pemerintah daerah cukup optimal, realisasi pendapatan transfer secara keseluruhan masih berada di bawah target yang ditetapkan, yang dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam pencairan dana atau perubahan kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi. Berikut Tabel 1.59 pendapatan transfer Kabupaten Berau;

TABEL 1.59
Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Pendapatan Transfer
Kabupaten Berau Tahun 2024

Komponen	Tingkat Capaian/ Realisasi (%)
Pendapatan Transfer Pem. Pusat	100.74%
Pendapatan Transfer Pem. Daerah	95,73%

Sumber : Bapenda Kabupaten Berau, 2024

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 mencatat tingkat capaian total sebesar 255.98% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berhasil mencapai 255.98%, menandakan bahwa target yang ditetapkan untuk kategori ini melebihi dari arget yang ditentukan. Adapun komponen capaian/realisasi lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut Tabel 1.60

TABEL 1.60
Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah
Kabupaten Berau Tahun 2024

Komponen	Tingkat Capaian/ Realisasi (%)
Lain-lain Pendapatan	0,00 %
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	108,20%
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Tambang	326.88

Sumber : Bapenda Kabupaten Berau, 2024

1.6. REALISASI BELANJA MENURUT BELANJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi target maupun realisasi, dengan capaian yang semakin membaik setiap tahunnya. Pada tahun 2022, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 3,40 triliun, namun realisasi yang berhasil dicapai hanya Rp 2,91 triliun, dengan tingkat capaian 82,68%. Pada Tahun berikutnya, yaitu 2023, target meningkat signifikan menjadi Rp 5,18 triliun, dan realisasi yang berhasil dicapai mencapai Rp 4,61 triliun, dengan tingkat capaian yang membaik menjadi 89,00%. Pada tahun 2024, target kembali meningkat menjadi Rp 6,11 triliun, dan realisasi berhasil melampaui target dengan pencapaian sebesar Rp 6,19 triliun, menghasilkan tingkat capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir, yaitu 101,41%. Peningkatan capaian dari tahun ke tahun ini menunjukkan adanya perbaikan dalam efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, dengan kinerja yang semakin optimal dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. Berikut Tabel 1.61 Belanja Daerah Kabupaten Berau;

TABEL 1.61

Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Belanja Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 - 2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
2022	3.395.298.000.000	2.906.895.452.391,91	82,68
2023	5.177.879.482.000	4.608.337.316.737,56	89,00
2024	6.999.194.000.000	6.364.742.344.858,84	90.94

Sumber : BPKAD Berau, 2024

Tabel 1.61 memperlihatkan Belanja Daerah Tahun 2024 didominasi oleh belanja Operasi, belanja modal dan terakhir belanja tidak terduga. Realisasi belanja daerah Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 6,364 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6,99 triliun. Dari empat komponen utama belanja, Belanja Operasi memiliki target Rp 2,406 triliun dan terealisasi sebesar Rp 2,084 triliun, dengan tingkat capaian 86.60%, menunjukkan bahwa sebagian besar belanja rutin telah terserap dengan baik meskipun belum mencapai target penuh. Belanja Modal, yang diarahkan untuk investasi aset dan infrastruktur, menunjukkan kinerja yang lebih optimal dengan realisasi Rp 3,809 triliun dari

target Rp 4,103 triliun, mencapai 92.81%. Namun, Belanja Tidak Terduga, yang biasanya dialokasikan untuk keperluan darurat atau kejadian tidak terprediksi, hanya terealisasi sebesar Rp 5,77 miliar dari target Rp 22,64 miliar, dengan tingkat capaian yang sangat rendah, yaitu 25,51%, menandakan bahwa sebagian besar anggaran ini tidak digunakan. Sementara itu, Belanja Transfer, yang merupakan alokasi dana kepada pihak ketiga seperti desa atau lembaga lainnya, memiliki tingkat capaian tertinggi, yaitu 99,95%, dengan realisasi sebesar Rp 465,702 miliar dari target Rp 465,928 miliar, menunjukkan hampir seluruh anggaran tersalurkan sesuai perencanaan. Berikut Tabel 1.62 realisasi Belanja Daerah Kabupaten Berau;

TABEL 1.62
Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2024

Komponen	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian/ Realisasi(%)
Belanja Operasi	2.406.630.766.545,02	2.84232.142.045,59	876.60
Belanja Modal	4.103.994.263.579,98	3.809.032.966.566,25	92.81
Belanja Tidak Terduga	22.640.327.875,00	5.774.799.583,00	25,51
Belanja Transfer	465.928.642.000,00	465.702.436.664,00	99,95
Total	6.999.194.000.000,00	6.364.742.344.858,84	90.94

Sumber : BPKAD Berau, 2024

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 2,084 triliun dari target Rp 2,406 triliun, dengan tingkat capaian 86.60%. Komponen terbesar dalam belanja ini adalah Belanja Pegawai, yang memiliki target Rp 1,152 triliun dan terealisasi sebesar Rp 1,038 triliun, dengan tingkat capaian 90,07%, mencerminkan penyerapan anggaran yang cukup baik untuk gaji dan tunjangan pegawai. Belanja Barang dan Jasa, yang digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, memiliki realisasi sebesar Rp 841.29 miliar dari target Rp 1,028 triliun, dengan tingkat capaian 81.78%, menunjukkan bahwa sebagian anggaran masih belum terserap sepenuhnya. Belanja Hibah, yang dialokasikan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan sosial, berhasil mencapai 90,30%, dengan realisasi Rp 189.599 miliar dari target Rp 209,96 miliar. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial menunjukkan tingkat realisasi tertinggi di

antara semua komponen, yaitu 99,47%, dengan realisasi Rp 15,17 miliar dari target Rp 15,255 miliar, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh anggaran bantuan sosial telah tersalurkan sesuai rencana. Secara keseluruhan, meskipun tingkat realisasi belanja operasi belum mencapai 100%, pencapaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran yang cukup baik dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan layanan publik. Berikut Tabel 1.63 realisasi Belanja Daerah Kabupaten Berau;

TABEL 1.63
Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Operasi
Kabupaten Berau Tahun 2024

Komponen Belanja Operasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian/Realisasi(%)
Belanja Pengawai	1.152.667.557.073,60	1.038.160.066.708,34	90,07
Belanja Barang dan Jasa	1.028.744.361.989,42	841.298.122.888,25	81,78
Belanja Hibah	209.963.847.482,00	189.599.952.449,00	90,30
Belanja Bantuan Sosial	15.255.000.000,00	15.174.000.000,00	99,47
Total	2.406.630.766.545,02	2.84.232.142.045,59	86,60

Sumber : BPKAD Berau, 2024

Realisasi Belanja Modal Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 3,809 triliun dari target Rp 4,103 triliun, dengan tingkat capaian 92,81%, menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam investasi aset dan pembangunan infrastruktur daerah. Dari berbagai komponen belanja modal, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi memiliki alokasi terbesar, dengan target Rp 3,215 triliun dan realisasi mencapai Rp 3,081 triliun, dengan tingkat capaian 95,85%, mencerminkan efektivitas yang tinggi dalam pembangunan infrastruktur transportasi dan irigasi. Belanja Modal Peralatan dan Mesin juga menunjukkan kinerja optimal dengan tingkat capaian 88,43%, terealisasi sebesar Rp 246,84 miliar dari target Rp 279,149 miliar. Sementara itu, Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp 472,715 miliar dari target Rp 580,117 miliar, dengan tingkat

capaian 81,49%, menandakan bahwa masih terdapat pekerjaan pembangunan yang belum selesai atau tertunda. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya memiliki tingkat capaian 23.37%, dengan realisasi Rp 1.700 miliar dari target Rp 7,278 miliar belum mencapai target sepenuhnya. Belanja Modal Aset Lainnya mencatat realisasi sebesar Rp 4,676 miliar dari target Rp 5,588 miliar, dengan tingkat capaian 83,69%. Namun, yang paling rendah penyerapannya adalah Belanja Modal Tanah, yang hanya mencapai 8,16%, dengan realisasi Rp 1,35 miliar dari target Rp 16,57 miliar, menunjukkan adanya kendala dalam pengadaan atau pembebasan lahan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat ketimpangan dalam beberapa komponen, tingkat realisasi belanja modal yang cukup tinggi menandakan bahwa mayoritas investasi daerah telah berjalan sesuai perencanaan. Berikut Tabel 1.64 realisasi Belanja Modal Daerah Kabupaten Berau;

TABEL 1.64
Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Modal
Kabupaten Berau Tahun 2024

Komponen	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian/ Realisasi(%)
Belanja Modal Tanah	16.566.742.200,00	1.352.415.463,00	8,16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.149.073.890,00	246.840.508.196,29	88.4
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	580.117.759.021,98	472.739.119.960,41	81,49
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.215.293.974.101,00	3.081.747.295.756,45	95,85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.278.373.017,00	1.700.742.650,00	23.37
Belanja Modal Aset Lainnya	5.588.341.350,00	4.676.717.909,00	83,69
Total	4.103.994.263.579,98	3.809.032.966.566,25	92.81

Sumber : BPKAD Berau, 2024

Belanja Tidak Terduga Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2024 memiliki target sebesar Rp 22,64 miliar, namun realisasi yang berhasil dicapai hanya Rp 5,77 miliar, dengan tingkat capaian 25,51%. Anggaran ini biasanya dialokasikan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam, keadaan darurat, atau kejadian luar biasa lainnya. Rendahnya realisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana tidak terpakai, kemungkinan karena minimnya kejadian yang memerlukan penggunaan dana darurat selama tahun anggaran berjalan. Meskipun serapan anggaran dalam kategori ini relatif rendah, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kondisi daerah dalam keadaan stabil dan tidak banyak mengalami kejadian tidak terduga yang memerlukan intervensi keuangan secara besar-besaran. Berikut Tabel 1.65 realisasi Belanja Tida Terduga Daerah Kabupaten Berau;

TABEL 1.65
Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Tidak Terduga
Kabupaten Berau Tahun 2024

Komponen	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian/Realisasi(%)
Belanja Tidak Terduga	22.640.327.875,00	5.774.799.583,00	25,51
Total	22.640.327.875,00	5.774.799.583,00	25,51

Sumber : BPKAD Berau, 2024

Belanja Transfer Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2024 memiliki target sebesar Rp 465,93 miliar dan berhasil direalisasikan hampir sepenuhnya dengan capaian 99,95%, yaitu sebesar Rp 465,70 miliar. Komponen utama dalam belanja transfer ini terdiri dari Belanja Bagi Hasil, yang ditargetkan sebesar Rp 11,10 miliar dan terealisasi sebesar Rp 11,02 miliar, dengan tingkat capaian 99,32%, menunjukkan bahwa hampir seluruh dana bagi hasil telah tersalurkan sesuai rencana. Selain itu, Belanja Bantuan Keuangan memiliki alokasi terbesar, yakni Rp 454,83 miliar, dengan realisasi mencapai Rp 454,68 miliar, atau 99,97%, mencerminkan efektivitas yang sangat tinggi dalam penyaluran bantuan keuangan kepada pihak terkait, seperti pemerintah desa atau lembaga lainnya. Secara keseluruhan, tingginya tingkat capaian dalam kategori belanja transfer ini

menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyalurkan dana secara optimal dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan penerima. Berikut Tabel 1.66 realisasi Belanja transfer Daerah Kabupaten Berau;

TABEL 1.66
Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Transfer
Kabupaten Berau Tahun 2024

Komponen	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian/ Realisasi(%)
Belanja Bagi Hasil	11.100.000.000,00	11.024.007.000,00	99,32
Belanja Bantuan Keuangan	454.828.642.000,00	454.678.429.664,00	99,97
Total	465.928.642.000,00	465.702.436.664,00	99,95

Sumber : BPKAD Berau, 2024

Analisis pemanfaatan belanja dapat juga dilihat berdasarkan distribusi alokasinya berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada tabel 1.67 terlihat bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mendapatkan porsi pengalokasian anggaran terbesar yaitu dengan total alokasi anggaran belanja sebesar Rp 5.146.565.927.474 dan realisasi mencapai Rp 4.753.228.372.024, dengan tingkat capaian 92,4%. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Belanja Daerah harus diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Selain itu, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah harus memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan tetap berpedoman pada standar pelayanan minimal.

Adapun realisasi alokasi belanja untuk urusan wajib pada pelayanan dasar adalah sebesar Rp 4.753.228.372.024 dari total alokasi anggaran belanja sebesar Rp 5.146.565.927.474, yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Alokasi terbesar diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (DPUPR), dengan anggaran Rp 3.703.277.617.844 dan realisasi Rp

3.460.820.407.899, dengan tingkat capaian 93,5%, menunjukkan serapan anggaran yang cukup optimal dalam bidang infrastruktur. Selanjutnya, Dinas Pendidikan memperoleh alokasi anggaran terbesar kedua, yakni Rp 608.674.000.714, dengan realisasi Rp 545.787.158.012, dan tingkat capaian 89,7%, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendukung layanan pendidikan. Dinas Kesehatan juga mendapatkan alokasi yang cukup besar, yaitu Rp 351.293.693.694, dengan realisasi Rp 314.864.099.936, mencapai 89,6%, menunjukkan prioritas pada sektor kesehatan masyarakat.

Selain itu, beberapa OPD lainnya juga menunjukkan tingkat capaian yang cukup tinggi, seperti Badan Kesbangpol dengan realisasi 95,0%, Dinas Sosial dengan 93,6%, dan DKPP dengan 93,0%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar belanja telah terserap dengan baik. Namun, terdapat OPD dengan serapan anggaran yang lebih rendah, seperti RSUD Dr. Abdul Rivai, yang hanya mencapai 86,6%, dengan realisasi Rp 235.693.102.639 dari alokasi Rp 272.153.520.110, yang mungkin disebabkan oleh efisiensi pengeluaran atau kendala dalam pelaksanaan program. Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan telah mencapai lebih dari 92%, dengan fokus utama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang sejalan dengan prioritas belanja daerah sesuai regulasi yang berlaku. Sisa anggaran yang belum terserap, sebesar Rp 393.337.555.450, masih dapat dioptimalkan dalam periode mendatang untuk meningkatkan efektivitas program pemerintahan. Berikut Tabel 1.67 Komponen Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kabupaten Berau, berikut;

TABEL 1.67

**Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Wajib Pelayanan
Dasar Kabupaten Berau Tahun 2024**

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	%	
1	Satpol PP	Rp 22.160.653.374	Rp 20.317.501.510	91,7	Rp 1.843.151.864
2	BPDB	Rp 31.827.451.714	Rp 27.933.406.456	87,8	Rp 3.894.045.258
3	DKPP	Rp 58.950.716.429	Rp 54.823.062.207	93,0	Rp 4.127.654.222
4	RSUD Dr.Abdul Rivai	Rp 272.153.520.110	Rp 235.693.102.639	86,6	Rp 36.460.417.471
5	Badan Kesbangpol	Rp 76.708.121.307	Rp 72.842.007.234	95,0	Rp 3.866.114.073
6	Dinas Kesehatan	Rp 351.293.693.694	Rp 314.864.099.936	89,6	Rp 36.429.593.758
7	DPUPR	Rp 3.703.277.617.844	Rp 3.460.820.407.899	93,5	Rp 242.457.209.945
8	Dinas Pendidikan	Rp 608.674.000.714	Rp 545.787.158.012	89,7	Rp 62.886.842.702
9	Dinas Sosial	Rp 21.520.152.288	Rp 20.147.626.131	93,6	Rp 1.372.526.157
Jumlah		Rp 5.146.565.927.474	Rp 4.753.228.372.024	92,4	Rp 393.337.555.450

Sumber : BPKAD Berau, 2024

Analisis pemanfaatan belanja daerah Kabupaten Berau juga dapat dilihat berdasarkan distribusi alokasi anggaran untuk berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan wajib non pelayanan dasar. Pada Tahun Anggaran 2024, total alokasi anggaran untuk 10 OPD dalam kategori ini adalah sebesar Rp 383.589.831.193, dengan realisasi mencapai Rp 353.736.862.779, atau 92,22% dari target yang telah ditetapkan. Sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp 29.852.968.414 menunjukkan adanya ruang untuk optimalisasi belanja daerah dalam beberapa sektor.

Dari segi realisasi anggaran, beberapa OPD memiliki tingkat serapan yang sangat baik, seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIB) dengan capaian 92,87%, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dengan 92,42%, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) dengan 91,36%, mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan layanan publik di sektor administrasi, komunikasi, dan kearsipan. Dinas Perhubungan (DISHUB) mencatat realisasi anggaran tertinggi di antara OPD

lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 148.263.043.475 dan realisasi Rp 139.636.763.874, mencapai 94,18%, yang menunjukkan alokasi anggaran sektor transportasi dan infrastruktur mobilitas daerah telah dimanfaatkan secara optimal.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) juga memiliki tingkat capaian yang cukup tinggi, yaitu 93,75%, dengan realisasi Rp 57.377.675.511 dari alokasi Rp 61.206.049.083, yang mencerminkan fokus pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan daerah. Namun, beberapa OPD memiliki tingkat serapan anggaran yang lebih rendah dibanding lainnya, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) yang hanya mencapai 87,94%, dengan realisasi Rp 16.192.899.520 dari target Rp 18.413.837.996, serta Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) dengan capaian 88,50%, mengindikasikan bahwa masih terdapat sisa anggaran yang cukup besar dalam program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan olahraga.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran untuk 10 OPD ini cukup optimal, dengan rata-rata 92,22%, menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan telah dijalankan dengan baik. Sisa anggaran yang masih ada sebesar Rp 29.852.968.414 dapat menjadi peluang untuk penguatan dan akselerasi program di sektor yang belum terserap secara maksimal guna mendukung pembangunan daerah secara lebih efektif. Berikut Tabel 1.68 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar Kabupaten Berau;

TABEL 1.68

Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar Kabupaten Berau Tahun 2024

No	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	%	
1.	DISDUKCAPIL	Rp13.335.988.477	Rp12.324.527.342	92,42	Rp1.011.461.135
2.	DPMPTSP	Rp16.272.945.758	Rp14.450.216.826	88,80	Rp1.822.728.932
3.	DISPORA	Rp33.178.320.051	Rp29.364.454.123	88,50	Rp3.813.865.928
4.	DISKOMINFO	Rp35.181.508.823	Rp32.140.682.656	91,36	Rp3.040.826.167

5.	DINASPANGAN	Rp14.849.536.893	Rp13.132.049.381	88,43	Rp1.717.487.512
6.	DLHK	Rp61.206.049.083	Rp57.377.675.511	93,75	Rp3.828.373.572
7.	DPMK	Rp18.413.837.996	Rp16.192.899.520	87,94	Rp2.220.938.476
8.	DPPKBP3A	Rp24.001.897.645	Rp21.578.231.715	89,90	Rp2.423.665.930
9.	DISPUSIB	Rp18.886.702.992	Rp17.539.361.831	92,87	Rp1.347.341.161
10.	DISHUB	Rp148.263.043.475	Rp139.636.763.874	94,18	Rp8.626.279.601
Total		Rp383.589.831.193	Rp353.736.862.779	92,22	Rp29.852.968.414

Sumber : BPKAD Berau, 2024

Analisis pemanfaatan belanja daerah Kabupaten Berau juga dapat ditinjau berdasarkan alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan pilihan yang menangani sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Pada Tahun Anggaran 2024, total alokasi anggaran untuk 7 OPD dalam kategori ini adalah sebesar Rp 211.667.785.178, dengan realisasi mencapai Rp 172.431.926.010, atau 81,46% dari target yang telah ditetapkan. Sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp 39.235.859.168 menunjukkan adanya ruang untuk optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam mendukung sektor ekonomi, perikanan, ketenagakerjaan, dan pertanian.

Beberapa OPD menunjukkan tingkat serapan anggaran yang cukup baik, seperti Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) dengan capaian 91,33%, serta Dinas Perikanan yang mencapai 90,97%, mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran dalam pengembangan sektor industri, perdagangan, dan perikanan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) juga menunjukkan capaian yang baik dengan 89,03%, menandakan bahwa program-program terkait tenaga kerja dan transmigrasi telah berjalan dengan cukup optimal.

Namun, terdapat beberapa OPD dengan tingkat serapan anggaran yang lebih rendah. Dinas Tanah (DISTANAH) mencatat realisasi terendah, yaitu hanya 33,94%, dengan realisasi Rp 9.527.267.808 dari alokasi Rp 28.070.930.406, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran untuk sektor pertanahan belum

terserap, kemungkinan karena adanya kendala dalam proses pengadaan lahan atau administrasi pertanahan. Dinas Perkebunan (DISBUN) juga memiliki tingkat capaian yang relatif rendah, yaitu 82,72%, dengan sisa anggaran Rp 3.259.103.849, mengindikasikan bahwa ada program yang belum berjalan secara maksimal di sektor perkebunan. Dinas Pertanian dan Peternakan (DISTANAK) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) memiliki tingkat realisasi yang cukup baik, masing-masing 88,60% dan 88,57%, namun masih memiliki sisa anggaran yang cukup besar, yaitu Rp 4.559.411.319 dan Rp 6.467.492.577, yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata di Kabupaten Berau. Berikut Tabel 1.69 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Wajib Pilihan Kabupaten Berau;

TABEL 1.69

Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Berau Tahun 2024

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	
1.	DISKOPERINDAG	Rp27.469.262.642	Rp25.087.830.315	91,33	Rp2.381.432.327
2.	DINAS PERIKANAN	Rp22.545.793.733	Rp20.509.144.702	90,97	Rp2.036.649.031
3.	DISBUN	Rp18.861.733.169	Rp15.602.629.320	82,72	Rp3.259.103.849
4.	DISTANAK	Rp39.994.436.914	Rp35.435.025.595	88,60	Rp4.559.411.319
5.	DISTANAH	Rp28.070.930.406	Rp9.527.267.808	33,94	Rp18.543.662.598
6.	DISNAKERTRAN	Rp18.129.392.051	Rp16.141.284.584	89,03	Rp1.988.107.467
7.	DISBUDPAR	Rp56.596.236.263	Rp50.128.743.686	88,57	Rp6.467.492.577
TOTAL		Rp211.667.785.178	Rp172.431.926.010	81,46	Rp39.235.859.168

Sumber : BPKAD Berau, 2024

Analisis pemanfaatan belanja daerah Kabupaten Berau juga dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk berbagai penyelenggaraan unsur pendukung yang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Pada Tahun Anggaran 2024, total alokasi anggaran untuk 19 OPD dalam kategori ini mencapai Rp 1.023.308.514.282, dengan realisasi sebesar Rp 929.803.350.409, atau 90,86% dari total anggaran yang tersedia. Sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp 93.505.163.873 menunjukkan adanya peluang untuk optimalisasi pemanfaatan anggaran guna meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan

daerah. Beberapa OPD menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang sangat baik, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan capaian 95,78%, merealisasikan Rp 499.911.809.872 dari target Rp 521.954.417.494, yang mencerminkan efektivitas tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (BAGIAN PROKOPIM) juga memiliki tingkat realisasi yang baik, mencapai 95,18%, serta Kantor Penghubung yang mencatat realisasi sebesar 94,19%, menunjukkan optimalisasi pemanfaatan anggaran di bidang administrasi pemerintahan dan komunikasi.

Di sisi lain, beberapa OPD memiliki tingkat serapan anggaran yang lebih rendah dibanding yang lain. Bagian Ekonomi memiliki tingkat capaian terendah, yaitu 46,56%, dengan realisasi Rp 1.019.759.002 dari target Rp 2.190.000.000, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran belum terserap secara optimal dalam program yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah. Bagian Tata Pemerintahan (BAGIAN TAPEM) juga memiliki tingkat capaian yang rendah, yaitu 71,31%, dengan sisa anggaran Rp 1.238.997.682, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana sepenuhnya. Selain itu, Sekretariat DPRD (SETWAN) memiliki alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu Rp 105.814.696.089, namun realisasi anggaran hanya mencapai 81,27%, meninggalkan sisa anggaran sebesar Rp 19.815.276.899, yang menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran masih dapat ditingkatkan. Bagian Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN KESRA) juga memiliki sisa anggaran yang cukup besar, yaitu Rp 14.978.586.395, dengan tingkat capaian 75,54%, mengindikasikan bahwa beberapa program kesejahteraan sosial belum terserap secara maksimal. Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran untuk 19 OPD ini mencapai 90,86%, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik. Berikut Tabel 1.70 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Pendukung Kabupaten Berau;

TABEL 1.70

Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Pendukung/
Penunjang dan Pengawasan Kabupaten Berau Tahun 2024

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	
1.	BKPSDPM	Rp25.371.260.116	Rp23.096.406.517	91,03	Rp2.274.853.599
2.	BAPENDA	Rp27.625.269.870	Rp23.673.270.843	85,69	Rp3.951.999.027
3.	BPKAD	Rp521.954.417.494	Rp499.911.809.872	95,78	Rp22.042.607.622
4.	BAPALITBANG	Rp25.985.209.869	Rp23.765.673.968	91,46	Rp2.219.535.901
5.	INSPEKTORAT	Rp23.717.551.368	Rp20.890.016.762	88,08	Rp2.827.534.606
6.	KECAMATAN (13)	Rp133.361.663.957	Rp122.233.302.739	91,66	Rp11.128.361.218
7.	KORPRI	Rp2.650.493.895	Rp1.794.985.000	67,72	Rp855.508.895
8.	SETWAN	Rp105.814.696.089	Rp85.999.419.190	81,27	Rp19.815.276.899
9.	BAGIAN TAPEM	Rp4.318.982.788	Rp3.079.985.106	71,31	Rp1.238.997.682
10.	BAGIAN HUKUM	Rp2.717.212.700	Rp2.377.138.763	87,48	Rp340.073.937
11.	BAGIAN KESRA	Rp61.237.082.500	Rp46.258.496.105	75,54	Rp14.978.586.395
12.	BAGIAN PEMBANGUNAN	Rp2.015.481.000	Rp1.758.397.620	87,24	Rp257.083.380
13.	BAGIAN EKONOMI	Rp2.190.000.000	Rp1.019.759.002	46,56	Rp1.170.240.998
14.	BAGIAN BPBJ	Rp3.899.649.806	Rp3.307.730.695	84,82	Rp591.919.111
15.	BAGIAN ORGANISASI	Rp2.024.109.400	Rp1.750.184.564	86,47	Rp273.924.836
16.	BAG.PERENCANAAN DAN KEU	Rp45.186.337.952	Rp41.307.522.269	91,42	Rp3.878.815.683
17.	BAGIAN PROKOPIM	Rp10.186.941.930	Rp9.695.453.314	95,18	Rp491.488.616
18.	BAGIAN UMUM	Rp21.487.519.228	Rp16.410.055.497	76,37	Rp5.077.463.731
19.	KANTOR PENGHUBUNG	Rp1.564.634.320	Rp1.473.742.583	94,19	Rp90.891.737
TOTAL		Rp1.023.308.514.282	Rp929.803.350.409	90,86	Rp93.505.163.873

Sumber : BPKAD Berau, 2024

1.7. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Pembiayaan APBD Kabupaten Berau terealisasi Rp 891.211.172.162,04 dari target sebesar Rp 891.211.172.162,04 atau 100%.

2. Pengeluaran pembiayaan. Adapun untuk Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 berupa Pembayaran Netto sebesar Rp 891.211.172.162 dari rencana sebesar Rp 891.211.172.162 atau 100%

TABEL 1.71

Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Pembiayaan dan Pengeluaran,
Penunjang, Pengawasan Kabupaten Berau Tahun 2024

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pembiayaan	Rp.800.427.865.251,52	Rp.891.211.172.162,00	Rp.891.211.172.162,04	100,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp.802.427.865.251,52	Rp.893.211.172.162,00	Rp.893.211.172.162,04	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp.893.211.172.162,04	0,00	Rp.673.343.725.955,38	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.2.000.000.000,00	Rp.2.000.000.000,00	Rp.2.000.000.000,00	100,00

Sumber : BPKAD Berau, 2024

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain, mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan penyempurnaan regulasi tentang pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang didasarkan pada identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien, maka sejalan dengan dinamika dan perkembangan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan upaya-upaya konkrit. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan, pada prinsipnya disusun berdasarkan anggaran kinerja. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kebijakan, dimungkinkan adanya penyesuaian dan perubahan terhadap anggaran program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah.

APBD diarahkan secara optimal sebagai katalisator pendanaan program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan memperhatikan asumsi-asumsi makro, perubahan fiskal, maupun acuan lain sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD.

APBD disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Bupati Berau Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pengelolaan APBD meliputi perencanaan keuangan (penganggaran) yang harus selaras dengan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan/realisasi anggaran, dan pelaporannya. Perencanaan keuangan setiap tahunnya dilakukan secara paralel dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang sama. Bagaimana pun, dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Sesuai dengan mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berlaku, APBD satu tahun telah ditetapkan paling lambat di akhir tahun sebelumnya, sehingga awal tahun berjalan, anggaran telah siap diimplementasikan untuk membiayai pembangunan. Selanjutnya, di tahun berjalan, ada mekanisme penyesuaian perencanaan maupun penganggaran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Karenanya, di setiap tahun pula terdapat Perubahan RKPD maupun Perubahan APBD.

2.1 ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN APBD

APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai derivasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kemudian dijabarkan melalui Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dalam prosesnya dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD yang pengelolaan keuangan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja yang efektif dan efisien pada tahun anggaran 2024 melalui:

- a) Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi tanpa harus menambah beban masyarakat, tetapi dengan cara penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi, mengantisipasi kebocoran, tunggakan dan pemberian sanksi atas penghindar pajak serta pemberian penghargaan (*reward*) kepada wajib pajak teladan.
- b) Peningkatan efisiensi dan efektifitas Belanja Daerah sesuai dengan prioritas.
- c) Prioritas anggaran diarahkan untuk membiayai program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
- d) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dan investasi swasta.
- e) Membangun kinerja Pemerintah Daerah yang bersih dan berwibawa dengan menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat mengancam transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- f) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah.
- g) Optimalisasi pengelolaan aset daerah/BUMD dan Dinas atau lembaga penghasil agar makin mampu menampilkan kinerja yang efisien, transparan serta mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi pendapatan daerah.

2.1.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan

Kebijakan pengelolaan pendapatan diformulasikan secara adaptif dengan mempertimbangkan proses pemulihan ekonomi dengan melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan, antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi yang diarahkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pemberian stimulus Pajak Daerah secara selektif dan terukur untuk menjaga keseimbangan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan Pajak Daerah;
- b) Intensifikasi pemungutan Pajak Daerah melalui penetapan tarif Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah non Pajak Daerah melalui ekstensifikasi Retribusi Daerah berupa penambahan objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah;
- d) Optimalisasi Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, berasal dari kontribusi Badan Usaha Milik Daerah;
- e) Optimalisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, utamanya yang berasal dari Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

2.1.2. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah menurut klasifikasi belanja,

terdiri dari:

- a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
- d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Kebijakan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada beberapa fokus, antara lain:

- a) Pelaksanaan Program Prioritas dalam rangka menstimulus Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Berau;
- b) Pemenuhan Hak Keuangan Bupati/Wakil Bupati;
- c) Pemenuhan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau;
- d) Pemenuhan Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- e) Pemenuhan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, termasuk didalamnya pemenuhan kewajiban atas kurang salur Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota.
- f) Optimalisasi Belanja Bantuan Keuangan untuk membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja maupun pelayanan publik;
- g) Pemenuhan Belanja Program/Kegiatan pada SKPD/Unit Kerja maupun antar SKPD/Unit Kerja dalam rangka optimalisasi Belanja Daerah;
- h) Pemenuhan anggaran belanja pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD);

- i) Penyesuaian penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) dan realokasi anggaran sesuai amanat peraturan perundang-undangan; dan
- j) Penajaman Belanja Program/Kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka mengakselerasi pencapaian indikator kinerja.

2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Daerah diarahkan untuk menutup Defisit Anggaran melalui Pembiayaan Netto yang berasal dari selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan, yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 Audited.
- b. Pengeluaran Pembiayaan berupa pembayaran pokok pinjaman sebelum jatuh tempo.

2.2 PENGELOLAAN PENJABARAN APBD

Perubahan Penjabaran APBD dapat dilakukan sepanjang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Akumulasi dari Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kemudian juga dilakukan langkah-langkah optimalisasi penerimaan dan penajaman pos-pos pengeluaran menyebabkan perubahan Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

2.2.1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan bertujuan menjelaskan bagaimana derajat otonomi fiskal, ruang fiskal, jenis pajak dan retribusi daerah, kaitannya terhadap penanggulangan kemiskinan. Sebelum menjelaskan komposisi pendapatan secara lebih rinci, analisis pendapatan dapat diawali dengan meninjau perkembangan pendapatan secara agregat dari tahun ke tahun, sesuai dengan periode kebutuhan penyusunan SPKD. Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
3. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kinerja Keuangan Daerah berupa Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada Tahun 2022 s/d 2024 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1 sebagai berikut;

TABEL 2.1
Kinerja Keuangan Daerah (Realisasi Pendapatan Daerah) Kabupaten Berau Tahun 2022 - 2024 (Milyar)

Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	299.529.844.588,90	286.669.630.661,78	343.480.236.165,39
Pendapatan Transfer	2.869.867.002.747,00	4.406.411.710.669,00	5.774.506.770.500,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	7.822.834.044,00	76.039.376.420,69

Sumber : Bapenda Kabupaten Berau, 2024

Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lainnya. Dalam kurun tiga tahun terakhir (2022-2024) pendapatan daerah konsisten meningkat. Analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah ini dapat dijelaskan antara lain.

1. Realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan pada tahun 2024 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 19,29% sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan dari Tahun 2022 yaitu sebesar 1.04%. dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,08 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan pada semua unsur pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, sedangkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan. Komponen Pendapatan Transfer masih menjadi sumber pendapatan terbesar, dengan rata-rata komposisi sekitar 31.05% persen dari total pendapatan daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19.82 persen. Semua unsur PAD menunjukkan tren positif, terutama pada komponen pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
3. Pendapatan Transfer mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 31.05 persen. Peningkatan ini terutama berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Dana Alokasi Umum (DAU), yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami fluktuasi, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Berau masih membutuhkan dukungan dari dana perimbangan untuk menyelenggarakan pemerintahan.
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 87.20 persen. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2024, yang mencapai Rp76.039 milyar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp7,82 miliar.

Lonjakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya tambahan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya atau sumber pendapatan lain yang baru masuk dalam laporan pendapatan daerah.

Kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah masih berasal dari Pendapatan Transfer, 31,05 persen dari total pendapatan. Meskipun kontribusinya masih dominan, nilai Dana Perimbangan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, Dana Perimbangan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2022, namun pada 2024 peningkatannya tidak sepesat sebelumnya. Sebaliknya, PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan signifikan, terutama pada tahun 2024, di mana Lain-Lain Pendapatan yang Sah melonjak drastis mencapai Rp76.039 Milyar. Hal ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Berau untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Tren peningkatan PAD juga menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya daerah, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak, serta optimalisasi penerimaan dari sektor lain yang sah. Dengan tren ini, diharapkan Kabupaten Berau dapat terus meningkatkan kapasitas fiskalnya secara mandiri di masa mendatang.

Pengelolaan Pendapatan Daerah berorientasi pada peningkatan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga dengan mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pendapatan Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, Pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif berkembangnya investasi di Kabupaten Berau.

Pemerintah Kabupaten Berau berupaya mengoptimalkan pendapatan dari Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 baik yang menyangkut upaya Pengelolaan Pendapatan Daerah,

- a. Penyempurnaan Peraturan Daerah, baik untuk Pendapatan Daerah maupun untuk Retribusi Daerah.
- b. Penyempurnaan Administrasi Pajak
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.
- d. Pemeliharaan sistem dan prosedur pelayanan
 - Pemeliharaan SIM-PBB (Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan).
 - Pemeliharaan Tapping Box
 - Pengadaan Aplikasi Retribusi Pemakaian Kekayaan (SIMREDA)
 - Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Hotel dan Restoran (SIMHORE)
 - Pemeliharaan Aplikasi Si WAJAR.
 - Pemberian Alat Pajak untuk Wajib Pajak di Pulau Derawan.
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
- f. Peningkatan Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya

- Melaksanakan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah
 - Melakukan pemeriksaan monitoring terhadap WP/WR
 - Membuat nota perhitungan Pajak dan Retribusi daerah serta membuat surat ketetapan pajak dan retribusi daerah
 - Melaksanakan pencatatan penerimaan pajak dan retribusi daerah
 - Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah
 - Penegakan hukum dibidang pajak dan retribusi dengan membentuk Tim Penegakan Hukum
- g. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan PBB dilakukan dengan penagihan kepada Wajib Pajak PBB, antara lain :
- Perluasan wajib pajak
 - Penyempurnaan tarif
 - Perluasan objek pajak
 - Kemudahan Pendaftaran PBB
 - Verifikasi kembali obyek pajak yang lama diatas 5 tahun.
 - Penerbitan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penghapusan Sanksi Adminstrasi PBB-P2.
- h. Pendapatan dari Pendapatan Transfer
- Klarifikasi rencana penerimaan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
 - Evaluasi penerimaan Pendapatan Transfer
 - Koordinasi dengan pihak Perusahaan yang masih aktif (Pemegang IUP).
- i. Pemberian Reward kepada wajib pajak dalam upaya sadar pajak.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Berau secara keseluruhan tercapai secara maksimal dari target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Pada tahun 2024, target pendapatan daerah sebesar Rp. 6.107.982.827.838,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.194.026.383.086,08, atau terealisasi sebesar 101,41%, melebihi dari target yang

ditetapkan. Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada Tahun 2024, target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 303.864.396.033,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 343.480.236.165,39, atau 113.04%. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah, realisasi yang tidak memenuhi target adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengrlolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sementara itu, Pendapatan Transfer dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.774.413.283.269,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.774.413.283.269,00 atau 100 %.

Komponen terbesar dalam Pendapatan Transfer adalah Dana Perimbangan, yang ditargetkan sebesar Rp. 4.813.515.450.269,00, tetapi hanya terealisasi sebesar Rp. 4.847.083.601.192,00 atau 100.70%. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) realisasinya mencapai 101.20% dari target. Untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, target yang ditetapkan sebesar Rp. 29.705.148.536,00 dapat direalisasikan jauh lebih tinggi, yaitu sebesar Rp. 76.039.376.420,69, atau mencapai 255.98% dari target. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Berau mulai tahun 2017 hingga 2024 berada pada angka yang relatif kecil, yang menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Kontribusi pendapatan yang paling tinggi adalah Dana Perimbangan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Namun, nilai PAD dan PAD lainnya yang sah mengalami kenaikan, yang menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Berau untuk tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Perbandingan Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 dan 2.3 sebagai berikut;

TABEL 2.2
Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN Th. 2023 (Rp)	REALISASI Th. 2023 (Rp)	PERSEN (%)
PENDAPATAN – LRA	4.377.445.743.906	4.700.904.174.874,03	107,39
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	259.170.865.751	287.131.921.005,02	110,79
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	90.000.000.000	93.382.456.473,00	103,76
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	11.465.689.150	14.933.983.944,00	130,25
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	17.619.185.180	16.119.182.280,09	91,49
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	140.085.991.421	162.696.298.307,93	116,14
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	4.065.914.334.955	4.406.411.710.669,00	108,37
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.326.684.252.800	3.672.777.328.714,00	110,40
- Dana Perimbangan			
- Dana Insentif Daerah (DID)			
- Dana Desa			
Pendapatan Transfer Antar Daerah	739.230.082.155	733.634.381.955,00	99,24
- Pendapatan Bagi Hasil	0	0	0
- Bantuan Keuangan	0	0	0
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.360.543.200	7.822.834.044.00	14,94
- Pendapatan Hibah	45.000.000.000	0,00	0
- Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan UU	7.360.543.200	7.360.543.200	100

Sumber : Bapenda Kabupaten Berau, 2024

TABEL 2.3
Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN Th. 2024 (Rp)	REALISASI Th. 2024 (Rp)	PERSEN (%)
PENDAPATAN - LRA	6.107.982.827.838,00	6.194.026.383.086,08	101,41
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	303.864.396.033,00	343.480.236.165,39	113.04
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	93.558.789.845,00	91.558.760.332,00	97,86
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	110.642.378.350,00	18.044.822.196,00	16,31
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	19.600.000.000,00	17.957.639.584,26	91,62
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	80.063.227.838,00	215.853.383.553,13	269,60
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.774.413.283.269,00	5.774.506.770.500,00	100
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.922.956.645.269,00	4.959.421.374.192,00	100,74
Dana Perimbangan	4.813.515.450.269,00	4.847.083.601.192,00	100,70
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4.005.399.285.269,00	4.053.383.565.000,00	101,20
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	589.047.874.000,00	588.991.002.328,00	99,99
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	82.281.122.000,00	80.364.880.846,00	97,67
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	136.787.169.000,00	124.344.153.018,00	90,90
- Dana Desa	95.468.642.000,00	95.468.642.000,00	100,00
- Insentif Fiskal	13.972.553.000,00	16.869.131.000,00	120,73
Pendapatan Transfer Antar Daerah	851.456.638.000,00	815.085.396.308,00	95,73
- Pendapatan Bagi Hasil	495.496.638.000,00	459.125.396.308,00	92,66
- Bantuan Keuangan	355.960.000.000,00	355.960.000.000,00	100,00
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.705.148.536,00	5.774.506.700.500,00	255,98
- Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	9.631.000.000,00	10.420.888.331,00	108,20
- Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan	20.074.148.536,00	65.618.488.089,69	326,88

Sumber : Bapenda Kabupaten Berau, 2024

Realisasi Pendapatan tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.194.026.383.086,03. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp. 4.700.904.174.874,03, maka terjadi peningkatan sebesar 31,76% atau sebesar Rp. 1.493.122.208.212,00

2.2.2. Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, ketersediaan Anggaran Belanja merupakan variabel yang sangat strategis, karena alokasi anggaran harus didasarkan atas prediksi penerimaan yang rasional. Besaran belanja daerah disusun dan berorientasi pada tujuan prioritas daerah, hal ini berarti bahwa setiap rupiah yang dialokasikan akan memuat tujuan-tujuan pada setiap rencana kerja daerah yang telah direncanakan sebelumnya. Serta pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja maka cukup mempengaruhi terhadap realisasi Belanja Daerah.

Pada dasarnya kebijakan umum dibidang pengelolaan belanja daerah berorientasi pada terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran belanja yang dapat mewujudkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam jangka pendek dan dapat menciptakan pendapatan baru (investasi) dalam jangka panjang.

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran;
- b. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;

- c. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan
- d. Analisis proyeksi belanja daerah.

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran belanja tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

TABEL 2.4
Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah
Kab Berau Tahun 2022- 2024 (Rp)

URAIAN	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
REALISASI BELANJA DAERAH	2.906.895.452.391,91	4.608.337.316.737,56	6.364.742.344.858,84
Belanja Operasi	1.574.647.666.072,91	1.819.011.710.892,56	2.084.232.142.042,59
Belanja Modal	1.028.531.224.206,00	2.345.617.541.442,00	3.809.032.966.566,25
Belanja Tak Terduga	2.795.846.813,00	1.826.837.315,00	5.774.799.583,00
Belanja Transfer	300.920.715.300,00	441.881.227.088,00	465.702.436.664,00

Sumber : BPKAD Berau, 2024

Analisis terhadap realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2021-2024, sebagai berikut :

1. Total belanja daerah mengalami kenaikan signifikan pada periode 2022-2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 49,16%. Belanja daerah meningkat dari Rp. 2,90 triliun di tahun 2022 menjadi Rp. 6,41 triliun di tahun 2024. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
2. Belanja Operasi dan Belanja Modal mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.
 - o Belanja Operasi meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 16,57%, dari Rp. 1,57 triliun di tahun 2022 menjadi Rp. 2,11 triliun di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya kebutuhan operasional daerah.
 - o Belanja Modal tumbuh lebih tinggi dengan rata-rata 67,58%, dari Rp. 1,02 triliun di tahun 2022 menjadi Rp. 3,82 triliun di tahun 2024,

menunjukkan fokus pemerintah pada investasi infrastruktur dan pengadaan aset.

3. Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer juga mengalami peningkatan.
 - o Belanja Tak Terduga meningkat drastis dari Rp. 2,79 miliar di tahun 2022 menjadi Rp. 5,77 miliar di tahun 2024, mencerminkan kesiapan daerah dalam menghadapi kondisi darurat.
 - o Belanja Transfer naik dari Rp. 300,92 miliar di tahun 2022 menjadi Rp. 465,70 miliar di tahun 2024, menandakan meningkatnya alokasi dana untuk berbagai pihak yang berhak menerima transfer daerah.
4. Peningkatan realisasi belanja daerah mencerminkan meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, optimalisasi anggaran sangat diperlukan agar kenaikan belanja dapat berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti honorarium tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan Anggaran belanja dengan total Rp. 5,17 triliun, yang terealisasi sebesar Rp. 4,60 triliun atau 89,00%. Pada tahun 2024, anggaran belanja meningkat lagi menjadi Rp. 6,99 triliun, dengan realisasi hingga tahun berjalan sebesar Rp.

6,364 triliun atau 90.94%. Peningkatan belanja daerah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Berau.

Belanja daerah Kabupaten Berau terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer. Belanja Operasi, yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial, mengalami peningkatan dari Rp. 2,13 triliun di tahun 2023 menjadi Rp. 2,40 triliun di tahun 2024, dengan tingkat realisasi masing-masing sebesar 85,13% dan 86.60%. Belanja Modal, yang mencakup investasi pada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, serta aset lainnya, juga meningkat signifikan dari Rp. 2,58 triliun di tahun 2023 menjadi Rp. 4,10 triliun di tahun 2024, dengan realisasi mencapai 90,79% dan 92.81%. Selain itu, Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari Rp. 15,52 miliar di tahun 2023 menjadi Rp. 22,64 miliar di tahun 2024, dengan realisasi meningkat dari 11,77% menjadi 25,51%. Kenaikan ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam menangani kejadian tidak terduga dan kondisi darurat. Belanja Transfer, yang terdiri dari transfer bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya serta desa, juga mengalami peningkatan dari Rp. 442,19 miliar di tahun 2023 menjadi Rp. 465,92 miliar di tahun 2024, dengan tingkat realisasi yang tetap tinggi di angka 99,95%.

Peningkatan belanja daerah dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Berau dalam memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan peningkatan belanja yang cukup besar, perlu adanya optimalisasi penggunaan anggaran agar realisasi belanja selaras dengan efektivitas pembangunan. Evaluasi terhadap belanja daerah juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Secara lebih rinci Target dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2022 dapat dilihat pada sebagai berikut :

TABEL 2.5

Anggaran Dan Realisasi Belanja Kabupaten Berau Tahun 2023-2024

URAIAN	ANGGARAN(Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN	ANGGARAN(Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN
	TAHUN 2023	TAHUN 2023	(%)	TAHUN 2024	TAHUN 2024	(%)
BELANJA DAERAH						
BELANJA OPERASI, MODAL DAN TAK TERDUGA	5.177.879.482.000	4.608.337.316.737,56	89,00	6.999.194.000.000,00	6.364.742.344.585,84	90,94
BELANJA OPERASI	2.136.652.416.585	1.819.011.710.892,56	85,13	2.406.630.766.545,02	2.084.232.142.045,59	87,74
Belanja Pegawai	950.561.904.928	812.871.161.542,95	85,51	1.152.667.557.073,60	1.038.160.066.708,34	90,07
Belanja Barang dan Jasa	993.395.407.456	834.592.894.715,61	84,01	1.028.744.361.989,42	841.298.122.888,25	81,78
Belanja Hibah	183.280.304.201	163.011.244.933,00	88,94	209.963.847.482,00	189.599.952.449,00	90,30
Belanja Bantuan Sosial	9.414.800.000	8.536.409.701,00	90,67	15.255.000.000,00	15.174.000.000,00	99,47
BELANJA MODAL	2.583.507.416.051	2.345.617.541.442,00	90,79	4.103.994.263.579,98	3.809.032.966.566,25	92,81
Belanja Modal Tanah	17.447.199.000	7.825.488.693,00	44,85	16.566.742.200,00	1.352.415.463,00	8,16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.524.561.369	172.966.458.500,00	92,24	279.149.073.890,00	246.840.508.196,29	88,46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	359.913.853.309	307.876.754.279,00	85,54	580.117.759.021,98	472.739.119.960,41	81,49
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.009.310.327.282	1.848.412.488.655,00	91,99	3.215.293.974.101,00	3.081.747.295.756,45	95,85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.311.475.091	8.536.351.315,00	91,68	7.278.373.017,00	1.700.742.650,00	23,37
BELANJA TAK TERDUGA	15.522.260.364	1.826.837.315,00	11,77	22.640.327.875,00	5.774.799.583,00	25,51
Belanja Tak Terduga	15.522.260.364	1.826.837.315,00	11,77	22.640.327.875,00	5.774.799.583,00	25,51
TRANSFER	442.197.389.000	441.881.227.088,00	99,93	465.928.642.000,00	465.702.436.664,00	99,95
TRANSFER BAGI HASIL	9.600.000.000	9.540.281.000,00	99,38	11.100.000.000,00	11.024.007.000,00	99,32
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.600.000.000	9.540.281.000,00	99,38	9.600.000.000,00	9.538.723.000,00	99,36
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	432.597.389.000	432.340.946.088,00	99,94	454.828.642.000,00	454.678.429.664,00	99,97
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	428.640.946.088,00	429.640.946.088,00	98,67	132.473.000,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	100,00	454.696.169.000,00	454.678.429.664,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Berau, 2024

Anggaran Belanja Operasi dan Modal serta Realisasi di Setiap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 serta Analisis terhadap realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2023-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Persentase realisasi total belanja mengalami kenaikan pada periode 2023-2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38.11%. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, serta Belanja Tak Terduga, yang terus meningkat guna mendukung program pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.
2. Rata-rata pertumbuhan Belanja Operasi pada periode 2023-2024 mencapai 14.58%. Komponen Belanja Pegawai memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan ini, dengan pertumbuhan mencapai 27,71%, yang mencerminkan peningkatan kebutuhan operasional pegawai daerah. Selain itu, Belanja Barang dan Jasa juga mengalami kenaikan sebesar 0.81%, seiring dengan peningkatan aktivitas pelayanan publik.
3. Rata-rata pertumbuhan Belanja Modal sebesar 62.39%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada infrastruktur daerah, termasuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang naik sebesar 60,20%, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tumbuh 30,95%. Peningkatan belanja modal ini menegaskan fokus pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur strategis.
4. Kenaikan porsi realisasi belanja daerah menggambarkan meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi anggaran agar kenaikan belanja dapat memberikan dampak maksimal terhadap pembangunan yang telah direncanakan, serta memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran dan Realisasi Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024, Pelaksanaan Urusan Wajib dan Pilihan serta Urusan Penunjang dapat dilihat pada tabel 2.6 dan 2.6a sebagai berikut;

TABEL 2.6

Anggaran Dan Realiasi Anggaran OPD Tahun 2024 Pelaksana Urusan Wajib dan Pilihan

No.	OPD/Bagian/Kecamatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	Persen (%)	
1	SATPOL PP	Rp22.160.653.374	Rp20.317.501.510	91,7	Rp1.843.151.864
2	BPDB	Rp31.827.451.714	Rp27.933.406.456	87,8	Rp3.894.045.258
3	DPKN	Rp58.950.716.429	Rp54.823.062.207	93,0	Rp4.127.654.222
4	RSUD dr.ABDUL RIVAI	Rp272.153.520.110	Rp235.693.102.639	86,6	Rp36.460.417.471
5	BADAN KESBANGPOL	Rp76.708.121.307	Rp72.842.007.234	95,0	Rp3.866.114.073
6	DINAS KESEHATAN	Rp351.293.693.694	Rp314.864.099.936	89,6	Rp36.429.593.758
7	DPUPR	Rp3.703.277.617.844	Rp3.460.820.407.899	93,5	Rp242.457.209.945
8	DINAS PENDIDIKAN	Rp608.674.000.714	Rp545.787.158.012	89,7	Rp62.886.842.702
9	DINAS SOSIAL	Rp21.520.152.288	Rp20.147.626.131	93,6	Rp1.372.526.157
10	DISDUKCAPIL	Rp13.335.988.477	Rp12.324.527.342	92,42	Rp1.011.461.135
11	DPMPTSP	Rp16.272.945.758	Rp14.450.216.826	88,80	Rp1.822.728.932
12	DISPORA	Rp33.178.320.051	Rp29.364.454.123	88,50	Rp3.813.865.928
13	DISKOMINFO	Rp35.181.508.823	Rp32.140.682.656	91,36	Rp3.040.826.167
14	DINASPANGAN	Rp14.849.536.893	Rp13.132.049.381	88,43	Rp1.717.487.512
15	DLHK	Rp61.206.049.083	Rp57.377.675.511	93,75	Rp3.828.373.572
16	DPMK	Rp18.413.837.996	Rp16.192.899.520	87,94	Rp2.220.938.476
17	DPPKBP3A	Rp24.001.897.645	Rp21.578.231.715	89,90	Rp2.423.665.930
18	DISPUSIB	Rp18.886.702.992	Rp17.539.361.831	92,87	Rp1.347.341.161
19	DISHUB	Rp148.263.043.475	Rp139.636.763.874	94,18	Rp8.626.279.601
20	DISKOPERINDAG	Rp27.469.262.642	Rp25.087.830.315	91,33	Rp2.381.432.327
21	DINAS PERIKANAN	Rp22.545.793.733	Rp20.509.144.702	90,97	Rp2.036.649.031
22	DISBUN	Rp18.861.733.169	Rp15.602.629.320	82,72	Rp3.259.103.849

23	DISTANAK	Rp39.994.436.914	Rp35.435.025.595	88,60	Rp4.559.411.319
24	DISTANAH	Rp28.070.930.406	Rp9.527.267.808	33,94	Rp18.543.662.598
25	DISNAKERTRAN	Rp18.129.392.051	Rp16.141.284.584	89,03	Rp1.988.107.467
26	DISBUDPAR	Rp56.596.236.263	Rp50.128.743.686	88,57	Rp6.467.492.577
JUMLAH		RP5.741.823.543.845	RP5.279.397.160.813	91,95	RP462.426.383.032

Sumber : BPKAD Berau, 2024

TABEL 2.7

Anggaran Dan Realiasi Anggaran OPD Tahun 2024 Pelaksana Urusan Penunjang

No.	OPD/Bagian/Kecamatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	Persen(%)	
1	BKPSDPM	Rp25.371.260.116	Rp23.096.406.517	91,03	Rp2.274.853.599
2	BAPENDA	Rp27.625.269.870	Rp23.673.270.843	85,69	Rp3.951.999.027
3	BPKAD	Rp521.954.417.494	Rp499.911.809.872	95,78	Rp22.042.607.622
4	BAPALITBANG	Rp25.985.209.869	Rp23.765.673.968	91,46	Rp2.219.535.901
5	INSPEKTORAT	Rp23.717.551.368	Rp20.890.016.762	88,08	Rp2.827.534.606
6	TANJUNG REDEB	Rp35.392.213.988	Rp32.302.602.193	91,27	Rp3.089.611.795
7	SAMBALIUNG	Rp9.150.045.979	Rp8.758.020.961	95,72	Rp392.025.018
8	TABALAR	Rp6.778.239.210	Rp6.275.586.009	92,58	Rp502.653.201
9	GUNUNG TABUR	Rp11.979.353.730	Rp11.077.623.347	92,47	Rp901.730.383
10	BIATAN	Rp5.477.252.487	Rp4.939.473.058	90,18	Rp537.779.429
11	TALISAYAN	Rp7.756.941.675	Rp7.082.940.973	91,31	Rp674.000.702
12	PULAU DERAHAN	Rp6.031.022.725	Rp5.047.253.817	83,69	Rp983.768.908
13	BATU PUTIH	Rp5.270.963.188	Rp5.093.367.276	96,63	Rp177.595.912
14	BIDUK-BIDUK	Rp7.170.391.719	Rp6.699.636.557	93,43	Rp470.755.162
15	TELUK BAYUR	Rp15.612.373.550	Rp14.601.139.641	93,52	Rp1.011.233.909
16	MARATUA	Rp9.006.264.493	Rp7.812.354.520	86,74	Rp1.193.909.973

No.	OPD/Bagian/Kecamatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	Persen(%)	
17	SEGAH	Rp7.216.511.150	Rp6.403.781.879	88,74	Rp812.729.271
18	KELAY	Rp6.520.090.063	Rp6.139.522.508	94,16	Rp380.567.555
19	KORPRI	Rp2.650.493.895	Rp1.794.985.000	67,72	Rp855.508.895
20	SETWAN	Rp105.814.696.089	Rp85.999.419.190	81,27	Rp19.815.276.899
21	BAGIAN TAPEM	Rp4.318.982.788	Rp3.079.985.106	71,31	Rp1.238.997.682
22	BAGIAN HUKUM	Rp2.717.212.700	Rp2.377.138.763	87,48	Rp340.073.937
23	BAGIAN KESRA	Rp61.237.082.500	Rp46.258.496.105	75,54	Rp14.978.586.395
24	BAGIAN PEMBANGUNAN	Rp2.015.481.000	Rp1.758.397.620	87,24	Rp257.083.380
25	BAGIAN EKONOMI	Rp2.190.000.000	Rp1.019.759.002	46,56	Rp1.170.240.998
26	BAGIAN BPBJ	Rp3.899.649.806	Rp3.307.730.695	84,82	Rp591.919.111
27	BAGIAN ORGANISASI	Rp2.024.109.400	Rp1.750.184.564	86,47	Rp273.924.836
28	BAG.PERENCANAAN DAN KEU	Rp45.186.337.952	Rp41.307.522.269	91,42	Rp3.878.815.683
29	BAGIAN PROKOPIM	Rp10.186.941.930	Rp9.695.453.314	95,18	Rp491.488.616
30	BAGIAN UMUM	Rp21.487.519.228	Rp16.410.055.497	76,37	Rp5.077.463.731
31	KANTOR PENGHUBUNG	Rp1.564.634.320	Rp1.473.742.583	94,19	Rp90.891.737
JUMLAH		RP1.023.308.514.282	RP929.803.350.409	90,86	RP93.505.163.873

Sumber : BPKAD Berau, 2024

2.2.3. Pengelolaan Anggaran Pembiayaan

Dari data tabel 2.7 di bawah ini dapat disimpulkan bahwa komposisi defisit anggaran belanja daerah Kabupaten Berau seluruhnya ditutup dari Sumber Pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 100 persen.

SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya penghematan yang dilakukan oleh Kabupaten Berau dengan menekan angka belanja operasi Belanja Modal, Belanja tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Pada tahun 2023, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 802,42 miliar dan terealisasi sepenuhnya 100%. Seluruh penerimaan ini berasal dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2024, penerimaan pembiayaan meningkat menjadi Rp. 893,21 miliar, dengan realisasi juga mencapai 100%. Peningkatan penerimaan pembiayaan ini mencerminkan adanya sisa anggaran tahun sebelumnya yang lebih besar, yang kemudian dialokasikan kembali dalam APBD tahun berjalan. Pengeluaran pembiayaan tetap konsisten dalam dua tahun terakhir, yaitu sebesar Rp. 2 miliar setiap tahunnya, yang seluruhnya digunakan untuk penyertaan modal daerah kepada BUMD, dengan tingkat realisasi 100%. Tidak terdapat pengeluaran investasi non-permanen lainnya, sehingga pengeluaran pembiayaan hanya dialokasikan untuk investasi dalam BUMD. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam strategi investasi daerah untuk memperkuat perekonomian lokal melalui penguatan modal di BUMD.

Pada tahun 2023, Kabupaten Berau mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 893,21 miliar, yang berasal dari penghematan belanja dan pendapatan daerah yang melebihi target. Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi SiLPA turun menjadi Rp. 673,34 miliar. Penurunan, angka ini tetap menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan optimalisasi belanja daerah.

Dengan adanya pengelolaan anggaran yang efektif, Kabupaten Berau dapat mempertahankan stabilitas fiskal serta mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik secara optimal. Adapun SILPA Daerah Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :



TABEL 2.8
SiLPA Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI TAHUN 2023 (Rp)	PERSEN (%)	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024 (Rp)	PERSEN (%)
PEMBIAYAAN	802.427.865.251,52	802.427.865.251,52	100 %	891.211.172.162,00	891.211.172.162,04	100,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	802.427.865.251,52	802.427.865.251,52	100 %	893.211.172.162,00	893.211.172.162,04	100,00
Penggunaan SiLPA	802.427.865.251,52	802.427.865.251,52	100 %	893.211.172.162,00	893.211.172.162,04	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0
Penyertaan modal daerah pada BUMD	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	893.211.172.162,04	0	0,00	673.343.725.955,38	0,00

Sumber : BPKAD Berau, 2024

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bab ini memuat capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024, kebijakan Strategis yang ditetapkan pemerintah dan tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah.

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1. URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Berau pada tahun 2024, Tersaji pada tabel 3.1.dan 3.2. adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1

Jumlah OPD Penyelenggara Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Berau Tahun 2024

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)
			Rp	Persen	
1.	Satpol PP	22.160.653.374	20.317.501.510	91,68	1.843.151.864
2.	BPDB	31.827.451.714	27.933.406.456	87,77	3.894.045.258
3.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	58.950.716.429	54.823.062.207	93,00	4.127.654.222
4.	RSUD Dr.Abdul Rivai	272.153.520.110	235.693.102.639	86,60	36.460.417.471
5.	Badan Kesbangpol	76.708.121.307	72.842.007.234	94,96	3.866.114.073
6.	Dinas Kesehatan	351.293.693.694	314.864.099.936	89,63	36.429.593.758
7.	DPUPR	3.703.277.617.844	3.460.820.407.899	93,45	242.457.209.945
8.	Dinas Pendidikan	608.674.000.714	545.787.158.012	89,67	62.886.842.702
9.	Dinas Sosial	21.520.152.288	20.147.626.131	93,62	1.372.526.157
Jumlah		5.146.565.927.474	4.753.228.372.024	92,36	393.337.555.450

TABEL 3.2
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN PADA OPD PENYELENGGARA URUSAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.872.601.174	9.569.500.665	100%	88%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	379.238.100	267.121.180		70%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	68.180.000	49.345.743	4	72%	Dokumen	Masih adanya Kontribusi Untuk BIMTEK yang belum terealisasi karena kekurangan biaya perjalanan dinas	Pada penganggaran berikutnya akan di sesuaikan antara perdin dan biaya bimtek
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	140.909.300	109.898.437	12	78%	Laporan	Adanya Rencana Pelaksanaan rapat Evaluasi Renja di Kecamatan pesisir yang dicancel karena faktor cuaca	Kedepan pelaksanaan akan di optimalkan sesuai dengan ketersediaan anggaran.
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.148.800	107.877.000	12	63%	Laporan	Adanya Pengurangan	Kedepan pelaksanaan akan

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								kuota peserta pawai dan penjaga stand Expo 2024	di optimalkan sesuai dengan ketersediaan anggaran.
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.439.328.876	7.630.454.461		90%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.225.468.876	7.432.294.461	50	90%	Orang/Bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	213.860.000	198.160.000	12	93%	Dokumen		
		Adminstrasi Kepegawaian perangkat Daerah	218.891.298	172.767.675		79%			
		Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	134.891.298	128.058.000	4	95%	Paket		
		Bimbingan Teknis Implementsi Peraturan Perundang-undangan	84.000.000	44.709.675	6	53%	Orang	Masih adanya Kontribusi Untuk BIMTEK yang belum terealisasi karena kekurangan biaya perjalanan dinas	Pada penganggaran berikutnya akan di sesuaikan antar perdin dan biaya bimtek
		Adminstrasi Umum perangkat Daerah	707.245.800	587.669.037		83%			
		Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.939.600	11.990.000	1	55%	Paket		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.860.000	60.624.000	7	93%	Paket		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	239.960.000	156.811.000	6	65%	Paket	Terdapat Penghematan	Kedepan akan dianggarkan

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								pada anggaran biaya Logistik Kantor	proporsional sesuai pemakaian tahun sebelumnya
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.986.200	9.376.200	4	41%	Paket	Terdapat Penghematan pada anggaran biaya cetak dan penggandaan	Kedepan akan dianggarkan proporsional sesuai pemakaian tahun sebelumnya
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	5.145.000	12	51%	Dokumen	Terdapat pengurangan belanja berlangganan surat kabar	Kedepan akan dianggarkan proporsional sesuai pemakaian tahun sebelumnya
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.500.000	343.722.837	100	99%	Laporan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.344.000	63.500.000		85%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.344.000	63.500.000	28	85%	Unit		
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.825.100	443.964.539		82%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.486.000	3.484.000	249	100%	Laporan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.789.100	121.669.683	12	59%	Laporan	Terdapat penghematan pada pemakaian Listrik, Air dan Wifi	Kedepan akan dianggarkan proporsional sesuai pemakaian tahun sebelumnya
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.550.000	318.810.856	12	96%	Orang/Bulan		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.728.000	404.023.773		79%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162.400.000	105.304.273	22	65%	Unit	Terdapat Penghematan pada anggaran pemeliharaan kendaraan dan bahan bakar kendaraan Jabatan	Kedepan akan dianggarkan proporsional sesuai pemakaian tahun sebelumnya
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.816.000	201.232.500	18	84%	Unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	19.660.000	8.050.000	50	41%	Unit	Terdapat penghematan pada anggaran Pemeliharaan alat dan mesin	Kedepan akan dianggarkan proporsional sesuai pemakaian tahun sebelumnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.852.000	89.437.000	2	100%	Unit		
	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.288.052.200	10.748.000.845	100%	95%			
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	2.515.514.200	2.380.049.704		95%			

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaen/Kota	1.342.940.000	1.335.895.012	13	99%	Dokumen		
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	124.940.000	121.932.500	13	98%	Dokumen		
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	442.000.000	421.116.060	50	95%	Orang		
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	205.422.000	165.711.434	5	81%	Dokumen		
		Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	300.408.800	275.661.085	20	92%	Laporan		
		Penyediaan Layanan dalam Dampak Penegakan Perda dan Perkada	99.803.400	59.733.613	10	60%	Laporan	Pada tahun Anggaran 2024 Tidak ada Dampak	Mengedepankan Pendekatan Secara HUMANIS Dalam Layanan Dampak

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Penegakan Perda dan Perkada Yang Mengakibatkan Ganti Rugi (Pengobatan)	Penegakan Perda dan Perkada
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8.634.438.000	8.257.930.861		96%			
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	315.806.000	166.240.522	9	53%	Laporan	Dengan Adanya Regulasi Baru, Terkait Penerbitan SK TIM Sehingga Tim Tidak Dapat Berjalan Dengan Maksimal	Pengusulan SK TIM Akan Dilakukan Diawal Tahun
		Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8.318.632.000	8.091.690.339	12	97%	Laporan		
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	138.100.000	110.020.280		80%			
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	138.100.000	110.020.280	3	80%	Laporan		
JUMLAH			22.160.653.374	20.317.501.510	100	91,68	Persen		
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	15.388.517.564	12.165.005.492					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		DAERAH KABUPATEN/ KOTA							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.350.000	318.594.683					
		Penyusunan Dokument Perencanaan Perangkat Daerah	85.000.000	82.622.656	4	4	dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.200.000	27.503.900	5	5	Laporan		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222.150.000	208.468.127	15	15	dokumen, ot		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.797.613.676	9.133.830.720					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.597.170.176	6.481.881.841	12	12	Bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.170.443.500	2.627.553.559	4	4	Orang/ dokumen		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	30.000.000	24.395.320	1.000	900	Dokumen		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65.000.000	59.041.863					
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	65.000.000	59.041.863	5	5	Unit/ laporan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	570.819.000	536.680.913					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	80.819.000	78.711.138	100	100	Set/paket		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan fungsinya	490.000.000	457.969.775	20	19	Orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	550.502.588	501.045.905					
		Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.785.000	9.785.000	4	4	Gedung		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.718.500	66.598.900	23	22	Paket		
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	17.999.488	16.959.500	7	7	Ruangan		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000	88.262.000	2	2	Paket		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.000.000	52.000.000	2	2	Paket		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	640.000	1	1	Dokumen	Terbatasnya waktu karena tagihan dari pihak majala diakhir tahun sedangkan dana up pada saat itu sudah nihil disetor ke kasda dan akan dimasukan daftar utangyang akan	perlunya pengkajian dan perhatian sehingga target bisa tercapai maksimal

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								dibayarkandi tahun 2025	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.999.600	15.193.500	2	2	Laporan	Jumlah tamu yang datang terbatas dan tidak terlayani dengan maksimal hingga akhir tahun hanya tim dari audit inspektorat yang datang	perlunya pelayanan maksimal sehingga target bisa tercapai
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.000.000	251.607.005	20	19	Laporan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	251.233.800	160.457.687					
		Pengadaan Mebel	14.909.700	14.230.000	1	1	Set		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	79.624.100	69.164.100	1	1	Unit		
		Pengadaan Aset Tetap Lainnay (SAPRAS/DH-DR)	156.700.000	77.063.587	4	3	Unit	Waktu pengadaan terlalu singkat karena dana DBH-DR di sahskan di bulan september	perlunya pengesahan diwaktu yang senggang/panjang sehingga pengadaan berjalan sesuai target yang diinginkan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	378.498.500	327.177.821					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.996.000	1	1	Lembar		
		Penyedia Jasa komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	238.498.500	187.231.821	12	12	Bulan		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	18.500.000	18.450.000	15	15	Laporan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.500.000	118.500.000	4	4	Laporan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.437.500.000	1.128.175.900					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak an Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	1.387.500.000	1.091.337.900	60	50	Unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	25.000.000	11.933.000	100	50	Unit/jenis	pemeliharaan sudah terlaksana di murni hingga diakhir tahun belum/kurangn ya permohonan dari bidang terkait pemeliharaan dan perbaikan	perunya evaluasi permohonan pemeliharaan/perbaikan sehingga anggaran kedepannya lebih maksimal tercapai
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	25.000.000	24.905.000	1	1	Unit		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.116.695.100	4.626.056.670					
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	899.727.000	845.246.320					
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota	500.000.000	474.521.777	5	5	Dokumen		
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	399.727.000	370.724.543	11064	10564	Orang		
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.582.013.400	1.492.089.202					
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana kabupaten/kota	315.000.000	300.747.161	20	20	kawasan		
		Penyediaan peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	14.999.900	-	20	0	unit	harga yang tersedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diinginkan	harga yang terbaik dengan kualitas terbaik perlu dicermati ulang kedepan. sehingga peralatan perlindungan aman bagi pengguna saat dilapangan dalam pencarian dan pertolongan (evakuasi korban)
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1.082.253.500	1.036.908.787	20	19	laporan		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	169.760.000	154.433.254	3	3	Kegiatan		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.411.305.200	2.201.805.640					
		Respon Cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	20.000.000	-	1	0	Laporan	Tidak terjadi kejadian luar biasa penyalit/wabah zoonosis prioritas sehingga anggaran tidak terealisasi	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kota	927.036.100	910.974.898	3	3	Dokumen		
		Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	749.509.100	727.869.579	11064	11064	orang		
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/kota	64.760.000	64.760.000	11064	1164	orang		
		Aktivasi Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana	650.000.000	498.201.163	1	1	laporan	1. Aktivasi Komando anggaran Khusus penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	kedepannya perlu keluasaan waktu dalam pelaksanaan dan terpenuhinya SDM baik kuantitas dan kualitasnya
								2. Anggran tersebut baru turun bulan	

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								September 2024 sementara penanganan Karhutla sebelumnya sudah dilaksanakan akan tetapi tidak bisa dibayarkan mengingat tanggal Pengesahan	
								3. Limit waktu yang hanya 3 Bulan	
		Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana	223.649.500	86.915.508					
		Penyusunan Regulasi Penanganan Kabupaten/Kota	75.000.000	35.709.108	2	2	Dokumen		
		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	148.649.500	51.206.400	1	1	Dokumen		
		3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	11.322.239.050	11.142.344.294					
		Pencegahan, Pengendalain, Pemadaman, Penyelamatan dan	10.759.909.050	10.669.890.435					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	10.149.299.050	10.075.884.716	10	9	Jenis		
		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	610.610.000	594.005.719	100	100	%		
		Intraksi Peralatan Proteksi Kebakaran	84.760.000	47.288.250					
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi kebakaran	34.880.000	18.727.000	15	10	Gedung	Waktu pelaksanaan terlalu singkat karena dana DBH-DR di sahkan di bulan september, serta terbatasnya SDM	kedepannya perlu keluasaan waktu dalam pelaksanaan dan terpenuhinya SDM baik kuantitas dan kualitasnya
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran	39.880.000	23.025.000	15	12	Paket	Waktu pelaksanaan terlalu singkat karena dana DBH-DR di sahkan di bulan september, serta terbatasnya SDM	kedepannya perlu keluasaan waktu dalam pelaksanaan dan terpenuhinya SDM baik kuantitas dan kualitasnya
		Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian	10.000.000	5.536.250	25	20	Dokumen	Waktu pelaksanaan terlalu singkat karena dana	kedepannya perlu keluasaan waktu dalam pelaksanaan dan terpenuhinya

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		penyebab kejadian kebakaran						DBH-DR di sahan di bulan september, serta terbatasnya SDM	SDM baik kuantitas dan kualitasnya
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	477.570.000	425.165.609					
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	250.000.000	232.666.705	10	10	Kali		
		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	227.570.000	192.498.904	15	10	gedung		
JUMLAH			31.827.451.714	27.933.406.456	100	87,77	Persen		
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.453.151.130	8.715.697.359					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	24.913.785					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	24.913.785	4	4	Dokumen	Dapat terlaksana dengan baik tanpa masalah yang berarti	-

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.499.800	4.102.500	4	4	Dok	Walaupun Realisasi Keuangan hanya 32,82 % tetapi target fisik tercapai 100 %, hal ini merupakan efisiensi	
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	215.200.000	205.074.092	12	12	Dok		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.866.434.608	6.367.123.546					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.603.274.608	6.103.963.546	384	384	Org/Bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	263.160.000	263.160.000	12	12	Bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	187.550.000	173.441.262		9			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	75.050.000	75.050.000	99	99	Stel		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	112.500.000	98.391.262	10	9	orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	528.843.400	467.676.125					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	6	6	jenis		
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	84.996.400	83.904.800	8	8	unit		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan peralatan rumah tangga	13.982.000	8.432.000	8	8	unit	Secara fisik terealisasi 100%, sisa dana hampir 40% adalah merupakan efisiensi	
		Penyediaan bahan logistik kantor	68.613.000	60.498.000	12	12	bulan		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.252.000	12.362.000	5000	4400	lembar	target yang benar adalah 5000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000	12.960.000	1,44	1400	eksemplar		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	305.000.000	281.519.325	26	25	kali		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	774.025.127	689.325.058					
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas jabatan	495.200.000	412.900.000	6	6	Unit		
		Pengadaan Mebel	278.825.127	276.425.058	4	4	Set		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.397.900	408.713.727					
		Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000	2.100.000	1,2	1,2	lembar		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	191.997.900	157.924.243	12	12	bulan		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	261.900.000	248.689.484	72	72	orang		
		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	614.900.095	584.503.856					
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	165.000.000	136.638.169	17	17	unit		
		Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	24.998.300	24.498.300	36	36	unit		
		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	424.901.795	423.367.387	1	1	unit		
		2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	411.890.000	403.161.695					
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	303.270.000	296.416.046					
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	303.270.000	296.416.046	1	1	laporan		
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	108.620.000	106.745.649					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	108.620.000	106.745.649	5	5	laporan		
		3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.868.175.999	3.364.587.869					
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	260.000.000	155.168.049					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	260.000.000	155.168.049	50	41	laporan	Kegiatan ini secara fisik terealisasi sebesar 82%, secara keuangan hampir 60%, karena sebagian besar adalah dana untuk perjalanan dinas, sehingga hal ini merupakan efisiensi karena sebagian rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi dilaksanakan secara daring	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	300.000.000	250.515.162					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha							
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	300.000.000	250.515.162	4	4	dokumen		
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.308.175.999	2.958.904.658					
		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	3.308.175.999	2.958.904.658	5	5	dokumen		
		4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	9.833.000.000	9.780.666.190					
		Pencegahan Perumahan dan Kawasaan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	9.833.000.000	9.780.666.190					
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	9.833.000.000	9.780.666.191	321	321	unit rumah		
		5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA	33.156.799.500	32.349.772.503					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	33.156.799.500	32.349.772.503					
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	210.119.500	200.600.044	1	1	dokumen		
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	32.696.680.000	31.910.471.470	176	175	paket		
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	250.000.000	238.700.989	15	15	laporan		
Jumlah			58.723.016.629	54.613.885.616	100	93	Persen		
4.	RSUD dr.ABDUL RIVAI	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	259.169.838.370	223.889.402.570	100%	85%	%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.729.000	95.612.504					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.730.000	35.149.300	5	5	dok		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.999.000	60.463.204	5	5	dok	Pengembalian dana kegiatan (silpa) karena standar harga di DPA tinggi	Penyesuaian standar harga kedepannya
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.663.361.552	82.131.221.533					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90.364.761.552	81.908.561.533	12	12	bln		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	298.600.000	222.660.000	12	12	bln	(Silpa), Honor diambil Sesuai Standar Pagu, Sehingga Banyak Sisa Anggaran	Menyesuaikan Standar Pagu
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	682.740.000	622.654.760					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	682.740.000	622.654.760	80	80	org		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	547.990.900	450.409.680					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.990.900	154.187.000	12	12	bln		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.000.000	28.550.000	12	12	bln		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	184.730.000	12	12	bln		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	82.942.680	12	12	bln	Banyak Kegiatan Koordinasi Yang dipending yang Sudah	Merencanakan Kegiatan Lebih Teliti

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								direncanakan atau di jadwalkan,	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.276.660	111.980.000					
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	0	0	unit		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.276.660	111.980.000	4	4	jenis		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.622.600.000	1.622.357.074					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.622.600.000	1.622.357.074	12	12	bln		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.938.260	473.496.000					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	424.998.260	378.752.000	12	12	bln		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.950.000	45.329.000	3	3	jenis		
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	59.990.000	49.415.000	5	5	jenis		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	164.670.201.998	138.188.686.152					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	164.670.201.998	138.188.686.152	12	12	bln	Pengembalian dana kegiatan (silpa) cukup besar karena anggaran BLUD tidak harus habis/ direalisasikan seluruhnya. BLUD mengacu kepada prinsip efisiensi anggaran	Mengacu pada aturan dan pedoman pengelolaan keuangan BLUD Permendagri 79 tahun 2018
		Penataan Organisasi	220.000.000	192.984.867					
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	220.000.000	192.984.867	100	100	%		
		2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.181.696.740	9.313.050.519	100%	91%			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.834.330.140	3.535.907.559					
		Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.494.390.940	3.268.477.850	8	8	jenis	Pengembalian dana kegiatan (silpa) cukup besar karena sampai akhir tahun barang	Menambah anggaran untuk pengadaan alat kesehatan

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TKDN alat kesehatan yang sesuai dengan pagu tidak ada dalam e-katalog, sedangkan di e-katalog harga diatas pagu banyak. Sehingga pengelola tidak bisa merealisasikan anggaran tersebut	
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	0	0	jenis		
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	339.939.200	267.429.709	28	28	jenis	Harga Setandar Kegiatan dibawah Pagu,dan Sebagian Honor Pemegang Kegiatan Tidak diambil	Merencanakan Pagu Lebih teliti
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.495.794.600	3.329.557.520					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62.628.000	47.441.671					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	106.659.500	79.290.275					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	55.490.000	47.721.000	12	12	bln	Pengembalian dana kegiatan (silpa) karena menyesuaikan adanya kegiatan bencana	Merencanakan belanja lebih teliti lagi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.582.580.000	2.563.232.156	12	12	bln		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	66.705.700	54.208.002	12	12	bln	Pengembalian dana kegiatan (Silpa) karena untuk kegiatan kontribusi asosiasi pelatihan K3RS yang dianggarkan secara offline ternyata oleh Kemenkes diselenggarakan secara daring karena antisipasi peningkatan kasus Covid yang terjadi di Singapura. Untuk anggaran PPI yang dipersiapkan untuk IPCN baru tidak bisa dilaksanakan	Penyesuaian standar harga kedepannya

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								karena belum ada di rekrut IPCN sesuai saran surveyor akreditasi.	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	224.100.000	220.104.216	100	100	%		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	308.553.400	265.684.400	6	6	unit		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-					
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	89.078.000	51.875.800	100	100	%	Ada Kegiatan Yang Tidak Jadi dilaksanakan Sesuai Kesepakatan dan di Undur Ketahun 2025	Merencanakan Lebih Teliti
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	-	-					
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	-	-	100	100	%		
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.851.572.000	2.447.585.440					
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	2.851.572.000	2.447.585.440	12	12	bln		
	3	PROGRAM PENINGKATAN	2.801.985.000	2.490.649.550	100%	89%			

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.801.985.000	2.490.649.550					
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.801.985.000	2.490.649.550	100	100	%		
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-					
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-					
JUMLAH			272.153.520.110	235.693.102.639	100	86,60	Persen		
5	Badan Kesbangpol	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.397.315.495	7.143.079.084					
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	264.878.000	173.655.527					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	5.742.550	4	4	Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.652.000	48.124.294	3	3	Laporan		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.226.000	119.788.683	4	4	Laporan		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.302.925.295	5.640.329.772					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.984.733.295	5.366.777.772	12	12	Orang/bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	318.192.000	273.552.000	12	12	Dokumen		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.620.000	170.089.781					
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	105.620.000	91.678.682	3	3	Dokumen		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	107.000.000	78.411.099	6	5	Orang		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.213.800	454.211.729					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.510.200	3.056.000	6	5	Paket		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.588.600	112.693.900	4	4	Paket		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.617.000	19.362.000	100	80	Paket		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.998.000	5.985.000	5.000	3.000	Paket		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.020.000	240	230	Dokumen		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.000.000	306.094.829	50	49	Laporan		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.492.000	593.161.065					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.792.000	1.550.000	180	155	laporan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.700.000	103.718.499	12	12	laporan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	509.000.000	487.892.566	132	132	laporan		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.186.400	111.631.210					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	174.000.000	98.261.210	10	8	unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.270.000	13.370.000	20	15	unit		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	196.916.400	-	1	0	unit		
		2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA	3.195.047.100	2.959.281.404					
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	3.195.047.100	2.959.281.404					
		Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembaruan Kebangsaan,Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.007.548.600	2.779.928.304	250	240	orang		
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembaruan Kebangsaan,Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	187.498.500	179.353.100	12	12	laporan		
		3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN	49.180.298.212	48.415.294.298					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	49.180.298.212	48.415.294.298					
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum	207.711.600	83.751.700	1	1	Dokumen		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah							
		Pelaksanaan Kebijakan Bidang Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah	46.574.684.512	46.413.673.586	2.500	2350	Orang		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah	265.940.000	138.681.100	1400	970	Orang		
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi	2.131.962.100	1.779.187.912	26	24	Laporan		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah							
		4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYAKARATAN	498.572.000	391.847.903					
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	498.572.000	391.847.903					
		Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	359.136.000	300.635.307	100	90	orang		
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	139.436.000	91.212.596	17	16	laporan		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
		5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	2.307.729.600	1.907.721.288					
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemnatapan Pelaksanaan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomisosal dan Budaya	2.307.729.600	1.907.721.288					
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi sosial budaya dan Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	2.015.779.600	1.656.691.834	600	590	orang		
		Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	291.950.000	251.029.454	48	48	laporan		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	13.129.158.900	12.024.783.257					
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosiladaerah kabupaten/kota	13.129.158.900	12.024.783.257					
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang bidang kewaspadaan dini,kerjasama inelijen.pemantauan orang asing,tenaga kerjaasing dan lembaga asing kewaspdaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik di daerah	1.319.730.000	1.136.376.237	310	300	Orang		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang bidang kewaspadaan dini,kerjasama intelijen.pemantauan	8.834.513.900	8.468.984.728	100	100	orang		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah							
		Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang bidang kewaspadaan dini, kerjasama inelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	1.167.900.000	1.137.234.694	365	364	laporan		
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	1.807.015.000	1.282.187.598	50	40	dokumen		
JUMLAH			76.708.121.307	72.842.007.234	100	94,96	Persen		
6	Dinas Kesehatan	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	152.494.291.919	144.944.205.690					
		Perencanaan, Penganggaran, dan	855.200.000	719.389.934					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	375.000.000	285.396.356	3	3	Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000	28.105.531	3	3	Laporan	Masih kurang optimalnya jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga anggaran tidak terserap secara optimal	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	435.200.000	405.888.047	5	5	Laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	143.009.028.665	136.521.406.152					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	140.427.228.665	136.521.406.152	1.203	1.203	orang/bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.949.100.000	1.532.177.218	1	1	Dokumen		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	632.700.000	535.450.611	1	1	Dokumen		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	375.000.000	234.766.500					
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	275.000.000	156.666.500	4	3	Dokumen	Masih kurang optimalnya jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								anggaran tidak secara optimal	serapan anggaran bisa optimal
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	78.100.000	1	1	Laporan		
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	34.900.000	34.356.981					
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	34.900.000	34.356.981	1	1	Dokumen		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	282.998.000	243.625.649					
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	90.000.000	86.500.000	300	300	Paket		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	70.000.000	59.209.700	1	1	Dokumen		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	49.998.000	26.210.000	50	30	Orang	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga serapan anggaran kurang optimal	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan dan membuat jadwal sosialisasi secara sistematis selama satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	73.000.000	71.705.949	4	4	Orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.806.452.554	1.688.505.169					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.996.000	9.229.000	15	15	Paket		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.237.999.554	1.159.384.000	20	20	Paket		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.070.000	46.174.500	10	8	Paket		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.499.000	60.452.000	10	9	Paket		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	4.560.000	1	1	Dokumen	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga serapan anggaran kurang optimal	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.888.000	36.258.000	1	1	Laporan		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.000.000	372.447.669	85	85	Laporan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.946.959.700	2.856.700.536					
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.260.902.500	2.207.210.536	33	33	Unit		
		Pengadaan Mebel	686.057.200	649.490.000	10	10	Unit		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.317.030.000	1.081.533.019					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.492.000	3.540.000	1	1	Laporan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	627.988.000	511.597.993	1	1	Laporan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	683.550.000	566.395.026	1	1	Laporan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.866.723.000	1.563.921.750					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.348.483.000	1.165.408.917	600	467	unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.240.000	55.579.500	12	5	Unit	Disesuaikan dengan peralatan dan mesin yang memerlukan pemeliharaan sehingga tidak semua anggaran terserap dan juga terkendala waktu pelaksanaannya	Pengoptimalkan inventaris peralatan dan mesin yang rencananya akan dilakukan pemeliharaan pada tahun 2025 sehingga penyerapan anggaran yang dialokasikan dapat terserap secara maksimal

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	375.000.000	342.933.333	1	1	Unit		
		2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	130.699.158.532	114.616.383.115					
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	63.342.277.232	56.226.854.769					
		Pembangunan Puskesmas	2.453.858.000	2.181.451.647	2	2	Unit		
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	994.756.500	793.086.000	1	1	Unit	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga serapan anggaran kurang optimal	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal
		Pengembangan Puskesmas	7.018.441.700	6.976.715.375	6	6	Unit		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	245.000.000	241.757.831	1	1	Unit		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	26.505.429.196	21.101.218.060	6	6	Unit	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga serapan anggaran kurang optimal	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.444.250.300	1.440.338.490	1	1	Unit		
		Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.988.912.736	10.320.105.160	135	135	Fasyankes Unit		
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	776.708.000	750.751.714	23	23	Fasyankes Unit		
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	12.301.410.800	11.836.680.492	200	200	Paket		
		Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	254.510.000	228.620.000	1	1	Layanan		
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	359.000.000	356.130.000	22	22	Paket		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.287.305.100	56.397.249.601					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.369.380.000	964.054.901	5.700	4.294	orang	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga serapan anggaran kurang optimal	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	986.000.000	777.324.340	6.500	4.287	orang	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga serapan anggaran kurang optimal	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	248.565.100	213.112.714	4.261	4.028	orang		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	568.468.000	548.160.460	9.600	9.600	orang		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	190.000.000	173.698.041	38.458	32.774	orang		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	68.361.055	180.166	125.434	orang	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga serapan anggaran kurang optimal	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	272.370.200	269.005.655	13.000	13.000	orang		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.000.000	43.730.000	17.134	15.727	orang		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	457.934.900	443.292.000	4.435	4.435	orang		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	180.000.000	169.401.130	248	248	orang		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	891.010.600	853.993.687	5.162	5.162	orang		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	129.998.000	109.688.000	6.422	5.852	orang		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.575.850.000	255.506.000	7.573	1.751	Dokumen	Kegiatannya dilakukan berdasarkan adanya kasus yang terjadi yang berpotensi untuk terjadinya KLB	Karena sifatnya hanya dilaksanakan jika ada terjadi kasus yang berpotensi KLB maka pada tahun 2025 anggaranya di kurangi disesuaikan dengan kondisi pada tahun 2024 sebagai dasar untuk proyeksi anggran ditahun 2025
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.332.351.000	1.691.390.107	1.225	704	Dokumen	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								sehingga serapan anggaran kurang optimal	satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	302.467.600	254.384.007	21	21	Dokumen		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.214.321.000	1.052.283.109	21	21	Dokumen		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	591.677.500	520.340.500	9	9	Dokumen		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	205.000.000	204.371.835	21	21	Dokumen		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	394.681.200	299.308.160	55	55	Dokumen		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	217.513.000	205.113.000	100	100	orang		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.641.163.000	1.225.632.890	21	21	Dokumen	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga serapan anggaran kurang optimal	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	31.452.786.000	30.290.979.430	1	1	Dokumen		
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	16.000.000	12.373.500	17	15	Paket	Kegiatan ini dilaksanakan jika ada kasus	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Laboratorium Rujukan/Nasional						yang terjadi adan dilakukan pengambilan sampel untuk dikirim sehingga jika kasus yang terjadi kurang maka serapan anggaran yang telah dialokasikan juga kurang	kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	658.000.000	429.257.187	13	13	Dokumen	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga serapan anggaran kurang optimal	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	15.100.000.000	12.875.755.257	1	1	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	785.730.000	772.680.000	1	1	Dokumen		
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.337.040.000	812.209.573	22	21	Unit	Labkesda belum siap untuk dilakukan survei Akreditasi	Direncanakan akan di laksanakan di tahun 2025
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	60.100.000	-	20	0	Laporan	Tidak ada kasus KIPi yang terjadi sehingga	Tahun 2025 tidak dimasukkan lagi sub kegiatan ini

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						tidak dilakukan investigasi	
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	599.480.000	595.496.023	1	1	Unit		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	191.388.000	191.122.040	1	1	Dokumen		
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	168.030.000	75.225.000	1	1	Dokumen	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga serapan anggaran kurang optimal	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.170.416.200	1.124.755.748					
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.170.416.200	1.124.755.748	21	21	Dokumen		
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	899.160.000	867.522.997					
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	169.160.000	163.568.400	85	85	Unit		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	730.000.000	703.954.597	22	22	Unit		
		3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.338.980.999	3.175.466.438					
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	591.744.999	586.468.040					
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.000.000	19.775.000	9	9	Dokumen		
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	571.744.999	566.693.040	21	21	Dokumen		
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.747.236.000	2.588.998.398					
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.747.236.000	2.588.998.398	150	150	orang		
		4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	810.000.000	510.209.120					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150.000.000	59.724.500					
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan : Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150.000.000	59.724.500	75	36	Dokumen	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga serapan anggaran kurang optimal	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	400.000.000	269.113.370					
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik : Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan	400.000.000	269.113.370	588	437	Dokumen	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga serapan	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						anggaran kurang optimal	serapan anggaran bisa optimal
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100.000.000	88.437.250					
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100.000.000	88.437.250	500	477	Dokumen		
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	160.000.000	92.934.000					
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	160.000.000	92.934.000	250	163	Unit	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga serapan anggaran kurang optimal	Mengoptimalkan untuk inventarisasi sesuai dengan kebutuhan selama satu tahun anggaran sehingga serapan anggaran bisa optimal
	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.122.948.000	1.968.572.459					
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan	1.864.101.000	1.744.909.400					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.864.101.000	1.744.909.400	7	7	Dokumen		
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	26.101.000					
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	30.000.000	26.101.000	21	21	Dokumen		
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	228.847.000	197.562.059					
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	228.847.000	197.562.059	3	3	Dokumen		
		UPTD Dinas Kesehatan	61.828.314.244	49.649.263.114					
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
	6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan							

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Bugis							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.183.000.000	964.405.102	13.118	13.118	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.515.165.990	1.175.148.223	1	1	Dokumen	Ada anggaran untuk tenaga kontrak yang telah dianggarkan tidak terserap karena ada kebijakan tidak boleh mengangkat tenaga kontrak pada tahun 2024	Menyusun anggaran terkait dengan tenaga kontrak berdasarkan tenaga yang sesuai dengan data pada tahun 2024 sehingga serapan anggaran bisa optimal
		7 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Tanjung Redeb							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.651.986.754	1.509.239.854	21.763	21.763	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.789.472.500	1.493.023.452	1	1	Dokumen		
		8 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan							

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Sambaliung							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.254.820.000	1.192.757.069	19.900	19.900	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	2.360.163.500	1.766.113.396	1	1	Dokumen	Ada anggaran untuk tenaga kontrak yang telah dianggarkan tidak terserap karena ada kebijakan tidak boleh mengangkat tenaga kontrak pada tahun 2024	Menyusun anggaran terkait dengan tenaga kontrak berdasarkan tenaga yang sesuai dengan data pada tahun 2024 sehingga serapan anggaran bisa optimal
		9 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Suaran							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	423.349.800	382.338.213	4.950	4.950	Dokumen		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.597.188.400	1.389.271.092	1	1	Dokumen		
		10 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Tubaan							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	374.000.000	347.186.800	5.000	5.000	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	2.810.620.700	1.789.896.272	1	1	Dokumen	Ada anggaran untuk tenaga kontrak yang telah dianggarkan tidak terserap karena ada kebijakan tidak boleh mengangkat tenaga kontrak pada tahun 2024	Menyusun anggaran terkait dengan tenaga kontrak berdasarkan tenaga yang sesuai dengan data pada tahun 2024 sehingga serapan anggaran bisa optimal
		11 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Upt Puskesmas Biatan Lempake							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	356.000.000	349.859.351	7.919	7.919	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	2.096.254.100	1.907.273.048	1	1	Dokumen		
		12 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Talisayan							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	900.700.000	721.159.800	13.500	13.500	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.986.335.100	1.605.175.902	1	1	Dokumen		
		13 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Batu Putih							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	602.986.000	594.818.495	8.942	8.942	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	2.223.353.900	1.991.483.704	1	1	Dokumen		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		14 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Biduk-Biduk							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	607.930.000	443.787.300	6.554	6.554	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	2.718.492.000	2.114.224.027	1	1	Dokumen	Ada anggaran untuk tenaga kontrak yang telah dianggarkan tidak terserap karena ada kebijakan tidak boleh mengangkat tenaga kontrak pada tahun 2024	Menyusun anggaran terkait dengan tenaga kontrak berdasarkan tenaga yang sesuai dengan data pada tahun 2024 sehingga serapan anggaran bisa optimal
		15 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Upt Puskesmas Gunung Tabur							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.178.680.000	1.059.173.796	15.190	15.190	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	2.055.994.300	1.748.917.768	1	1	Dokumen		
		16 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Merancang							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	646.793.450	369.221.800	5.700	5.700	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	2.443.131.200	1.826.318.066	1	1	Dokumen	Ada anggaran untuk tenaga kontrak yang telah dianggarkan tidak terserap karena ada kebijakan tidak boleh mengangkat tenaga kontrak pada tahun 2024	Menyusun anggaran terkait dengan tenaga kontrak berdasarkan tenaga yang sesuai dengan data pada tahun 2024 sehingga serapan anggaran bisa optimal
		17 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
18		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Tanjung Batu							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	631.070.000	599.970.592	11.500	11.500	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	3.353.504.700	2.408.444.652	1	1	Dokumen	Ada anggaran untuk tenaga kontrak yang telah dianggarkan tidak terserap karena ada kebijakan tidak boleh mengangkat tenaga kontrak pada tahun 2024	Menyusun anggaran terkait dengan tenaga kontrak berdasarkan tenaga yang sesuai dengan data pada tahun 2024 sehingga serapan anggaran bisa optimal
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas PI Derawan							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	143.000.000	132.482.157	1.700	1.700	Dokumen		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.974.400.100	1.511.999.428	1	1	Dokumen	Ada anggaran untuk tenaga kontrak yang telah dianggarkan tidak terserap karena ada kebijakan tidak boleh mengangkat tenaga kontrak pada tahun 2024	Menyusun anggaran terkait dengan tenaga kontrak berdasarkan tenaga yang sesuai dengan data pada tahun 2024 sehingga serapan anggaran bisa optimal
		19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Teluk Bayur							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.187.429.000	1.043.913.654	16	16	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.494.160.600	1.116.141.826	1	1	Dokumen	Ada anggaran untuk tenaga kontrak yang telah dianggarkan tidak terserap karena ada kebijakan tidak boleh mengangkat	Menyusun anggaran terkait dengan tenaga kontrak berdasarkan tenaga yang sesuai dengan data pada tahun 2024 sehingga serapan anggaran bisa optimal

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								tenaga kontrak pada tahun 2024	
		20 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Labanan							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	643.525.650	530.827.170	8.865	8.865	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	2.495.546.400	1.662.637.251	1	1	Dokumen	Ada anggaran untuk tenaga kontrak yang telah dianggarkan tidak terserap karena ada kebijakan tidak boleh mengangkat tenaga kontrak pada tahun 2024	Menyusun anggaran terkait dengan tenaga kontrak berdasarkan tenaga yang sesuai dengan data pada tahun 2024 sehingga serapan anggaran bisa optimal
		21 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Upt Puskesmas Tepian Buah							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	666.593.000	590.339.242	1.1476	1.1476	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	2.249.366.600	1.839.707.990	1	1	Dokumen		
		22 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Long Laai							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.500.000	5.243.400	400	400	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.477.765.700	1.208.058.620	1	1	Dokumen		
		23 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Kelay							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	315.225.000	285.214.900	3.034	3.034	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	2.583.734.600	2.000.416.134	1	1	Dokumen	Ada anggaran untuk tenaga	Menyusun anggaran terkait

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								kontrak yang telah dianggarkan tidak terserap karena ada kebijakan tidak boleh mengangkat tenaga kontrak pada tahun 2024	dengan tenaga kontrak berdasarkan tenaga yang sesuai dengan data pada tahun 2024 sehingga serapan anggaran bisa optimal
		24 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Merapun							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	350.000.000	264.599.005	3.579	3.579	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	2.412.578.000	1.979.496.104	1	1	Dokumen		
		25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Long Boy							

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-				Belum terpisah peserta JKN dari UPT Puskesmas Kelay pada awal tahun 2024 jadi tidak terdapat dana kapitasi dari sub kegiatan pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sehingga anggarannya adalah Rp 0	Pada Tahun 2025 telah terpisah peserta JKN yang berada di wilayah kerja UPT Puskesmas Long Boy sehingga anggaran tahun 2025 sudah dianggarkan pendapatan berasal dari jumlah peserta yang tercatat di Faskes UPT Puskesmas long Boy.
		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.957.141.500	1.722.168.792	1	1	Dokumen		
	26	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Puskesmas Maratua							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	298.260.000	281.696.074	3.543	3.543	Dokumen		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	3.136.594.800	2.226.343.955	1	1	unit	Ada anggaran untuk tenaga kontrak yang telah	Menyusun anggaran terkait dengan tenaga kontrak

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								dianggarkan tidak terserap karena ada kebijakan tidak boleh mengangkat tenaga kontrak pada tahun 2024	berdasarkan tenaga yang sesuai dengan data pada tahun 2024 sehingga serapan anggaran bisa optimal
		27 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Upt Laboratorium Kesehatan Daerah							
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	888.948.300	793.544.800	1	1	Dokumen		
		28 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Upt Instalasi Farmasi Kabupaten							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	771.552.600	705.224.835	1	1	Dokumen		
JUMLAH			351.293.693.694	314.864.099.936	100	89,63	Persen		
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.093.580.073	24.576.083.798					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	442.072.000	417.067.847					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.412.000	25.531.049	3	3	Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.000.000	78.062.935	5	5	Dokumen		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	323.660.000	313.473.863	1	1	Dokumen		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.757.770.023	17.289.661.090					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.699.536.023	16.264.957.090	12	12	Bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.058.234.000	1.024.704.000	12	12	Bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	649.400.000	496.900.555					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	249.400.000	220.600.000	238	238	Stell		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000	276.300.555	50	50	Orang	karena anggaran diberikan pada anggaran apbd-p, jadi tidak terserap maksimal	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.123.891.050	1.083.019.039					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	4.455.000	1	1	Tahun		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	531.895.050	519.429.645	1	1	Tahun		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.996.000	63.000.000	1	1	Tahun		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.991.000	1	1	Tahun		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	14.400.000	1	1	Tahun	sebenarnya sudah terserap maksimal, yg tidak terserap, karena tidak bisa dipaksakan, karena sesuai dengan standar yang ada	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480.000.000	471.743.394	1	1	Tahun		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684.310.000	630.314.408					
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	624.310.000	571.564.408	5	5	Unit		
		Pengadaan Mebel	60.000.000	58.750.000	5	5	Unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.306.138.000	3.743.772.040					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.498.000	1.284.000	12	12	Bulan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.059.810.000	854.356.550	1	1	Tahun		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.990.000	28.600.000	1	1	Tahun		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.209.840.000	2.859.531.490	1	1	Tahun		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.129.999.000	915.348.819					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	599.999.000	386.391.909	1	1	Tahun	karena ada kendaraan yang rusak pada akhir tahun, dan tidak sempat diperbaiki	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	530.000.000	528.956.910	1	1	Tahun		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	510.222.194.396	486.818.654.476					
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	268.205.460.396	248.219.844.893					
		Operasi dan Pemeliharaan Sungai	25.570.394.062	24.846.276.976	1	1	Dokumen		
		Pembangunan Unit Air Baku	14.850.000.000	11.230.300.900	0,65	0,65	Km	sebenarnya sudah terserap maksimal, yg tidak terserap, karena tidak bisa dipaksakan, karena sesuai dengan standar yang ada	
		Pembangunan Tanggul Sungai	227.785.066.334	212.143.267.017	1	1	Tahun		
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	242.016.734.000	238.598.809.583					
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	113.037.901.000	111.654.658.065	5	5	Km		
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	128.978.833.000	126.944.151.518	5	5	Km		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	213.763.577.782	208.488.297.735					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	213.763.577.782	208.488.297.735					
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum	471.000.000	290.797.082	3	3	Dokumen	karena anggaran diberikan pada anggaran apbd-p, jadi tidak terserap maksimal	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	1.300.000.000	835.905.700	2	2	Unit	karena anggaran diberikan pada anggaran apbd-p, jadi tidak terserap maksimal	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	96.246.967.782	94.616.076.236	16323	16323	M		
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	9.474.250.000	9.085.416.220	2	2	Unit		
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	106.271.360.000	103.660.102.497	16323	16323	M		
		4 PROGRAM PENGEMBANGAN	20.525.750.000	18.734.960.592					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	20.525.750.000	18.734.960.592					
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	17.445.000.000	15.709.554.198	1	1	Unit		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	3.080.750.000	3.025.406.394	2	2	Dokumen		
		5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8.756.000.000	8.427.821.294					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.756.000.000	8.427.821.294					
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	283.500.000	237.881.914	1	1	Tahun		
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem	8.472.500.000	8.189.939.380	1	1	Kegiatan		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							
		6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	539.301.787.541	523.711.962.030					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	539.301.787.541	523.711.962.030					
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	102.023.110.000	100.149.012.806	10	10	Kegiatan		
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	120.530.000.000	117.593.504.168	10	10	Kegiatan		
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	7.392.000.000	7.135.837.830	1	1	Kegiatan		
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	309.356.677.541	298.833.607.226	10	10	Kegiatan		
		7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	428.499.379.199	329.683.070.845					
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	428.499.379.199	329.683.070.845					
		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gudang	175.000.000	84.296.000	1	1	Kegiatan	Adanya kesalahan dalam perhitungan perencanaan	

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								anggaran, sehingga mengakibatkan kurang terserapnya anggaran yang diberikan	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	427.743.379.199	329.111.883.144	5	5	Unit		
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	581.000.000	486.891.701	2	2	Dokumen		
		8 PROGRAM PENYELENGGARA JALAN	1.947.701.349.353	1.855.447.060.732					
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.947.701.349.353	1.855.447.060.732					
		Penyusunan Rencana, Kebijakan,	12.741.000.000	11.756.667.926	10	10	Dokumen		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan							
		Pembangunan Jalan	734.519.434.362	688.254.054.420	5	5	Km	Perbaiki seperti diatas nyata Anggaran tidaksesuai dgn Realisasi tetapi volume 100%	
		Rekonstruksi Jalan	1.130.024.781.530	1.092.915.224.573	7	7	Km		
		Pemeliharaan Berkala Jalan	10.810.000.000	10.557.433.045	2	2	Km		
		Rehabilitasi Jembatan	10.369.999.999	10.153.434.438	1	1	Km		
		Pembangunan Jembatan	24.131.133.462	17.825.707.345	1	1	Unit		
		Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	1.500.000.000	1.427.788.742	10	10	Titik		
		Rehabilitasi Jalan	17.625.000.000	17.460.585.553	3	3	Km		
		Pemeliharaan Rutin Jalan	5.980.000.000	5.096.164.690	1	1	Km		
		9 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.264.999.500	2.226.426.859					
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3.264.999.500	2.226.426.859					
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	588.577.600	391.196.270	40	40	Orang	Adanya kesalahan dalam perhitungan perencanaan anggaran, sehingga	

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								mengakibatkan kurang terserapnya anggaran yang diberikan	
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	275.000.000	204.724.645	40	40	Orang		
		Penyediaan Instruktur/ Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	65.000.000	14.160.000	1	1	Kegiatan	Adanya kesalahan dalam perhitungan perencanaan anggaran, sehingga mengakibatkan kurang terserapnya anggaran yang diberikan	
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	2.336.421.900	1.616.345.944	40	40	Orang	Adanya kesalahan dalam perhitungan perencanaan anggaran, sehingga mengakibatkan kurang terserapnya anggaran yang diberikan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.149.000.000	2.706.069.538					
		10							

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.928.000.000	1.815.196.363					
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	1.928.000.000	1.815.196.363	1	1	Dokumen		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	473.000.000	356.754.358					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	473.000.000	356.754.358	1	1	Dokumen	Adanya kesalahan dalam perhitungan perencanaan anggaran, sehingga mengakibatkan kurang terserapnya anggaran yang diberikan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	388.000.000	279.133.160					
		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemnafaatn Ruang	388.000.000	279.133.160	1	1	Dokumen	Adanya kesalahan dalam perhitungan perencanaan anggaran, sehingga mengakibatkan kurang	

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								terserapnya anggaran yang diberikan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	360.000.000	254.985.657					
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	360.000.000	254.985.657	1	1	Dokumen	Adanya kesalahan dalam perhitungan perencanaan anggaran, sehingga mengakibatkan kurang terserapnya anggaran yang diberikan	
JUMLAH			3.703.277.617.844	3.460.820.407.899	100	93,45	Persen		
8	DINAS PENDIDIKAN	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	384.824.381.737	336.745.557.065	100%	87,51	100%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	688.640.000	499.364.798	100%	72,51	100%		Adapun solusinya sebagai berikut :
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.440.000	77.092.160	4 Dokumen	66,78	Dokumen	Standar fotocopy di DPA lebih tinggi dari	Menyusun Standar Fotocopy menyesuaikan /

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Belanja sehingga ada Silpa	Mendekati Harga Belanja Pasaran
								Konsumsi Kegiatan Rapat yang sebagaian tidak dilaksanakan	Menyusun Kembali Jadwal Rapat selama 1 (tahun)
								Honor KPA tidak direalisasikan dikarenakan 6 bulan masih di ambil alih PA (KPA Pensiun)	Menyusun Honor Pengelola Kegiatan (KPA) sesuai dengan waktu Pelaksanaan Tugas nya
								Sisa perjalanan dinas biasa yang tidak direalisasikan	Menyusun Kembali Rencana Perjalanan Menyesuaikan Pelaksanaan Tahun sebelum nya dan Akan Berjalan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105.000.000	82.768.713	8 Dokumen	78,83	Dokumen	Honor KPA tidak direalisasikan dikarenakan 6 bulan masih di ambil alih PA (KPA Pensiun)	Menyusun Honor Pengelola Kegiatan (KPA) sesuai dengan waktu Pelaksanaan Tugas nya
								Konsumsi Rapat dan Kegiatan yang sebagian tidak dilaksanakan	Menyusun Kembali Jadwal Rapat dan Kegiatan selama 1 (tahun)
								Sisa perjalanan dinas biasa yang	Menyusun Kembali Rencana Perjalanan Menyesuaikan

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								tidak direalisasikan	Pelaksanaan Tahun sebelum nya dan Akan Berjalan
								Selisih Harga Fotocopy antara belanja dengan harga di DPA	Menyusun Standar Fotocopy menyesuaikan / Mendekati Harga Belanja Pasaran
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	468.200.000	339.503.925	7 Laporan	72,51	Laporan	Honor KPA tidak direalisasikan dikarenakan 6 bulan masih di ambil alih PA (KPA Pensiun)	Menyusun Honor Pengelola Kegiatan (KPA) sesuai dengan waktu Pelaksanaan Tugas nya
								Konsumsi Rapat dan Kegiatan yang sebagian tidak dilaksanakan	Menyusun Kembali Jadwal Rapat dan Kegiatan selama 1 (tahun)
								Sisa perjalanan dinas biasa yang tidak direalisasikan	Menyusun Kembali Rencana Perjalanan Menyesuaikan Pelaksanaan Tahun sebelum nya dan Akan Berjalan
								Selisih Harga Fotocopy antara belanja dengan harga di DPA	Menyusun Standar Fotocopy menyesuaikan / Mendekati Harga Belanja Pasaran
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	380.794.320.487	333.121.232.289	100%	87,48	100%		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	327.186.604.918	285.578.644.209	30394 Orang/bulan 14 bln	87,28	Orang/bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.254.115.569	46.241.950.780	12 Dokumen	88,49	Dokumen		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.278.600.000	1.227.575.000	12 Dokumen	96,01	Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	75.000.000	73.062.300	13 laporan	97,42	laporan		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	130.000.000	127.530.280	100%	98,10	100%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	130.000.000	127.530.280	6 Laporan	98,10	Laporan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	295.000.000	269.373.332	100%	91,31	100%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85.000.000	82.335.000	170 Paket	96,86	Paket	Sisa dari pagu dana	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	40.000.000	40.000.000	2 Dokumen	100	Dokumen	tidak ada permasalahan	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	45.000.000	43.320.000	1 Dokumen/20 Kasus	96,27	Dokumen/ Kasus	sisa dari pagu adalah sisa bbm	perjalanan monitoring sesuai dengan bbm yang diperlukan
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	38.686.500	1 Kegiatan	77,37	Kegiatan	Karena terlalu besarnya dana untuk	Menyesuaikan Standar

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								honorarium narasumber perjamnya, maka kami hanya dapat menggunakan separuh dari dana tersebut, standar honorarium yang tercantum di dalam DPA adalah Standar honorarium untuk widiaswara bukan narasumber biasa	Honorarium Narasumber
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	65.031.832	6 Orang	86,71	Orang	Biaya kontribusi tidak direalisasikan dan sisa anggaran merupakan sisa anggaran dari perjalanan dinas	Kedepan nya akan di buatkan perencanaan perjalanan dengan mengevaluasi realisasi tahun sebelum nya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.303.271.250	1.252.267.115	100%	96,09	100%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.120.250	18.610.100	2 Paket	97,33	Paket		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	548.667.000	528.615.850	12 Paket	96,35	Paket	Sisa dari pagu dana	Tidak ada permasalahan

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.874.000	100.679.500	2 Paket	99,81	Paket		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	118.900.000	116.663.900	3 Paket	98,12	Paket		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.867.000	3 Jenis	98,67	Jenis	Sisa Pagu Dana	Tidak ada permasalahan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.000.000	306.629.558	12 Bulan	98,91	Bulan		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	195.710.000	171.201.207	12 Bulan	87,48	Bulan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	601.660.000	566.120.135	100%	94,09	100%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.660.000	145.103.135	5 Unit	89,76	Unit	Sisa Hasil Penawaran Negoisasi Penyedia Pada Paket E Purchasing	Tidak ada permasalahan
		Pengadaan Mebel	40.000.000	35.470.000	2 Jenis	88,68	Jenis	Sisa Hasil Penawaran	Tidak ada permasalahan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	385.547.000	2 Unit	96,39	Unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.494.000	484.124.192	100%	84,86	100%		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.494.000	2.152.500	121 Lembar	86,31	Lembar		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.000.000	409.971.692	12 Laporan	82,66	Laporan		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	40.000.000	12 Bulan	100	Bulan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.000.000	32.000.000	12 Bulan	100	Bulan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.996.000	425.544.924	100%	96,50	100%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195.996.000	181.059.424	8 Unit	92,38	Unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	245.000.000	244.485.500	2 Unit	99,79	Unit		
		2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	218.615.508.977	203.903.754.747	100%	93,27	100%		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	112.194.952.266	104.887.723.146		93,49			
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.134.525.000	1.090.635.000	1 Sekolah	96,13	Sekolah	Sisa Hasil Penawaran Penyedia Pada Paket Lelang	Tidak Ada Permasalahan
		Penambahan Ruang Kelas Baru	2.195.237.000	1.616.923.152	18 Unit	73,66	Unit	Sisa Hasil Penawaran Penyedia Pada Paket Lelang	Tidak Ada Permasalahan

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.521.144.610	10.410.822.162	60 Unit	98,95	Unit	Sisa Hasli Penawaran pada Paket Pengadaan Langsung	Tidak Ada Permasalahan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.529.649.000	3.160.519.100	21 Sekolah	89,54	Sekolah	Sisa Hasil Penawaran Penyedia Pada Paket Lelang pengadaan Langsung	Tidak Ada Permasalahan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.174.354.000	1.169.978.000		99,63		Sisa Hasil Penawaran pada Paket Pengadaan Langsung	Tidak Ada Permasalahan
		Pengadaan Mebel Sekolah	6.319.496.000	6.308.544.488	2 Paket/49 Sekolah	99,83	Paket/Sekolah	Sisa Hasil Penawaran Negoisasi Penyedia Pada Paket E Purchasing	Tidak Ada Permasalahan
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.011.386.000	6.949.243.966	27 Paket/153 Sekolah	99,11	Paket/Sekolah	Sisa Hasil Penawaran Negoisasi Penyedia Pada Paket E Purchasing	Tidak Ada Permasalahan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.050.000.000	1.810.394.500	1300 Peserta Didik/ 1300 Siswa	88,31	Peserta Didik/ Siswa	Beasiswa yang tidak terealisasi, dikarenakan siswanya yang sudah terdaftar di sk bupati tidak melengkapi berkas, karna yang bersangkutan pindah sekolah keluar daerah dan ada beberapa	

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								siswa yang ada di Sk bupati , siswa tersebut juga dapat beasiswa kaltim tuntas dari Propinsi jadi siswa tersebut tidak bisa mengambil beasiswa dobel dengan jumlah dana diterima sama besarnya, jadi salah satu beasiswa harus dibatalkan dan mereka membatalkan beasiswa kabupaten berau.	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	424.114.000	422.265.000	3 Paket / 6 Sekolah	99,56	Paket /Sekolah	Sisa Hasli Penawaran pada Paket Pengadaan Langsung	Tidak Ada Permasalahan
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	400.000.000	220.097.200	173 Satuan Pendidikan/ 173 Sekolah	55,02	Satuan Pendidikan/ Sekolah	Untuk kegiatan OSN tidak adanya kegiatan di tingkat provinsi secara offline. kegiatan dilaksanakan secara online. Untuk kegiatan ANBK tidak cukupnya waktu dari pusat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi serta kurangnya personil dalam	Adanya koordinasi antara Kabupaten dan Provinsi agar Kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tepat waktu

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								kegiatan baik itu simulasi, gladi bersih maupun pelaksanaan ANBK.	
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	137.500.000	104.435.000	28 Orang / 158 Satuan Pendidikan	75,95	Orang/Satuan Pendidikan	Perjalanan dinas yang tersisa karena tidak cukup waktu sehingga tidak sempat buat SPJnya dan untuk melakukan perjalanan Dinas perlu BBM sementara BBM sudah habis	Kegiatan Supervisi pengawas kesekolah lebih terencana buat jadwal terlebih dahulu untuk melakukan perjalanan agar bisa mencapai target yang sudah ditentukan dan untuk penunjang perjalanan BBM nya disesuaikan anggarannya
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000	181.276.500	175 Siswa / 173 Sekolah/ 150 Peserta Didik	90,64	Siswa /Sekolah/ Peserta Didik	Sisa Belanja yang teralisasi, serta belum masuknya belanja honor penanggungjawab an pengelola keuangan	tidak ada permasalahan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.144.383.000	942.945.038	500 Orang	82,40	Orang	Kegiatan terdiri dari kegiatan guru penggerak 30 org, diklat TOT Implementasi Pendidikan Karakter Budaya dan Anti Korupsi 70 orang, diklat Kompetensi SD 25 orang, diklat KTI 30 orang dan diklat tenaga pendidik TK,SD dan SMP 32 orang	28 orang guru agama islam dalam PPG yang tidak terserap ditahun 2023 diajukan ulang dan akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan yang 15 orang lagi dianggarkan ulang dalam dpa tahun 2024 untuk belanja beasiswa mahasiswa selanjutnya,

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								selebihnya ada kegiatan Tim penilai angka kredit , kegiatan sertifikasi dan PPG TK, SD dan SMP ditambah dengan anggaran Tambahan yaitu kegiatan Uji Kompetensi(Ukom) sebanyak 53 orang dan kegiatan porseni guru di provinsi seanyak 50 orang.total target 187 untuk diklat tercapai semua dan untuk kegiatan tim penilai angka kredit dari sekian usulan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan sejumlah 292 orang tahun 2023 periode april dan oktober.anggaran yang tidak terserap adalah anggaran PPG guru Agama Islam sebanyak 28 orang karena pihak universitas tidak bisa menerima	

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								karena pendidikan sudah berjalan beberapa bulan sedangkan yang 15 orang lagi diakomodir oleh dana APBN.	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	368.250.000	107.605.700	158 Satuan Pendidikan/ 40 Sekolah	29,22	Satuan Pendidikan/ Sekolah	Penambahan kegiatan baru muncul di ABT, sehingga pengajuan GU untuk pelaksanaan kegiatan harus bersamaan dengan kegiatan BOSDA yang menggunakan dana UP yang cukup besar.	Penambahan dana UP
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.223.385.007	2.174.400.000	18 Satuan Pendidikan/ 35329 Siswa	51,48	Satuan Pendidikan/ Siswa	Realisasi anggaran yang tercover hanya lingkup Pagu Anggaran BOSDA tidak termasuk anggaran BOSP, karena realisasi penggunaan dana BOSP terdapat pada sekolah masing masing.	Tidak ada permasalahan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Seluruh Sekolah)	70.600.228.649	67.566.189.960	158 Satuan Pendidikan	95,70	Satuan Pendidikan	Realisasi anggaran yang tercover hanya lingkup Pagu Anggaran BOSDA tidak termasuk	Tidak ada permasalahan

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								anggaran BOSP, karena realisasi penggunaan dana BOSP terdapat pada sekolah masing masing.	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	761.300.000	651.448.380	41 Orang / 12 Bulan	85,57	Orang/ Bulan	Belanja perjadi yang tidak terealisasi secara maksimal, dikarenakan masa transisi kegiatan ke bidang Pembinaan SD yang menyesuaikan dengan sistem sehingga waktu yang tersisa untuk merealisasikan di lapangan sangat minim.	di tahun berikutnya perencanaan kegiatan akan di susun secara sistematis
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	83.900.774.646	77.784.632.963		92,71			
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2.882.997.000	2.467.657.000	2 Sekolah	85,59	Sekolah		
		Penambahan Ruang Kelas Baru	5.669.997.400	5.028.699.000	3 Sekolah	88,69	Sekolah		
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	400.000.000	343.574.000	1 Ruang	85,89	Ruang		
		Pembangunan Laboratorium	3.057.016.950	2.728.042.000	6 Ruang	89,24	Ruang		
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	1.253.013.822	1.120.730.800	2 Sekolah	89,44	Sekolah		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.619.999.970	3.571.440.000	3 Sekolah	98,66	Sekolah		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	234.998.900	233.909.000	4 Sekolah	99,54	Sekolah		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	234.780.000	227.664.000	4 Sekolah	96,97	Sekolah		
		Pengadaan Mebel Sekolah	12.999.978.000	12.843.190.900	10 Paket/ 10 Sekolah	98,79	Paket/Sekolah		
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	11.841.807.000	11.206.428.041	13 Paket / 47 Sekolah	94,63	Paket/Sekolah		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.310.000.000	1.844.520.800	1062 Peserta Didik/ 1062 Siswa	79,85	Peserta Didik/Siswa		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	499.978.000	480.770.100	6 Paket / 25 Sekolah	96,16	Paket/Sekolah		
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	400.000.000	337.227.093	56 Sekolah/1100 Siswa	84,31	Sekolah/Siswa		
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	152.180.000	149.954.000	48 Satuan Pendidikan/ 56 Sekolah	98,54	Satuan Pendidikan/Sekolah	ada 4 satuan pendidikan belum diikuti sertakan dalam kegiatan	Melibatkan dalam kegiatan MKKS sehingga informasi tersampaikan
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100.000.000	85.877.000	110 Peserta Didik/ 110 Siswa	85,88	Peserta Didik/Siswa		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	780.000.000	733.795.549	715 Peserta	94,08	Peserta	Anggaran biaya kebutuhan lain tidak mendukung untuk direalisasikan	Mengusulkan kembali dan melaksanakan kegiatan di tahun 2024

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								target sebanyak 715 peserta	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	335.000.000	306.731.900	58 Sekolah	91,56	Sekolah	Tidak ada masalah	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3.664.180.000	2.254.500.000	18 Satuan Pendidikan/ 14681 Siswa	61,53	Satuan Pendidikan/ Siswa	Banyak sekolah belum siap dengan tenaga pengelola yang mumpuni	Mengusulkan pembuatan juknis bosda khususnya penerima dana HIBAH
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Seluruh Sekolah)	33.123.803.604	31.506.288.153	48 Satuan Pendidikan	95,12	Satuan Pendidikan	Banyak jenis belanja belum terinput di SIPD	Mengusulkan pembuatan juknis bosda
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	341.044.000	313.633.627	14 Orang/ 12 Bulan	91,96	Orang/ Bulan	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19.570.654.439	18.445.231.145		94,25			
		Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	1.371.882.000	1.305.881.662	4 Sekolah	95,19	Sekolah		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.553.737.000	1.532.082.000	8 TK Negeri	98,61	TK Negeri		
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	614.000.000	603.470.500	3 TK Negeri	98,29	TK Negeri		
		Pengadaan Mebel PAUD	285.000.000	250.792.000	5 Paket	88	Paket		
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	4.197.489.904	4.094.227.000	2 Paket/ 15 Sekolah	97,54	Paket/ Sekolah		
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	84.999.790	70.269.790	1 Paket	82,67	Paket		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	288.876.000	231.102.000	8 Paket	80	Paket		
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	5.213.170.000	4.834.161.213	4444 Peserta Didik	92,73	Peserta Didik		
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	100.000.000	99.976.000	228 Satuan Pendidikan	99,98	Satuan Pendidikan		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	275.000.000	273.856.955	45 Orang	99,58	Orang		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	566.000.000	449.312.888	40 Satuan Pendidikan	79,38	Satuan Pendidikan		
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.917.499.745	4.606.011.137	228 Satuan Pendidikan	93,67	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan Belum Laporan Ke SIMBOP	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	103.000.000	94.088.000	10 Orang	91,35	Orang		
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.949.127.626	2.786.167.493		94,47			
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	200.000.000	161.397.000	2576 Peserta Didik	80,70	Peserta Didik	Untuk realisasi target sudah tercapai, akan tetapi untuk realisasi anggaran masih tersisa karena honor KPA dan BPP tidak dicairkan, serta ada kelebihan	Untuk tahun ke depan untuk Honor KPA dan BPP tidak dianggarkan kembali di Sub Kegiatan ini dan untuk makan Minum rapat & Aktivitas Lapangan

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								anggaran untuk Makan Minum Rapat dan Aktivitas Lapangan	akan disesuaikan dengan kegiatan
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	75.000.000	71.349.523	10 Satuan Pendidikan	95,13	Satuan Pendidikan		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	286.437.000	239.950.300	70 Orang	83,77	Orang		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	150.000.000	126.525.600	Kelembagaan dan Manajemen 10 Satuan Pendidikan	84,35	Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan		
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	1.913.320.000	1.908.415.855	10 Satuan Pendidikan	99,74	Satuan Pendidikan	Terdapat belanja Makan Minum aktifitas lapangan dan honor penyelenggara acara berupa honor rohaniawan peruntukan kegiatan pelantikan dan mutasi kepala sekolah tidak dapat terserap	kegiatan yang diajukan sedianya akan diselenggarakan ditahun 2024.

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								karena Pengguna anggaran sudah memasuki masa purna tugas	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan (UPT SPNF SKB)	281.370.626	236.259.215		83,97		Standar cetak Modul di DPA terlalu rendah dari biaya cetak di Percetakan, sisa perjalanan dinas dan Honorarium Tim Pelaksana untuk pengarah tidak dibayarkan	Standar Cetak di DPA harus disesuaikan dengan harga cetak di Percetakan. Sisa Perjalanan Dinas tidak ada masalah dan Honorarium Tim Pelaksana untuk Pengarah tidak dibayarkan karena melebihi ketentuan penerima.
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	43.000.000	42.270.000	10 Orang	98,30	Orang		
		3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.209.122.000	5.125.660.800		98,40			
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.209.122.000	5.125.660.800		98,40			

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.075.562.000	5.018.146.000	12 Dokumen	98,87	Dokumen	Terdapat belanja jasa pendidikan beberapa guru SD swasta i-tisham biatan karena semua guru mengundurkan diri karena ada permasalahan dalam yayasan sehingga honor tidak bisa direalisasikan	Tahun 2024 SD I-Tisham mengajukan pendidik dan tenaga kependidikan yang baru.
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	133.560.000	107.514.800	1 Laporan	80,50	Laporan	Terdapat belanja Makan Minum aktifitas lapangan dan honor penyelenggara acara berupa honor rohaniawan peruntukan kegiatan pelantikan dan mutasi kepala sekolah tidak dapat terserap karena Pengguna anggaran sudah memasuki masa purna tugas	kegiatan yang diajukan sedianya akan diselenggarakan ditahun 2024.

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		4 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	24.988.000	12.185.400		48,77			
		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.988.000	12.185.400		48,77			
		Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	24.988.000	12.185.400	1 Kamus/ 1 Buku	48,77	Kamus/Buku	Dana yang tersedia tidak cukup jika untuk membuat 1 buah kamus sehingga kemarin hanya digunakan untuk konsultasi pembuatan kamus ke Kantor Bahasa Prop Kaltim di Samarinda	Akan dianggarkan kembali di tahun 2024 sesuai hasil konsultasi yang telah dilakukan ke Kantor Bahasa Prop Kaltim
JUMLAH			608.674.000.714	545.787.158.012	100	89,67	Persen		
9	DINAS SOSIAL	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.881.772.855	7.441.116.042					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	281.485.400	274.944.025					

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.354.000	41.385.260	5 Dokumen	87,4	Dokumen	Realisasi Keuangan 87,4%, namun realisasi fisik telah mencapai 100 % yaitu sebanyak 5 Dokumen perencnaan	Telah dilakukan efesiensi anggaran dengan memaksimalkan sumber daya yg ada.
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.086.800	53.026.232	5 Laporan	99,89	Laporan		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181.044.600	180.532.533	15 Laporan	99,72	Laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.758.592.355	5.451.963.883					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.570.600.355	5.263.971.883	14 Orang/ bulan	94,50	Orang/ bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	187.992.000	187.992.000	15 Orang	100	Orang		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	147.750.000	115.974.878					
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.750.000	49.680.000	70 Paket	96	Paket		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96.000.000	66.294.878	15 Orang	69,06	Orang	Pelaksanaan Kegiatan Secara Virtual, sehingga yang dibayarkan hanya kontribusi	Penyusunan RKA agar lebih teliti dikoordinasikan dengan lembaga yang ditujuh

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.424.000	643.988.834					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.883.000	13.233.000	15 Paket	95,32	Paket		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.608.000	199.657.080	15 Paket	98,06	Paket		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.751.000	12.642.000	15 Paket	99,15	Paket		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.182.000	85.155.000	20 Paket	99,97	Paket		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	5.859.000	10 Paket	83,7	Paket		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.905.000	10 Dokumen	98,1	Dokumen		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.000.000	322.537.754	12 Bulan Laporan	99,24	Bulan Laporan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.282.400	22.510.000					
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.282.400	22.510.000	1 Unit	96,68	Unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	660.490.200	604.485.372					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.498.000	3.620.000	150 Surat Laporan	65,84	Surat Laporan		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236.842.200	210.834.638	12 Bulan Laporan	89,02	Bulan Laporan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.150.000	390.030.734	5 Orang Laporan	93,28	Orang Laporan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.748.500	327.249.050					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.000.000	230.014.750	35 Unit	88,47	Unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.840.000	31.675.000	30 Unit	99,48	Unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	49.672.000	1 Unit	99,34	Unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.908.500	15.887.300	1 Unit	99,87	Unit		
		2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.957.007.800	1.893.099.375					
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	341.186.800	340.292.930					
		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	341.186.800	340.292.930	500 Keluarga	99,74	Keluarga		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	135.236.600	132.257.975					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	135.236.600	132.257.975	20 Dokumen	97,8	Dokumen		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.480.584.400	1.420.548.470					
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	161.991.000	159.836.735	62 Orang	98,67	Orang		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	184.793.800	181.983.741	13 Orang	98,48	Orang		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	344.469.800	344.439.444	6.862 KPM Keluarga	99,99	KPM Keluarga		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	439.639.800	408.820.077	30 KUBE Lembaga	92,99	KUBE Lembaga		
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia	349.690.000	325.468.473	20 Klien Sertifikat	93,07	Klien Sertifikat		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							
		3 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.265.000.483	8.776.030.184					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	7.941.490.483	7.756.688.217					
		Penyediaan Sandang	124.980.000	115.608.000	40 klien PMKS Orang	92,5	klien PMKS Orang		
		Penyediaan Alat Bantu	172.281.000	138.540.000	33 klien Orang	80,42	klien Orang	Salah satu Klien Penyandang Disabilitas calon penerima bantuan membatalkan untuk melakukan pengukuran kaki palsu sehingga tidak bisa dibuatkan kaki palsunya	Melakukan pendekatan kepada klien calon penerima bantuan dan mengupayakan / mendatangkan petugas pengukur kaki palsu ke Kabupaten Berau
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	261.322.000	222.453.300	10 Orang	85,13	Orang		
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	6.739.714.000	6.707.918.574	1100 Orang	99,53	Orang		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat							
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	200.000.000	157.700.628	30 Orang	78,85	Orang	Kurang maksimal melakukan rapat tim koordinasi	Memaksimalkan pelaksanaan rapat tim koordinasi
		Pemberian Layanan Kedaruratan	283.193.683	264.019.996	100 Orang	93,23	Orang		
		Pemberian Layanan Rujukan	159.999.800	150.447.719	20 Orang	94	Orang		
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.323.510.000	1.189.299.967					
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	119.154.200	119.092.399	100 Puskessos Orang	99,95	Puskessos Orang		
		Pemberian Layanan Kedaruratan	234.280.000	205.477.897	9 ABH Orang	87,71	ABH Orang		
		Penyediaan Permakanan	169.958.000	169.958.000	16 Orang	-	Orang	Klien mendapatkan bantuan permakanan dari kegiatan lain dan bantuan dari lembaga masyarakat lainnya	Dinas Sosial selalu mengupayakan untuk memberikan pelayanan Penyediaan Permakanan bagi klien 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS yang merupakan Sub

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									kegiatan diluar SPM
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	284.900.000	244.423.982	33 Orang	85,79	Orang	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Sosial	Tahun 2025 ada penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	179.999.800	174.519.285	30 Orang	96,96	Orang		
		Pemberian Layanan Rujukan	193.000.000	133.772.605	16 Orang	69,31	Orang	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Sosial	Tahun 2025 ada penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	142.218.000	142.055.799	5 Lembaga/InstansiDokumen	99,89	Lembaga/Instansi Dokumen		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.132.918.800	954.210.816					
		4 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	296.969.800	182.208.900					
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	94.880.000	41.106.000	10 Orang	43,32	Orang	Berdasarkan hasil asesment di kelurahan dan kampung sedikit ditemukan anak putus sekolah, sekalipun ada namun pihak keluarganya	Mengoptimalkan sosialisasi layanan rehabilitasi sosial pada anak putus sekolah/terlantar.

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								tidak mau ke panti sosial dengan anggapan mereka masuk panti kehidupan susah dan tidak terurus dan keluarga memilih panti sasta	
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	97.209.800	76.392.100	7 Orang	78,58	Orang	Keterbatasan kouta dari Panti Sosial Prov. Untuk anak Kab. Berau	Kordinasi pada Panti Sosial Prov. Kaltim agar kouta utk Berau dapat ditingkatkan
		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	104.880.000	64.710.800	7 Orang	61,7	Orang	Karena tidak banyak ditemukan anak terlantar di kelurahan dan kampung yang mau tinggal di Panti, banyak yg memilik tinggal di tempat keluarganya	Sosialisasi layanan panti sosial terhadap keluarga klien
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	835.949.000	772.001.916					
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	184.199.800	164.096.196	13 Kecamatan Orang	89,09	Kecamatan Orang		

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	445.049.600	417.669.400	1 Dokumen Keluarga	93,85	Dokumen Keluarga		
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	206.699.600	190.236.320	2.935 Keluarga	92,04	Keluarga		
		5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	800.846.550	621.602.616					
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	354.893.550	202.283.500					
		Penyediaan Makanan	74.996.750	74.482.500	100 Orang	99,31	Orang		
		Penyediaan Sandang	74.912.000	74.462.000	100 Orang	99,4	Orang		
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	69.989.800	12.747.000	2 Tempat Unit	18,21	Tempat Unit	Karena spesifikasi tenda yang baru tidak ada di SIPD, sedangkan stock tendan yang lama masih banyak sehingga tidak jadi pengadaan tenda.	Layanan tempat penampungan korban bencana tetap dilaksanakan jika diperlukan sesuai tenda yang ada.
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	74.995.000	25.117.000	50 Orang	33,49	Orang	Berasarkan hasil asesment di lapangan tidak banyak korban bencana yg kelompok rentan	Tetap mempersiapkan dana layanan Khusus kelompok rentan.
		Pelayanan Dukungan Psikososial	60.000.000	15.475.000	100 Orang	25,79	Orang	Karena pada setiap terjadi	Tetap memepersiapkan

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								bencana (kebakaran) warga yang mengalami psikososial sedikit dan tidak mau tinggal di tenda pengungsian	biaya layanan dukungan psikososial.
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	445.953.000	419.319.116					
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	276.883.000	257.589.116	1 Kampung	93,03	Kampung		
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	169.070.000	161.730.000	30 Orang	95,66	Orang		
		6 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	482.605.800	461.567.098					
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	482.605.800	461.567.098					
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	482.605.800	461.567.098	2 Makam	95,64	Makam		
JUMLAH			21.520.152.288	20.147.626.131	100	93,62	Persen		

3.1.2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Berau pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3
Jumlah OPD Penyelenggara Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Berau Tahun 2024

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)
			Rp	Persen	
1.	DISDUKCAPIL	13.335.988.477	12.324.527.342	92,42	1.011.461.135
2.	DPMPTSP	16.272.945.758	14.450.216.826	88,80	1.822.728.932
3.	DISPORA	33.178.320.051	29.364.454.123	88,50	3.813.865.928
4.	DISKOMINFO	35.181.508.823	32.140.682.656	91,36	3.040.826.167
5.	DINASPANGAN	14.849.536.893	13.132.049.381	88,43	1.717.487.512
6.	DLHK	61.206.049.083	57.377.675.511	93,75	3.828.373.572
7.	DPMK	18.413.837.996	16.192.899.520	87,94	2.220.938.476
8.	DPPKBP3A	24.001.897.645	21.578.231.715	89,90	2.423.665.930
9.	DISPUSIB	18.886.702.992	17.539.361.831	92,87	1.347.341.161
10.	DISHUB	148.263.043.475	139.636.763.874	94,18	8.626.279.601
JUMLAH		383.589.831.193	353.736.862.779	92,22	29.852.968.414

TABEL 3.4
LAPORAN REALISASI OPD PENYELENGGARA URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.160.758.301	8.419.422.170					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	753.583.400	598.936.646					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	470.093.400	360.715.925	3	3	Dokumen		1. Untuk sisa anggaran perjalanan dinas dalam kota yang tidak terserap dikembalikan atau dilakukan pergeseran 2. mengatur ulang pelaksanaan Bimtek dengan lebih baik dan efisien ditahun berikutnya
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79.961.000	65.492.846	5	5	Dokumen	Berjalan dengan baik	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	203.529.000	172.727.875	12	12	Dokumen	- Berjalan dengan baik dengan beberapa	- melakukan penyesuaian penganggaran untuk honorarium sesuai

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								belanja tidak dilaksanakan karena terkait aturan (Honorarium) - Belanja cetak terserap 5-6 %	dengan peraturan yang berlaku - melakukan penyesuaian target jumlah dokumen yang akan dicetak dan digandakan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.297.063.101	6.842.347.450					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.961.143.101	6.511.540.030	12	12	Bulan	Berjalan baik	-
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	335.920.000	330.807.420	12	12	Bulan	Pembayaran JKK/JKM/Bpis terkait kendala kurang anggaran	Penambahan anggaran
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	117.750.000	103.900.000					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.750.000	34.450.000	60	60	Stel	Pengadaan baju ASN dan Non ASN Waskat/Hitam putih/batik	Penambahan anggaran
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	69.450.000	6	14	Orang	Kurangnya dana untuk mengikuti diklat/bimtek terkait peningkatan kompetensi tenaga teknis	Penambahan anggaran, menambah jumlah target peserta Bimtek

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.067.300	120.733.500					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.769.000	3.611.000	12	12	Bulan	Berjalan dengan baik	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.107.500	25.267.500	12	12	Bulan	Berjalan dengan baik	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.137.800	2.392.000	5	5	Jenis	Berjalan dengan baik	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.990.000	84.129.000	12	12	Bulan	Berjalan dengan baik	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.063.000	2.334.000	35	35	Buku	Kurang terserap dengan baik karena jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan yang disesuaikan dengan kebutuhan	- melakukan penyesuaian target jumlah dokumen yang akan dicetak dan digandakan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	12	12	Bulan	Anggaran untuk belanja bahan bacaan/koran kurang	Penambahan anggaran
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.000.000	277.129.777	12	12	Bulan	Berjalan dengan baik	menyesuaikan belanja perjalanan dalam daerah/kota untuk efisiensi anggaran

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	464.847.200	425.526.110					
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	459.847.200	420.530.000	1	1	Unit	bejalan dengan baik	
		Pengadaan Mebel	5.000.000	4.996.110	1	1	Unit	bejalan dengan baik	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.690.000	179.554.959					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.988.000	1.344.000	300	210	Lembar	Berjalan baik, disesuaikan dengan kebutuhan karena target belanja melebihi ketersediaan anggaran	Menyesuaikan target belanja dengan anggaran yang tersedia
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.000.000	87.981.815	12	12	Bulan	Berjalan baik, menyesuaikan tagihan rutin Listrik, Telepon dan Air	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.980.000	4.198.400	4	1	Kali	Berjalan baik, Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor disesuaikan dengan jumlah	melakukan pemeriksaan dan pendataan peralatan dan perlengkapan kantor yang harus dilakukan perawatan secara rutin

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								peralatan dan perlengkapan yang harus dilakukan perawatan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.722.000	86.030.744	12	12	Bulan	Berjalan baik	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.757.300	148.423.505					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.300.000	45.432.938	2	2	Unit	Berjalan dengan baik	Melakukan inventarisasi kendaraan yang harus dilakukan perawatan dan pembayaran pajak sesuai dengan waktu
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.000.000	67.824.072	19	19	Unit	Berjalan dengan baik	Melakukan inventarisasi kendaraan yang harus dilakukan perawatan dan pembayaran pajak sesuai dengan waktu
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.457.300	35.166.495	12	12	Bulan	Berjalan dengan baik	
		2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.503.200.613	5.133.848.085					
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	40.682.702					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	50.000.000	40.682.702	2	2	Dokumen	Kegiatan berjalan dengan lancar, ada sisa anggaran : Honor KPA yg secara fisik KPA terealisasi 100% , namun utk honor yg sesuai aturan tdk boleh dibayarkan,(b atas maksimal 3 keg) dan sisa dana lainnya adalah efisiensi anggaran	tidak ada, karena nomenklatur program kegiatan Kemen.Kominfo berubah utk tahun 2025 menjadi KOMDIGI beserta 'bunyi' aturan baru per sub kegiatan.
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5.453.200.613	5.093.165.383	2	2	Dokumen		
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	139.719.000	102.626.297	13	13	Dokumen	Kegiatan berjalan dengan lancar, ada sisa anggaran perjadin masih tersisa karena kendala dana GU yang lambat	Harus banyak melakukan pertemuan rapat evaluasi

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.998.024.668	1.893.280.827	6	6	Media	Kegiatan berjalan dengan lancar, ada sisa anggaran perjadi masih tersisa karena kendala dana GU yang lambat	Harus banyak melakukan pertemuan rapat evaluasi
		Pelayanan Informasi Publik	464.756.945	375.542.827	425	325	Dokumen	SPJ kurang lancar antar kegiatan sehingga menyebabkan GU lambat diproses	Harus banyak melakukan pertemuan rapat evaluasi
		Layanan Hubungan Media	198.272.000	167.470.000	9	9	Media		menekankan kepada pihak ketiga utk membuat rekening pada Bank Kaltimara, utk proses NPD dan GU akan di skemakan lebih merata, dan proporsional. Karena PPTK kegiatan selalu mengalah dengan kegiatan lain.
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	61.728.900	53.893.900	3	3	Kerjasama	Kegiatan berjalan dengan lancar, ada sisa	akan ada transisi ke aturan Komdigi tahun 2025.

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								anggaran : Honor KPA yg sesuai aturan tdk boleh dibayarkan,(b atas maksimal 3 keg) dan sisa dana adalah efisiensi anggaran, adapun sisa anggaran adalah sisa efisiensi .	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.590.699.100	2.500.351.532	2	2	Media dan Komunitas	kegiatan berjalan lancar sebagaimana realisasi keuangan, sisa anggaran adalah dalam rangka efisiensi	tidak ada kendala
		3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	19.070.111.880	17.437.347.515					
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.832.951.300	16.342.518.808					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	17.832.951.300	16.342.518.808	12	12	Bulan	Kegiatan tidak ada masalah, namun ada Silva karena Pagu Anggaran lebih besar dari pada e katalog,dan juga pembayaran wifi berdasarkan pemakaian	Agar lebih memperhatikan kesesuaian pagu dan e katalog
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.237.160.580	1.094.828.707					
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	249.193.000	159.822.386	1	1	Dokumen	Ada Honor yang tidak bisa di SPJ kan karena terbentur dengan aturan, dan juga sisa dari kegiatan sosialisasi dibayar berdasarkan riil	
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	363.120.580	342.791.118	2	2	Unit	Tidak ada kendala	

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	299.847.000	285.542.850	12	12	Bulan	Tidak ada kendala	
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	275.000.000	266.672.353	1	1	Aplikasi	Tidak ada kendala	
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	50.000.000	40.000.000	1	1	Paket	Tidak ada kendala	
		4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	660.228.029	444.678.469					
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	660.228.029	444.678.469					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	186.648.000	129.205.059	1	1	Dokumen	Keterbatasan SDM dan waktu untuk melaksanakan kegiatan	Di tahun 2025 ada tambahan CPNS JF Statistisi Ahli Pertama 2 orang kegiatan bisa dilaksanakn mulai di triwulan dua
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	116.620.000	72.752.238	20	20	Orang	Target Tercapai dengan baik dengan Keterbatasan SDM dan waktu untuk melaksanakan kegiatan	Di tahun 2025 ada tambahan CPNS JF Statistisi Ahli Pertama 2 orang kegiatan bisa dilaksanakn mulai di triwulan dua

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	121.690.000	81.690.672	1	1	Dokumen	Keterbatasan SDM dan waktu untuk melaksanakan kegiatan	Di tahun 2025 ada tambahan CPNS JF Statistisi Ahli Pertama 2 orang kegiatan bisa dilaksanakn mulai di triwulan dua
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	40.640.000	-	50	0		Keterbatasan waktu untuk mengadakan kegiatan sosialisasi SIPD eWalidata yang di isi oleh narsum dari kemendagri	Rencana di awal tahun 2025 akan pergerseran anggaran mengundang narsum dari kemendagri
		Pengembangan Infrastruktur	137.395.029	120.738.000	1	1	Dokumen	Tidak ada kendala.	-
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	57.235.000	40.292.500	1	1	Dokumen	Anggaran honor operator statistik sektoral terserap 100%.. Anggaran makan minum tidak terserap 100% karena keterbatasan waktu dan SDM untuk	Di tahun 2025 ada tambahan CPNS JF Statistisi Ahli Pertama 2 orang kegiatan bisa dilaksanakn mulai di triwulan dua

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								mengadakan kegiatan	
		5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	457.210.000	428.256.640					
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	374.820.000	351.022.292					
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	235.910.000	218.416.031	47	44	OPD	Tidak ada kendala, hanya masih keterbatasan SDM untuk memaksimalkan kegiatan	di Tahun 2025 ada penambahan SDM Jf. Sandiaman 2 orang dan Jf. Manggala Informatika 1 orang
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	138.910.000	132.606.261	47	44	OPD	Tidak ada kendala, hanya masih keterbatasan SDM untuk memaksimalkan kegiatan	di Tahun 2025 ada penambahan SDM Jf. Sandiaman 2 orang dan Jf. Manggala Informatika 1 orang
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	82.390.000	77.234.348					
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82.390.000	77.234.348	47	44	OPD	Tidak ada kendala, hanya masih keterbatasan	di Tahun 2025 ada penambahan SDM Jf. Sandiaman 2 orang dan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								SDM untuk memaksimalkan kegiatan	Jf. Manggala Informatika 1 orang
JUMLAH			34.851.508.823	31.863.552.879	100%	91,43	Persen		
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.544.160.477	10.656.036.432					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.944.000	75.535.461					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.976.000	42.117.461	4	4	dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.968.000	33.418.000	5	5	laporan		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.540.521.897	6.049.814.787					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.401.753.897	5.932.946.787	34	34	orang		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.768.000	116.868.000	12	12	dokumen		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.000.000	76.883.837					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	84.000.000	76.883.837	9	8	orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.187.330.280	2.005.448.427					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.860.300	7.993.000	13	13	paket		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.728.904.980	1.561.326.337	30	30	paket		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.619.000	121.177.000	60	49	paket		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.946.000	11.997.500	5	5	paket		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	2	2	dokumen		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	297.954.590	100	132	laporan		
		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	37.173.000	31.152.000					
		Pengadaan Mebel	37.173.000	31.152.000	4	4	Jenis		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.056.947.700	1.926.558.857					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	341.287.700	311.986.409	12	12	laporan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.715.660.000	1.614.572.448	12	12	laporan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.243.600	490.643.063					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	218.000.000	181.273.708	12	12	unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.950.000	42.600.300	18	18	unit	Penghematan Anggaran	Solusi : sisa dana dikembalikan ke kas daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	272.293.600	266.769.055	1	1	gedung		
	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	759.560.000	727.263.471					
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	559.840.000	536.987.853					
		Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	188.911.000	186.191.756	6	6	dokumen	Masih terdapat penduduk rentan yang belum terdata, sehingga masih banyak yang belum	Solusi : Hanya melaksanakan pelayanan adminduk kepada penduduk rentan yang melapor ke Dinas dukcapil untuk dilakukan pelayanan jemput bola,

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								mendapatkan pelayanan adminduk	Kecuali untuk masyarakat yang mengalami musibah, seperti kebakaran atau banjir untuk kasus ini tim Capil langsung datang ke lokasi untuk melakukan pelayanan adminduk.
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	196.997.000	192.008.097	13	13	laporan	Masih terdapat penduduk yang belum dilakukan perekaman ktp elektronik, ketersediaan anggaran yang terbatas	Solusinya : memprioritaskan pelayanan di sekolah setara SLTA di setiap Kecamatan dengan memprioritaskan wajib KTP yang lebih banyak
		Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan atas pelaporan peristiwa kependudukan	173.932.000	158.788.000	6	6	dokumen		
		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	199.720.000	190.275.618					
		Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	78.860.000	75.261.000	1	1	laporan		
		Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	120.860.000	115.014.618	1	1	laporan		
		3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	430.300.000	401.257.653					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pelayanan Pencatatan Sipil	301.294.000	282.384.686					
		Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan atas pelaporan peristiwa penting	128.430.000	121.095.377	400	1566	dokumen		
		Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	172.864.000	161.289.309	6	6	laporan		
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	129.006.000	118.872.967					
		Supervisi Bersama dengan Kantor Kementrian yang Meyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan agama Mengenai pelaporan Pencatatan Nikah, Talak ,Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis data Kependudukan	129.006.000	118.872.967	5	5	laporan		
		4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	501.846.000	443.261.496					
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan	210.776.000	183.818.027					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyajian Database Kependudukan							
		Pengelolaan dan penyajian data kependudukan	125.882.000	121.957.082	2	2	dokumen		
		Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	84.894.000	61.860.945	10	5	dokumen	Masih banyak OPD yang belum melakukan PKS	Melakukan Sosialisasi yang lebih intensif ke OPD yang memiliki peluang untuk melakukan kerjasama pemanfaatan data
		Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	214.739.000	194.543.124					
		Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	79.786.000	66.933.740	15	5	laporan	OPD masih kurang dalam melakukan PKS Pemanfaatan data	Melakukan Sosialisasi yang lebih intensif ke OPD yang memiliki peluang untuk melakukan kerjasama pemanfaatan data
		Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	134.953.000	127.609.384	17	17	laporan		
		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	76.331.000	64.900.345					
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	76.331.000	64.900.345	5	5	laporan		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100.122.000	96.708.290					
		Penyusunan Profil Kependudukan	100.122.000	96.708.290					
		Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lainnya	100.122.000	96.708.290	1	1	dokumen		
JUMLAH			13.335.988.477	12.324.527.342	100	92,42	Persen		
3.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	14.244.032.315	13.068.032.910					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	331.380.000	314.045.399	7	7	Dokumen		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	154.498.000	146.736.199	4	4	Dokumen		
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18.442.000	18.442.000	2	2	Laporan		
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	158.440.000	148.867.200	1	1	Laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.385.099.039	6.650.112.718	26	26			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.110.315.039	6.389.828.718	12	12	OB		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	207.960.000	193.460.000	12	12	Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	58.041.000	58.041.000	1	1	Laporan		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.783.000	8.783.000	1	1	Laporan		
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	7.990.000	7.590.000	24	24			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2.990.000	2.850.000	12	12	Laporan		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	5.000.000	4.740.000	12	12	Laporan		
		Adiminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Darerah	9.999.000	9.999.000	12	12	Dokumen		
		Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	9.999.000	9.999.000	12	12	Dokumen		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.973.000	62.394.566	87	85	Orang		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	29.975.000	27.500.000	82	82	Paket		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	54.998.000	34.894.566	5	3	Orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	576.208.850	552.195.562	10861	10861			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	6.599.000	5	5	Paket		
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	202.527.100	199.673.400	38	38	Paket		
		Penyediaan peralatan rumah tangga	3.497.000	3.497.000	5	5	Paket		
		Penyediaan bahan logistik kantor	66.685.000	64.354.000	12	12	Paket		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.999.750	31.979.000	10.000	10.000	Paket		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000	3.840.000	720	720	Dok		
		Penyediaan Bahan/Material	35.000.000	31.694.200	1	1	Paket		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	215.000.000	210.558.962	80	80	Laporan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.074.952.176	1.027.407.326	2	2			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	486.000.000	445.931.826	3	3	Unit		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	45.000.000	1	1	Unit		
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.469.800	1.469.800	2	2	Unit		
		Pengadaan Mebel	108.797.176	108.730.000	3	3	Unit		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.685.200	48.685.200	2	2	Unit		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	380.000.000	377.590.500	2	2	Unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.938.387.250	3.656.693.459	58	58			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.112.257.250	865.837.643	12	12	Laporan		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	24.970.000	11.375.000	7	7	Laporan	Beberapa AC, Komputer dan Peralatan Komputer Lainnya yang Masih Prima Sehingga Tidak Dilakukan Pemeliharaan	Lebih Cermat Dalam Identifikasi Kebutuhan Anggaran
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.801.160.000	2.779.480.816	39	39	Laporan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	835.043.000	787.594.880	17	17			

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Urusan Pemerintah Daerah							
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.174.000	63.489.750	11	11	Unit		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.859.000	41.382.000	2	2	Unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.450.000	48.685.200	1	1	Unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	281.280.000	279.736.900	1	1	Unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	156.280.000	154.904.030	1	1	Unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	199.397.000	1	1	Unit		
		2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.705.798.000	1.664.487.431					
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	1.232.298.000	1.212.838.042	44	44			

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing Pemuda Pelopor	334.848.000	318.992.420	8	8	Orang		
		Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemuda	147.450.000	146.960.622	35	35	Orang		
		Peningkatan Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	750.000.000	746.885.000	1	1	Orang		
		Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	473.500.000	451.649.389	8	8			
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	473.500.000	451.649.389	8	8	Orang		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16.181.969.736	13.594.269.742					
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.861.667.838	1.640.131.245	1	1			
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota	1.861.667.838	1.640.131.245	1	1	Unit		
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	2.178.892.000	1.961.505.253	42	42			
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Even dan Single Even Tingkat Kabupaten/Kota	1.078.894.000	957.588.800	6	6	Dokumen		
		Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	450.000.000	408.289.600	8	8	Dokumen		
		Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	649.998.000	595.626.853	28	28	Orang		
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	5.159.722.000	4.017.105.321	674	568			
		Seleksi Atlit Daerah	49.988.000	47.490.000	250	250	Orang		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	74.995.000	16.250.000	1		Pelatda	Pemusatan Peatihan Atlit Disabilitas Yang Semulanya Akan Dilaksanakan Oleh Dispora Kabupaten Berau, Namun Kebijakan Dispora Provinsi Mengambil Alih Pelaksanaan Tersebut.	Meningkatkan Koordinasi Dengan Dispora Provinsi Dalam Hal Agenda / Kalender Olahraga Tahunan
		Pembinaan dan pengembangan atlit berprestasi Kabupaten/Kota	4.038.748.000	3.464.410.441	250	215	Orang		
		Pemberian penghargaan olahraga Kabupaten/Kota	915.991.000	412.000.000	150	80	Orang	Anggaran Yang Belum Terealisasi Adalah Anggaran Yang Disediakan Untuk Bonus Atlit Disabilitas, Atlit dan Pelatih PON Sumut dan	Penganggaran yang Lebih Cermat Dengan Menyesuaikan Data Atlit dan Pelatih Berprestasi Yang Akan Diberikan Penghargaan / Bonus

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Aceh 2024, Namun Atlit Disabilitas Meraih Minim Prestasi serta Atlit dan Pelatih PON Akan Diahlihan Pemberian Bonusnya Pada Tahun 2025 Dikarenakan Anggaran Yang Ada Tidak Dapat Mencakup Seluruh Atlit dan Pelatih PON Yang Akan Diberikan Penghargaan/ Bonus.	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data dan Informasi Sektoral Olahraga	80.000.000	76.954.880	23	23	Dokumen		
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.035.000.000	840.021.800	19	15			
		Standarisasi Organisasi Keolahragaan	335.000.000	140.021.800	18	14	Dokumen	Anggaran Ini Yang	Meningkatkan Koordinasi Dengan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Disediakan Untuk Pelaksanaan Pelatihan/Sertifikasi Wasit dan Pelatih Cabor Sepak Takraw dan Cabor Sepak Bola, Namun Yang Terlaksana Hanya Cabor Sepak Takraw. Sedangkan Pelatihan/Sertifikasi Wasit dan Pelatih Cabor Sepak Bola Tidak Terlaksana Dikarenakan Menurut Pengurus Cabornya Anggaran Yang tersedia Tidak Cukup.	Pengurus Cabor Terkait Kebutuhan Anggaran Kegiatan
		Pengembangan organisasi keolahragaan	700.000.000	700.000.000	1	1	Organisasi		
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	5.946.687.898	5.135.506.123	12	11			

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	672.936.000	633.763.080	2	2	Dokumen		
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	49.999.000	48.101.000	2	2	Laporan		
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	4.948.752.898	4.200.370.856	6	5	Unit		
		Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat	275.000.000	253.271.187	2	2	Dokumen		
		4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	1.046.520.000	1.037.664.040					
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.046.520.000	1.037.664.040	251	251			
		Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	218.445.000	210.488.160	250	250	Orang		
		Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	828.075.000	827.175.880	1	1	Laporan		
JUMLAH			33.178.320.051	29.364.454.123	100%	88,50	Persen		
4.	Pangan	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.137.025.893	8.016.475.469			87,74		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	358.480.000	345.845.375			96,48		
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.280.000	146.767.259	2	2	dokumen		
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	8.862.250	1	1	laporan		
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.200.000	190.215.866	4	4	kali		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.051.750.393	6.086.389.682					
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.849.690.393	5.903.929.682	12	12	bulan		
		- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	202.060.000	182.460.000	12	12	bulan		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	205.080.000	190.978.544					
		- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.000.000	51.160.000	40	40	org		
		- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	67.080.000	62.669.120	13	13	lokasi		
		- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000	77.149.424	5	5	org		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.415.500	507.429.824					
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.783.000	10	10	jenis		
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.707.500	186.414.000	5	5	jenis		
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.708.000	73.949.800	12	12	bulan		
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	7.928.000	5	5	jenis		
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	7.000.000	6.480.000	2	2	exsampler		
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000	224.875.024	35	35	kali		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000.000	280.600.000					
		- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	300.000.000	280.600.000	1	1	unit		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.300.000	379.910.178					
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	840.000	150	150	surat		
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.000.000	83.531.374	12	12	bulan		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		- Penyediaan Jasa Palayanan Umum Kantor	327.300.000	295.538.804	7	7	org		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.000.000	225.321.866					
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.000.000	215.761.866	43	43	unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.560.000	10	10	jenis		
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0	0			
		2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	502.465.000	319.790.470					
		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	502.465.000	319.790.470					
		- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	185.000.000	10.822.513	1	0	unit	Infrastruktur tdk terealisasi krn lokasi	Lokasi hibah disiapkan sebelum penetapan DPA

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								hibah tidak tersedia	
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	91.060.000	87.809.472	2	2	kali		
		- Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	226.405.000	221.158.485	1	1	unit		
		3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.249.147.500	3.042.043.608					
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.401.432.000	1.282.797.227					
		-Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	660.224.000	618.886.082	5	5	jelis olahan		
		- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	134.420.000	117.393.568	9	9	kali		
		- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	214.000.000	189.151.094	1	1	Klp		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	110.000.000	100.587.199	13	13	Klp		
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	175.508.000	154.092.508	13	13	titik/lokus		
		- Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	107.280.000	102.686.776	1	1	laporan		
		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	976.145.500	927.623.606					
		- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	92.920.000	81.767.906	1	1	Dokumen		
		- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	883.225.500	845.855.700	30	25,92	Ton	Target 30 ton tdk tercapai karena ada kenaikan harga beras cppd, sehingga dana yang ada disesuaikan menjadi 25,92 ton	Antisipasi kenaikan harga
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	871.570.000	831.622.775					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	111.500.000	105.880.962	1	1	Laporan		
		- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	652.500.000	626.618.204	10	10	Klp		
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	107.570.000	99.123.609	2	2	kali		
		4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	919.062.500	828.198.043					
		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	204.060.000	195.381.568					
		- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	204.060.000	195.381.568	2	2	Peta		
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	715.002.500	632.816.475					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	715.002.500	632.816.475	12	12	kali		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM		ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.041.836.000	925.541.791					
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1.041.836.000	925.541.791					
			- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	146.996.000	131.996.722	3	3	Rekom		
			- Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	142.000.000	128.407.323	3	3	Rekom		
			- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	403.840.000	396.758.200	52	52	Sampel		
			- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	349.000.000	268.379.546	4	4	Klp		
JUMLAH				14.849.536.893	13.132.049.381	100	88,43	Persen		
5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	23.553.472.001	21.956.649.208					
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	392.454.500	347.438.150					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	170.278.500	146.209.267	1	1	dokumen		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	222.176.000	201.228.883	1	1	even		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.248.054.301	11.531.190.256					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.954.016.301	11.254.842.256	12	12	bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	294.038.000	276.348.000	12	12	bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	237.250.000	234.667.250					
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	92.250.000	89.915.000	125	125	stel		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	145.000.000	144.752.250	9	15	orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	935.885.400	761.643.326					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	38.861.000	26.603.000	2	2	jenis		
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	269.010.200	233.048.500	12	12	bulan		
		Penyediaan bahan logistik kantor	104.712.200	72.501.500	994	1165	porsi		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.302.000	14.176.200	10	23	jenis	Realisasi melebihi target yang sudah ditetapkan	Target dan realisasi akan disesuaikan pada perencanaan ke depan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35.000.000	29.999.970	5	42	eksemplar		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	450.000.000	385.314.156	12	12	bulan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	448.420.000	437.900.000					
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	376.000.000	367.600.000	1	5	unit		
		Pengadaan Mebelair	72.420.000	70.300.000	6	6	jenis		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.106.422.600	5.738.324.922					
		Penyediaan jasa surat menyurat	8.690.000	2.500.000	1.000	125	surat		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	446.945.200	322.803.190	4	4	jenis		
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5.650.787.400	5.413.021.732	118	118	orang		
		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3.184.985.200	2.905.485.304					
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2.058.980.000	1.903.608.121	30	13	jenis		
		Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	54.810.000	53.885.750	30	44	jenis		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1.027.640.400	919.435.433	12	12	bulan	Terdapat silva karena ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Pembersihan Sungai Segah dan Sungai Kelay sebesar Rp 90.377.000, disebabkan kegiatan bersifat terlalu teknis (bidang kebersihan), sementara kegiatan tersebut masuk di belanja rutin	Berupaya penganggaran dapat lebih efektif / tepat sasaran pada penganggaran berikutnya
		Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	43.554.800	28.556.000	6	32	jenis	Realisasi tercapai melebihi target yang ditentukan	Target dan realisasi akan disesuaikan pada perencanaan ke depan
		2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	725.630.000	715.210.076					
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	75.000.000	74.699.766					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	75.000.000	74.699.766	1	1	dokumen		
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	650.630.000	640.510.310					
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	650.630.000	640.510.310	1	1	dokumen		
	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.675.599.020	1.519.617.295					
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	1.675.599.020	1.519.617.295					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	194.099.800	183.698.311	13	13	kecamatan		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	223.820.000	203.659.733	391,466	572,41	ton CO2eq		
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.257.679.220	1.132.259.251	500	139	dokumen		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	490.285.300	453.445.092			dokumen		
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	315.445.300	286.432.291	3	5	kali		
		Penghentian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	174.840.000	167.012.801	20	20	perusahaan		
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	603.535.800	406.404.699					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	153.573.000	122.485.221	13	13	kali	Honor narasumber bimtek tentang Limbah Bahan Beracun Berbahaya /unsur-unsur pencemar (limbah pabrik) tidak terealisasi sebesar Rp 25.000.000,- karena belum ada jadwal yang pasti dari Kementrian	

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	199.320.000	125.315.978	4	4	kali	Terdapat silva karena pagu pengadaan barang yang diserahkan ke masyarakat di DPA lebih tinggi dari harga pasar	Untuk penyusunan anggaran ke depan diupayakan memperhatikan harga pasar
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	250.642.800	158.603.500	4	4	kali		
		4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	11.173.341.146	10.705.227.022					
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	11.173.341.146	10.705.227.022					
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.970.792.846	9.671.094.533	4	4	lokasi		
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.202.548.300	1.034.132.489	4	4	lokasi		
		5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA	464.328.000	377.877.160					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN							
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	464.328.000	377.877.160			lokasi		
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	464.328.000	377.877.160	20	9	lokasi	Dokumen yang terealisasi hanya 9 dari target 20 dokumen dikarenakan adanya perubahan peraturan yang menyatakan bahwa izin TPS Limbah B3 bukan lagi merupakan izin melainkan bagian dari Persetujuan Lingkungan yaitu Rintek Limbah B3	Untuk penyusunan anggaran ke depan, target kinerja akan disesuaikan dan dilakukan perubahan nama kegiatan menjadi pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara Limbah B3 di kabupaten/kota
		6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	469.253.000	447.173.831					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	469.253.000	447.173.831					
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	217.968.000	199.799.593	100	7	dokumen	Dokumen yang terealisasi hanya 7 dari target 100 dokumen dikarenakan sebagian verifikasi dokumen lingkungan dilakukan secara online pada system OSS serta adanya perubahan peraturan yang menyatakan bahwa beberapa proses	Untuk penyusunan anggaran ke depan, target kinerja akan disesuaikan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								dokumen lingkungan menjadi kewenangan pusat dan provinsi	
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	251.285.000	247.374.238	20	32	kali		
		7 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.070.397.700	958.629.668					
		Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	1.070.397.700	958.629.668					
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	398.758.000	342.528.334	1	1	kampung		
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	211.602.700	196.928.462	2	1	even		
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan	460.037.000	419.172.872	3	3	sekolah		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		8	Kampanye Lingkungan Hidup						
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	134.436.000	126.074.183				
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	134.436.000	126.074.183				
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	134.436.000	126.074.183	7	7	aduan	
		9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	20.845.771.116	19.711.367.277				
			Pengelolaan Sampah	20.845.771.116	19.711.367.277				
			Penangan sampah melalui pengangkutan	8.919.485.816	8.721.211.497	100	100	%	Sisa Anggaran dari Pembayaran tenaga Kebersihan dengan adanya tenaga kebersihan yang keluar/ mengundurkan diri
			Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di	11.073.126.300	10.228.540.944	58	58	jenis	Terdapat Sisa Anggaran dari Pengadaan yg melalui

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TPA/TPS/SPA Kabupaten Kota						Ecatalog dimana harganya jauh lebih rendah dari Pagu dan Efisiensi BBM Operasional	
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	443.409.600	400.406.559	4	4	kecamatan		
		Pengurangan sampah dengan melakukan pendauran ulang sampah	409.749.400	361.208.277	1000	1000	kg		
JUMLAH			61.206.049.083	57.377.675.511	100	93,75	Persen		
6.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.197.836.842	11.458.154.129					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	454.404.300	435.524.651					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	67.709.600	60.561.271	3	3	89,44	Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	105.000.000	101.005.907	8	8	100	Dokumen	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	281.694.700	273.957.473	4	4	96,20	Dokumen	

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.942.323.143	8.368.934.117					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.940.983.143	7.407.314.327	12	12	93,28	Bulan	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	757.800.000	732.839.790	12	12	96,71	Bulan	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	243.540.000	228.780.000	1	1	93,94	Dokumen	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	19.999.600	16.819.700					
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.999.600	16.819.700	4	4	84,10	Laporan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127.000.000	126.630.423					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	42.000.000	42.000.000	71	71	100	paket	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	85.000.000	84.630.423	14	15	99,57	Orang	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	734.843.799	696.030.860					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	41.000.000	40.922.000	20	32	99,81	paket	
		Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	159.398.900	149.216.700	55	55	93,61	paket	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.944.899	11.870.000	17	17	99,37	paket	

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000	79.045.000	40	40	90,34	paket	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	10.303.000	3	3	34,34	paket	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	24.950.000	9	9	99,80	dokumen	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.000.000	379.724.160	40	55	99,93	laporan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	583.768.000	577.792.323					
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	544.000.000	538.024.323	5	5	98,90	unit	
		Pengadaan Mebel	39.768.000	39.768.000	14	14	100	Unit	
		Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	-	-	0	0	0	Unit	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	298.688.000	271.345.711					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.688.000	3.038.000	375	400	82,38	Surat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.000.000	268.307.711	12	12	90,95	laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.036.810.000	965.076.344					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	283.106.000	270.372.487	30	30	95,50	Unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.930.000	48.865.000	7	7	54,34	unit	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	336.000.000	323.119.523	2	2	96,17	Unit	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.774.000	322.719.334	2	2	98,46	Unit	
		2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	4.797.289.250	4.348.444.357					
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.759.965.650	3.402.462.716					
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	273.907.450	173.786.162	1	0	63,45	Unit	Karena Belanja Modal yang tidak dilaksanakan keterlambatan proses pengadaan pada saat akan dilakukan akun PA di non aktifkan oleh LKKP, pengajuan pengaktifan sudah dilakukan oleh LPSE tapi hingga akhir Nopember belum ada

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									respon, sementara waktu pelaksanaan pekerjaan diperkirakan 1 bulan sehingga waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan pekerjaan ini
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	489.999.300	424.604.045	25	40	86,65	Perpustakaan	
		Pengembangan Ke khasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	84.237.900	83.517.800	360	4.500	360	eksemplar	
		Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kabupaten / Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	1.899.999.600	1.847.654.422	10	30	97,24	lokasi	
		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten / Kota	92.449.800	78.350.820	20	20	84,75	Perpustakaan	
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	456.437.200	431.134.738	45	580	94,46	orang	
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	138.044.800	130.570.588	3	3	94,59	Layanan	
		Pengembangan Bahan Pustaka	115.979.800	108.134.166	120	47	93,24	eksemplar	Harga buku mengalami kenaikan 50% dari harga sebelumnya ,

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									jenis pengadaan yang dibeli merupakan buku Referensi, harganya cukup mahal
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	208.909.800	124.709.975	1.100	1.468	59,70	eksemplar	
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.037.323.600	945.981.641					
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	439.469.800	406.461.564	6	8	92,49	lokus	
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	397.299.800	350.038.544	30	540	88,10	orang	
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi sosial	200.554.000	189.481.533	120	149	94,48	Perpustakaan	
	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	62.380.500	51.379.901					
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	45.340.600	37.962.001					
		Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan Naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	45.340.600	37.962.001	4	52	83,73	eksemplar	

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.039.900	13.417.900	70	70	78,74	Persen	
		Pengolahan dan Penyiangan koleksi budaya etnis Nusantara	17.039.900	13.417.900	12	18	78,74	eksemplar	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.829.196.400	1.681.383.444					
	4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.135.260.800	1.092.955.184					
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	430.694.000	420.939.131					
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	160.310.000	157.260.151	90	90	98,10	Berkas	
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	163.304.000	159.329.520	35.000	40.000	97,57	berkas	
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan kabupaten/kota	107.080.000	104.349.460	1	1	97,45	laporan	
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	97.066.800	90.086.725					
		Akuisisi,Pengolahan,Prese rvasi,dan Akses Arsip Statis	97.066.800	90.086.725	6.500	6.500	92,81	berkas	
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	607.500.000	581.929.328					
		Penyediaan Informasi , Akses dan Layanan	421.800.000	398.599.260	56	70	94,50	pengguna	

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Melalui JIKN							
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	185.700.000	183.330.068	1	1	98,72	laporan	
		5 PROGRAM PERLINDUNGANDAN PENYELAMATAN ARSIP	588.935.600	485.118.755			82,37		
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Yang Memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	503.778.600	411.505.595					
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	189.345.600	186.960.780	650	655	98,74	arsip	
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	314.433.000	224.544.815	2.700	0	71,41	berkas	Karena rekom ANRI tentang Pemusnahan Arsip keluar di Akhir Desember 2024, sehingga tidak bisa dilaksanakan karena tidak cukup waktu , jadi pemusnahan Arsip akan dilaksanakan tahun 2025

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pencarian arsip Statis Kabupaten/kota yang dinyatakan hilang	85.157.000	73.613.160				
			Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan hilang	85.157.000	73.613.160	10	10	86,44	arsip
		6	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	105.000.000	103.309.505				
			Pelaksanaan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup di Kabupaten / Kota	105.000.000	103.309.505				
			Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	105.000.000	103.309.505	3	3	98,39	Arsip
JUMLAH			18.886.702.992	17.539.361.831	100%	92,87	Persen		
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.753.679.696	8.059.575.063				
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	661.900.000	523.330.928	100	80	%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	39.887.932	5	5	Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	456.510.000	370.820.779	1	1	Laporan	

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.390.000	112.622.217	2	2	Laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.249.083.096	5.931.169.944	100	100	%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.094.963.096	5.810.869.944	35	35	Orang		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	154.120.000	120.300.000	15	12	Orang		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	139.980.000	93.699.900	45	45	Orang		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.980.000	44.753.900	1	1	Paket		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	85.000.000	48.946.000	10	7	Orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	604.396.400	549.117.954	45	45	Orang		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.980.000	8.980.000	4	4	Paket		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.736.400	188.542.900	4	4	Paket		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.700.000	70.279.000	4	4	Paket		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.980.000	10.160.000	4	4	Paket		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000	5.620.000	1	1	Dokumen		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.000.000	265.536.054	4	4	Laporan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.913.200	405.513.200	20	20	Unit		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	323.000.000	280.600.000	2	1	Unit		
		Pengadaan Mebel	40.000.000	40.000.000	5	5	Unit		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.913.200	84.913.200	3	3	Unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.231.000	380.540.582	12	12	Bulan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	144.281.000	123.649.378	12	12	Laporan		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	7.360.000	20	20	Laporan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	282.950.000	249.531.204	7	6	Laporan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.176.000	176.202.555	80	80	%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	187.890.000	162.075.955	19	19	Unit		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.286.000	14.126.600	1	1	Unit		
		2 PROGRAM PENATAAN DESA	471.544.000	261.582.626					
		Penyelenggaraan Penataan Desa	471.544.000	261.582.626	1	0	Desa	Silpa Rp. 209.961.374 merupakan akumulasi saldo Sub Kegiatan. Rencana pemekaran Kampung Babagung (Talisayan) terhambat karena persyaratan terkait Perbup Penetapan dan Penegasan Batas belum terbit sebagai syarat utama untuk dilaksanakannya pemekaran kampung sebagaimana	Melakukan koordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan Setda Berau selaku leading sektor penetapan batas untuk memprioritaskan Kampung Talisayan dalam penyelesaian batasnya

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf f Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	
		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa (Idem)	164.900.000	38.152.620	1	0	Desa	Silpa Rp. 126.747.380 , sisa belanja persediaan, efisiensi anggaran perjalanan dinas dan Rp. 100.000.000 untuk pembuatan Naskah Akademik dalam rangka penyusunan Perda sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (2,3,4) Permendagri 21 tahun 2017 tentang Penataan Desa terhambat dengan belum	Melalui Tim Penataan Kampung Talisayan yang telah dibentuk mendorong pihak-pihak terkait dalam hal ini Kecamatan beserta Kampung Talisayan dan Kampung Biatan Ilir yang masih berselisih terhadap penetapan batas kampung Talisayan untuk bersepakat menyerahkannya permasalahannya kepada Bupati Berau

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								terbitnya Perbup Penetapan dan Penegasan Batas	
		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	72.890.000	45.717.200	1	0	Desa	Silpa Rp. 27.172.800, efisiensi anggaran pada BBM, makan minum rapat dan perjalanan dinas. Rencana pemekaran Kampung Babagung (Talisayan) terhambat karena persyaratan terkait Perbup Penetapan dan Penegasan Batas belum terbit sebagai syarat utama untuk dilaksanakannya pemekaran kampung sebagaimana	Melakukan koordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan Setda Berau selaku leading sektor penetapan batas untuk memprioritaskan Kampung Talisayan dalam penyelesaian batasnya

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf f Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	
		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	74.565.000	23.782.480	1	1	Desa	Silpa Rp. 44.381.520.000, efisiensi anggaran BBM dan perjalanan dinas dalam kota	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	159.189.000	153.930.326	50	50	Unit		
		3 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	57.460.000	32.957.624					
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	57.460.000	32.957.624	14	14	Lembaga		
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	57.460.000	32.957.624	1	1	Dokumen		
		4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.732.599.000	3.986.691.510					
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.732.599.000	3.986.691.510	50	50	%		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.600.000.000	1.488.348.760	1	1	Dokumen		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	30.000.000	28.049.000	1	1	Dokumen		
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	105.000.000	62.841.000	1	1	Dokumen		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	850.000.000	684.117.000	1	1	Dokumen		
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	200.000.000	151.628.400	100	100	Orang		
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	265.000.000	243.339.991	1	1	Dokumen		
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	479.760.000	327.153.000	1	1	Laporan		
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	47.000.000	38.046.350	1	1	Laporan		
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	180.080.000	79.414.592	1	1	Dokumen		
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	152.000.000	129.344.485	1	1	Dokumen		
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	150.000.000	147.221.950	100	100	Orang		
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa/Kampung	70.000.000	16.041.000	1	1	Laporan		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	603.759.000	591.145.982	1	1	Dokumen		
		5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.398.555.300	3.852.092.697	30	16	Swadaya (Kampun)	Tidak semua kampung yang paham mengenai pendataan dana partisipasi swadaya masyarakat (partisipasi masyarakat itu sendiri dan pihak ketiga). Silpa Rp.546.462.603 , dari 8 Sub Kegiatan pendukung Kegiatan	Melanjutkan pendampingan pendataan partisipasi swadaya masyarakat pada tahun 2025 (Perlu Penyesuaian anggaran)
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	4.398.555.300	3.852.092.697	25	25	Lembaga Kemasyara katan		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	88.675.000	71.909.921	1	1	Dokumen		
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	615.909.200	509.047.622	1	1	Dokumen		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	160.884.600	116.554.793	1	1	Lembaga		
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	65.000.000	29.731.400	1	1	Unit		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	160.708.000	141.911.004	1	1	Dokumen		
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	271.128.500	264.961.919	1	1	Laporan		
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	292.250.000	199.295.373	1	1	Laporan		
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.744.000.000	2.518.680.665	1	1	Dokumen	Dokumen kegiatan selama 1 tahun	
JUMLAH			18.413.837.996	16.192.899.520	100%	87,94	Persen		
8.	DPPKBP3A	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	11.120.612.313	10.239.339.657					
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.787.200	433.605.983					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.348.800	53.672.119	4	4	Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	69.009.000	68.288.931	1	1	Dokumen		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	318.429.400	311.644.933	13	13	Dokumen		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.073.562.413	7.357.785.223					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.214.082.413	6.512.307.463	12	12	Bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	676.300.000	669.067.760	12	12	Bulan		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	183.180.000	176.410.000	12	12	Bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.075.000	292.768.162					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	144.075.000	138.825.000	163	163	Stel		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	155.000.000	153.943.162	6	6	Orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	684.068.800	662.430.517					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	18.482.000	18.476.000	1	1	Paket		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.362.300	147.644.000	600	600	Buah/Boto l/Kotak/U nit		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.729.500	30.131.000	1	1	Paket		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.000.000	139.112.000	12	12	Bulan		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Panggandaan	29.999.800	29.493.800	12	12	Bulan		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.493.000	1306	1306	Exemplar		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.995.200	4.947.500	1	1	Paket	Untuk Tahun 2024 tidak tamu yang difasilitasi untuk penggunaan Alat Apung	Untuk Tahun 2025 tetap di anggarkan dikarena apabila ada tamu yang perlu difasilitasi Alat Sewa Apung.
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.000.000	285.133.217	260	256	Kali		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.037.452.500	931.049.600					
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	485.037.500	428.769.600	2	2	Unit		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	494.109.000	446.280.000	2	2	Unit		
		Pengadaan Mebel	39.266.000	38.150.000	1	1	Paket		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.040.000	17.850.000	1	1	Paket		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	162.798.600	152.435.472					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000	2.120.000	12	12	Bulan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.998.600	150.315.472	12	12	Bulan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.867.800	409.264.700					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.965.800	298.934.700	580	580	UB		
		Pemeliharaan Mebel	2.500.000	2.500.000	1	1	Paket		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.470.000	49.390.000	50	50	Unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.932.000	58.440.000	1	1	Paket		
		2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.324.599.600	1.260.173.808					
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	407.900.000	384.034.835					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kewenangan Kabupaten / Kota							
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	230.350.000	227.101.758	36	36	OPD		
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	177.550.000	156.933.077	40	40	Orang		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	916.699.600	876.138.973					
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	699.650.000	676.367.973	40	40	Orang		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	217.049.600	199.771.000	2	2	Kali		
		3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	549.949.400	455.968.555					
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	129.949.400	123.187.242					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	129.949.400	123.187.242	50	50	Orang		
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	150.000.000	93.902.409					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	150.000.000	93.902.409	9	9	Kasus	Yang tidak terealisasi, Makan minum (karena kasus perempuan yang ditempatkan dirumah aman hanya 4 orang dari 19 kasus) dan untuk perjalanan dinas dalam daerah tidak terealisasi seluruhnya karena kasus yg terjadi kebanyakan di tanjung redeb	Meningkatkan Sosialisasi pada masyarakat agar berani melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi di wilayahnya

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								(dalam kota) sehingga nya tidak memerlukan biaya penginapan	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	270.000.000	238.878.904					
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	270.000.000	238.878.904	6	6	Unit		
		4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	658.033.000	617.991.735					
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	367.033.000	335.486.041					
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	272.989.000	260.701.573	900	900	Orang		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	94.044.000	74.784.468	20	20	Keluarga		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	291.000.000	282.505.694					
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	206.000.000	200.018.696	- 36 - 13	- 36 - 13	- OB - Unit		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	85.000.000	82.486.998	4	4	Orang		
		5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	275.404.000	242.385.111					
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender	275.404.000	242.385.111					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		dan Anak Dalam Kelembagaan Data Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	275.404.000	242.385.111	1	1	Aplikasi		
		6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	923.427.000	876.093.369					
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	569.961.000	536.989.862					
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	404.990.000	381.206.872	7	5	Kegiatan		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	164.971.000	155.782.990	1	1	Dokumen		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	353.466.000	339.103.507					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota							
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	353.466.000	339.103.507	2	2	Kegiatan		
		7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.445.033.000	1.321.141.975					
		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	315.295.000	304.758.620					
		Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program / Kegiatan Pencegahan KTA	315.295.000	304.758.620	3	3	Kegiatan		
		Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	663.238.000	583.817.907					
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	663.238.000	583.817.907	50	50	Orang		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	466.500.000	432.565.448					
		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	281.500.000	257.139.356	2	2	Kali		
		Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	185.000.000	175.426.092	25	25	Orang		
		8 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	566.871.500	404.294.108					
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	196.072.000	169.260.017					
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan	75.012.000	68.763.900	15	15	Sekolah		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal							
		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Non Formal	86.060.000	68.630.000	10	10	Sekolah		
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	35.000.000	31.866.117	1	1	Laporan		
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Pendudukan Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	370.799.500	235.034.091					
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	86.060.000	46.312.863	23	23	Faskes	dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang memiliki sasaran indikator yang sama sehingga dilakukan efisiensi anggaran dengan cara menggunakan anggaran kegiatan hanya pada salah satu sub kegiatan saja seperti makan	Untuk Tahun 2025 Kegiatan Siga akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan rencana aksi bidang Dalduk,

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								minum, BBM, Perdin dalam	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	84.000.000	28.008.000	12	12	Laporan	dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang memiliki sasaran indikator yang sama sehingga dilakukan efisiensi anggaran dengan cara menggunakan anggaran kegiatan hanya pada salah satu sub kegiatan saja seperti makan minum, BBM, Perdin dalam	Untuk Tahun 2025 Kegiatan Siga akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan rencana aksi bidang Dalduk
		Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	200.739.500	160.713.228	40	40	Rumah Data		
		9 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.809.163.132	3.118.313.478					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.370.599.200	1.127.324.573					
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	654.799.600	514.396.038	13	13	Kecamatan	dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang memiliki sasaran indikator yang sama sehingga dilakukan efisiensi anggaran dengan cara menggunakan anggaran kegiatan hanya pada salah satu sub kegiatan saja seperti makan minum, BBM, Perdin dalam	Untuk Tahun Anghgaran 2025 Bidang dalduk akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran Tahun 2025 dan sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan dari awal Tahun agar penyerapan bisa maksimal.
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	277.820.000	228.920.294	130	124	Laporan		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000	85.465.000	5	5	Dokumen		
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	337.979.600	298.543.241	13	13	Kecamatan		
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	396.000.000	270.450.000					
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	396.000.000	270.450.000	2640	1803	Orang	PPKBD dan SUB PPKBD di kampung pada beberapa kecamatan tidak bisa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban untuk pengajuan honor, dikarenakan PKB tidak berada ditempat untuk melakukan	Untuk Tahun 2025 Bidang Dalduk akan monev dan pendampingan secara langsung di 4 Kecamatan yang masih sangat rendah Penyerapannya agar IMP bisa meng SPJ kan dan mencari solusi permasalahan selama ini yang ada di lapangan dan menarik laporan dari SIGA adapun 4 Kecamatan yaitu : Kecamatan Segah , Kecamatan Kelay , Kecamatan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								pendampingan dalam melakukan penarikan data dari Aplikasi SIGA. Sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk pembayaran honor.	Sambaliung dan kecamatan Tabalar.
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	1.871.911.932	1.592.593.005					
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	129.775.000	106.734.663	23	23	Faskes		
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	532.827.000	459.764.751	1032	1032	Orang		
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	660.807.932	558.807.084	1	1	Unit Balai Penyuluhan		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36.194.000	36.194.000	3	3	Kegiatan		
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	262.365.000	215.159.716	30	30	Orang		
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	249.943.000	215.932.791	4	4	Kali		
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	170.652.000	127.945.900					
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	170.652.000	127.945.900	29	29	Kampung	PKB yang bertugas di kecamatan Kelay dan Maratua tidak Maksimal dalam melaksanakan kegiatan poktan dan pokja. Sedangkan PKB yg	Untuk Tahun Anggaran 2025 Bidang Dalduk akan secara langsung ke Kecamatan Kelay dan maratua untuk melaksanakan kegiatan Pokja dan melakukan pendampingan serta pembinaan kepada PKB wilker Kelay dan maratua agar bisa melaksanakan

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								bertugas di kecamatan segah sedang cuti menikah dan cuti melahirkan	kegiatan Pokja secara Mandiri karena sudah menjadi Tupoksi PKB untuk melaksanakan kegiatan di wilayah kerja masing-masing,
		10 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.328.804.700	3.042.529.919					
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.125.575.800	2.879.666.619					
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	137.719.000	110.145.850	5	2	Jenis Perlombaan	indikator target dalam kegiatan ini yaitu lomba. Akan tetapi untuk melaksanakan kegiatan lomba tersebut tidak terbit juknis dari BKKBN Pusat. Sehingga ada 2 lomba yang tidak bisa dilaksanakan	Akan melaksanakan sesuai Juknis dari Provinsi

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	129.998.000	87.860.000	10	10	Kelompok	Pembelian Barang sudah terealisasi, barang sudah diambil langsung ke Kantor DPPKBP3A oleh Kelompok kegiatan, UPPKA dan PIK - R sehingga BBM dan Perjadin tidak terealisasi	Pengadaan akan tetap dilaksanakan sesuai permintaan
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1.705.420.000	1.618.509.411	510	510	Orang		
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling	1.152.438.800	1.063.151.358	16	15	Kelompok		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)							
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Keluarga	203.228.900	162.863.300					
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	203.228.900	162.863.300	16	13	Kelompok		
JUMLAH			24.001.897.645	21.578.231.715	100%	89,90	Persen		
9.	Dinas Perhubungan	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	20.833.109.201	18.315.492.792	95	87,92	persen		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	390.200.000	380.023.712	95	97,39	persen		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000.000	45.000.000	4	4	dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.000	12.500.000	3	3	dokumen		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	332.700.000	322.523.712	12	12	bulan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.188.669.301	14.303.843.230	95	94,17	persen		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.976.674.301	13.223.351.230	98	98	orang		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.211.995.000	1.080.492.000	12	12	bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	469.724.000	433.189.093	95	92,22	persen		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	394.724.000	382.498.000	135	135	orang		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	50.691.093	6	5	orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	619.990.800	608.286.866	95	98,11	persen		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	29.995.000	29.293.000	12	12	bulan		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.995.800	94.642.500	7	7	jenis		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000	54.985.000	12	12	bulan		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	97.600.000	2	2	jenis		
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	7.345.000	12	12	bulan	Kurang maksimalnya dalam penyusunan rencana belanja anggaran	Menyusun rencana belanja dengan lebih teliti sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.000.000	324.421.366	12	12	bulan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.420.147.500	89.440.000	95	6,3	persen		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.420.147.500	89.440.000	2	1	jenis	Pekerjaan pengadaan kendaraan Skylift tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk dapat segera menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan denda

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								anggaran 2024 dikarenakan unit kendaraan tidak tersedia di Dealer Hino	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.894.943.600	1.659.436.679	95	87,57	persen		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.984.000	4.972.000	100	100	surat		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	409.999.600	332.254.895	12	12	bulan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.479.960.000	1.322.209.784	12	12	bulan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.434.000	841.273.212	95	99,04	persen		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	579.600.000	572.900.812	43	43	unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.980.000	29.980.000	20	20	unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.852.000	49.518.000	1	1	unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	190.002.000	188.874.400	12	12	bulan		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		2. Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	102.569.998.980	99.135.537.038	95	96,65	persen		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	99.839.999.280	96.596.793.119	95	96,75	persen		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	98.819.999.280	95.591.386.419	5	5	jenis		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.020.000.000	1.005.406.700	2	2	jenis		
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	300.000.000	256.706.000	95	85,57	persen		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	256.706.000	12	12	bulan		
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	599.999.700	589.883.890	95	98,31	persen		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	599.999.700	589.883.890	12	12	bulan		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.170.000.000	1.059.108.702	95	90,52	persen		
		Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	550.000.000	549.520.000	12	12	bulan		
		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	243.000.000	222.368.738	30	25	orang		
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	215.000.000	146.466.641	8	6	kali pertemuan / tahun		
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	162.000.000	140.753.323	1	1	laporan		
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	154.000.000	152.425.200	95	95,18	persen		
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	154.000.000	152.425.200	25	25	orang/ tahun		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	506.000.000	480.620.127	95	97,61	persen		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	306.000.000	285.408.000	13	13	kali/tahun		
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	200.000.000	195.212.127	5	5	kali/tahun		
		3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	24.859.935.294	22.185.734.044	95	89,24%	persen		
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	23.219.936.394	20.613.479.224	95	88,27	persen		
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	21.247.251.024	18.746.700.497	3	3	pelabuhan / dermaga		
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	674.999.770	644.068.665	12	12	bulan		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.297.685.600	1.222.710.062	12	12	bulan		
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1.639.998.900	1.572.254.820	95	95,87	persen		
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	939.999.700	920.366.820	12	12	bulan		
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	699.999.200	651.888.000	12	12	bulan		
JUMLAH			148.263.043.475	139.636.763.874	95	94,18%	persen		
10.	DPMPTSP	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.262.417.158	8.189.806.388					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	99.426.995					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000	99.426.995	4	4	Dokumen		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.291.799.606	5.691.092.799					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.059.755.606	5.459.048.799	32	32	Orang/ Bulan		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	232.044.000	232.044.000	1	1	Dokumen		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.000.000	124.557.663					
		Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	48.000.000	44.600.000	2	2	Paket		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	100.000.000	79.957.663	10	10	Orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.234.239.932	1.050.021.067					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.240.000	2.525.000	4	4	Paket		
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	736.003.032	666.440.500	15	13	Paket		
		Penyediaan bahan logistik kantor	83.719.300	48.430.300	15	12	Paket		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	74.277.600	31.674.650	9	9	Paket		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	9.000.000	966	912	Dokumen		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	325.000.000	291.950.617	62	62	Laporan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.000.000	44.000.000					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.000.000	44.000.000	2	2	Unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.919.000	709.759.706					
		Penyediaan jasa surat menyurat	2.044.000	1.648.700	125	125	Laporan		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	215.075.000	172.436.852	12	12	Laporan		
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	540.800.000	535.674.154	13	13	Laporan		
		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	656.458.620	470.948.158					
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	321.000.000	173.654.158	18	18	Unit		
		Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	63.980.000	27.088.000	30	30	Unit		
		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	271.478.620	270.206.000	1	1	Unit		
		2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	178.776.000	152.568.135	370	374	Investor		

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	178.776.000	152.568.135					
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	178.776.000	152.568.135	3	3	Dokumen	Masih kurangnya tenaga IT dalam pengoperasian Website peta potensi	dilakukan penambahan tenaga IT untuk mengelola website sehingga sasaran dan tujuan dapat tercapai
		3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	4.562.553.000	4.343.105.313	2	2	Kegiatan		
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.562.553.000	4.343.105.313					
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	4.267.553.000	4.131.415.825	2	2	Dokumen	Kegiatan Pameran Promosi berjalan dengan baik dan lancar dan cukup banyak para pengunjung yang hadir pada saat pameran promosi ini dilaksanakan, namun permasalahan nya selama	Perlu dibentuk Tim OPD Teknis Kegiatan bukan hanya dilakukan secara konvensional tetapi perlu ditingkatkan melalui format sarana Promosi dalam bentuk cetak berupa brosur, banner, spanduk, baliho dan sebagainya dan begitu pula dalam bentuk media elektronik seperti Pasang Iklan atau siaran melalui media televisi, youtube,

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								pameran dilaksanakan belum adanya para peminat maupun investor yang mau menanamkan modalnya untuk berinvestasi di Kab. Berau	facebook, instagram dan lain sebagainya
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	295.000.000	211.689.488	3	3	Dokumen	Secara umum tidak ada permasalahan, hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja yaitu penyusunan dokumen strategi promosi	Tetap melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens baik internal Dpmptsp maupun eksternal menjadi atensi untuk kelancaran dan pencapaian target tahun berikutnya
		4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.034.468.200	795.752.911	4	3,75	Triliun		
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	1.034.468.200	795.752.911					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
		Koordinasi dan konsultasi penetapan fasilitasi / insentif daerah	387.454.000	227.945.247	4	4	Dokumen	Pasifnya masyarakat tentang izin terkait implementasi PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko atau OSS-RBA Masyarakat / pelaku usaha cenderung ingin perizinan yang instan / langsung jadi, tidak mau mencoba untuk tahapan proses perizinan yang sudah mudah secara online sehingga masih perlu pendampingan	Sosialisasi dan pendampingan yang luas dan inklusif perlu terus dilaksanakan agar pelaku usaha/masyarakat terutama yang akses informasi dan perizinan tetap terbantu dan terlayani dengan baik perlunya koordinasi dan konsultasi tentang tata cara penertiban bangunan gedung yang belum memiliki PBG/IMB dan pemenuhan komitmen bagi pelaku usaha yang belum memenuhi perizinan dasar setelah diterbitkan perizinan usahanya

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								sebagian masyarakat/pelaku usaha belum melek teknologi yang pada sekarang ini makin berkembang pesat sehingga mau tidak mau harus turut mengikuti	peningkatan sarana dan prasarana jaringan internet yang mumpuni, paling tidak meningkatkan kecepatan jaringan dari 2G ke 4G. dan menjadi perhatian untuk PemKab Berau dalam hal ini Diskominfo semoga ditahun depan ada peningkatan sarana jaringan didaerah/dikampung yang kurang bahkan blankspot.
		Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	376.465.200	335.402.967	3850	4143	Pelaku Usaha	Adanya perubahan penerbitan izin dari sistem manual ke sistem Perizinan Online OSS RBA belum didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang betul - betul menguasai tentang sistem Aplikasi berbasis	Penambahan dana dalam hal mengikutsertakan tenaga aparatur dalam bimtek dan pelatihan guna peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM di instansi Dpmptsp

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Online (Sistem OSS RBA)	
								Sistem perizinan online OSS RBA sampai saat ini masih terus dalam tahap penyempurnaan sehingga setiap saat selalu update sistem	penambahan sarana dan prasarana seperti notebook yang digunakan untuk sosialisasi dan pendampingan perizinan Online OSS RBA
		Pemantauan, analisis, evaluasi dan paleporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	270.549.000	232.404.697	65	65	Kegiatan Usaha	Kurangnya sosialisasi yang luas dan inklusif terkait implementasi PP No. 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko atau OSS-RBA perlu terus dilaksanakan agar pelaku usaha/masyarakat terutama yang akses informasi dan	Melakukan Bimbingan teknis untuk OSS-RBA untuk aparatur kampung yang jauh dari ibu kota Tanjung Redeb

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								keterampilan menggunakan perangkat teknologinya terbatas	
								Untuk pelaksanaan kegiatan masih 72% dikarenakan keterbatasan waktu	Kegiatan akan dilaksanakan tahun depan dengan mengatur jadwal
		5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.014.195.400	807.342.944	85	101	Persentase		
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.014.195.400	807.342.944					
		Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan Usahanya	268.308.800	163.904.183	10	6	Kegiatan Usaha	Sebagian besar permasalahan yang masuk tidak terkait dengan pelayanan perizinan yang ada di Dpmptsp, namun terkait dengan permasalahan diluar	Sebagai Tim permasalahan tetap membantu penyelesaian atau menjadi penengah dalam permasalahan kedua belah pihak sesuai arahan dari OMBUSMAN RI dan sesuai kemampuan Tim

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Dpmptsp seperti gangguan tetangga kanan kiri yang dalam pembangunan rumah atau usahanya, suara gangguan tweter pemanggil burung wallet, gangguan atau penolakan terhadap pembukaan THM	
								Tempat atau ruang khusus terkait privasi pelapor masih belum terakomodir di Dpmptsp	semoga di tahun ini seiring dengan akan di bangunnya MPP Kab. Berau semoga bisa terialisasi, maka ruang privasi untuk pelapor tersedia.
								Kurangnya tenaga baik staf maupun fungsional khusus yang terlatih dalam penanganan pengaduan di	Pengadaan Calon ASN atau P3K dapat meminimalisir kekuarangan SDM pada kegiatan ini

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Dpmptsp Kab. Berau	
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	486.688.600	461.442.248	100	100	Pelaku Usaha	Banyaknya jumlah Pelaku Usaha yang sudah memiliki Izin/NIB tetapi belum melakukan Pelaporan LKPM sebagai Komitmen Pemilik Usaha, hal ini dikarenakan ketidaktahuan	Perlu penambahan jumlah Peserta Bimtek kepada Pelaku Usaha dalam sosialisasi Implementasi Perizinan OSS RBA
		Pengawasan Penanaman Modal	259.198.000	181.996.513	45	67	Kegiatan Usaha	Pelaksanaan pengawasan melalui Aplikasi di OSS-RBA	Melakukan Bimtek/Sosialisasi kepada OPD Teknis tentang Pengawasan Berbasis OSS-RBA
		6. PROGRAM PENGOLAHAN DATA dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	220.536.000	161.641.135	52	33	Data Izin		
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.536.000	161.641.135					

NO	OPD PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	220.536.000	161.641.135	52	33	Data Izin	Belum ada tenaga teknis pranata komputer di Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan untuk menunjang pemeliharaan	Mengusulkan untuk penambahan tenaga teknis pranata komputer di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan
								belum adanya sarana laptop untuk menunjang kegiatan diluar gedung	Mengusulkan pengadaan laptop untuk menunjang kegiatan luar gedung (sosialisasi)
								Masih terdapat beberapa wilayah kecamatan yang belum dilaksanakan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha	Melaksanakan kegiatan sosialisasi ke kecamatan seluruh wilayah Kabupaten Berau secara bertahap
JUMLAH			16.272.945.758	14.450.216.826	100	88,80	Persen		

3.1.3 PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan di Kabupaten Berau pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

TABEL 3.5

Jumlah OPD Penyelenggara Urusan Pilihan yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Berau Tahun 2024

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)
			Rp	Persen	
1	BKPSDPM	25.371.260.116	23.096.406.517	91,03	2.274.853.599
2	BAPENDA	27.625.269.870	23.673.270.843	85,69	3.951.999.027
3	BPKAD	521.954.417.494	499.911.809.872	95,78	22.042.607.622
4	BAPALITBANG	25.985.209.869	23.765.673.968	91,46	2.219.535.901
5	INSPEKTORAT	23.717.551.368	20.890.016.762	88,08	2.827.534.606
Jumlah		624.653.708.717	591.337.177.962	94,67	33.316.530.755

TABEL 3.6
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA OPD PENYELENGGARA URUSAN PILIHAN YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	11.050.125.316	10.138.184.028					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	772.518.400	555.338.814					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.468.000	43.865.386	12	12	Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000	35.778.380	10	10	Laporan		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	667.050.400	475.695.048	12	12	Laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.993.431.016	8.429.986.404					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.275.599.016	6.826.412.470	700	700	Orang/ Bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.532.400.000	1.423.763.934	12	12	Dokumen		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan	185.432.000	179.810.000	12	12	Dokumen		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226.750.000	217.600.526					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	111.750.000	111.533.760	133	133	Paket		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115.000.000	106.066.766	12	13	Orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.880.600	514.224.503					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.638.000	4.544.000	12	12	Paket		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	251.472.800	238.030.400	12	12	Paket		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.919.800	19.349.000	12	12	Paket		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.700.000	44.211.400	12	12	Paket		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.150.000	3.480.000	12	12	Paket		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	3.240.000	12	12	Dokumen	Perubahan jumlah langganan bahan bacaan dari target	Mencermati perubahan pada saat penyusunan RKA Perubahan

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000	201.369.703	12	12	Laporan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.067.200	105.288.627					
		Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000	20.938.627	1	1	Unit		
		Pengadaan Mebel	0	0	-	-	-		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.067.200	84.350.000	14	14	Unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.470.100	181.855.379					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	960.000	12	1	Laporan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.968.700	143.882.879	12	12	Laporan		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.988.000	12.660.000	12	9	Laporan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.513.400	24.352.500	12	12	Laporan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.008.000	133.889.775					

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.945.000	106.749.775	12	12	Unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.063.000	27.140.000	2	1	Unit		
		2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.147.046.800	5.562.987.714					
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.180.865.200	2.111.463.136					
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	75.000.000	74.850.000	1	1	Dokumen		
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.799.917.200	1.738.008.901	2.440	2349	Dokumen	Target kurang karena seleksi PPPK Tahap II penjadwalan mundur ke Tahun 2025	Akan dilaksanakan Tahun 2025
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	85.000.000	83.218.972	170	170	Dokumen		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	110.948.000	107.978.820	5.500	6254	Dokumen	Realisasi melebihi target disebabkan ada penambahan	Mencermati saat penginputan target kinerja

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								ASN baru di tahun 2024 dan pada saat penginputan RKA Perubahan terlewatkan untuk disesuaikan	pada tahap penyusunan RKA Perubahan
		Pengelolaan Data Kpegawaian	110.000.000	107.406.443	100	188	Dokumen		Mencermati saat penginputan target kinerja pada tahap penyusunan RKA Perubahan
		Mutasi dan Promosi ASN	941.749.000	817.792.894					
		Pengelolaan Mutasi ASN	216.629.000	187.497.928	380	373	Dokumen	Dikarenakan adanya PILKADA untuk Kabupaten Berau sehingga untuk tahun 2024 sejak bulan maret sampai akhir tahun tidak ada pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural maupun Fungsional	Sudah di Ajukan Permohonan Rekomendasi Pelantikan ke Menteri Dalam Negeri terkait Pelantikan Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	209.380.000	209.352.757	1.200	1200	Dokumen		
		Pengelolaan Promosi ASN	515.740.000	420.942.209	8	8	Dokumen	Dikarenakan adanya PILKADA untuk Kabupaten	Telah dilakukan Tahapan Seleksi terbuka untuk

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Berau sehingga untuk tahun 2024 sejak bulan maret sampai akhir tahun tidak ada pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural maupun Fungsional	Jabatan Pimpinan tinggi Pratama dan Jabatan Administrator
		Pengembangan Kompetensi ASN	1.768.940.600	1.575.310.071					
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	433.594.000	407.147.737	50	57	Orang	Realisasi melebihi target disebabkan jumlah atlet yang dikirim bertambah karena adanya penambahan jumlah cabor yang dipertandingkan dalam PORPROV KORPRI Kaltim di Kab.Paser	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	704.998.600	597.563.292	10	9	Orang	Dikarenakan jadwal masuk perkuliahan penerima TUBEL mundur ke tahun 2025, sehingga beasiswa tidak bisa dibayarkandi	Menyiapkan daftar nominatif penerima TUBEL lebih dari target, apabila terdapat penerima TUBEL yang tidak dapat tepat waktu memulai

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								tahun anggaran 2024	perkuliahannya dapat digantikan nominatif selanjutnya
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	630.348.000	570.599.042	432	429	Orang		
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.255.492.000	1.058.421.613					
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	244.536.000	209.617.104	47	45	Dokumen		
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	106.700.000	101.179.292	230	230	Orang		
		Pembinaan Disiplin ASN	625.016.000	479.028.510	200	190	Orang	Realisasi hanya 76,64 % dikarenakan ada kegiatan yang tidak dapat direalisasikan disebabkan nama kegiatan Bonus/Hadiah Perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an di DPA mencantumkan Spesifikasi	Upaya mengatasi kesalahan nama kegiatan di DPA akan dilakukan penyesuaian pada saat pengusulan rencana kerja anggaran baru atau pada saat pergeseran/perubahan DPA SKPD sehingga kegiatan Bonus/Hadiah Musabaqah

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Perorangan Tingkat Nasional (Juara I dan Juara II) sedangkan yang Ikut Musabaqah Tilawatil Qur'an KORPRI Tingkat Nasional di Palangkaraya Kalteng mendapat Juara Harapan II dan Harapan III.	Tilawatil Qur'an KORPRI dapat direalisasikan.
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	112.120.000	109.418.045	15	7	Laporan		
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	75.000.000	73.331.073	15	15	Dokumen		
		Evaluasi Pembinaan Disiplin	92.120.000	85.847.589	47	45	Laporan		
		3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.174.088.000	7.395.234.775					
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	8.174.088.000	7.395.234.775					

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.000.484.000	718.156.608	1.288	1.239	Orang	Sejumlah peserta yang telah dilakukan pemanggilan untuk mengikuti penilaian kompetensi dan potensi tidak hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga jumlah peserta yang menjadi target capaian tidak terpenuhi yang tidak dapat dibayarkan lagi	Membuat Sosialisasi tentang pentingnya penilaian kompetensi dan potensi yang ditujukan ke Kepala OPD agar tidak memberikan penugasan lain kepada calon peserta, dan memastikan kehadiran dari peserta tersebut sesuai jadwal
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	7.173.604.000	6.677.078.167	2.058	2176	Laporan	Realisasi melebihi target karena adanya kegiatan mendesak yang penting untuk dilaksanakan, yaitu pelatihan operator IP-ASN dan Bimtek Manajemen Pelatihan Efektif	Menyiapkan target pelatihan yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia
JUMLAH			25.371.260.116	23.096.406.517	100	91,03	Persen		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
2.	Badan Pendapatan Daerah	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.822.835.170	17.515.575.355					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.264.700.000	948.965.215					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105.000.000	84.459.340	100%	80,44%	Dok		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.159.700.000	864.505.875	100%	74,55%	Kecamatan	Masih adanya Kontribusi Untuk BIMTEK yang belum terealisasi	Diupayakan tahun depan kontribusi untuk bintek terealisasi secara optimal
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.475.379.370	12.065.795.871					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.130.379.370	11.814.279.871	100%	83,61%	Bulan	Ada beberapa Target untuk pendapatan yang tidak tercapai.sehingga realisasi belum bisa optimal	Akan lebih diupayakan lagi tahun depan agar realisasinya bisa optimal
		Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	345.000.000	251.516.000	100%	72,90%	Bulan	Masih adanya beberapa kontribusi yang belum terealisasi dikarenakan ada	Semoga Tahun depan aplikasi SIPD tidak banyak trouble agar kegiatan bisa

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								sedikit trouble di SIPD Penatausahaan	terealisasi tepat waktu
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	200.000.000	162.247.554					
		Pendataan & Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	200.000.000	162.247.554	100%	81,12%	Laporan	Ada perjalanan Dinas Dalam Daerah yang belum terealisasi dikarenakan harus ada sinkronisasi dengan BPKAD, Kegiatan bersamaan dengan Bidang Lain	Melakukan Koordinasi dengan BPKAD terkait pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.430.000	116.300.000					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	116.430.000	116.300.000	100%	99,89%	Stel		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.131.413.800	1.929.629.299					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.600.000	10.260.000	100%	88,45%	Jenis		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	644.813.800	643.600.000	100%	99,81%	Jenis		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	340.000.000	163.702.000	100%	48,15%	Bulan		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	480.000.000	476.860.000	100%	99,35%	Jenis		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	19.716.000	100%	65,72%	Exemplar	Beri alasan dan tindak lanjut	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	625.000.000	615.491.299	100%	98,48%	Bulan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	390.000.000	390.000.000					
		Penyediaan Kendaraan Dinas Perorangan/ Kendaraan Dinas Jabatan	390.000.000	390.000.000	100%	100%	Unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.519.912.000	1.327.643.223					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.662.000	1.700.000	100%	63,86%	Buah	Sudah kurangnya Untuk Pengantaran/ Kirim surat/ Paket. Lebih ke Surat Elektronik/ Via WA	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000	362.655.922	100%	90,66%	Bulan		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.500.000	37.017.433	100%	45,98%	Bulan	Masih banyak peralatan dalam kondisi baik	

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	1.036.750.000	926.269.868	100%	89,34%	Bulan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.000.000	413.088.693					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan	300.000.000	233.612.233	100%	77,87%		Masih ada beberapa Kendaraan yang dalam kondisi baik	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	225.000.000	179.476.460	100%	79,77%	Unit	Masih beberapa ada Kendaraan yang dalam kondisi baik	
		Penataan Organisasi	200.000.000	161.905.500					
		Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	200.000.000	161.905.500	100%	80,95%	Dok	Ada Bimtek yang belum terealisasi	
		2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	550.000.000	548.966.931					
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	550.000.000	548.966.931	100%	99,81%	Dok		
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	200.000.000	191.790.386					
		Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi	200.000.000	191.790.386	100%	95,90%	Triliun		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
		3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.052.434.700	5.416.938.171					
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.930.949.500	3.546.841.873					
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	897.000.000	857.610.626	100%	95,61%	Dok		
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	755.000.000	722.233.513	100%	95,66%	Peraturan		
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	471.300.000	449.328.435	100%	95,34%	WP		
		Pengolahan dan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	595.399.500	508.215.440	100%	85,36%	Sistem	Ada item yang tidak teralisasi karena masih kurangnya nilai untuk Upgrade Pentest	Tahun depan diupayakan item item tersebut bisa terealisasi
		Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan	1.212.250.000	1.009.453.859	100%	83,27%	WP	Ada beberapa item yang tidak terealisasi secara penuh dikarenakan pelayanan. Tetapi pada dasarnya tidak ada kendala	tahun depan akan lebih optimal lagi untuk pelayanan

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.771.485.200	1.561.535.948					
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	200.000.000	184.238.607	100%	92,12%	Dok		
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	185.000.000	162.348.000	100%	87,76%	Layanan	Ada sebagian perjalanan Dinas Dalam daerah yang belum terelaisasi karena bertepatan dengan kegiatan lain	Diupayakan tahun depan akan lebih terencana lagi untuk bagian perjalanan dinas
		Penagihan Pajak Daerah	769.485.200	671.953.000	100%	87,33%	Milyar	Ada beberapa item yang tidak terlaksana dikarenakan ada perubahan tempat kegiatan.yang awalnya dioutdoor menjadi Indoor	Diupayakan tahun depan agar kegiatan tidak ada lagi perubahan tempat kegiatan
		Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	425.000.000	390.655.956	100%	91,92%	WP		
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	192.000.000	152.340.385	100%	79,34%	WR	Efisiensi dikarenakan ada kegiatan yang bersamaan dengan bidang lain	Diupayakan tahun depan agar lebih terencana lagi

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	350.000.000	308.560.350	100%	88,16%		Dikarenakan sementara fokus untuk kecamatan terdekat	Tahun depan akan lebih optimal lagi mensosialisasikan ke semua kecamatan
JUMLAH			27.425.269.870	23.481.480.457	100	85,62%	Persen		
3.	BPKAD	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.478.716.419	14.621.134.851					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.958.000	171.643.300					
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	20.000.000	15.870.000	100%	79,35	Persen	Tidak ada kendala	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	7.524.000	100%	75,24	Persen	Tidak ada kendala	
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	158.958.000	148.249.300	100%	93,26	Persen	Tidak ada kendala	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.471.022.219	10.863.465.779		94,70	Persen		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.636.767.219	10.061.169.779	100%	94,59	Persen	Tidak ada kendala	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	789.456.000	774.576.000	100%	98,12	Persen	Tidak ada kendala	

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	44.799.000	27.720.000	100%	61,88	Persen	Tidak ada kendala	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	368.892.500	270.399.479		73,30	Persen		
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	168.893.500	159.305.300	100%	94,32	Persen	Tidak ada kendala	
		Sosialisasi peraturan perundang undangan	99.999.000	26.483.200	100%	26,48	Persen	Tahun 2024 tidak terlalu banyak peraturan baru yang disosialisasikan ke OPD	Dievaluasi kembali rencana anggaran yang disinkronkan dengan rencana sosialisasi sosialisasi peraturan ke OPD
		Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan	100.000.000	84.610.979	100%	84,61	Persen	Tidak ada kendala	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.150.376.000	1.408.133.512		65,48	Persen		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.980.000	6.369.000	100%	21,24	Persen	Tahun 2024, kebetulan tidak banyak bola lampu yang diganti karena mati, sehingga realisasinya tidak memenuhi target	Belanja untuk stok tahun selanjutnya, sehingga serapannya tetap maksimal
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	527.847.100	482.590.700	100%	91,43	Persen	Tidak ada kendala	
		Penyediaan perlengkapan rumah tangga	49.992.000	47.174.750	100%	94,36	Persen	Tidak ada kendala	

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	377.497.900	168.508.500	100%	44,64	Persen	Tidak ada kendala	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.059.000	31.767.000	100%	45,34	Persen	Tidak ada kendala	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	45.000.000	44.425.000	100%	98,72	Persen	Tidak ada kendala	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.050.000.000	627.298.562	100%	59,74	Persen	Tidak ada kendala	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.003.804.700	905.617.500		90,22	Persen		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	964.397.200	866.210.000	100%	89,82	Persen	Tidak ada kendala	
		Pengadaan mebel	39.407.500	39.407.500	100%	100	Persen	Tidak ada kendala	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	781.349.000	697.629.987					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.492.000	2.484.000	100%	99,68	Persen	Tidak ada kendala	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.327.000	59.770.823	100%	82,64	Persen	Tidak ada kendala	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.730.000	22.598.200	100%	45,44	Persen	Ada beberapa unit peralatan kantor yang sampai akhir tahun anggaran masih	Pendataan peralatan yang memang sudah seharusnya diservis agar lebih

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								belum selesai dikerjakan oleh tekhnisi, sehingga penyelesaiannya masuk tahun anggaran selanjutnya	awal diservis sebelum tahun anggaran berakhir
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	656.800.000	612.776.964	100%	93,30	Persen	Tidak ada kendala	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.314.000	304.245.294		59,16	Persen		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	379.520.000	273.310.554	100%	72,01	Persen	Tidak ada kendala	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	50.000.000	12.633.740	100%	25,27	Persen	Tahun 2024 prosentase kendaraan R2 yang mengajukan klaim perbaikan kurang	Evaluasi ulang kendaraan R2 yang akan diservis dikurun waktu tahun anggaran selanjutnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.794.000	18.301.000	100%	21,58	Persen	Tahun 2024 prosentase perbaikan atas kerusakan gedung masih minim	Evaluasi ulang komponen gedung yang perlu diperbaiki

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	496.103.186.875	477.541.162.879		96,26	Persen		
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.444.790.000	2.667.786.138		77,44	Persen		
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	350.000.000	287.285.221	100%	82,08	Persen	Tidak ada kendala	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	860.000.000	552.389.000	100%	64,23	Persen	Tidak ada kendala	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	200.000.000	185.201.652	100%	92,60	Persen	Tidak ada kendala	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	200.000.000	164.246.154	100%	82,12	Persen	Tidak ada kendala	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	250.000.000	159.930.245	100%	63,97	Persen	Tidak ada kendala	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	334.790.000	234.792.619	100%	70,13	Persen	Tidak ada kendala	
		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.250.000.000	1.083.941.247	100%	86,72	Persen	Tidak ada kendala	

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.835.243.000	1.650.178.619		89,92	Persen		
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	361.586.000	345.406.876	100%	95,53	Persen	Tidak ada kendala	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	820.217.000	724.286.337	100%	88,30	Persen	Tidak ada kendala	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	653.440.000	580.485.406	100%	88,84	Persen	Tidak ada kendala	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.479.834.000	1.277.926.368		86,36	Persen		
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	335.205.000	316.937.563	100%	94,55	Persen	Tidak ada kendala	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	825.599.000	656.349.786	100%	79,50	Persen	Tidak ada kendala	

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	319.030.000	304.639.019	100%	95,49	Persen	Tidak ada kendala	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	488.718.969.875	471.633.347.914		96,50	Persen		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	454.978.642.000	454.834.541.331	100%	99,97	Persen	Tidak ada kendala	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	22.640.327.875	5.774.799.583	100%	25,51	Persen	Realisasi anggaran khusus dari Sub kegiatan ini parameternya berbanding berbalik dari Subkeg yang lainnya	Penentuan Pagunya sesuai Permendagri No 77 Tahun 2020
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	11.100.000.000	11.024.007.000	100%	99,32	Persen	Tidak ada kendala	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	624.350.000	311.923.840		49,96	Persen		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	624.350.000	311.923.840	100%	49,96	Persen	Kegiatan ini melibatkan Narasumber dari Kementrian, sehingga jika dalam kurun waktu tahun berjalan tidak ada permasalahan yang krusial dengan SIPD, maka OPD tidak mengundang Narasumber tersebut	Anggaran tetap disiapkan untuk menanggulangi jika sewaktu waktu ada permasalahan aplikasi sehingga harus mendatangkan Narasumber dari pusat
		3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9.372.514.200	7.749.512.142		82,68	Persen		
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.372.514.200	7.749.512.142		82,68	Persen		
		Penyusunan Standar Harga	1.230.650.000	1.133.721.710	100%	92,12	Persen	Tidak ada kendala	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	210.000.000	170.621.242	100%	81,25	Persen	Tidak ada kendala	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.048.668.200	878.833.350	100%	83,80	Persen	Tidak ada kendala	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	4.085.570.000	3.586.546.870	100%	87,79	Persen	Tidak ada kendala	
		Penilaian Barang Milik Daerah	1.466.280.000	1.012.021.969	100%	69,02	Persen	Tidak ada kendala	

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.331.346.000	967.767.001	100%	72,69	Persen	Masih ada beberapa tahapan target kinerja yang penyelesaiannya akan berakhir ditahun 2025	Target penyelesaian ditahun 2025
JUMLAH			521.954.417.494	499.911.809.872	100	95,78	Persen		
4.	Baplitbang	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	15.583.202.569	14.047.989.338					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242.616.000	210.653.828					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.500.000	60.078.165	3	3	dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	176.116.000	150.575.663	2	2	laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.571.362.353	7.988.020.812	100	100	%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.721.440.353	7.247.101.148	41	41	orang		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	849.922.000	740.919.664	1	1	dokumen		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	843.520.000	622.522.827	100	100	%		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	156.400.000	110.080.000	1	1	paket	Beri Alasan dan Tindak Lanjut	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	687.120.000	512.442.827	30	42	orang	Dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan bimtek yang sering berbenturan dengan jadwal pembahasan perencanaan dan penganggaran sehingga membuat serapan anggaran untuk sub kegiatan ini tidak maksimal disamping itu juga pemilihan yang selektif terhadap pelaksanaan bimtek yang sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing ASN yang ada di Bapelitbang	Kedepannya akan mengatur jadwal yang bisa mengakomodir kegiatan ini dan lebih selektif dalam mengikut sertakan ASN yang akan mengikuti bimtek

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.972.996.416	1.808.710.533	100	100	%		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	71.935.000	71.376.600	1	1	paket		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	698.673.180	689.778.000	1	1	paket		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	88.800.236	58.436.000	1	1	paket	Dikarenakana keterbatasan waktu yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanaman hias artifisial untuk dekorasi ruang rapat RPJPD dan keterbatasan penyedia untuk mengadalan / mempersiapkan bahan baku yang digunakan untuk tanaman hias artifisial tersebut	Membuat perencanaan pengadaan yang memperhitungkan waktu dan penyedia yang bisa melaksananannya
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.000.000	185.160.000	1	1	paket		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.588.000	28.013.000	1	1	paket		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	63.000.000	62.980.000	1	1	dokumen		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	28.690.000	1	1	laporan		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	780.000.000	684.276.933	1	1	laporan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.722.382.600	1.503.156.101	100	100	%		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.593.129.600	1.374.040.000	3	3	unit		
		Pengadaan Mebel	129.253.000	129.116.101	10	10	unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.820.900	498.788.281	100	100	%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.388.000	3.388.000	1	1	laporan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	461.063.700	328.096.189	1	1	laporan	Belanja dianggarkan sebagaimana kebutuhan selama satu tahun terutama tagihan rekening listrik tetapi realisasinya berdasarkan tahun berjalan	Akan menghitung kembali secara realistis di tahun akan datang belanja di sub kegiatan ini

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.369.200	167.304.092	1	1	laporan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.597.504.300	1.416.136.956	100	100	%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	438.550.000	412.933.300	25	25	unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.158.954.300	1.003.203.656	2	2	unit		
	2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.359.846.800	4.101.626.667	100	100	%		
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.261.147.600	2.134.158.099	3	3	dok		
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	515.726.000	499.849.669	16	16	Berita Acara		
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.745.421.600	1.634.308.430	2	2	dokumen		
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	905.218.000	844.342.498	1	1	dok		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Perencanaan Pembangunan Daerah							
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	397.486.000	377.230.039	2	2	masukan		
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	507.732.000	467.112.459	57	57	orang		
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.193.481.200	1.123.126.070	100	100	%		
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	679.007.200	663.303.907	2	2	laporan		
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	514.474.000	459.822.163	3	3	laporan		
	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.680.090.400	4.294.608.028	100	100	%		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.266.385.600	1.090.675.122	100	100	%		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	240.482.000	233.845.324	4	4	dokumen		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	156.198.100	136.440.869	4	4	laporan		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	333.598.000	321.462.436	2	2	dokumen		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	158.344.500	67.120.860	1	1	laporan	Kegiatan penyusunan Inkesra merupakan produk yang dihasilkan oleh BPS sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sehingga realisasi kegiatan rendah	Di tahun akan datang kegiatan tersebut tidak lagi di anggarkan dan akan merasionalisasikan anggaran sub kegiatan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	377.763.000	331.805.633	1	1	laporan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Bidang Pembangunan Manusia							
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.974.451.800	1.875.004.115	100	100	%		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	449.999.400	426.905.671	1	1	dokumen		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	333.098.600	304.293.661	1	1	laporan		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	449.200.000	435.697.645	1	1	dokumen		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	742.153.800	708.107.138	2	2	laporan		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.439.253.000	1.328.928.791	100	100	%		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	230.356.000	213.062.798	10	10	dokumen		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	337.370.000	309.986.781	13	13	laporan		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	357.853.000	309.361.320	10	10	laporan		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	513.674.000	496.517.892	5	5	laporan		
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.362.070.100	1.321.449.935					
		4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.362.070.100	1.321.449.935	100	100	%		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	222.562.000	220.856.681	1	1	laporan		
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	222.562.000	220.856.681	1	1	data		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	310.393.300	307.002.653	1	1	laporan		
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	310.393.300	307.002.653	1	1	dokumen		
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	829.114.800	793.590.601	12	12	inovasi / dok		
			Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	614.058.800	586.574.293	12	12	inovasi / dok		
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	215.056.000	207.016.308	1	1	laporan		
JUMLAH				25.985.209.869	23.765.673.968	100	91,46	Persen		
5.	INSPEKTORAT	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.748.476.988	15.250.774.158					
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	405.200.000	328.770.150					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000	107.563.086	3	3	Dokumen		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	73.882.854	4	4	Laporan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.200.000	147.324.210	4	4	Dokumen	Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sharing ke Bapenas mencari narasumber untuk pendampingan terkait pembuatan renstra tahun 2025 tidak terlaksana dikarenakan SOP untuk menemui orang Bapenas sulit dilakukan.	Mencari narasumber lain untuk mendampingi dalam menyusun Renstra
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.398.483.268	11.692.712.367					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.099.623.268	11.417.142.367	58	58	Orang		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	298.860.000	275.570.000	12	12	Dokumen		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	0		
		Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	1.092.659.000	954.657.795					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	113.264.000	111.070.000	2	2	Paket		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	979.395.000	843.587.795	57	57	Orang		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.001.057.200	831.963.263					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	17.644.000	17.644.000	5	5	Paket		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	390.918.200	319.170.000	2	2	Paket		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000	6.868.000	1	1	Paket		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.000.000	199.546.000	36	36	Paket		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.995.000	11.995.000	38	38	Paket		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	8.000.000	8	8	Paket		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.000.000	268.740.263	12	12	Laporan	Dibatasi penggunaan anggarannya	Tetap akan dibatasi penggunaannya untuk hal-hal yang anggarannya tidak terakomodir dikegiatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	416.412.000	386.700.000					
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000	278.000.000	1	1	Unit		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.412.000	108.700.000	4	4	Unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	586.199.000	449.637.663					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.498.000	5.698.000	12	12	Laporan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	221.901.000	193.582.139	12	12	Laporan		
		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	356.800.000	250.357.524	12	12	Laporan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	848.466.520	606.332.920					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	599.960.000	495.374.120	35	35	Unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.870.000	46.035.000	5	5	Jenis		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.984.520	45.079.800	1	1	Unit	Gedung Bangunan Kantor Inspektorat sampai dengan saat ini masih tercatat di Dinas PUPR dan belum	Menunggu serah terima gedung

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								diserahkan ke Inspektorat sehingga belum bisa dilakukan rehabilitasi gedung dan bangunan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.652.000	19.844.000	1	1	Unit		
		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.860.487.980	3.907.555.403					
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.467.520.980	2.670.169.406					
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	220.000.000	206.392.801	4	4	Laporan		
		Reviu Laporan Kinerja	200.000.000	199.375.000	4	4	Laporan		
		Reviu Laporan Keuangan	200.000.000	199.550.000	4	4	Laporan		
		Pengawasan Desa	1.317.405.280	871.406.390	100	68	Kampung / Desa	Kegiatan keluarga berintegritas yang rencananya akan dilaksanakan di Kecamatan Maratua tidak terlaksana disebabkan KPK menunda hingga dapat melibatkan Bupati terpilih	Mengikuti saran yang dilakukan oleh KPK

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kerjasama Pengawasan Internal	880.128.700	666.009.492	2	2	Kesepakatan	Kegiatan keluarga berintegritas yang rencananya akan dilaksanakan di Kecamatan Maratua tidak terlaksana disebabkan KPK menunda hingga dapat melibatkan Bupati terpilih	Kegiatan Keluarga Berintegritas sharing dari 2 sub kegiatan sehingga ketika tidak terlaksana maka akan mempengaruhi realisasi 2 sub kegiatan tersebut
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	649.987.000	527.435.723	4	4	Laporan		
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.392.967.000	1.237.385.997					
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	99.991.000	80.107.228	4	4	Laporan		
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.292.976.000	1.157.278.769	25	25	Laporan		
		3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.108.586.400	1.731.687.201					
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	174.489.400	154.774.843					

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	174.489.400	154.774.843	1	1	Rekomen dasi		
		Pendampingan dan Asistensi	1.934.097.000	1.576.912.358					
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	1.227.180.000	1.028.032.667	47	47	Perangkat Daerah		
		Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	185.421.000	171.654.418	18	18	Perangkat Daerah		
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	391.985.000	281.803.233	12	12	Kegiatan	Ini anggaran titipan yang pelaksananya adalah kepolisian dan kejaksaan yaitu saberpungli sehingga dalam merealisasikan tergantung dari kegiatan yang dilaksanakan Tim Saberpungli	Karena pelaksananya eksternal sehingga realisasi akan mengikuti
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	129.511.000	95.422.040	47	47	Perangkat Daerah	Honor Tim yang tidak dicairkan karena dibatasi jumlah orangnya dari tahun sebelumnya	akan mengalihkan anggaran honor rekening belanja yang lain
JUMLAH			23.717.551.368	20.890.016.762	100	88,08	Persen		

3.1.4 PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan di Kabupaten Berau pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

TABEL 3.7
Jumlah OPD Penyelenggara Urusan Pilihan Berkaitan dengan Pelayanan di
Kabupaten Berau Tahun 2024

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)
			Rp	Persen	
1.	DISKOPERINDAG	27.469.262.642	25.087.830.315	91,33	2.381.432.327
2.	DINAS PERIKANAN	22.545.793.733	20.509.144.702	90,97	2.036.649.031
3.	DISBUN	18.861.733.169	15.602.629.320	82,72	3.259.103.849
4.	DISTANAK	39.994.436.914	35.435.025.595	88,60	4.559.411.319
5.	DISTANAH	28.070.930.406	9.527.267.808	33,94	18.543.662.598
6.	DISNAKERTRAN	18.129.392.051	16.141.284.584	89,03	1.988.107.467
7.	DISBUDPAR	56.596.236.263	50.128.743.686	88,57	6.467.492.577
Jumlah		211.667.785.178	172.431.926.010	81,46	39.235.859.168

TABEL 3.8
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA OPD PENYELENGGARA URUSAN
PILIHAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.008.710.578	21.581.786.757					
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	393.079.500	308.512.000	5	5	Dokumen		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.880.000	105.298.200	3	3	Dokumen	Tidak ada permasalahan dikarenakan telah dibelanjakan 100% sesuai kebutuhan	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.500	5.642.000	5	5	Dokumen	Tidak ada permasalahan dikarenakan telah dibelanjakan 100% sesuai kebutuhan	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.200.000	197.571.800	2	2	Dokumen	Titipan anggaran untuk Pawai yang dalam pelaksanaannya dibatasi jumlah peserta yang terlibat sehingga	Evaluasi kegiatan yang tidak terlaksana sebagai dasar perencanaan berikutnya

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								tidak dapat terserap maksimal	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.266.612.778	18.362.565.427	12	12	Bulan		Adakah Tunjangan yg belum terbayar Jawaban : Semua terbayar lengkap dan Anggaran yang tersisa 10% merupakan rencana/ penjagaan gaji pengangkatan PPPK/ CPNS. BPKAD yang berkompeten menghitung.
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.066.312.778	18.162.265.427	126	126	OB	Tidak ada permasalahan dikarenakan anggaran dibayarkan sesuai dengan jumlah pegawai selama 12 bulan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200.300.000	200.300.000	4	4	Dokumen		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.000.000	55.628.318	100	80	Persen		
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	95.000.000	55.628.318	9	7	Orang	Keterbatasan waktu pelaksanaan	Evaluasi kegiatan yang tidak terlaksana sebagai

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Bimbingan Teknis diakhir tahun	dasar perencanaan berikutnya
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	805.633.900	765.972.618	12	12	Bulan		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.934.000	14.250.000	2	2	Paket		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	458.272.300	443.607.895	10	10	Paket		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.927.600	3.610.000	10	10	Paket		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.500.000	62.334.000	20	15	Paket	Tidak ada permasalahan dikarenakan telah dibelanjakan sesuai Kebutuhan selama 12 bulan (berupa Makan Minum Kegiatan Rapat dan Aktivitas Lapangan)	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	6.610.000	8	8	Paket	Deviasi harga pada belanja barang atau terjadi selisih harga anggaran yaitu selisih antara harga pasar dengan harga standar.	- Penyesuaian harga standar dengan survei harga pasar secara berkala, penyusunan harga standar berbasis data aktual,

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Selisih yang terjadi dikategorikan selisih negatif karena harga di pasar lebih rendah daripada harga standar.	pemanfaatan sistem e-catalogue, penetapan harga standar yang fleksibel - Monitoring dan Evaluasi secara Berkala
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	4.860.000	24	24	Dokumen	Tidak ada permasalahan dikarenakan telah dibelanjakan 100% sesuai kebutuhan	Kegiatan 100%(24) tetapi penggunaan Dana hanya 69.43 % Jawaban: Anggaran disusun dalam bentuk global 1 tahun. Jadi pembelanjaan mengikuti harga real dan sudah mencapai target indikator selama 12 bulan sebanyak 24 dokumen, sehingga ada sisa anggaran.
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.000.000	230.700.723	12	12	Laporan		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.110.150.400	1.006.800.000	100	100	Persen		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.110.150.400	1.006.800.000	12	12	unit	Deviasi harga pada belanja barang atau terjadi selisih harga anggaran yaitu selisih antara harga pasar dengan harga standar. Selisih yang terjadi dikategorikan selisih negatif karena harga di pasar lebih rendah daripada harga standar.	- Penyesuaian harga standar dengan survei harga pasar secara berkala, penyusunan harga standar berbasis data aktual, pemanfaatan sistem e-catalogue, penetapan harga standar yang fleksibel - Monitoring dan Evaluasi secara Berkala
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.043.444.000	835.038.125	12	12	Bulan		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.198.000	1.570.000	1	1	Laporan	Tidak ada permasalahan dikarenakan telah dibelanjakan 100% sesuai kebutuhan	Jawaban : Materai di standar harga 14.000/lembar, sedangkan dibelanjakan real materai 10.000/lembar.
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301.050.000	257.081.749	12	12	Laporan	Tidak ada permasalahan dikarenakan telah dibelanjakan	Jawaban : Anggaran tersedia secara global 1 tahun, dan pengeluaran

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								100% sesuai tagihan	berdasarkan real pemakaian wifi, air, listrik.
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	740.196.000	576.386.376	15	15	Laporan	Tidak ada permasalahan dikarenakan anggaran dibayarkan sesuai dengan jumlah pegawai selama 12 bulan	Mohon lebih spesifik selisih 163,809,624 Jawaban : Sub kegiatan terdiri atas Belanja Kebersihan Kantor dan Pembayaran Honor PTT dan sudah terbayar 100%. Terjadi efisiensi anggaran dikarenakan pembelanjaan barang sesuai real (terjadi deviasi harga).
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.790.000	247.270.269	100	100	Persen		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	260.000.000	224.576.769	89	58	Unit	Tidak ada permasalahan dikarenakan pelaksanaannya disesuaikan dengan usulan	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.790.000	6.830.000	15	10	Unit	Tidak ada permasalahan dikarenakan	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								pelaksanaannya disesuaikan dengan usulan	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	15.863.500	1	1	Kantor	Deviasi harga pada belanja barang/jasa atau terjadi selisih harga anggaran yaitu selisih antara harga pasar dengan harga standar. Selisih yang terjadi dikategorikan selisih negatif karena harga di pasar lebih rendah daripada harga standar.	- Penyesuaian harga standar dengan survei harga pasar secara berkala, penyusunan harga standar berbasis data aktual, pemanfaatan sistem e-catalogue, penetapan harga standar yang fleksibel - Monitoring dan Evaluasi secara Berkala
		2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9.915.206.600	8.654.565.874					
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.361.488.600	3.137.306.678	92	92	Unit		
		Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.361.488.600	3.137.306.678	1	1	Laporan	Deviasi harga pada belanja barang/jasa atau terjadi selisih harga anggaran yaitu selisih antara harga	- Penyesuaian harga standar dengan survei harga pasar secara berkala, penyusunan harga standar

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								pasar dengan harga standar. Selisih yang terjadi dikategorikan selisih negatif karena harga di pasar lebih rendah daripada harga standar.	berbasis data aktual, pemanfaatan sistem e-catalogue, penetapan harga standar yang fleksibel - Monitoring dan Evaluasi secara Berkala
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	5.683.724.700	4.742.978.269	- 936 Ha - 950 Ekor	- 929 Ha - 365 Ekor	Ha dan Ekor	Indikator Sub Kegiatan diatur dalam Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sedangkan Indikator Kegiatan tidak sehingga masih sesuai dengan Renstra OPD (Tupoksi)	Sub Kegiatan terdiri dari Rekening Belanja pendukung. Indikator Kinerja Sub Kegiatan merupakan gambaran/mewakili dari tugas fungsi pemegang kegiatan jadi total anggaran bukan hasil = volume indikator sub kegiatan x harga satuan.
		Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.346.911.600	1.201.528.827	7	7	Dokumen	- Honor PTT SILPA dikarenakan yang bersangkutan lulus PPPK	- Evaluasi anggaran dan Melakukan koordinasi dengan

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								- Kegiatan peningkatan daya dukung struktur jalan fisik tidak dapat dilaksanakan 100% dikarenakan Pihak Ketiga tidak dapat melanjutkan pekerjaan. Hal ini disebabkan kondisi jalan yang masih labil khususnya dari sta 100 s/d 180, dan tidak ada jalan alternatif sehingga ada kegiatan proyek lain yang harus melintasi jalan tersebut.	Bapelitbang dan BPKAD - Evaluasi kegiatan yang tidak terlaksana sebagai dasar perencanaan berikutnya
		Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.776.814.000	1.489.355.574	5	5	Dokumen	- Deviasi harga pada belanja barang atau terjadi selisih harga anggaran yaitu selisih antara harga pasar dengan harga standar. Selisih yang	- Penyesuaian harga standar dengan survei harga pasar secara berkala, penyusunan harga standar berbasis data aktual, pemanfaatan

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								terjadi dikategorikan selisih negatif karena harga di pasar lebih rendah daripada harga standar. - Belanja hibah cabai tidak terealisasi dikarenakan spesifikasi dan merk dagang yang tercantum di SSH sudah tidak diproduksi lagi - Belanja Perjalanan Luar Daerah (rapat-rapat Satker Provinsi) memiliki volume lebih kecil dari tahun sebelumnya.	sistem e-catalogue, penetapan harga standar yang fleksibel - Pengusulan Standar baru - Monitoring dan Evaluasi secara Berkala
		Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	2.559.999.100	2.052.093.868	12	10	Laporan	Deviasi harga pada belanja barang atau terjadi selisih harga anggaran yaitu selisih antara harga pasar dengan	- Penyesuaian harga standar dengan survei harga pasar secara berkala, penyusunan harga standar berbasis data

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								harga standar. Selisih yang terjadi dikategorikan selisih negatif karena harga di pasar lebih rendah daripada harga standar.	aktual, pemanfaatan sistem e-catalogue, penetapan harga standar yang fleksibel - Monitoring dan Evaluasi secara Berkala
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	869.993.300	774.280.927	15	15	Peternak dan Kelompok		
		Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	519.206.400	476.651.872	28800	29575,8	Ton	- Deviasi harga pada belanja barang atau terjadi selisih harga anggaran yaitu selisih antara harga pasar dengan harga standar. Selisih yang terjadi dikategorikan selisih negatif karena harga di pasar lebih rendah daripada harga standar. - Perjalanan Dinas	- Penyesuaian harga standar dengan survei harga pasar secara berkala, penyusunan harga standar berbasis data aktual, pemanfaatan sistem e-catalogue, penetapan harga standar yang fleksibel - Evaluasi anggaran sebagai dasar

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								dalam Daerah tidak dapat terealisasi maksimal dikarenakan kekurangan SDM sehingga juga mempengaruhi realisasi belanja BBM.	Perencanaan berikutnya
		Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	350.786.900	297.629.055	36	36	Laporan	Tidak terlaksananya beberapa kegiatan dikarenakan kurangnya koordinasi internal Dinas terkait Usulan SK Narasumber sehingga mengakibatkan kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan Pakan yang sedianya dilaksanakan di Gedung Pertemuan Dinas menjadi Batal.	Melaksanakan bimbingan Pengolahan Pakan di Lokasi/ Lapangan
		3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.363.423.500	2.079.103.334					

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	69.996.000	47.778.832	450	450	Ha		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	69.996.000	47.778.832	1	1	Dokumen	Honor yang tidak dapat dibayarkan karena dibatasi oleh regulasi pembayaran honor maksimal hanya 3 kegiatan yang bisa dibayarkan sekalipun tersebut memegang lebih dari 3 kegiatan.	Penyusunan anggaran harus bersinergi dengan sub kegiatan lain yang sejenis agar terhindar dari dobel penganggaran atau berlebihan dalam penganggaran, langkah ini dilakukan agar anggaran yang sudah dibuat dapat diserap dengan baik.
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	2.293.427.500	2.031.324.502	6	5,7	Unit		
		Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	215.999.500	195.314.993	1	1	Unit		
		Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	174.999.500	160.070.000	2	2	Unit		
		Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	393.999.700	292.825.034	2	1,7	Unit	- Belanja Jalan Usaha Tani tidak sepenuhnya terserap dikarenakan teknis dilapangan	- Evaluasi Pihak Ketiga - Penyusunan anggaran harus bersinergi dengan sub kegiatan lain

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								(material batu pada lapisan atas jalan tidak tersedia dilokasi). - Belanja bahan bakar minyak dan perjalanan dinas tidak terealisasi maksimal dikarenakan pekerjaan berada pada satu wilayah yang sama dengan pekerjaan lain pada sub kegiatan yang berbeda.	yang sejenis agar terhindar dari dobel penganggaran atau berlebihan dalam penganggaran, langkah ini dilakukan agar anggaran yang sudah dibuat dapat diserap dengan baik.
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	296.498.500	244.945.748	1	1	Unit	- Honor KPA yang tidak dapat dibayarkan karena dibatasi oleh regulasi pembayaran honor maksimal hanya 3 kegiatan yang bisa dibayarkan sekalipun KPA tersebut memegang lebih dari 3 kegiatan. - Penyerapan terendah pada	- Penyusunan anggaran harus bersinergi dengan sub kegiatan lain yang sejenis agar terhindar dari dobel penganggaran atau berlebihan dalam penganggaran, langkah ini dilakukan agar anggaran yang sudah dibuat

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								belanja bahan bakar minyak dan perjalanan dinas hal ini dikarenakan pekerjaan berada pada satu wilayah yang sama dengan pekerjaan lain pada sub kegiatan yang berbeda.	dapat diserap dengan baik.
		Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	1.211.930.300	1.138.168.727	1	1	Unit	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi yang akan dialokasi untuk honorarium Tenaga Keurmaster selama 3 bulan tidak terealisasi dikarenakan tidak ada tenaga Keurmaster di RPH - Deviasi harga pada belanja barang atau terjadi selisih harga anggaran yaitu selisih antara harga	- Keurmaster adalah tenaga teknis yang bertugas untuk memeriksa kualitas daging hasil pemotongan di RPH. Tenaga tersebut saat ini diisi oleh seorang Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang tidak sesuai untuk tugas tersebut, sementara pengangkatan tenaga honorer baru tidak diperbolehkan

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								pasar dengan harga standar. Selisih yang terjadi dikategorikan selisih negatif karena harga di pasar lebih rendah daripada harga standar.	- Penyesuaian harga standar dengan survei harga pasar secara berkala, penyusunan harga standar berbasis data aktual, pemanfaatan sistem e-catalogue, penetapan harga standar yang fleksibel - Monitoring dan Evaluasi secara Berkala
		4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.420.436.636	1.341.788.398					
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	316.977.500	305.370.536	4.000	3.488	Ekor		
		Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	316.977.500	305.370.536	65	68	Laporan		
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik	913.630.136	856.807.501	9.000	9.927	Kali		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	913.630.136	856.807.501	84	84	Laporan	- Belanja jasa tenaga kesehatan SILPA dikarenakan yang bersangkutan lulus PPPK - Deviasi harga pada belanja barang atau terjadi selisih harga anggaran yaitu selisih antara harga pasar dengan harga standar. Selisih yang terjadi dikategorikan selisih negatif karena harga di pasar lebih rendah daripada harga standar.	- Evaluasi anggaran dan Melakukan koordinasi dengan Bapelitbang dan BPKAD - Penyesuaian harga standar dengan survei harga pasar secara berkala, penyusunan harga standar berbasis data aktual, pemanfaatan sistem e-catalogue, penetapan harga standar yang fleksibel
		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	189.829.000	179.610.361	275	308	Sampel		
		Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	189.829.000	179.610.361	24	24	Laporan		
	5.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	332.898.000	244.783.488					

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	332.898.000	244.783.488	10	10	Kecamatan		
		Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	332.898.000	244.783.488	158	158	Ha	Deviasi harga pada belanja barang atau terjadi selisih harga anggaran yaitu selisih antara harga pasar dengan harga standar. Selisih yang terjadi dikategorikan selisih negatif karena harga di pasar lebih rendah daripada harga standar. Jawaban : Tidak ada pembahasan tambahan karena belanja Pestisida terealisasi 100%, yang tidak terealisasi maksimal ada pada belanja pendukung seperti perjalanan (yang dilaksanakan	- Penyesuaian harga standar dengan survei harga pasar secara berkala, penyusunan harga standar berbasis data aktual, pemanfaatan sistem e-catalogue, penetapan harga standar yang fleksibel - Monitoring dan Evaluasi secara Berkala

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								menyesuaikan keadaan)	
		6 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	334.362.000	240.703.076					
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	334.362.000	240.703.076	42	42	Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha		
		Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	179.363.000	90.444.366	4	4	Dokumen	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Pelaksanaan Temu Usaha Pertanian tidak dapat terealisasi maksimal dikarenakan Beberapa kegiatan terjadwal yang dilaksanakan Provinsi tidak terlaksana sepenuhnya sehingga pelaksana Kabupaten/Kota tidak menggunakan anggaran tersebut, dan untuk kegiatan Temu Usaha dikarenakan pada	- Evaluasi kegiatan yang tidak dapat terlaksana sebagai dasar perencanaan berikutnya

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								kegiatan tersebut perlu mendatangkan narasumber dari pihak perusahaan asuransi namun berhalangan hadir sehingga penjadwalan kegiatan tertunda, sehingga sangat berpengaruh pada anggaran konsumsi dan penunjangnya yaitu anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan uang saku yang jumlahnya cukup signifikan Sudah dibahas diatas untuk rincian belanja yang tidak terealisasi. 4 Dokumen merupakan rekomendasi BBM untuk Petani terealisasi 100%	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	154.999.000	150.258.710	15	15	Laporan		
		7. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.619.399.600	1.292.294.668					
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.619.399.600	1.292.294.668	10	10	Kecamatan		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	831.540.000	734.512.048	10	10	unit	BBM untuk operasional Penyuluh dan Paket Data tidak dapat terealisasi dikarenakan ada Penyuluh yang pensiun	Penyesuaian perencanaan dengan menyesuaikan jumlah Penyuluh yang ada dan mempertimbangkan tambahan penyuluh yang diterima CPNS 2025
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	365.359.600	274.320.320	66	66	unit	- Honor PTT SILPA dikarenakan pemusatan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Honor Narasumber Kegiatan Pra PEDTA KTNA tidak terealisasi dikarenakan	Evaluasi anggaran dan Melakukan koordinasi dengan Bapelitbang dan BPKAD

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Narasumber berasal dari Eselon II	
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	422.500.000	283.462.300	20	20	unit	- Belanja Pupuk NPK untuk bahan Demplot Penyuluh Swadaya dikarenakan teknis penerima Pupuk tidak boleh personal/perorangan - BBM untuk operasional Penyuluh tidak terealisasi karena telah didukung dari Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Bantuan Keuangan)	- Evaluasi kegiatan yang tidak terlaksana - Penyesuaian dan revisi perencanaan (mengganti kegiatan dengan yang lebih relevan dan dapat dilaksanakan)
JUMLAH			39.994.436.914	35.435.025.595	100	88,60	Persen		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
2	DISNAKERTRANS	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.753.191.851	9.974.827.111					
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	369.017.400	364.946.806					
		- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	112.080.600	112.051.042	12	12	Dokumen		
		- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD	79.001.800	78.385.209	12	12	Laporan		
		- Evaluasi kinerja perangkat daerah	177.935.000	174.510.555	45	45	Laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.289.963.551	6.713.948.260					
		- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	5.889.353.551	5.434.006.613	41	56	Orang/ Bulan		
		- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1.400.610.000	1.279.941.647	10	10	Dokumen		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	202.400.000	187.657.618					
		- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	61.500.000	61.500.000	60	60	Paket		
		- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	140.900.000	126.157.618	10	10	Orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	709.810.300	688.311.700					
		- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	11.988.000	11.988.000	5	5	Paket		
		- Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.659.500	226.518.000	9	9	Paket		
		- Penyediaan peralatan rumah tangga	8.801.800	8.801.800	9	9	Paket		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		- Penyediaan bahan logistik kantor	110.455.000	109.572.000	2.000	5000	Paket		
		- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.906.000	9.204.250	15	5	Paket		
		- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	5.000.000	4.880.000	240	240	Dokumen		
		- Penyelenggaraan rapat koordinasi dn konsultasi SKPD	320.000.000	317.347.650	15	15	Laporan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	858.961.700	799.079.000					
		- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	676.694.400	637.420.000	2	1	Unit		
		- Pengadaan Meubel	25.766.000	25.519.000	3	3	Unit		
		- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	14.767.800	14.640.000	22	22	Unit		
		- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	141.733.500	121.500.000	1	3	Laporan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.450.300	247.815.290					
		- Penyediaan Surat Menyurat	3.194.000	2.990.000	1200	1200	Laporan		
		- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	263.997.700	236.870.290	12	36	Laporan		
		- Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8.258.600	7.955.000	22	22	Laporan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1.047.588.600	973.068.437					
		- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	347.300.000	275.446.437	30	30	Unit		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		- Pemeliharaan mebel	32.000.000	32.000.000	5	15	Unit		
		- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	18.470.000	18.465.000	16	16	Unit		
		- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	649.818.600	647.157.000	1	1	Unit		
		2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	185.866.000	181.182.913					
		Penyusunan Tenaga Kerja (RTK)	185.866.000	181.182.913					
		- Penyusunan tenaga kerja makro	61.194.000	60.071.288	1	1	Dokumen		
		- Penyusunan tenaga kerja mikro	124.672.000	121.111.625	20	35	Orang		
		3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.455.477.000	1.391.512.538					
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1.206.387.000	1.165.109.699					
		- Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1.132.207.000	1.095.954.440	100	112	Orang		
		- koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	74.180.000	69.155.259	5	5	Lembaga		
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	45.500.000	41.611.917					
		- Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	45.500.000	41.611.917	5	3	Lembaga		
		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	82.960.000	71.972.000					

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		- Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	82.960.000	71.972.000	3	3	Perizinan		
		Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	43.250.000	42.153.270					
		- Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	43.250.000	42.153.270	15	15	Perusahaan		
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.380.000	70.665.652					
		- Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	77.380.000	70.665.652	20	20	Dokumen		
		4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.276.615.200	1.228.903.427					
		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	715.509.200	692.331.935					
		- Pelayanan antar kerja	90.172.000	89.107.000	120	45	Orang		
		- Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	63.422.200	59.210.894	28	20	Orang		
		- Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi Pencari Kerja	215.757.000	208.441.156	120	200	Orang		
		- Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	121.764.000	115.337.231	30	7	Orang		
		- Perluasan kesempatan kerja	224.394.000	220.235.654	55	40	Orang	Anggaran yang tidak mencukupi untuk melaksanakan pelatihan bagi 55 Orang yang di Target kan	Anggaran untuk pelatihan diharapkan bisa sesuai dengan Jumlah target
		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	96.498.000	94.082.029					

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		(LPTKS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		- Pengawasan dan pengendalian LPTKS	96.498.000	94.082.029	15	12	Lembaga		
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	319.584.000	303.459.876					
		- Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	116.802.000	105.451.761	12	12	Laporan		
		- Job fair/bursa kerja	202.782.000	198.008.115	75	551	Orang		
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	145.024.000	139.029.587					
		- Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	145.024.000	139.029.587	5	0	Orang	Tidak adanya Pencari Kerja atau Pekerja yang mau bekerja di Luar Negri dan sampai saat ini belum ada Permasalahan yang di alami pekerja Migran Indonesia	Sosialisai dan Identifikasi telah dilakukan ke kampung dan sekolah, namun belum ada yang berminat untuk bekerja di Luar negri
		5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.640.863.600	2.871.918.294					
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.525.511.600	1.761.051.264					
		- Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	224.244.000	223.293.118	115	225	Perusahaan		
		- Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan	2.301.267.600	1.537.758.146	1		Laporan	1.Sumber Dana PAD : Hanya	1. Mengarahkan BPJS

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan						dapat dilaksanakan/ dir ealisasikan 10 (sepuluh) bulan terhitung dari bulan Maret - Desember 2024 karena : a. Perjanjian kerja sama antara Disnakertrans Kab. Berau dengan BPJS Ketenagakerjaan Kab. Berau mulai berlaku pada bulan Maret 2024. b. Keputusan Bupati Berau Nomor 400 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Monitoring Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah, Dan	Ketenagakerjaan agar membuat perjanjian kerja sama dgn pemerintah daerah Kab. Berau lebih awal sehingga bisa berlaku di bulan Januari 2025. 2. Mengarahkan BPJS Ketenagakerjaan agar membuat perjanjian kerja sama dgn Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau lebih awal sehingga bisa berlaku di bulan Januari 2025 3. Mengajukan Surat Keputusan Bupati Berau tentang Tim Verifikasi dan Monitoring Perlindungan Sosial

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Sumber Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) Sawit, mulai berlaku pada bulan Maret 2024. 2.Sumber Dana DBH Sawit : Hanya dapat dilaksanakan/ dir ealisasikan 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Oktober - Desember 2024 karena : a. Peraturan Bupati Berau Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Optimalisasi Perlindungan Pekerja Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah, baru mulai berlaku pada tanggal 20	Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan, lebih awal sehingga bisa berlaku di bulan Januari 2025. Poin 1, 2 dan 3 diatas sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaannya.

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								September 2024 (diatas tanggal 15) sehingga pelaksanaannya dimulai pada bulan Oktober s.d. Desember 2024. b. Jumlah calon peserta yang dianggarkan sebanyak 8.930 orang, akan tetapi yang diajukan hanya 8.587 orang, sisanya masih dalam proses pengumpulan dan verifikasi calon peserta.	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota.	1.115.352.000	1.110.867.030					
		- Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	210.614.000	210.223.296	100	239	Perkara		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	447.715.000	447.714.967	115	220	Perkara		
		- Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	197.481.000	195.167.093	10	34	Asosiasi dan Serikat Pekerja		
		- Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit di daerah kabupaten/kota	259.542.000	257.761.674	1	1	Lembaga		
		6. PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	550.047.000	296.075.930					
		- Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	550.047.000	296.075.930					
		- Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	550.047.000	296.075.930	30	12	Hektar	1. Terbatasnya jumlah staff pelaksana pada Bidang Transmigrasi sehingga kesulitan dalam membagi makna pelaksanaan ke lokasi. 2. Jauhnya lokasi Target kegiatan (Pulau Maratua)	1. Mengusulkan Penambahan Staf Pelaksana melalui rekrutmen CPNS dan P3K 2. Membuat Perencanaan lebih awal terhadap schedule pelaksanaan Lapangan bersama Stockholder

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								sehingga mengalami kesulitan melakukan penyesuaian waktu pelaksanaan bersama stockholder terkait kegiatan tersebut.	terkait kegiatan tersebut.
		7. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	113.034.600	84.149.858				3. Beberapa rekening sub kegiatan tidak terpakai karena secara realisasi fisik tercapai.	
		Penataan Persebara Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	113.034.600	84.149.858					
		- Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	92.084.800	67.425.658	1	1	Laporan	Rekening Sub Kegiatan tidak terpakai karena secara realisasi fisik tercapai.	
		- Penyuluhan transmigrasi	20.949.800	16.724.200	35	35	Kepala Keluarga		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		8.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	154.296.800	112.714.513					
			Pengembangan Satuan permukiman pada tahap kemandirian	154.296.800	112.714.513					
			- Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	154.296.800	112.714.513	50	50	Kepala Keluarga	Rekening Sub Kegiatan tidak terpakai karena secara realisasi fisik tercapai.	
JUMLAH				18.129.392.051	16.141.284.584	100	90,00	Persen		
3	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.121.019.251	10.797.862.255					
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	594.441.000	471.176.134					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	183.314.000	138.539.980	4	4	Dokumen		
			Koordinasi dan Penyusunan Lapoan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.647.000	104.871.113	6	6	Dokumen	Belanja Honorarium KPA tidak dibayarkan karena sudah direalisasikan di sub kegiatan lain yang lebih besar pagunya, serta terdapat belanja perjalanan dinas ke dalam daerah yang tidak dapat direalisasikan karena terbentur	Honor tidak dibayarkan karena sudah mencapai maksimal jumlah penerimaan honor sebagai KPA, sebaiknya dilakukan pergeseran belanja yang tidak dapat direalisasikan

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								kegiatan lain yang harus dihadiri	pada perubahan DPA
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.480.000	227.765.041	2	2	Laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.708.798.151	7.182.299.799					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.420.381.151	6.931.447.799	14	14	Bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	288.417.000	250.852.000	288	251	Orang		
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	61.301.000	56.698.419					
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	61.301.000	56.698.419	1	1	Dokumen		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.000.000	125.109.800					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000	69.750.000	100	100	Stell		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	145.000.000	55.359.800	13	4	Orang	Padatnya pelaksanaan kegiatan di lapangan dan keterbatasan pegawai di bidang dan memerlukan bantuan pegawai dari bidang lainnya sehingga pegawai yang rencananya diikutsertakan pelatihan tidak	Lebih cermat dalam menyusun jadwal kegiatan dan rencana pelatihan yang akan diikuti

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								bisa mengikuti sesuai rencana	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.067.559.100	959.896.013					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	21.182.000	21.139.000	11	11	Jenis		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.231.700	192.049.400	20	20	Unit		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.936.000	21.795.000	19	19	Jenis		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.825.000	43.463.000	752	640	Porsi		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.204.800	23.204.400	13.000	12.550	Lembar		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	4.340.000	2.100	1.140	Exampler		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	312.179.600	253.397.785	45	42	Orang		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.000.000	400.507.428	125	117	Orang		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.000.000	53.920.000					
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.000.000	43.920.000	2	2	Unit		
		Pengadaan Mebel	10.000.000	10.000.000	4	4	Unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.910.400.000	1.662.364.543					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.800.000	2.800.000	1.200	1.150	Surat		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.000.000	128.122.107	12	12	Bulan		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.715.600.000	1.531.442.436	576	564	Orang		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	504.520.000	286.397.547					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	352.200.000	234.294.167	45	39	Unit		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.000.000	1.800.500	1	1	Unit		
		Pemeliharaan Mebel	15.000.000	15.000.000	20	20	Unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.320.000	35.302.880	74	51	Unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	-	1	-	Unit	Belanja Jasa tenaga cleaning service rencana diperuntukkan untuk persiapan kepindahan dan kebutuhan tenaga kebersihan pada gedung baru Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, namun belum dapat terealisasi karena sampai akhir tahun masih	Mengusulkan kembali pada anggaran tahun berikutnya, karena belum terdapat tenaga kebersihan (Cleaning Service) dan untuk memenuhi kebutuhan pada gedung baru Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								menempati gedung lama	
		2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5.185.679.600	3.879.599.460	18	18	Event		
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.057.402.600	2.236.028.116					
		Pelindungan, Pegembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.502.402.600	1.753.726.239	3	3	Event	Kegiatan Pelantikan Dewan Kesenian Daerah (DKD) tidak dapat dilaksanakan karena terkendala SK yang belum terbit, selain itu anggaran tersedia di anggaran perubahan sehingga terkendala waktu	Menjadwalkan kegiatan pelantikan Dewan Kesenian Daerah di tahun berikutnya setelah SK sudah terbit
							PENJELASAN ---->	Output Kegiatan yang terealisasi adalah Event Rangkaian Hari Jadi, Event Festival Musik Pantai dan Event Tour Derawan 2024, realisasi sesuai target, realisasi anggaran belum terserap	Menjadwalkan kegiatan pelantikan Dewan Kesenian Daerah di tahun berikutnya setelah SK sudah terbit, standarisasi hadiah lomba sebaiknya dapat ditingkatkan agar dapat

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								maksimal karena pada rangkaian hari jadi terdapat kegiatan lomba-lomba yang masih kurang diminati peserta berkaitan dengan standarisasi hadiah yang masih rendah, selain itu pada sub kegiatan ini guna mendukung pemajuan kebudayaan daerah direncanakan untuk melaksanakan pelantikan Dewan Kesenian Daerah (DKD), dimana terdapat beberapa item belanja pendukung kegiatan tersebut, namun belum dapat dilaksanakan karena terkendala SK yang belum terbit, selain itu	mengundang minat peserta dalam memeriahkan event hari jadi Kabupaten Berau

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								anggaran tersedia di anggaran perubahan sehingga terkendala waktu.	
		Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	555.000.000	482.301.877	3	5	Lembaga	Realisasi kinerja melebihi target karena dari anggaran yang ada masih bisa dilaksanakan untuk pembinaan sehingga realisasi sebanyak lima lembaga adat/kebudayaan	Memfaatkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pembinaan di daerah
		Pelestrarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.898.277.000	1.568.572.187					
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	890.277.000	701.774.783	13	13	Tradisi Budaya		
		Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1.008.000.000	866.797.404	2	2	Event		
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	230.000.000	74.999.157					
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	230.000.000	74.999.157	3	1	Kelompok	Terdapat kelompok atau lembaga adat sebagai penerima hibah alat kesenian yang	Tidak merealisasikan belanja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga belanja hibah alat kesenian tidak dapat direalisasikan	ketentuan yang berlaku
		3. PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	170.000.000	104.717.295	3	3	Kelompok Seni Budaya		
		Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	170.000.000	104.717.295					
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	170.000.000	104.717.295	55	55	Pelaku Seni/Sanggar Seni	Belanja Honorarium Penanggungjawab an Pengelola Keuangan tidak dibayarkan karena keterbatasan pegawai sehingga pengelola keuangan adalah pejabat yang sama di beberapa kegiatan, sementara terdapat pembatasan jumlah	Belanja yang tidak dapat terealisasi sebaiknya pada saat anggaran perubahan dilakukan pergeseran ke belanja lain yang membutuhkan

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								honorarium yang dibayarkan	
		4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100.000.000	45.464.719	3	4	Situs/BCB		
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	100.000.000	45.464.719					
		Pengembangan Cagar Budaya	100.000.000	45.464.719	3	4	Situs/BCB	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas dan Perjalanan Dinas yang tidak terealisasi karena monitoring ke lokasi cagar budaya yang direncanakan telah dilaksanakan sekaligus monitoring ke lokasi lainnya	Kegiatan tetap dilaksanakan namun pembiayaannya tidak direalisasikan
		5. PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM	1.271.520.000	924.885.723	3	3	Museum/K eraton		
		Pegelolaan Museum Kabupaten/ Kota	1.271.520.000	924.885.723					
		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	110.000.000	90.634.682	2	2	Museum/K eraton		
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	225.000.000	169.349.284	2	2	Kegiatan	Beri Penjelasan seperti dibawah	
							PENJELAS AN ---->	Pada sub kegiatan ini terlaksana 2	Melakukan publikasi yang

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								lomba yang dilaksanakan di museum batiwakal untuk pelajar untuk mengenalkan sejarah dan cagar budaya terhadap pelajar, namun jumlah peserta lomba masih kurang sehingga ada anggaran yang tidak dapat terserap secara keseluruhan	lebih agar mengundang peserta di pelaksanaan selanjutnya
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	936.520.000	664.901.757	3	3	Museum/K eraton	Beberapa belanja yang belum terealisasi terkendala Keterbatasan waktu pelaksanaan	Menjadwalkan pelaksanaan kegiatan di awal agar dapat terlaksana
		6. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	30.998.382.942	28.704.365.868	236.141	557.214	Orang	Pada program ini ada dua indikator yaitu Jumlah Wisatawan dan Lama Kunjungan Wisatawan (target jumlah wisatawan thn 2024 : 236.141 orang, dan target lama kunjungan	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								wisatawan thn 2024 : 4 Hari)	
					4	3	Hari		
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	932.812.000	273.988.635					
		Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	219.020.000	107.256.839	12	15	Daya Tarik Wisata	Beberapa daya tarik wisata baru yang diusulkan masyarakat kampung, namun belum semuanya dapat dilakukan mengingat jarak dan lokasi yang diusulkan jauh dari pemukiman masyarakat. Selain itu, beberapa daya tarik wisata baik yang telah terkelola maupun yang masih potensi yang telah didata sebagian besar masih memiliki sapras dan pengelolaan yang belum baik.	Menindaklanjuti beberapa usulan masyarakat yang belum dapat dikunjungi di tahun 2024 pada tahun 2025, sarana dan prasarana dan akses ke Daya Tarik Wisata perlu ditingkatkan.
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	223.065.000	166.731.796	8	10	Kampung Wisata	Secara menyeluruh tidak ada kendala yang dihadapi, pada	Pembinaan Kampung Wisata secara berkala ke kampung wisata

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2024 8 Desa wisata masuk dalam 500 Besar, 7 Desa wisata masuk dalam 300 besar dan 3 Desa wisata masuk dalam 100 besar serta 1 Desa wisata masuk dalam 50 besar ADWI 2024 dan Desa Wisata Kepulauan Derawan meraih Juara III untuk kategori Digital	yang memiliki potensi masuk dalam ADWI
		Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik)	490.727.000	-	1	-	Dokumen Perencanaan	Adanya edaran dari Kemendagri tentang Pemetaan Sub Kegiatan DAK Non Fisik, sehingga pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah pergeseran sub kegiatan yaitu di anggaran perubahan,	Mempedomani Juknis DAK Non Fisik

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								sedangkan berdasarkan Juknis DAK Non Fisik tidak memenuhi syarat waktu pelaksanaan kegiatan	
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	430.000.000	424.779.662					
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	200.000.000	195.225.102	50	50	Orang		
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	230.000.000	229.554.560	3	3	Bidang Usaha		
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	28.775.648.942	27.234.111.939					
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	761.075.800	731.899.256	3	3	Dokumen Perencanaaan		
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	3.884.115.771	3.642.461.671	3	3	Produk Wisata	Pembiayaan yang bersumber dari DBH-DR pada sub kegiatan ini terdapat pada anggaran perubahan sehingga waktu pelaksanaan sangat terbatas, dengan beberapa tahapan	1 Sarana dan Prasarana dilakukan Addedum Kontrak (Waktu) 30 Hari Kalender
					5	4	Sarana dan Prasarana		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, tender, kualifikasi sampai pelaksanaan pekerjaan	
		Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	23.530.571.371	22.437.181.678	32	29	Sarana dan Prasarana	Pembiayaan yang bersumber dari APBD-P waktu pelaksanaan sangat terbatas, dengan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, tender, kualifikasi sampai pelaksanaan pekerjaan	3 Sarana dan Prasarana dilakukan Addedum Kontrak (Waktu) 30 Hari Kalender
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	599.886.000	422.569.334	5	11	Pokdarwis		
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	859.922.000	771.485.632					
		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	170.000.000	160.802.055	8	8	Bidang Usaha		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	689.922.000	610.683.577	2	2	Data		
		7. POGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.829.123.800	4.509.868.031	7	8	Destinasi Wisata		
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	4.829.123.800	4.509.868.031					
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	293.466.000	285.206.600	2	2	Kegiatan		
		Peningkatan Keja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	359.878.600	324.585.723	3	3	Kerjasama dan Kemitraan		
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	2.189.999.600	1.940.624.120	7	7	Event		
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.985.779.600	1.959.451.588	11	11	Media Promosi Pariwisata		
		8. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.920.510.670	1.161.980.335					
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.515.633.930	845.196.722					
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	776.473.930	653.724.872	120	120	Orang		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	452.632.600	-	120	-	Orang	Kegiatan 2 Pelatihan yang bersumber dari DAK Non Fisik tidak dapat dilaksanakan karena beberapa hal yang menjadi pertimbangan :1. Untuk melaksanakan kegiatan dengan volume peserta 40 orang per pelatihan dana yang tersedia tidak mencukupi, jika mengurangi volume per kegiatan menjadi 30 orang maka tidak sesuai dengan Juknis DAK Non Fisik yang ada.2. Tidak tersedia peserta bagi pelatihan pemandu selam sesuai dengan Juknis 40 oarang bersertifikat minimal resque3. Terdapat	Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut pelatihan tidak dapat dilaksanakan dan tetap mengacu kepada Juknis DAK Non Fisik yang ada

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									kekurangan anggaran di beberapa kode rekening (akomodasi peserta, uang saku peserta, uang transport peserta, paket meeting peserta)4. Belum tersedianya pengajar/instrukt ur sesuai dengan Juknis telah berpraktik sebagai assesor pemandu wisata gua	
			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	286.527.400	191.471.850	80	80	Orang		
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	404.876.740	316.783.613					
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	404.876.740	316.783.613	40	40	Orang		
JUMLAH				56.596.236.263	50.128.743.686	100	88,57	Persen		
4	DINAS PERIKANAN	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.995.777.736	9.147.127.811					
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	712.377.200	660.937.348	9	9	Dokumen		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	374.817.400	328.163.493	4	4	Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.285.200	10.460.450	3	3	Dokumen		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	325.274.600	322.313.405	2	2	Dokumen		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.391.795.868	6.705.062.035	12	12	Bulan		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.196.995.868	6.522.842.035	12	12	Bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	194.800.000	182.220.000	240	240	OB		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	213.419.000	196.645.605	116	116	Orang		
		Pengadaan Pakaian Batik Tradisional	81.419.000	80.785.800	60	60	Orang		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	132.000.000	115.859.805	8	8	Orang		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	579.234.590	559.447.636	100	100	%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.990.000	6.166.000	10	10	Jenis		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.873.490	152.295.100	29/14	29/14	Jenis		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.455.100	3.353.000	7	7	Jenis		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.416.000	68.876.300	1.692	1692	Orang		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000	3.967.500	2/4700	2/4700	Jenis/lembar		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	24	24	eksemplar		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.000.000	319.789.736	200/26	200/26	OK		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.366.800	605.187.216	12	12	%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	1.823.700	8/150	8/150	Kg/lembar		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.991.800	190.530.516	12	12	Bulan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452.875.000	412.833.000	120	120	OB		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.584.278	419.847.971	64	64	Unit		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.100.000	166.075.454	34	34	Unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.950.000	5.650.000	29	29	Unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	247.034.278	244.036.017	1	1	Unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	4.086.500	15	15	Jenis		
		2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.428.896.200	4.881.417.514	25.569,53	26.323,93	Ton		
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4.325.144.600	3.855.288.376	1/106	1/106	Dokumen/ KUB		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	105.784.600	97.873.023	1	1	Dokumen	Belum Akuratnya data populasi baik jumlah nelayan, jumlah kapal dan alat tangkap yang digunakan sebagai dasar penghitungan agregat Kabupaten	Koordinasi dengan pemerintah kampung, penyuluh perikanan sesuai wilayah kerja terkait data yang diperlukan dan mengoptimalkan pengambilan data kelapangan
								Enumerator sebagai petugas pendataan yang berganti setiap tahun sehingga belum bisa melaksanakan tugas secara maksimal	Mengikut sertakan petugas pendataan bimtek dan pelatihan petugas pendataan statistik
		Penjaminan Ketersediaan Sarana usaha perikanan tangkap	4.219.360.000	3.757.415.353	26	26	KUB	Masih sangat diperlukan adanya peningkatan sarana perikanan tangkap agar produksi perikanan tangkap terus meningkat	Dilaksanakannya pengadaan bantuan sarana perikanan tangkap yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta mutu hasil usaha perikanan

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									tangkap skala usaha kecil
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	429.609.600	402.537.275	10	10	Orang		
		Pengembangan kapasitas nelayan kecil	429.609.600	402.537.275	10	10	Orang	Terbatasnya jumlah nelayan yang bisa mengikuti kegiatan bimtek	Menyampaikan kepada tim anggaran saat asistensi agar pagu untuk kegiatan ini ditambah dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas nelayan kecil serta mengidentifikasi kembali jenis bimtek apa yang dibutuhkan nelayan yang bisa dilaksanakan di dalam daerah sehingga bisa mengakomodir nelayan yang ikut dalam jumlah yang lebih banyak
		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	501.162.000	459.659.525	9	9	Jenis		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	501.162.000	459.659.525	9	9	Jenis		
		Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	172.980.000	163.932.338	5.000	5000	Lembar		
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan ukuran sampai dengan 10 GT	172.980.000	163.932.338	5.000	5.000	Lembar	Keterbatasan personil untuk melakukan verifikasi perijinan kapal nelayan di wilayah sentra nelayan yang tersebar di sepanjang pesisir Berau karena terbagi menjadi wilayah utara, wilayah selatan dan pulau-pulau kecil, selain itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perijinan kapal	Pelayanan fasilitasi perijinan dilakukan dengan mengunjungi kampung-kampung nelayan untuk melakukan sosialisasi, koordinasi sekaligus melakukan verifikasi teknis kapal-kapal nelayan sampai dengan 10 GT, perijinan kapal nelayan dijadikan dasar untuk memfasilitasi nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								nelayan sehingga sering menimbulkan permasalahan yang mempersulit kegiatan nelayan khususnya nelayan kecil, ketersediaan kuota BBM nelayan masih belum sesuai dengan kebutuhan BBM untuk operasional kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan	dengan menerbitkan rekomendasi BBM nelayan, sehingga nelayan dapat membeli BBM dengan harga subsidi di SPBU, SPBN dan SPBUN yang terdekat dari kampung mereka
		3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.221.905.850	4.668.415.364	2.452,01	3.459,88	Ton	Realisasi Kegiatan 3.459,88 ton lebih tinggi dari target 2.452,01 ton tetapi realisasi anggaran yang digunakan lebih sedikit dari target 5.221.905.850 menjadi 4.680.641.393, hal ini terjadi karena masih adanya sisa anggaran kontrak	1. Anggaran di SSH harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan ; 2. Dilakukan perencanaan sebelum melakukan kegiatan perjalanan Dinas

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								kegiatan dan juga sisa anggaran perjalanan Dinas	
		Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	813.510.000	788.950.630	44	44	Orang		
		Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	813.510.000	788.950.630	44	44	Orang	- Perubahan inovasi dan teknologi berkaitan kondisi geografis dan demografi sentra kawasan perikanan budidaya	- Memberikan informasi terkait balai budidaya yang refresentatif sebagai wadah pembelajaran, konsultasi, BIMTEK dan workshop perikanan budidaya bagi pelaku usaha budidaya
								- Terbatasnya kemampuan dalam transformasi teknologi perikanan budidaya di tingkat lapang	- Melibatkan PPL untuk bimbingan teknis dilapangan
								- Terbatasnya sentra pelatihan dan pendidikan perikanan budidaya yang kompetitif	- Rencana pembelajaran dan BIMTEK berdasarkan sentra tematik pengembangan kawasan

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									perikanan budidaya
								- Perlu keseriusan dan kesungguhan dalam mencoba teknologi baru terkait teknis perikanan budidaya yang dipadupadankan dengan kondisi lapangan	- Informasi berupa leaflet, brosur dan makalah terkait pengembangan teknis budidaya pada saat pameran perikanan yang bersifat edukatif
								- Belum adanya MoU dan perjanjian kerjasama dengan balai perikanan budidaya terkait peningkatan SDM pelaku perikanan budidaya	- Penyampaian informasi terkait penanganan hama penyakit ikan dan bio security di lingkungan perikanan budidaya secara berkala
		Kegiatan Pengelolaan pembudidayaan ikan	4.408.395.850	3.879.464.734	23	23	Pokdakan/ Lembaga		
		Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	785.750.000	664.944.647	9	9	Pokdakan/ Lembaga	- Stabilitas harga produk hasil perikanan budidaya belum stabil	- Perlu adanya inisiasi pembentukan asosiasi pasar yang terdiri dari pembenih, pembudidaya, dan pemasar hasil perikanan yang memformulasikan

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									harga pasar sesuai dengan kebutuhan (ketersediaan dan permintaan)
								- Belum adanya SK Kepala Daerah yang menetapkan kawasan pengembangan perikanan budidaya berdasarkan potensi, komoditi unggulan dan keunggulan demografis	- Rencana jangka pendek (1 sampai dengan 2 tahun) perlu adanya SK Penetapan Kepala Daerah terkait dengan pengembangan perikanan budidaya oleh pelaku usaha perikanan budidaya
								- Belum dikuasai sepenuhnya teknologi tepat guna terkait dengan pengembangan perikanan budidaya oleh pelaku usaha perikanan budidaya	- Inisiasi bimtek, latihan, workshop dan seminar perikanan budidaya oleh pelaku usaha perikanan budidaya dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, produk hasil perikanan dan nilai tambah

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									dari produk yang dihasilkan
								- Belum adanya pengembangan terintegrasi kawasan budidaya berdasarkan tematik	- Perlu adanya penetapan SK Kepala Derah terkait pengembangan kawasan terintegrasi yang melibatkan lintas sektor atau OPD dalam rangka pengembangan perikanan budidaya berbasis tematik (pariwisata berkelanjutan)
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.451.825.900	3.070.164.327	13	13	Jenis	- Lokasi sangat dipengaruhi pasang surut air sehingga pekerjaan harus menunggu lokasi kering	- Penunjukan rekanan yang memiliki kualifikasi pekerjaan bangunan yang sesuai dengan kondisi demografis BBI Lokal Bedungun
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	170.819.950	144.355.760	8	8	Kecamatan	- Kurangnya SDM teknis HPI, peralatan pengujian yang lebih baik lagi	- Meningkatkan SDM dengan cara melakukan bimtek/ diklat tentang HPI,

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									pengadaan alat pengujian yang lebih baik lagi. (canggih)
								- Belum adanya pos monitoring kesehatan ikan dan lingkungan di sentra-sentra kawasan budidaya	- Perlu adanya pembangunan pos monitoring kesehatan ikan dan lingkungan di sentra-sentra kawasan budidaya yang memberikan informasi kecenderungan kualitas air, distribusi hama penyakit ikan, dan penanganan terkait serangan hama penyakit ikan
								- Belum adanya sistem informasi peringatan dini terkait serangan hama penyakit ikan di setra-sentra kawasan budidaya	- Perlu adanya jejaring sistem informasi serangan hama penyakit ikan di setra-sentra kawasan budidaya yang terhubung atau terkoneksi dengan server utama di

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									Dinas Perikanan sehingga usaha preventif dapat dilakukan sedini mungkin
		4. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	285.785.700	252.685.895	100	107,69	%		
		Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	285.785.700	252.685.895	130	140			
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	163.208.700	138.140.293	90	95	Orang	masih banyaknya nelayan yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan berupa setrum dan racun	selalu mengadakan sosialisasi dan membantu nelayan membuat NIB, memberikan pemahaman kepada nelayan tentang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan untuk beralih ke ramah lingkungan
		Pengawasan Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat	122.577.000	114.545.602	40	45	Orang	masih banyaknya pembudidaya belum memiliki NIB, tingginya	selalu mengadakan sosialisasi dan membantu

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						harga pakan di pasaran, pembudidaya di tambak masih ada yang menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan (Thiodan)	pembudidaya membuat NIB, membuat pakan alternatif, memberikan pemahaman kepada pembudidaya tambak tentang penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan untuk beralih ke ramah lingkungan (Saponin)
		5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.988.245.647	1.887.661.611	4.759,53	4.778,23	Ton		
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	280.228.000	263.147.179	1	1	Dokumen		
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	280.228.000	263.147.179	1	1	Dokumen	Data dan informasi pelaku utama perikanan (pengolah dan pemasar hasil perikanan) kurang valid dan Kurangnya SDM surveilens petugas pendataan	Dilaksanakannya pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	369.356.000	332.079.629	80	80	Orang		
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	369.356.000	332.079.629	80	80	Orang	Terbatasnya diversifikasi olahan hasil perikanan dan narasumber pelatihan olahan hasil perikanan	Dilaksanakannya Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan bagi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan dan Masyarakat
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.338.661.647	1.292.434.803	13	13	Jenis		
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.338.661.647	1.292.434.803	13	13	Jenis	Terbatasnya sarana pengolahan hasil perikanan yang tersedia dan jumlah anggaran yang tersedia	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil
JUMLAH				22.920.611.133	20.837.308.195	1,00	90,91	Persen		
5	PERKEBUNAN	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	259.670.000	219.294.285	5	5	dokumen		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.878.000	11.923.000	5	5	dokumen		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222.130.000	189.866.194	11	11	laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.055.855.969	8.175.053.277	12	12	bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	695.910.000	616.066.320	12	12	bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	76.376.396	5	5	orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.497.000	4.287.000	15	15	jenis		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	262.302.100	236.447.000	16	16	jenis		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.055.000	58.907.000	12	12	bulan		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.050.000	3.366.500	100	100	dokumen		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.780.000	5	5	majalah/ko ran		
		Penyediaan Bahan/Material	9.981.600	8.525.000	10	10	jenis		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.000.000	248.947.651	16	16	undangan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	0	0	unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.988.000	1.510.000	130	124	surat		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.896.700	164.564.117	12	12	bulan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.500.000	151.389.713	30	30	unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.590.000	18.310.000	6	6	unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.382.600	228.069.200	1	1	ruangan / bangunan		
		2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	647.895.700	590.542.744	15	15	Kampung		
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	110.000.000	109.092.440	9	9	Kampung		
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,							

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	883.801.800	697.042.779	60	60	Ha		
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	156.100.000	142.267.160	1	1	Sumber benih/kebu n induk		
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	143.222.300	137.672.290	8	8	Ha		
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	322.200.000	28.053.840	1	1	penagkar	1. Kode Rekening Kegiatan tidak sesuai dengan kodefikasi hasil pembahasan RKP DBH Sawit TA. 2024 Tanggal 21 Maret 2024	Sesuai Arahkan Bagian Ekonomi, Anggaran DBH Sawit, tidak dapat dilaksanakan (Tidak Ada Solusi)
								2. Peraturan Menteri Keuangan No. 91 /PMK/07/2023 tentang DBH Sawit baru diketahui setelah penyusunan RKP dan SIPD sehingga beberapa rincian	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut	
								3. Kegiatan yang disusun sebagian besar berupa pengadaan barang dan jasa dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak diperbolehkan, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas masih sangat memerlukan dukungan perangkat dimaksud.	
		3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
		Pengembangan Prasarana Pertanian							
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan	796.733.000	732.193.700	100	100	Ha		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B							
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan							
		4 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	566.200.000	559.930.812	15	15	Ha		
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	577.500.000	307.241.392	10000	10000	Ha	1. Kode Rekening Kegiatan tidak sesuai dengan kodefikasi hasil pembahasan RKP DBH Sawit TA. 2024 Tanggal 21 Maret 2024	
								2. Peraturan Menteri Keuangan No. 91 /PMK/07/2023 tentang DBH Sawit baru diketahui setelah penyusunan RKP dan SIPD	Target dan Realisasi merupakan Target dan Realisasi dari Kegiatan dengan Anggaran Murni 2024, Sedangkan Sisa Anggaran dari DBH Sawit,

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								sehingga beberapa rincian kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut	tidak mempengaruhi terhadap Target dan Realisasi Kegiatan tersebut.
								3. Kegiatan yang disusun sebagian besar berupa pengadaan barang dan jasa dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak diperbolehkan, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas masih sangat memerlukan dukungan perangkat dimaksud.	Adanya Anggaran DBH Sawit, diperuntukkan sebagai penunjang Kegiatan (Makan Minum Rapat, Sewa Gedung Pertemuan, Honor Narasumber Konsultasi Publik RAD KSB dan Sosialisasi ISPO Kebun Mandiri, Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kontribusi terkait Pelatihan Sosialisasi ISPO) jadi karena Arahkan Bagian Ekonomi dan Sebab Tidak Bisa Dilaksanakannya Kegiatan DBH

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									Sawit, maka tidak mempengaruhi target awal Kegiatan beserta Realisasinya.
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan	150.000.000	147.782.382	3	3	KTPA		
		5 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN							
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1.144.017.000	233.842.616	50	50		1. Kode Rekening Kegiatan tidak sesuai dengan kodefikasi hasil pembahasan RKP DBH Sawit TA. 2024 Tanggal 21 Maret 2024	
								2. Peraturan Menteri Keuangan No. 91 /PMK/07/2023 tentang DBH Sawit baru diketahui setelah penyusunan RKP dan SIPD sehingga beberapa rincian	Target dan Realisasi merupakan Target dan Realisasi dari Kegiatan dengan Anggaran Murni 2024, Sedangkan Sisa Anggaran dari DBH Sawit, tidak mempengaruhi

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut	terhadap Target dan Realisasi Kegiatan tersebut.
								3. Kegiatan yang disusun sebagian besar berupa pengadaan barang dan jasa dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak diperbolehkan, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas masih sangat memerlukan dukungan perangkat dimaksud.	
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	163.996.000	160.994.799	20	20	PBS		
		6 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	310.000.000	270.329.812	6	6	Kampung		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	354.772.400	321.838.851	10	10	Kelompok Tani		
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	135.608.000	120.401.170	11	11	Kecamatan		
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten	806.000.000	625.719.880	4	4	Kelas	1. Kode Rekening Kegiatan tidak sesuai dengan kodefikasi hasil pembahasan RKP DBH Sawit TA. 2024 Tanggal 21 Maret 2024	
								2. Peraturan Menteri Keuangan No. 91 /PMK/07/2023 tentang DBH Sawit baru diketahui setelah penyusunan RKP dan SIPD sehingga beberapa rincian kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut	Target dan Realisasi merupakan Target dan Realisasi dari Kegiatan dengan Anggaran Murni 2024, Sedangkan Sisa Anggaran dari DBH Sawit, tidak mempengaruhi terhadap Target dan Realisasi Kegiatan tersebut.
								3. Kegiatan yang disusun sebagian besar berupa	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								pengadaan barang dan jasa dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak diperbolehkan, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas masih sangat memerlukan dukungan perangkat dimaksud.	
JUMLAH			18.861.733.169	15.602.629.320	100	82,72	Persen		
6	Dinas Pertanahan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.998.716.806	6.073.453.066					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	322.699.500	272.909.737	22	22	Dokumen		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	24.007.000	6	6	Dokumen		
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.500.000	3.257.000	4	4	Dokumen	kurangnya SDM yang mengakibatkan keterlambatan dalam peng SPJn	adanya penambahan SDM tahun 2025
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	285.199.500	245.645.737	12	12	Laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.868.571.206	4.345.477.688	12	12	Bulan		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.081.079.206	3.683.254.328	12	12	Bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	787.492.000	662.223.360	12	12	Bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109.750.000	91.722.564	12	12	Bulan		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.750.000	37.500.000	2	2	Paket		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000	54.222.564	7	7	orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	799.702.800	620.001.148	12	12	Bulan		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.853.000	3.451.000	2	2	bulan		
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	250.390.300	227.927.500	12	12	Jenis		
		Penyediaan peralatan rumah tangga	31.953.500	27.750.000	12	12	bulan		
		Penyediaan bahan logistik kantor	61.330.000	53.879.000	12	12	bulan		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.660.000	1.940.000	12	12	bulan	tempat pemasangan Baliho+ Rangka belum ada	akan dibuatkan tiang rangka Baliho terlebih dahulu
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	12	12	Bulan		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	248.500.000	238.069.148	30	30	Bulan		
		Dukungan Pelaksnaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	185.016.000	56.984.500	1	1	Sistim	• 1. Aplikasi tidak dapat dijalankan dikarenakan ada indikasi aplikasi	Agar penganggaran untuk sistem dilakukan pemenuhan pada

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								yang dinilai kurang aman dan tidak kompatibel lagi, dan versi aplikasi yang tidak support, maka perlu diadakan upgrade versi. 2. Anggaran untuk Upgrade dan Pemeliharaan di murni masih belum tercukupi, dan pemenuhannya di anggaran ABT Tahun 2024. 3. Pelaksanaan Monitoring dan Pembinaan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dikarenakan adanya kendala dalam aplikasi tersebut. 4. Sehingga kekurangan waktu dalam pelaksanaan penyerapan	anggaran murni, karena sistem merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								anggaran.	
		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	509.371.300	482.915.350	2	4	Unit		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	429.799.600	413.315.350	6	6	Unit		
		Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	79.571.700	69.600.000	4	4	Unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.222.000	108.690.847	12	12	Bulan		
		Penyediaan jasa surat menyurat	2.240.000	1.920.000	200	200	Materai	Belanja sesuai Kebutuhan	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	155.982.000	106.770.847	12	12	Bulan		
		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	230.400.000	151.735.732	52	52	Unit		
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.400.000	151.735.732	52	52	Unit		
		2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	301.997.400		100%	0,00%	%		
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	301.997.400	127.751.424	23	36	Dokumen, Berita acara		
		Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	128.336.000	71.324.000	20	31	Dokumen	1. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang seharusnya	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								dilaksanakan di semua kecamatan namun pada pelaksanaannya tidak semua kecamatan dilakukan inventarisasi sengketa dikarenakan nihilnya sengketa di beberapa kecamatan tersebut sehingga berpengaruh terhadap minimnya belanja bahan bakar, belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas dalam kota	
								2. Belanja perjalanan dinas luar daerah direncanakan untuk mengikuti pelaksanaan Rakor Pertanahan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Kaltim namun kurangnya	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								informasi terkait pelaksanaan Rakor Pertanahan pada tahun 2024 tidak diikuti	
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	173.661.400	56.427.424	3	5	Berita Acara	1. Permohonan untuk mediasi berdasarkan surat permohonan dalam tahun 2024 ada 3 (tiga) permohonan yang dilakukan peninjauan lapangan yang berada di Kecamatan Tanjung Redeb, Pulau Derawan dan Tabalar sehingga berpengaruh dengan minimnya penggunaan belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja BBM dan Belanja Makan Minum Rapat	
								2. Minimnya belanja perjalanan dinas luar kota karena:	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								- Pelaksanaan Bimtek oleh Kementrian Dalam Negeri dilaksanakan sebelum DPA Perubahan disahkan sehingga biaya kontribusi dan belanja perjalanan dinas luar kota tidak dapat digunakan - Harmonisasi Raperbup (sengketa) yang tahun tahun sebelumnya pengusul Raperbup diundang untuk menghadiri secara langsung di Biro Pemerintahan Provinsi Kaltim namun pada tahun ini pelaksanaanya melalui daring (zoom meeting)	
		3. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN	18.742.503.200	2.123.349.431	100%	11,33%	%		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.742.503.200	2.123.349.431	9	2	Dokumen	1. Lahan Drainase Mesjid Al - Badar Kecamatan Tanjung Redeb : Dari OPD Pengguna Masih Perbaikan Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).	1. Terhadap lahan-lahan yang tidak terealisasi pada Tahun 2024, dan lahan tersebut memang dibutuhkan oleh OPD Pengguna dapat di Anggarkan Kembali pengadaannya pada Anggaran 2025
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.742.503.200	2.123.349.431	9	2	Dokumen	2. Lahan Eks. Kebakaran Ujung Tanjung Kecamatan Tanjung Redeb : Untuk Kejelasan dalam penyelesaian kegiatan ini, perlu kembali koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Berau Bersama Kasi DATUN	2. Lahan – lahan yang akan diusulkan oleh OPD Pengguna yang akan dibebaskan pada Tahun 2025 agar Menyusun Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Kejaksaaan Negeri Berau.	
								3. Lahan Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Teluk Bayur : Lambatnya masuk Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dari OPD Pengguna, Sehingga waktu untuk pembebasan lahan sesuai tahapan tidak lagi memungkinkan untuk pembebasan yang di maksud.	3. Lahan yang di maksud diatas ada beberapa sudah masuk Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan sudah masuk Anggaran Tahun 2025 akan dilanjutkan proses pengadaan tanahnya.
								4. Lahan Jalan Perjuangan Kecamatan Tanjung Redeb : Perbaikan Peta Bidang Aset Tanah Pemerintah Daerah dan Perbaikan	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)	
								5. Lahan Dainase Kawasan Saluran Pembuangan Gang Kubah Kecamatan Tanjung Redeb : Dari OPD Pengguna masih Perbaikan Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)	
								6. Lahan Rencana Pembangunan Lapangan Olahraga : Dari OPD Pengguna baru menyerahkan Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								(DPPT), di Bulan Desember Tahun Anggaran 2024.	
								7. Lahan Rencana Pembangunan Perkantoran Terpadu di Kecamatan Maratua : Dari OPD Pengguna proses Menyusun Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), tetapi masuk dalam DPA Murni Anggaran 2025	
		4. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	404.507.000	268.666.874	100%	66,42%	%		
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	404.507.000	268.666.874	105	21	Dokumen		
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	243.879.000	185.279.670	100	18	Dokumen	• Terdapat permasalahan tata batas Kampung	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								antara Kampung Mapulu, Kampung Panaan dan Kampung Merabu, peta administrasi yang ada sekarang tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan • Inventarisasi di Kampung Panaan Kecamatan Kelay tidak bisa dilanjut karena program PTSL sudah masuk terlebih dahulu. • Objek redistribusi tanah di Kampung Mapulu kecamatan Kelay belum bisa dilanjut untuk proses pensertipikatan oleh BPN karena wilayah perkampungan tersebut masih dibebani Ijin	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Utama Damai Indah Timber meskipun sudah APL	
		Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	160.628.000	83.387.204	5	3	Dokumen	- Objek redistribusi tanah di kampung Panaan Kecamatan Kelay tidak bisa direkomendasikan karena program PTSL sudah masuk di Kampung tersebut. - Objek redistribusi tanah di Kampung Mapulu kecamatan Kelay belum bisa dilanjut untuk proses pensertipikatan oleh BPN karena wilayah perkampungan tersebut masih	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								dibebani Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Utama Damai Indah Timber • Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah bisa dilaksanakan berdasarkan hasil kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	
		5. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	646.793.000	450.870.667	100%	69,71%	%		
		Penerbitan Izin Membuka Tanah	646.793.000	450.870.667	27	60	Dokumen		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	247.826.000	163.982.619	20	48	Dokumen	1.Belum sepenuhnya terealisasi alokasi anggaran dikarenakan kurangnya Permohonan sebagai Dasar kami untuk turun kelapangan dari OPD/Kecamatan	Lebih mengintensifkan koordinasi kepada pihak Kecamatan/OPD terkait mengenai fasilitasi Pengukuran Lahan.

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								yang meminta memfasilitasi Pengukuran lahan. 2.OPD/ Kecamatan hanya memberikan titik koordinat untuk meminta memfasilitasi overlay status bidang tanah	
		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	398.967.000	286.888.048	7	12	Dokumen	1. Pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang diharapkan dihadiri/ dilaksan akan oleh Tim Pengawasan Atas Penerbitan SKPT oleh karena kesibukan ataupun bersamaan dengan kegiatan lainnya sehingga tidak semua yang ada dalam Tim	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								tersebut dapat melaksanakan monitoring sehingga berpengaruh terhadap Belanja BBM dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2. Tingginya standarisasi belanja bahan cetak berupa photo copy sebesar Rp. 1.000/lembar sedang harga pada umumnya tertinggi Rp. 500/lembar 3. Kurangya informasi terkait pelaksanaan Rakor Pertanahan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Kaltim yang mana rakor tersebut juga merupakan bagian dari rencana untuk usulan belanja	

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								perjalanan dinas luar daerah 4. Standarisasi dalam SIPD untuk pembayaran honor narasumber hanya dibolehkan 50% berdasar Perpres nomor 33 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Satuan Regional	
		6. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	976.413.000	483.176.346	100%	49,48%	%		
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	976.413.000	483.176.346	6	6	Laporan/ Dokumen		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	292.820.000	115.483.980	4	4	Laporan	Kegiatan tergantung usulan dari OPD terkait, sehingga jumlah usulan terhadap rencana penggunaan Tanah sangat mempengaruhi serapan anggaran	
		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	476.607.000	282.250.506	1	1	Dokumen	Perlu adanya Penyesuaian terkait zonasi wilayah yang ada	Dilakukan Penyesuaian Bentuk Zonasi untuk beberapa

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Sekarang, sehingga dapat mempermudah Porsenil dalam pengambilan sample koordinat objek lahan maupun Bangunan. - Kurangnya Informasi dilapangan terkait Transaksi jual-beli maupun penawaran dilokasi Sampling yang harus di ambil - Kurangnya Prasarana Kendaraan Roda Dua (Motor) Khususnya untuk Pengambilan Sempling di Kec. Pesisir, terkait luas wilayah dan medan yang harus ditempuh untuk mengambil Sampling di dalam Zonasi yang telah	lokasi, untuk mempermudah porsenil dalam pengambilan sample koordinat lahan / bangunan - Perlu Dukungan untuk Penambahan Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan Kendaraan Bermotor Roda Dua, untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Sampling Khususnya untuk Wilayah Kec. dipesisir Kab. Berau. - Perlu Dukungan untuk Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan karena pelaksanaan kegiatan ini hampir 80 %

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								ditentukan.	dilaksanakan diluar ruangan.
		Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	206.986.000	85.441.860	1	1	Dokumen	Dari beberapa usulan rencana konsolidasi tanah , hanya bisa dilaksanakan 1 tempat yang merupakan leding sektor dari BPN ,itupun secara bertahap,target tahun 2024 sampai pada terbitnya SK Bupati tentang Penetapan Lokasi yang berlaku selama 3 tahun	Kegiatan ini akan berlanjut pada tahun berikutnya
JUMLAH			28.070.930.406	9.527.267.808	100	33,94	Persen		
7	DISKOPERIN DAG	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	216.072.000	206.898.610	4	13	Dokumen	Banyaknya jumlah Dokumen Perencanaan yang diminta secara lintas sektor tidak sebanding dengan	Memberlakukan sistem kerja Over Hour

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								jumlah SDM yang tersedia	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98.750.000	94.672.911	12	12	Laporan	Realisasi kinerja tidak bisa dihitung secara real time, sehingga laporan pada ahkhir tahun seringkali terhambat	Memberikan/ membuat Laporan sementara dan laporan revisi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.406.723.644	7.588.090.635	78	78	Orang		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	856.908.060	815.804.264	12	12	Dokumen		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	9.229.000	1	1	Laporan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.951.000	45.410.000	85	98	Paket		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	122.000.000	86.571.682	4	8	Orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14.991.000	14.631.000	12	12	Bulan		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	224.080.000	218.696.000	12	14	Paket		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.500.000	44.095.000	12	23	Paket		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.140.000	10.140.000	12	12	Bulan		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.000.000	214.823.446	12	12	Bulan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.392.000	3.021.440	12	12	Bulan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	270.000.000	246.334.454	12	12	Bulan		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.950.000	17.310.000	12	12	Bulan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.988.000	8.834.000	3	3	Paket		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.000.000	113.851.046	25	27	Unit		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau Kendaraan Lapangan	59.000.000	48.563.643	5	5	Unit		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	6.440.000	1	1	Gedung		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	8.224.200	1	1	Gedung	Perbaikan yang diperlukan perbaikan/rehabilitasi jauh melampaui pagu yang tersedia, sehingga anggaran di maksimalkan untuk rehabilitasi ringan perbaikan gedung kantor	Telah dianggarkan perbaikan gedung secara menyeluruh untuk Tahun 2025
		2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
		Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan,serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	249.999.680	205.036.770	120	92	Koperasi	Kenaikan biaya perjalanan dan banyaknya jumlah koperasi yang harus di awasi/ dikunjungi tidak sepadan	Dilakukan pemetaan skala prioritas pengawasan koperasi untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan	108.392.000	102.313.397	120	87	Koperasi	Kenaikan biaya perjalanan dan	Dilakukan pemetaan skala

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota						banyaknya jumlah koperasi yang harus di awasi/ dikunjungi tidak sepadan	prioritas pengawasan kepatuhan koperasi untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia
		3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	408.148.232	382.246.120	120	131	Unit Usaha		
		4 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MICRO (UMKM)							
		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan							Penjelasan sudah kami tuliskan pada masing-masing sub kegiatan (diarsir warna biru)
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	330.000.000	234.309.740	2	2	Dokumen	Pendataan Potensi Usaha Mikro saat ini lebih banyak	Dilakukan refocusing kegiatan lapangan

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								dilakukan secara Online melalui Aplikasi, sehingga terjadi efisiensi	kepada pengawasan pengembangan UMKM
		Peberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	99.999.800	49.113.345	40	48	Unit Usaha	Jumlah UMKM yang ada tidak sebanding dengan jumlah SDM pada Bidang Koperasi UMKM yang menangani Pendataan, Pengawasan serta Evaluasi UMKM Kabupaten Berau	penambahan pegawai pada bid. seksi UMKM agar pelaksanaan kegiatan bisa lebih maksimal
		Peberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	150.000.000	109.943.392	40	48	Unit Usaha	Jumlah UMKM yang ada tidak sebanding dengan jumlah SDM pada Bidang Koperasi UMKM yang menangani Pendataan, Pengawasan serta Evaluasi UMKM Kabupaten Berau	penambahan pegawai pada bid. seksi UMKM agar pelaksanaan kegiatan bisa lebih maksimal
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	80.000.000	54.604.939	10	10	Orang	Jumlah UMKM yang ada tidak sebanding dengan jumlah SDM pada Bidang Koperasi UMKM yang menangani	penambahan pegawai pada bid. seksi UMKM agar pelaksanaan kegiatan bisa lebih maksimal

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Pendataan, Pengawasan serta Evaluasi UMKM Kabupaten Berau	
		5 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							
		Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	1.344.999.000	1.243.835.255	100	150	Unit Usaha		
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
		6 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)							
		Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	127.853.000	111.458.137	250	312	SKA		
		7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	339.410.000	330.525.301	2	2	Unit		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Fasiltasi Pengelolaan sarana Distribusi perdagangan	593.314.800	535.340.087	2	2	Unit		Dalam penyusunan kegiatan pada perubahan tahun 2023 akan di usulkan lagi antara lain pemeliharaan gantungan pada pasar basah serta akan lebih mencermati dalam menginput jumlah dan harga satuan yang akan di gandakan ditahun 2023
		Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya							
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8.034.540.400	7.965.411.387	8	6	Unit	Beberapa Lokasi Pasar yang cukup jauh serta sama sekali tidak difungsikan menyebabkan tidak semua unit pasar dapat dibina	
		8 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	99.880.000	86.595.737	12	12	Laporan	Kurang Update-nya harga barang kebutuhan pokok dan penting di masyarakat	Diperlukan lebih banyak koordinasi lintas sektor terkait BAPOKTING
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	121.397.000	114.191.247	360	360	Laporan		
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Berau							
		Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	154.815.000	128.631.750	11	11	Kegiatan		
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	69.999.000	46.781.578	10	12	Pengawasa n		
	9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten / Kota	70.000.000	44.108.674	2	2	Kegiatan		
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	65.360.000	50.499.174	25	25	Pelaku Usaha		
		10 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.							
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	539.227.600	481.269.542	500	1.221	Unit		
		Pengawasan / Penyuluhan Kemetrolagian legal	274.198.000	217.576.031	400	422	Unit		
		11 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	70.000.000	41.025.960	360	360	Dokumen		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
		12 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	390.000.000	345.600.000	1	1	Unit		

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		13 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
		Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	150.000.000	139.226.426	60	60	IKM		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.546.283.426	2.053.817.483	3	3	Outlet	Belanja Modal tidak dapat direalisasikan karna tidak cukup waktu (Barang Custom tertentu untuk mendukung kinerja IKM)	sistem pengadaan untuk TA 2023 dilakukan dengan melalui penunjukan langsung tidak lagi menggunakan sistem lelang dan memanfaatkan pengrajin lokal/daerah
		14 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA							
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri							

NO.	OPD PELAKSANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.							
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI, Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	227.000.000	212.727.512					pendaftaran sudah melalui aplikasi dan biayanya lebih efisien sehingga diharapkan agar kegiatan berjalan maksimal
JUMLAH			27.469.262.642	25.087.830.315	100	91,33	Persen		

3.1.5. PELAKSANAAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Hasil kinerja penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi penunjang di Kabupaten Berau pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

TABEL 3.9

Jumlah OPD Penyelenggara unsur pendukung dan Urusan Pemerintahan Berkaitan dengan Pelayanan di Kabupaten Berau Tahun 2024

No.	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)
			Rp	Persen	
1.	KORPRI	2.650.493.895	1.794.985.000	67,72	855.508.895
2.	SETWAN	105.814.696.089	85.999.419.190	81,27	19.815.276.899
3.	BAGIAN TAPEM	4.318.982.788	3.079.985.106	71,31	1.238.997.682
4.	BAGIAN HUKUM	2.717.212.700	2.377.138.763	87,48	340.073.937
5.	BAGIAN KESRA	61.237.082.500	46.258.496.105	75,54	14.978.586.395
6.	BAGIAN PEMBANGUNAN	2.015.481.000	1.758.397.620	87,24	257.083.380
7.	BAGIAN EKONOMI	2.190.000.000	1.019.759.002	46,56	1.170.240.998
8.	BAGIAN BPBJ	3.899.649.806	3.307.730.695	84,82	591.919.111
9.	BAGIAN ORGANISASI	2.024.109.400	1.750.184.564	86,47	273.924.836
10.	BAG.PERENCANAAN DAN KEU	45.186.337.952	41.307.522.269	91,42	3.878.815.683
11.	BAGIAN PROKOPIM	10.186.941.930	9.695.453.314	95,18	491.488.616
12.	BAGIAN UMUM	21.487.519.228	16.410.055.497	76,37	5.077.463.731
13.	KANTOR PENGHUBUNG	1.564.634.320	1.473.742.583	94,19	90.891.737
JUMLAH		265.293.141.608	216.232.869.708	81,51	49.060.271.900
KECAMATAN :					
1.	TANJUNG REDEB	35.392.213.988	32.302.602.193	91,27	3.089.611.795
2.	SAMBALIUNG	9.150.045.979	8.758.020.961	95,72	392.025.018
3.	TABALAR	6.778.239.210	6.275.586.009	92,58	502.653.201
4.	GUNUNG TABUR	11.979.353.730	11.077.623.347	92,47	901.730.383
5.	BIATAN	5.477.252.487	4.939.473.058	90,18	537.779.429
6.	TALISAYAN	7.756.941.675	7.082.940.973	91,31	674.000.702
7.	PULAU DERAWAN	6.031.022.725	5.047.253.817	83,69	983.768.908
8.	BATU PUTIH	5.270.963.188	5.093.367.276	96,63	177.595.912
9.	BIDUK-BIDUK	7.170.391.719	6.699.636.557	93,43	470.755.162
10.	TELUK BAYUR	15.612.373.550	14.601.139.641	93,52	1.011.233.909
11.	MARATUA	9.006.264.493	7.812.354.520	86,74	1.193.909.973
12.	SEGAH	7.216.511.150	6.403.781.879	88,74	812.729.271
13.	KELAY	6.520.090.063	6.139.522.508	94,16	380.567.555
JUMLAH		133.361.663.957	122.233.302.739	91,66	11.128.361.218

TABEL 3.10
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA OPD PENYELENGGARA UNSUR PENDUKUNG
DAN URUSAN PEMERINTAHAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Sekretariat Korpri	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.108.233.895	761.403.949					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.700.000	35.256.000					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.700.000	35.256.000	100%	43,69%	%	Anggaran kegiatan pawai budaya tidak terealisasi karena kekurangan sdm	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	623.883.895	399.759.178					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	563.363.895	371.679.178	100%	65,97%	%	pagu anggaran terlalu besar sedangkan jumlah ASN hanya 4 orang sehingga tidak dapat terserap maksimal	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.520.000	28.080.000	100%	46,40%	%	honor pengguna anggaran tidak dapat dibayarkan dikarenakan kepala sekretariat korpri	

								adalah plt. (tidak ada double honor PA)	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.000.000	65.271.180					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.500.000	23.942.000	100%	81,16%	%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	22.675.000	100%	69,77%	%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	2.176.000	100%	72,53%	%	Alasan dan tindak lanjut	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	2.340.000	100%	46,80%	%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	14.138.180	100%	35,35%	%	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi SKPD lebih banyak dilakukan melalui telepon / zoom meeting / online.	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.650.000	256.867.591					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.248.000	100%	83,20%	%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.150.000	255.619.591	100%	99,40%	%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000	4.250.000					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	4.250.000	100%	12,14%	%	Alasan dan tindak lanjut	

		2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.542.260.000	1.033.581.051					
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.105.000.000	817.916.051					
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.105.000.000	817.916.051	100%	74,02%	%		
			Pengembangan Kompetensi ASN	437.260.000	215.665.000					
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	437.260.000	215.665.000	100%	49,32%	%		
JUMLAH				2.650.493.895	1.794.985.000	100%	67,72%	Persen		
2	Sekretariat DPRD	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.467.790.663	54.573.787.319					
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	553.365.200	406.067.103					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	328.177.000	224.590.800	100	68,44	%	Untuk kegiatan pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan minggu ketiga bulan desember narasumber yang seyogyanya dari bagian biro organisasi berhalangan hadir karena ada kegiatan lain sehingga biaya	

								perjalanan dinas tidak dapat dipakai	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	225.188.200	181.476.303	100	80,59	%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.079.336.375	10.863.234.450					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.421.197.975	8.635.404.010	100	91,66	%		
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2.658.138.400	2.227.830.440	100	83,81	%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.226.390.000	1.055.408.100			%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	543.956.000	499.935.000	100	91,91	%		
		Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	347.947.000	270.518.800	100	77,75	%	Jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang akan diikuti bersamaan dengan kegiatan sekretariat	Mengatur ulang kembali anggaran diklat untuk anggaran perubahan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-Undangan	334.487.000	284.954.300	100	85,19	%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.314.543.900	5.069.265.597					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	492.300.000	489.622.300	100%	99,46	%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.768.286.000	2.685.741.000	100%	97,02	%		

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	332.722.100	309.444.200	100%	93,00	%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	494.409.000	437.552.500	100%	88,50	%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	483.230.800	474.268.500	100%	98,15	%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	81.914.500	100%	81,91	%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	643.596.000	590.722.597	100%	91,78	%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.009.630.800	2.604.860.000	100%	86,55	%		
		Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.009.630.800	2.604.860.000	100%	86,55	%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.404.086.800	2.072.850.472					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.992.000	2.568.000	100%	50,00	%	Untuk belanja paket pengiriman tidak dapat direalisasikan karena tahun 2024 tidak ada belanja pengiriman paket	Untuk tidak lagi menganggarkan biaya paket karena semua data dikirim melalui email dan aplikasi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.062.180.000	834.420.472	100%	92,00	%		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	587.064.800	513.225.800	100%	95,00	%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.850.000	722.636.200	100%	100,00	%		

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.795.861.000	2.633.083.657					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.241.021.000	1.198.386.982	100%	96,56	%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	374.040.000	361.945.250	100%	96,77	%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	981.300.000	922.351.425	100%	93,99	%		
		Pemeliharaan aset tetap lainnya	199.500.000	150.400.000	100%	75,39	%		
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	21.934.004.088	20.612.818.974					
		Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	19.823.115.288	19.235.787.269	100%	97,04	%		
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	878.523.000	719.430.000	100%	81,89	%		
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	1.232.365.800	657.601.705	100%	53,36	%	Ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Berau yang belum sempat melakukan media check up sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak rumah sakit penyedia jasa	Melakukan penjadwalan ulang medical check up anggota DPRD dengan pihak rumah sakit
		Layanan Administrasi DPRD	12.150.572.500	9.256.198.966					

		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8.161.224.000	5.900.224.516	100%	72,30	%	adanya jadwal Pilkada dan transisi Pergantian DPRD yang mengakibatkan kurang lebih 4 bulan Anggota DPRD tidak bisa melaksanakan Perjadin yang merupakan pos terbesar di anggaran serta perubahan sistem Lamsum yang terprogram ke rilcost juga mengurangi serapan anggaran	Menyampaikan Kepada Pimpinan DPRD sebagai Evaluasi Tahun mendatang
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3.989.348.500	3.355.974.450	100%	84,12	%		
	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	44.346.905.426	31.425.631.871					
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.603.600.000	3.001.400.204	100%	53,56	%	Ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti yang telah dijelaskan pada kolom sub kegiatan dibawah ini	Melakukan komunikasi secara intens kepada anggota badan musyawarah agar memberikan prioritas pelaksanaan kegiatan inti DPRD
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5.603.600.000	3.001.400.204	100%	53,56	%	- Sering terjadi pembatalan Rapat-Rapat DPRD yang sudah terjadwal sebelumnya - Tidak efisiensi (Pemborosan) anggaran Konsumsi	- Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahunan - Memberi masukan kepada Pimpinan DPRD untuk lebih memperhatikan tahap-tahapan penyusunan Propemperda

									- Sering terjadi Rapat secara tiba-tiba	
									- Adanya Peralihan Ketua dan Anggota DPRD Periode 2019-2024 ke Periode 2024-2029, dimana adanya mekanisme yang harus dilalui dalam menentukan Pimpinan Definitif sehingga berpengaruh terhadap proses pembentukan Alat Kelengkapan DPRD dimana Ketua dan Anggota Bapemperda baru terbentuk pada tanggal 12 November 2024, sehingga tidak sempat untuk membahas sisa Raperda di tahun 2024	- Melakukan Kembali penjadwalan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dimana dijadikan Raperda Prioritas sehingga bisa dimasukkan Kembali di Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk dibahas Kembali Bersama Pemerintah Daerah
								%	- Terlambatnya penyampaian telaah staf ke pimpinan DPRD - Perubahan Tujuan Perjalanan Dinas - Penjadwalan Perjalanan Dinas yang terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan - ketersediaan	- Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD untuk dapat menjadwalkan perjalanan dinas minimal 4 hari sebelum pelaksanaan sehingga penyampaian telaahan staf tidak terlambat dan Ketika ada perubahan tujuan perjalanan masih dapat teratasi

								maskapai pesawat yang tidak banyak sehingga mempengaruhi proses pembahasan dikarenakan harus adanya pembandingan dengan daerah lain yang telah menerapkan Perda	- Semoga pihak maskapai menambah armada penerbangan dan bukan di monopoli oleh satu maskapai saja
								Ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai targetnya seperti yang telah dijelaskan pada kolom sub kegiatan dibawah ini	Melakukan komunikasi secara intens kepada anggota badan musyawarah agar memberikan prioritas pelaksanaan kegiatan inti DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.114.286.250	2.258.194.902				Jumlah Rapat Rapat pembahasan yang Kurang dari yang direncanakan dikarenakan transisi Pergantian DPRD	Menyampaikan Kepada Pimpinan DPRD sebagai Evaluasi Tahun mendatang agar Kegiatan Rapat Rapat kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS dapat terelisasi sesuai program
		Pembahasan KUA dan PPAS	99.976.000	50.950.000	100%	50,96	%	Jumlah Rapat Rapat pembahasan yang Kurang dari yang direncanakan dikarenakan transisi Pergantian DPRD	Menyampaikan Kepada Pimpinan DPRD sebagai Evaluasi Tahun mendatang agar Kegiatan Rapat Rapat kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dapat terelisasi sesuai program

			Pembahasan APBD	3.246.577.500	1.935.497.319	100%	59,62	%	adanya jadwal Pilkada dan transisi Pergantian DPRD yng mengakibatkan perlunya waktu dalam Terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan baru Yaitu Badan Anggaran sehingga belum maksimal terealisasi keuangannya dengan Alokasi anggaran Perjadin Anggota Banggar merupakan pos terbesar	Menyampaikan Kepada Pimpinan DPRD sebagai Evaluasi Tahun mendatang
			Pembahasan APBD Perubahan	465.760.000	197.817.583	100%	42,47	%	adanya jadwal Pilkada dan transisi Pergantian DPRD yng mengakibatkan perlunya waktu dalam Terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan baru Yaitu Badan Anggaran sehingga belum maksimal terealisasi keuangannya dengan Alokasi anggaran Perjadin Anggota Banggar merupakan pos terbesar	Menyampaikan Kepada Pimpinan DPRD sebagai Evaluasi Tahun mendatang
			Pembahasan Laporan Semester	42.950.150		100%	0,00	%	Masa transisi anggota DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024 dengan Anggota DPRD periode 2024-	

								2029 sehingga ada sekitar dua bulan tidak ada kegiatan	
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	159.999.600	19.765.000	100%	12,35	%	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.	1. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
		Peningkatan Kapasitas DPRD	16.380.937.176	14.674.613.500				Ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai targetnya seperti yang telah dijelaskan pada kolom sub kegiatan dibawah ini	Melakukan komunikasi secara intens kepada anggota badan musyawarah agar memberikan prioritas pelaksanaan kegiatan inti DPRD
		Orientasi DPRD	917.626.500	727.779.336	100%	79,31	%	Pelaksanaan Orientasi DPRD oleh BPKSDM Provinsi Kalimantan Timur hanya satu kali dalam satu tahun dan pada saat pelaksanaan tersebut ada beberapa anggota DPRD yang berhalangan hadir	Melakukan koordinasi dengan BPKSDM provinsi kalimantan timur terkait penjadwalan kegiatan orientasi DPRD agar semua anggota DPRD dapat mengikuti kegiatan tersebut
		Pendalaman Tugas DPRD	3.395.378.800	2.203.833.019	100%	95,00	%		
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	10.968.539.676	10.889.711.929	100%	99,28	%		
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	300.616.000	242.156.540	100%	71,00	%	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli pelaksanaannya tergantung dari permintaan Ketua	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli perlu dimaksimalkan, misalnya dengan melibatkan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

								dan Anggota DPRD. Dimana Permintaan rekomendasi serta kebijakan berupa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Berau TA 2023, baik itu melalui Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan	pada Pembahasan APBD, RPJPD, Penyusunan Naskah Akademik Raperda dan Kebijakan-Kebijakan Strategis lainnya.
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	465.786.000	451.606.160	100%	96,96	%		
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	182.990.200	47.656.200	100%	26,04	%	Ada beberapa permasalahan yang ditemui menjadi kendala didalam penentuan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat (hearing) atau rapat dengar pendapat yaitu tidak adanya jadwal yang dimasukkan ke dalam gend badan muasyawarah (banmus) DPRD Kabupaten Berau, anggota DPRD kabupaten berau lebih banyak memasukkan jadwal pelaksanaan kegiatan ke luar daerah dalam	Agar kiranya untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat untuk tahun 2025 dapat lebih ditingkatkan lagi dan bisa dimasukkan ke dalam jadwal badan musyawarah.

								kurun waktu selama tahun anggaran 2024. Hal ini mengingat perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Berau dibayarkan melalui sistem <i>lumpsum</i> sehingga output dan capaian realisasi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat (hearing) atau rapat dengar pendapat sangat rendah apabila dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya	
		Penyusunan Program Kerja DPRD	150.000.000	111.870.316	100%	74,58	%	Penetapan Pimpinan DPRD mengalami keterlambatan yang mengakibatkan pelaksanaan penyusunan program kerja juga mengalami keterlambatan, sehingga dengan waktu yang sedikit mengakibatkan pelaksanaan rapat dan kegiatannya berjalan tidak maksimal dan	Penyusunan Program Kerja tahun ini diupayakan dilaksanakan di awal periode anggaran, sehingga kegiatan tersebut bisa dimaksimalkan agar serapan anggarannya juga maksimal

								serapan anggarannya juga tidak maksimal		
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.944.623.000	2.627.924.350			Ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai targetnya seperti yang telah dijelaskan pada kolom sub kegiatan dibawah ini	Melakukan komunikasi secara intens kepada anggota badan musyawarah agar memberikan prioritas pelaksanaan kegiatan inti DPRD	
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	719.623.000	130.845.000	100%	18,18	%	Ada beberapa permasalahan yang ditemui dan menjadi kendala didalam penentuan pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dalam daerah (kecamatan) yaitu : terdapat jadwal kegiatan yang ada didalam agenda Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Berau, anggota DPRD Kabupaten Berau lebih banyak memasukkan jadwal pelaksanaan kegiatan ke luar daerah dalam kurun waktu selama Tahun Anggaran 2024. Hal ini mengingat perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Berau dibayarkan melalui	Agar kiranya untuk pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dalam daerah (kecamatan) untuk Tahun Anggaran 2025 dapat lebih ditingkatkan lagi dan bisa dimasukkan ke dalam jadwal agenda kegiatan anggota DPRD Kabupaten Berau melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Berau.

								sistem lumpsum. Sehingga output dan capaian realisasi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dalam daerah (kecamatan) sangat rendah apabila dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya.	
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	25.000.000	21.874.000	100%	87,50	%		
		Pelaksanaan Reses	3.200.000.000	2.475.205.350	100%	77,35	%	Pada reses yang dilaksanakan 4 s/d 9 Maret 2024 yang dilaksanakan setelah pemilihan legislatif ada 3 anggota DPRD yang tidak melakukan Reses, dan saat reses dilaksanakan tanggal 28 november s/d 4 desember reses menggunakan sistem Adcost sehingga serapan anggaran yang digunakan berkurang	Agar setiap pelaksanaan reses dapat diikuti oleh seluruh anggota DPRD
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	735.070.500	176.913.055				Ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai targetnya seperti yang telah dijelaskan pada	

								kolom sub kegiatan dibawah ini	
		Pengawasan Kode Etik DPRD	378.780.000	165.151.855	100%	43,60	%	1. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD 2024. Dalam pelaksanaannya AKD kode etik terdiri dari 1. ketua, 1. Wakil Ketua dan 1 orang Anggota jadi hanya 3 orang anggota. dalam merealisasikan kegiatan perjadiannya AKD Kode etik juga masuk dalam AKD lainnya sehingga Penggunaan dana Kode etik tidak dapat maksimal	1. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD 2024. sebaiknya pada saat penjadwalan Kegiatan / Banmus dijadwalkan tersendiri sehingga serapan anggaran kegiatan Pengawasan Kode etik dapat direalisasikan dengan baik.
		Penyusunan Kode Etik DPRD	356.290.500	11.761.200	100%	3,30	%		
		Fasilitasi Tugas DPRD	13.473.911.000	8.610.333.860					
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.277.018.000	5.674.759.883	100%	68,56	%	Masa transisi anggota DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024 dengan Anggota DPRD periode 2024-2029 sehingga ada sekitar dua bulan tidak ada kegiatan	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3.458.423.000	1.313.636.449	100%	37,98	%	1. Sering terlambatnya penyampaian TS	sebaiknya penyampaian TS (telaahan Staf) dari

								(Telaahan Staf) dari Sekretaris Komisi sehingga dalam penunjukan pendamping tidak efesiensi	Sekretaris Komisi disampaikan ke Sekwan setelah penandatanganan hasil rapat BANMUS atau minimal 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan
								2. Berubah-ubahnya tujuan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan sehingga pelayanan sekretariat terhadap Dewan sering kali tidak efesiensi.	seharusnya tujuan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan program Dewan sehingga tidak akan mempengaruhi program dewan
								3. Setelah melaksanakan kegiatan kelengkapan SPJ dan Laporannya sering terlambat karena belum terkumpulnya berkas seperti : SPT/SPPD yang belum di Tandatangi Sekwan, tiket, Boarding Pass, bill hotel dan taxi dan laporan hasil perjalanan Dinas yang tidak ada	Para Pendamping seharusnya mengumpulkan/ memi nta berkas tersebut pada saat tanggal kembali dari setelah melaksanakan perjalanan Dinas.
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.738.470.000	1.621.937.528	100%	93,30	%	1. Sering terlambatnya penyampaian TS (Telaahan Staf) atau Memo dari Pimpinan sehingga dalam	sebaiknya penyampaian TS (telaahan Staf) atau Memo dari Pimpinan disampaikan ke Sekwan setelah

								Pembutan SPD tidak efesiensi	penandatanganan hasil rapat BANMUS atau minimal 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan
								2. Berubah-ubahnya tujuan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan sehingga pelayanan sekretariat terhadap Dewan sering kali tidak efesiensi.	seharusnya tujuan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan program Dewan sehingga tidak akan mempengaruhi program dewan
								3. Setelah melaksanakan kegiatan kelengkapan SPJ dan Laporannya sering terlambat karena belum terkumpulnya berkas seperti : SPT/SPPD yang belum di Tandatangani Sekwan, tiket, Boarding Pass, bill hotel dan taxi dan laporan hasil perjalanan Dinas yang tidak ada	<i>Solusi Para Pendamping seharusnya mengumpulkan/meminta berkas tersebut pada saat tanggal kembali dari setelah melaksanakan perjalanan Dinas.</i>
		Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	94.477.500	76.252.000	100%	80,71	%	1. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.	1. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
		Pembahasan Laporan Keterangan	94.477.500	76.252.000	100%	80,71	%		

			Pertanggungjawaban Kepala Daerah							
JUMLAH				105.814.696.089	85.999.419.190	100	81%	Persen		
3	Bagian Tata pemerintahan	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.318.982.788	3.079.985.106				Koreksi Pagu anggaran dan Realisasi sudah sesuai	
			Administrasi Tata pemerintahan	4.318.982.788	3.079.985.106	100%	71%			
			Penataan Administrasi Pemerintahan	1.567.737.388	1.257.373.600	7	6	upacara	- pedoman pelaksanaan terbit terlalu mepet dengan hari H sehingga mempengaruhi perencanaan - beberapa pembiayaan tidak tertuang dalam rekening belanja - tidak ada instruksi pelaksanaan di Kabupaten	- bentuk tim pelaksana kegiatan dan perkuat koordinasi Tim yang terlibat - pengusulan jenis pembiayaan dalam rekening belanja daerah
			Pengelola Administrasi Kewilayahan	1.704.645.400	1.018.734.098	3	3	Dokumen	- desakan penyelesaian batas wilayah kampung, kelurahan dan kecamatan - kurangnya tenaga teknis dalam penanganan batas	- rapat koordinasi dengan stekholder - bentuk tim dengan melibatkan tenaga ahli/narasumber ahli
			Fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah	1.046.600.000	803.877.408	3	3	Dokumen	- perubahan regulasi dalam penyusunan Laporan	- perkuat peran Tim - peningkatan kapasitas penyusun melalui rakortek dan benchmarking

JUMLAH			4.318.982.788	3.079.985.106	100	71,31	Persen		
4	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.717.212.700	2.377.138.763				
			Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.229.159.700	2.035.669.489				
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	779.845.000	685.451.567	640	785	Produk Hukum Daerah	target 640 produk hukum daerah terdiri dari a. Peraturan Daerah = 5 Perda b. Peraturan Bupati = 35 Perbup c. Keputusan Bupati = 600 Surat Keputusan
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	658.077.000	610.774.495	12	11	Kasus	realisasi 785 produk hukum daerah terdiri dari a. Peraturan Daerah = 9 Perda b. Peraturan Bupati = 54 Perbup c. Keputusan Bupati = 722 Surat Keputusan
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	791.237.700	739.443.427	640	785	Produk Hukum Daerah	karena jumlah kasus yang di fasilitasi oleh bagian hukum selama tahun 2024 hanya 11 kasus di bidang perdata dan Tata Usaha Negara
			Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	488.053.000	341.469.274				realisasi Sub Kegiatan pendokumentasi produk hukum daerah mengikuti realisasi Produk Daerah yang ditetapkan sehingga melebihi target yang telah dibuat pada tahun 2024
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	372.634.000	232.445.137	7	30	Dokumen	anggaran untuk pembayaran kegiatan Rapat Koordinasi BAPEMPERDA Se

									Indonesia tidak dapat dibayarkan karena kegiatan mendahului anggaran	
			Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	115.419.000	109.024.137	7	10	Kesepakatan Bersama/P erjanjian Kerja Sama		
JUMLAH				2.717.212.700	2.377.138.763	100	87,48	Persen		
5	Sekretariat Daerah	1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	61.237.082.500	46.258.496.105					
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	61.237.082.500	46.258.496.105			Persentase		
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	40.408.582.500	27.198.021.514	100%	67.31%	Persentase	Pelaksanaan Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual tidak menemui kendala yang berarti.	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	9.739.000.000	8.415.889.056	100%	86.41%	Persentase	Pelaksanaan Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	11.089.500.000	10.644.585.535	100%	95.99%	Persentase	Pelaksanaan Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	

JUMLAH				61.237.082.500	46.258.496.105	100	75,54	Persen		
6	Bagian Administrasi Pembangunan	1	Program Perekonomian dan Pembangunan							
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	2.015.481.000	1.758.397.620			Persen		
			Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	798.335.000	749.577.170	6	6	Kali	Minimnya Koordinasi Penanggung jawab kegiatan jika terjadi hambatan/permasalahan pada program/kegiatan di lapangan	Meningkatkan fungsi Koordinasi dan membuat Surat Edaran
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	585.094.000	525.560.605	12	12	Dokumen	Banyaknya pelaksanaan kegiatan fisik di APBD Perubahan	Meminta kepada OPD untuk melaksanakan pelelangan secepatnya
			Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	632.052.000	483.259.845	12	12	Laporan	Input data kemajuan Realisasi fisik & keuangan dalam aplikasi smeponline sering terlambat	Memberikan batasan waktu input kepada OPD dengan surat edaran & selalu mengingatkan kepada OPD yang belum input lewat group smeponline
JUMLAH				2.015.481.000	1.758.397.620	100	87,24	Persen		
7	Bagian Perekonomian dan SDA	1	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.190.000.000	1.019.759.002			Persen		
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.125.000.000	793.427.970			Persen		
			Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan	500.000.000	254.482.412	100%	0,51	persen	*Tidak terlaksananya FGD/Sosialisasi BLUD yang mendatangkan	*Berupaya mengundang Narasumber BLUD kembali di tahun 2024

		Pengelolaan BUMD dan BLUD						narasumber Kasubdit BLUD dari Kemendagri. *Pembuatan naskah akademik terkait penataan Asset Perumda Air Minum Batiwakkal Berau belum terlaksana, * kegiatan monev terkait unit Perumda Air Minum Batiwakkal Berau belum terlaksana maksimal	Melakukan koordinasi yang intens dengan pihak kemendagri terkait pelaksanaa sosialisai dan FGD yang dilaksanakan tahun 2024, dan ada kemungkinan melaksanakan kegiatan FGD di Jakarta. * Pelaksaan kajian naskah akademik tidak dilaksanakan mengingat hasil koordinasi dengan KASubdit BUMD menyarankan terlebih dahulu Pemerintah Kab. Berau untuk membentuk tim terlebih dahulu sehingga data-data sudah didapat.
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	450.000.000	429.390.209	100%	95,42 %	persen	Tidak ada masalah yang berarti, berkurangnya SDM yang potensi kerja tinggi.	Peningkatan baik kuantitas dan kualitas untuk dipenuhi di tahun 2024
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	175.000.000	109.555.349	100%	0,63	persen	Penyelesaian debitur atas utang yang belum dibayar, hal ini akan berupaya bekerjasama dengan KPKNL Kaltim di Kota Bontang untuk penagihan dan rencananya di tahun 2024 akan ada	*Bekerjasama dengan pihak Kecamatan setempat untuk mengetahuikepastian alamat debitur serta kepemilikan agunan yang dijaminakan. *Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas perlu adanya

									penyerahan dokumen kredit ke KPKNL Kaltim,	pendampingan pengawasan dan monitoring oleh KPKNL Bontang.
			Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.065.000.000	226.331.032			persen		
			Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambanagn dan Lingkungan Hidup	1.065.000.000	226.331.032	100%	0,21	persen	* untuk pelaksanaan pemberian insentif kepada kampung penerima berjalan dengan baik dan tercapai 100%, *terkait pelaksanaan Carbon Fun mengingat regulasi dan SDM yang terbatas sehingga pelaksanaannya tidak maksimal.	*Penyaluran dana insentf sebesar 2,7 Milyar telah disalurkan oleh BPKAD kepada kampng terpilih, * Peningkatan SDM baik dari segi Kualitas maupun Kuantitas.
JUMLAH				2.190.000.000	1.019.759.002	100	46,56	Persen		
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase peningkatan proses pengadaan barang/jasa selesai tepat waktu sesuai rencana pengadaan yang ditetapkan	3.899.649.806	3.307.730.695	100	90	Persen		
			Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu sesuai SOP	3.899.649.806	3.307.730.695	100	90	Persen		
			Persentase Jumlah Paket Pekerjaan yang Selesai Diproses	879.329.200	726.027.974	100	133,4	Persen	- Dalam hal fungsi pemilihan penyedia jasa, seringkali keterlambatan diakibatkan oleh :	

								a. Keterlambatan PA/KPA/PPK dalam melaksanakan persiapan pengadaan untuk Paket Pekerjaan APBD Murni 2024;	a. UKPBJ melakukan pendampingan proses penyusunan dokumen persiapan pengadaan
								b. Sehingga PA/KPA/PPK terlambat menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada UKPBJ	b. Melaksanakan percepatan dan tender dini agar proses tender terlaksana paling lambat di awal tahun sehingga penyerapan anggaran dapat dilakukan sesuai target yang ingin dicapai/ditetapkan.
								c. Jumlah paket tender yang naik secara signifikan seiring dengan peningkatan APBD tidak diikuti dengan peningkatan jumlah SDM membuat beban kerja JF PPBJ sangat tinggi	c. Membuat usulan penambahan personel dengan metode <i>outsourcing</i> tetapi tidak disetujui. Begitu juga usulan permohonan perpindahan jabatan dari OPD lain belum terpenuhi
		Persentase Pengaduan Sistem PBJ secara elektronik yang ditindaklanjuti	1.932.106.606	1.557.395.036	85	85	Persen	- Kurangnya aparatur terkait pemenuhan permintaan data/dokumen dan proses administrasi keuangan;	- Diperlukan upaya pemenuhan SDM terkait pemenuhan permintaan data/dokumen dan proses administrasi keuangan;
								- Sehingga penyelesaian pekerjaan rata-rata	

									terfokus pada semester 4 (empat);	
			Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek, pendampingan dan atau konsultasi	1.088.214.000	1.024.307.685	205	205	Orang	Pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan dan Adokasi Pengadaan Barang dan Jasa tidak menemui kendala yang berarti.	Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan RAK yang ditetapkan
JUMLAH				3.899.649.806	3.307.730.695	100	84,82	Persen		
9	Bagian Organisasi	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.024.109.400	1.750.184.564	100	100	Persen		
			Penataan Organisasi	2.024.109.400	1.750.184.564	100	100	Persen	Dinamika peraturan perundang-undangan mewajibkan Bagian Organisasi untuk lebih adaptif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, kolaborasi yang diharapkan pada saat pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, terdapat beberapa Perangkat daerah yang resisten terhadap aturan baru yang berlaku	Bagian Organisasi menyikapi dinamisme aturan yang berlaku dengan lebih adaptif, serta meningkatkan pemahaman ASN pada Bagian Organisasi terkait aturan-aturan baru yang berlaku. Perihal kendala kolaborasi dengan Perangkat Daerah yang masih resisten terkait perubahan aturan adalah, dengan mengupayakan untuk lebih intensif melaksanakan sosialisasi
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	766.359.400	689.237.465	2	2	Dokumen	Pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan tidak	-

									menemui kendala yang berarti.	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	509.250.000	401.460.716	47	47	Perangkat Daerah	Kolaborasi dengan Perangkat Daerah dirasa masih kurang. Kurangnya respon beberapa Perangkat Daerah terkait hal-hal yang menyangkut perbaikan pelayanan publik	Melaksanakan monev secara menyeluruh dan memberikan sosialisasi terkait pentingnya memenuhi syarat-syarat pelayanan publik yang baik
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	748.500.000	659.486.383	6	6	Dokumen	Perubahan aturan terkait Reformasi Birokrasi pada masa akhir pelaksanaannya serta minimnya waktu untuk menyesuaikan dengan aturan baru, menjadai kendal dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023	Pendalaman aturan baru terkait Reformasi Birokrasi di internal Bagian Organisasi
JUMLAH				2.024.109.400	1.750.184.564	100	86,47	Persen		
10	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.017.399.100	783.840.497			Persen		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	767.000.000	554.359.497	4	4	Dokumen	Tidak Ada Kendala	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	250.399.100	229.481.000	1	1	Laporan	Tidak Ada Kendala	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.611.877.312	26.001.866.377			Persen		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.255.996.512	24.840.694.777	12	12	Bulan	Tidak Ada Kendala	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	978.824.200	805.763.200	12	12	Bulan	Dana yang tersisa adalah besarnya Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak dicairkan pada Triwulan IV dikarenakan adanya larangan dari TIM Pemeriksa dalam pencairan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan karena masih dianggap TUPOKSI SKPD	Mengikuti Peraturan dan Ketentuan yang berlaku
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	377.056.600	355.408.400	1	1	Laporan	Tidak Ada Kendala	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.100.000.000	3.252.880.507			Persen		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.100.000.000	3.252.880.507	2000	1520	Kali	Tidak Ada Kendala	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.235.798.000	10.500.324.342	100	95,27	Persen		

			Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	12.498.000	11.281.800				Tidak Ada Kendala	
			Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	7.715.050.000	7.235.600.710	12	12	Bulan	Tidak Ada Kendala	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.508.250.000	3.253.441.832	12	12	Bulan	Tidak Ada Kendala	
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.221.263.540	768.610.546			Persen		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	621.263.540	168.610.546	12	12	Bulan	Anggaran untuk Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung ditentukan TIM TAPD	
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	12	12	Bulan	Tidak Ada Kendala	
JUMLAH				45.186.337.952	41.307.522.269	100	91,42	Persen		
11	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.186.941.930	9.695.453.314					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah							
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Paraturan Perundang-Undangan	-	-			-		
			Pelaksanaa Protokol dan Komunikasi Pimpinan	10.186.941.930	9.695.453.314					
			Fasilitasi Keprotokolan	1.427.790.000	1.418.294.900	760	754	Kegiatan	Kurangnya tenaga / personil / petugas Protokol PNS	Mengusulkan penambahan personil khususnya ASN Pria

			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	8.157.050.000	7.724.541.894	3.355	3.177	Advertoria 1		
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	602.101.930	552.616.520	365	334	Kegiatan		
JUMLAH				10.186.941.930	9.695.453.314	100	95,18	Persen		
12	Bagian Umum Sekretariat Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.487.519.228	16.410.055.497					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	888.274.000	416.510.005					
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	287.214.000	227.933.000	440	270	Stel	Tidak ada permasalahan yang signifikan karna kegiatan terlaksana dengan baik.	
			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	59.160.000	Rp-	2		Orang	Tidak ada pegawai yang meninggal saat melaksanakan tugas.	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	541.900.000	188.577.005	175	11	Orang	Adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan.	Melakukan koordinasi di awal tahun kegiatan.
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.335.745.500	2.823.431.180					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	56.601.500	12	12	Dokumen	Kegiatan bersifat insidentil karna dilaksanakan berdasarkan permintaan yang masuk.	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.411.083.500	948.353.816	2725	2725	Buah	Belanja modal terakomodir dengan baik, untuk kegiatan sewa asrama dan	Perlu adanya penyesuaian harga ditahun berikutnya.

								asuransi beberapa tidak dapat dibayar ditahun 2023 karena standarisasi harga yang ada tidak memenuhi karna adanya kenaikan tarif.	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	456.425.000	309.324.000	7000	5000	Buah	Semua belanja modal terakomodir sesuai dengan permintaan yang masuk.	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	205.400.000	100.309.000	16000	11000	Lembar/Buah/m2	Permintaan pengadaan cetak (Fotocopy) hanya sedikit yang masuk.	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.162.837.000	1.408.842.864	35	35	Kali	Kegiatan bersifat insidental karna dilaksanakan berdasarkan permintaan yang masuk.	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.138.774.000	7.596.735.043					
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.194.430.000	2.919.530.000	9	9	Kendaraan	Tidak ada permasalahan yang signifikan karna kegiatan terlaksana dengan baik.	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.944.344.000	4.677.205.043	21	21	Kendaraan	Tidak ada permasalahan yang signifikan karna kegiatan terlaksana dengan baik.	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.540.000	128.253.563					
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.540.000	128.253.563	12	12	Dokumen	Kegiatan bersifat insidentil karna dilaksanakan berdasarkan permintaan yang masuk.	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.434.002.528	3.249.986.663					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	721.830.000	492.504.882	30	30	Kendaraan	Besaran nilai BBM, Pajak dan Pemeliharaan yang terealisasi tagihannya berdasarkan permintaan yang masuk.	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.336.630.000	945.185.027	30	30	Kendaraan	Besaran nilai BBM, Pajak dan Pemeliharaan yang terealisasi tagihannya berdasarkan permintaan yang masuk.	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.540.000	68.814.000	3	3	Gedung	Kegiatan bersifat insidentil karna dilaksanakan berdasarkan permintaan yang masuk.	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	813.300.640	651.666.121	4	4	Gedung	Kegiatan bersifat insidentil karna dilaksanakan berdasarkan	

								permintaan yang masuk.	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.405.701.888	1.091.816.633	12	12	Gedung	Kegiatan bersifat insidentil karna dilaksanakan berdasarkan permintaan yang masuk.	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	107.836.000	Rp-					
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	107.836.000	Rp-	8	8	orang	Tidak ada permintaan untuk melakukan Medichal Check Up.	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.426.347.200	2.195.139.043					
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.072.609.600	695.603.600	60	45	Dokumen	Pengadaan jamuan makan dan minum yang ada disesuaikan dengan permintaan yang masuk dari Rumah Dinas Jabatan.	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	655.931.600	441.234.660	60	33	Dokumen	Pengadaan jamuan makan dan minum yang ada disesuaikan dengan permintaan yang masuk dari Rumah Dinas Jabatan.	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.697.806.000	1.058.300.783	60	54	Dokumen	Kegiatan bersifat insidentil karna dilaksanakan berdasarkan	

									permintaan yang masuk.	
JUMLAH				21.487.519.228	16.410.055.497	100	76,37	Persen		
13	Kantor Penghubung	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.564.634.320	1.473.742.583					
			Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.446.000	263.361.407					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.940.000	5.993.400	12	12	Bulan		Realisasi anggaran untuk komponen instalasi listrik/penerangan sebesar Rp 10.922.150 tetapi SPJ senilai Rp 4.928.750 terinput di SIPD pada Bagian Umum dan pada SIPD belum tersedia jurnal koreksi.
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.562.000	96.566.275	3	3	Unit		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.944.000	10.944.000	12	12	Kali		
			Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	149.857.732	12	12	Bulan		
		2	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.046.790.320	964.833.238					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.198.000	2.198.000	157	157	Lembar		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	374.920.000	334.700.188	12	12	Bulan		

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	669.672.320	627.935.050	12	12	Bulan		
	3	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	248.398.000	245.547.938	100	98,85	Persen		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.000.000	128.397.488	5	5	Unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.950.000	43.940.000	50	50	Unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	46.948.000	45.711.450	2	2	Gedung		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	27.500.000	27.499.000	2	2	Gedung		
JUMLAH			1.564.634.320	1.473.742.583	100	94,19	Persen		

TABEL 3.11
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA OPD PENYELENGGARA UNSUR PENDUKUNG DAN URUSAN
PEMERINTAHAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	KECAMATAN BIATAN	1 . PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.421.034.487	4.006.983.592	100	90,63	Persen		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	216.939.000	207.840.328	100	95,81	Persen		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.570.000	21.059.000	12	85,71	Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.836.000	21.567.880	5	98,77	Laporan		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.533.000	165.213.448	5	96,88	Laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.923.476.008	2.591.781.229	100	88,65	Persen		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.769.352	2.494.074.573	12	88,26	Bulan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	97.706.656	97.706.656	12	100	Bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.750.000	21.750.000	100	100	Persen		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.750.000	21.750.000	23	100	Stel		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	466.509.779	454.298.684	100	97,38	Persen		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	12	100	Jenis		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	243.632.779	238.819.000	12	98,02	Jenis		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.999.000	6.680.000	8	83,51	Jenis		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.878.000	96.860.000	16	99,98	Laporan		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000	2.373.000	8.000	79,10	Lembar		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.000.000	104.566.684	40	95,06	Laporan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.000.000	87.059.000	100	83,71	Persen		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.000.000	87.059.000	4	83,71	Unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.256.100	422.514.751	100	95,11	Persen		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	994.000	994.000	6	100	Laporan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.684.400	53.266.789	12	87,78	Laporan		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.977.700	3.840.000	16	38,49	Unit	Tidak adanya biaya pemeliharaan untuk peralatan dan mesin kantor khususnya PC, Laptop, Printer dan suku cadang kendaraan operasional	Penyusunan Anggaran berikutnya agar mengkoordinasikan dengan pengurus barang tentang kondisi barang yang rusak ringan/berat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.600.000	364.413.962	12	97,80	Bulan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.103.600	221.739.600	100	90,84	Persen		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.000.000	147.636.000	13	86,84	Unit		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.103.600	74.103.600	1	100	Unit		
		2 . PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	762.506.000	685.113.466	100	89,85	Persen		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	762.506.000	685.113.466	100	89,85	Persen		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	13.785.000	8	91,90	Kampung		
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	412.300.000	410.145.701	12	99,48	Bulan		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	335.206.000	261.182.765	8	77,92	Kampung		
		3 . PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.700.000	49.564.000	100	99,73	Persen		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49.700.000	49.564.000	100	99,73	Persen		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	49.700.000	49.564.000	12	99,73	Laporan		
		4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	101.350.000	101.310.000	100	99,96	Persen		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	101.350.000	101.310.000	4	99,96	Laporan		
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	101.350.000	101.310.000	4	99,96	Laporan		
		5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	142.662.000	96.502.000	100	67,64	Persen		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	142.662.000	96.502.000	100	67,64	Persen		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	102.684.000	67.808.000	8	66,04	Kampung	Honorarium Tim/Panitia Verifikasi	Pembayaran honorarium

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pendayagunaan Aset Desa						Pendampingan APBK tidak dapat dibayarkan sesuai dengan instruksi BPK	Tim/Panitia Verifikasi Pendampingan APBK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	24.978.000	16.340.000	4	65,42	Laporan	Tidak adanya kegiatan pemilihan kepala Desa/ Kampung	Penyusunan Anggaran berikutnya untuk mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	12.354.000	8	82,36	Kampung		
JUMLAH			5.477.252.487	4.939.473.058	100	90,18	Persen		
2	KECAMATAN SAMBALIUNG	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.533.726.199	5.273.205.866					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.799.000	118.374.480					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.169.000	20.864.000	8 Dokumen	82,90	Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	12.430.000	9.500.000	1 Laporan	76,43	Laporan	masih kurangnya SDM dalam reaisasi spj,	Mohon untuk difasilitasi oleh tim

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						terutama bagian Keuangan, PPTK dan Staf pengelola masih perlu mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis dalam upaya percepatan realisasi SPj	Asistensi anggaran terkait bimbingan teknis dan pengembangan skil untuk penyelesaian SPJ, boleh melalui BKSDM ataupun anggarannya dimasukkan sebagai biaya operasional mengikuti bimbingan teknis, pelatihan dalam upaya memaksimalkan kinerja anggaran di Kecamatan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.200.000	88.010.480	1 Laporan	86,97	Laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.798.629.199	4.627.866.209					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.161.632.759	3.997.788.305	12	96,06	bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	521.200.440	517.676.904	12	99,32	bulan		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.796.000	112.401.000	12	97,07	bulan		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	372.306.000	344.363.689					

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.990.000	2.980.000	1	99,67	paket		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.406.000	73.256.000	1	98,45	paket		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.540.000	108.155.000	4	84,80	paket		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.370.000	7.370.000	2	100	paket		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	3.355.000	1	67,10	Tahun		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.000.000	149.247.689	2	96,29	paket		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.232.000	89.203.090					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.996.000	2.990.000	232	99,80	lembar		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.300.000	81.314.090	12	85,32	bulan		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.936.000	4.899.000	12	32,80	bulan	Anggaran yang tidak terealisasi adalah belanja pemeliharaan website kecamatan, dikarenakan website kecamatan untuk tahun 2023 sudah disediakan oleh diskominfo,	Tahun berikutnya akan kami konsultasikan dengan Tim asistensi, agar anggaran tersebut dapat diajukan dalam anggaran

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								sehingga website kecamatan sebelumnya tidak aktif lagi dan tidak terealisasi belanja pemeliharaannya.	murni/ pergeseran ataupun perubahan ke dalam kegiatan lain yang memaksimalkan kinerja rentra kecamatan, terutama anggaran untuk peningkatan SDM ASN/Non ASN dikantor kecamatan Sambaliung
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.760.000	93.398.398					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	93.784.000	76.422.398	7	81,49	unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	7.000.000	1	100	tahun		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.976.000	9.976.000	1	100	unit		
		2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.455.089.780	3.389.348.975					

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	865.834.880	834.939.264					
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	707.647.880	695.746.264	13	98,32	kampung		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	158.187.000	139.193.000	3	87,99	kegiatan		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.589.254.900	2.554.409.711					
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.589.254.900	2.554.409.711	1	98,65	tahun		
		3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	96.248.000	74.753.952					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	64.982.000	20.712.168					
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	64.982.000	20.712.168	1	31,87	tahun	realisasi tidak maksimal dikarenakan terkait realisasi untuk penanganan bencana	Untuk tahun berikutnya, akan kami konsultasikan dengan tim asistensi

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						covid, dan pada 2023 kasus covid menurun drastis, sehingga anggaran tersebut tidak dapat terserap maksimal	
		4 PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.916.000	23.932.000					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.916.000	23.932.000					
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	24.916.000	23.932.000	1	96,05	kegiatan		
		5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	71.332.000	50.821.952					
		Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	71.332.000	50.821.952					
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	71.332.000	50.821.952	6	71,25	kampung	adanya kesalahan penganggaran belanja pembuatan id-card panitia pemilihan kepala kampung serentak tahun 2023 (kelebihan penganggaran)	Untuk Tahun di 2024, kegiatan tersebut tidak ada, solusinya, dana yang tersedia di tahun 2024 agar dapat digeser pada kegiatan yang dapat

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									dilaksanakan, sudah diajukan perubahan pada waktu asistensi di bulan september 2023, tapi saat pengecekan pada dokumen akhir anggaran 2024 di SIPD, masih tertera ada dana untuk pilkacam.
JUMLAH			9.181.311.979	8.812.062.745	100	95,98	Persen		
3	KECAMATAN TANJUNG REDEB	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.839.436.962	14.373.318.568					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.997.000	129.788.960		48%		tertundanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan	akan memaksimalkan kegiatan sesuai dengan perencanaan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000.000	22.897.680		51%	Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000	2.671.000		6%	Dokumen		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.997.000	104.220.280		58%	Kegiatan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.413.026.262	11.034.853.851		97%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.119.389.262	10.800.481.851		97%	Orang/Bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	293.637.000	234.372.000		80%	Orang/Bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	256.000.000	138.979.830		54%		Belanja yang di bawah standarisasi	Segera membuat penyesuaian Standarisasi yang berlaku
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	71.000.000	53.830.000		76%	Orang		
		Bimbingan Teknis Implementasi Perundang undangan	185.000.000	85.149.830		46%	Orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	613.062.500	455.147.487		74%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.000.000	5.848.000		34%	Unit	Belanja yang tidak sesuai dengan standarisasi	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.578.500	200.476.226		83%	Unit		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.989.000	7.419.000		49%	Unit	keterbatasan waktu dalam penyerapan anggaran	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.500.000	95.045.000		52%	Kegiatan	tertundanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan	

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.995.000	7.695.000		77%	Lembar	tertundanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	3.360.000		56%	Exemplar	Penghentian berlangganan beberapa media cetak	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000	135.304.261		97%	Kegiatan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.193.873.100	1.891.624.000		86%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	2.122.890.900	1.882.180.000		89%	Unit		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.982.200	9.444.000		13%	Unit	Belanja yang tidak sesuai dengan standarisasi	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	763.478.600	614.709.442		81%			
		Penyediaan Surat Menyurat	3.486.000	1.700.000		49%	Lembar	keterbatasan waktu dalam penyerapan anggaran	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	144.999.900	134.578.192		93%	Bulan		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.992.700	17.534.500		27%	Unit	Beberapa barang melebihi standar harga di pasaran	melakukakn survey lapangan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.000.000	460.896.750		84%	Orang/Bulan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.999.500	108.214.998		33%		keterbatasan waktu dalam penyerapan anggaran	Akan memaksimalkan kegiatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	104.999.500	71.324.998		68%	Unit		
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.000.000	36.890.000		16%	Unit		
		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	211.999.800	143.177.536	100 %	68%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	132.000.000	104.002.856		79%			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	132.000.000	104.002.856		79%	Kegiatan	keterbatasan waktu dalam penyerapan anggaran	Akan memaksimalkan kegiatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg tdk Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg Ada di Kecamatan	79.999.800	39.174.680		49%			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.999.800	39.174.680		49%	Kegiatan	tertundanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan	akan berkoordinasi pada OPD Terkait
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.705.937.876	17.471.144.063	100%	93%			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	269.998.700	190.087.400		70%			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	269.998.700	190.087.400		70%	Kegiatan	Beberapa kegiatan yang batal dilaksanakan karna jadwal yang berdekatan dengan kegiatan lain	Akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudh ditentukan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18.391.539.176	17.266.562.063		94%			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	75.000.000	54.893.600		73%	Kegiatan	Beberapa kegiatan yang batal dilaksanakan karna jadwal yang berdekatan dengan kegiatan lain	Akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudh ditentukan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.316.539.176	17.211.668.463		94%	Kegiatan		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	44.400.000	14.494.600		33%			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antarKeluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	44.400.000	14.494.600		33%	Kegiatan	tertundanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan	akan berkoordinasi pada OPD Terkait
		3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	439.098.000	296.744.026	100 %	68%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	439.098.000	296.744.026		68%			
		Sinergeritas Dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	439.098.000	296.744.026		68%	Kegiatan	tertundanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan	akan berkoordinasi pada OPD Terkait
		4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	160.743.350	4.979.000	100%	3%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	160.743.350	4.979.000		3%			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	160.743.350	4.979.000		3%	Kegiatan	Kegiatan tidak dilaksanakan karna bertepatan dengan kegiatan lain	Akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.998.000	13.239.000	100 %	38%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.998.000	13.239.000		38%			
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34.998.000	13.239.000		38%	Kegiatan	Beberapa kegiatan yang batal dilaksanakan karna jadwal yang berdekatan dengan kegiatan lain	Akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan
JUMLAH			35.392.213.988	32.302.602.193	100	91,27%	Persen		
4	KECAMATAN TABALAR	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.277.600	163.212.280	100	88,57			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.358.000	24.954.000	100	85			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	40.719.600	38.614.280	100	94,83			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.200.000	99.644.000	100	87,25			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.296.617.200	3.089.042.770	100	93,70			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.169.877.200	2.962.612.770	100	93,46			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.740.000	126.430.000	100	99,76			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.591.000	17.133.000	100	92,16			
		Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	18.591.000	17.133.000	100	92,16			
		Penatausahaan BMD pada SKPD	-	-	100				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000	63.143.000	100	97,14			
		Bimbingan Teknis Oplementasi Peraturan Perundang-undangan	65.000.000	63.143.000	100	97,14			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	768.496.110	738.611.850	100	96,11			
		Penyediaan Komponen Instalasi	16.997.000	15.622.000	100	91,91			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	392.405.610	387.365.250	100	98,72			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.393.500	24.713.500	100	97,32			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.000.000	150.524.000	100	91,23			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.300.000	1.232.000	100	19,56			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.400.000	10.430.000	100	84,11			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	148.725.100	100	99,15			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	260.106.300	254.423.000	100	97,82			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.129.600	89.820.000	100				
		Pengadaan Mebel	97.274.000	97.274.000	100	100			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.987.700	32.849.000	100	99,58			
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	36.715.000	34.480.000	100	93,91			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.274.000	243.877.600	100	77,60			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.894.000	5.880.000	100	99,76			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.970.000	12.434.000	100	19,14		1. Dikarenakan Listrik pada rumah dinas jabatan sudah terpasang Meteran/Token masing-masing sehingga pengisian daya listrik hanya di bebaskan pada Kantor Kecamatan dan Rumah Dinas Camat dan Sekcam, 2. Penggunaan Internet di kantor Camat sudah menggunakan WiFi bantuan dari Pemkab berau melalui Diskominfo sehingga anggarannya tidak teresap maksimal, 3. penggunaan air bersih di kantor camat masih menggunakan sumur bor dan tidak menggunakan PDAM sehingga anggarannya tidak teresap maksimal	

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.560.000	12.090.000	100	83,04			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.850.000	213.473.600	100	93,28			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.675.000	470.274.446	100	95,65			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	248.000.000	235.319.360	100	94,89			
		Pemeliharaan Mabel	-	-	100				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	100				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	235.675.000	234.955.086	100	99,69			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	8.000.000	-	100	0		Kegiatan yang sebelumnya kami anggarkan ternyata pelaksanaannya sudah terakomodir oleh kegiatan yang lain ya itu kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	71.997.000	67.707.000	100	94,04			
		Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	71.997.000	67.707.000	100	94,04			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	119.987.000	92.181.400	100	76,83			
		Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	26.989.000	20.789.000	100	77,03			
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan	92.998.000	71.392.400	100	76,77			
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	42.975.000	37.380.000	100	86,98			
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan	42.975.000	37.380.000	100	86,98			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		kewenangan lain yang dilimpahkan							
		3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	546.804.000	501.904.908	100	91,79			
		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	-	-					
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	372.444.000	331.875.508	100	89,11			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	174.360.000	170.029.400	100	97,52			
		4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	144.259.000	137.900.000	100	95,59			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Ketentraman dan Ketertiban Umum							
		Sinergeritas Dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	144.259.000	137.900.000	100	95,59		Belanja rapat koordinas dan makan minum (anggaran Covid)	
		5 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	233.240.000	222.517.000	100	95,40			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	213.240.000	202.797.000	100	95,10			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.000.000	19.720.000	100	98,60		Belanja Makan minum kegiatan	
		6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	219.940.000	176.277.755	100	80,15			
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	187.440.000	153.952.755	100	82,13			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pendayagunaan Aset Desa							
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	32.500.000	22.325.000	100	68,69			
JUMLAH			6.778.239.210	6.275.586.009	100	92,58	Persen		
5	KECAMATAN GUNUNG TABUR	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.700.510.530	7.203.489.585					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.760.000	239.044.665					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	39.584.000	8	98,96	dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	49.976.783	4	99,95	org		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.760.000	149.483.882	4	92,99	laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.862.275.300	5.629.529.591					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.667.491.300	5.435.601.982	12	95,91	bulan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	194.784.000	193.927.609	12	99,56	bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.730.000	108.386.672					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.730.000	44.730.000	38	100	stell		
		Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	70.000.000	63.656.672	10	90,94	org		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.424.630	299.390.700					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	4.994.400	15	41,62	jenis	Pengadaan belanja komponen listrik tidak sesuai peruntukannya dikarenakan bangunan kantor kecamatan sedang direhap total	akan lebih mencermati peruntukan dalam menyusun perencanaan kedepannya
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.952.630	34.939.000	15	89,70	jenis		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.872.000	18.405.300	8	97,53	jenis		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.600.000	104.695.000	100	94,66	kali		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000	9.697.000	4	69,26	jenis		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	1.920.000	5	38,40	jenis	dikarenakan langganan surat kabar yg satu sdh tidak berlangganan lagi	kedepannya akan lebih mencermati peruntukan dalam menyusun perencanaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000	124.740.000	50	99,79	kali		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.949.800	193.457.000					
		Pengadaan Mebel	60.000.000	50.373.000	6	83,96	jenis		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.949.800	109.474.000	5	98,67	buah		
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor bangunan lainnya	50.000.000	33.610.000	12	67,22	bulan	pengadaan sarana dan prasarana tidak optimal karna kantor kecamatan dalam pelaksaan rehap total sehingga pengadaan sapras gedung belum tercapai realisasinya	kedepannya akan lebih mencermati peruntukan dalam menyusun perencanaan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.950.800	579.852.639					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.501.800	2.800.000	750	79,96	buah		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.800.000	70.635.214	12	57,06	bulan	dikarenakan kegiatan kantor kami sementara pindah ke rumah dinas camat yg dimana pemakaiannya berbeda dgn gedung kantor	kedepannya untuk tahun 2025 kami sdh pindah ke gedung kantor dimana pemakaian akan normal kembali,

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								sehingga realisasinya tidak optimal	bahkan mungkin akan kami tambah dipagu anggaran untuk air dan listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	12.835.000	5	51,34	jenis	untuk pemeliharaan elektronik kantor kecamatan tahun 2024 ada beberapa jenis saja yang perlu di service sehingga realisasi untuk penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tidak terealisasi sepenuhnya	kedepannya akan lebih mencermati peruntukan dalam menyusun perencanaan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	570.649.000	493.582.425	12	86,49	bulan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.150.000	262.214.990					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	116.000.000	83.681.560	12	72,14	buah		
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203.150.000	178.533.430	2	87,88	buah		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000						
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	25.000.000	19.508.000					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Masyarakat di wilayah Kecamatan	25.000.000	19.508.000	12	78,03	bulan		
		3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.656.285.200	3.316.652.022					
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	904.900.200	797.195.340					
		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	40.600.000	40.014.000	1	98,56	kegiatan		
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	541.050.200	532.813.740	12	98,48	bulan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	323.250.000	224.367.600	12	69,41	bulan	belum optimalnya kegiatan fkks,PKK dan MTQ karena ada bebrapa kegiatan yg peruntukannya tidak bisa dilaksanakan karna masih kurang pemahaman untuk pertanggung jawabnn	kedepannya akan saling koordinasi dalam penyusunan anggaran baik itu kegiatan FKKS, PKK dan MTQ ,agar lebih tepat sasaran
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.751.385.000	2.519.456.682					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	90.780.000	69.478.400	12	76,53	bulan	dikarenakan pada saat pemeriksaan BPK di semester 1 untuk SK Honor tim pendampingan RT sk tersebut bertanda tangan Camat yang dimana jadi temuan bpk sehingga pada semester 2 untuk honor tim dpending dan tidak diaprahkan sehingga realisasinya tidak optimal	kedepannya akan lebih mencermati peraturan bupati mengenai sk TIM sehingga tidak lagi menjadi temuan BPK
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.660.605.000	2.449.978.282	12	92,08	bulan		
	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.500.000	36.878.728					

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.500.000	36.878.728					
		Sinergeritas Dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.500.000	36.878.728	12	91,06	bulan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	146.760.000	146.725.975					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	146.760.000	146.725.975					
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	146.760.000	146.725.975	1	99,98	kegiatan		
		5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	295.568.000	245.982.365					
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	295.568.000	245.982.365					
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	180.568.000	146.196.320	10	80,96	kampung		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kapala Kampung/Desa	55.000.000	52.612.095	10	95,66	kampung		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	60.000.000	47.173.950	12	78,62	bulan		
JUMLAH			11.864.623.730	10.949.728.675	100	92,29	Persen		
6	KECAMATAN TALISAYAN	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.105.620.175	5.588.586.850					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.400.000	171.024.228	100	82.46	%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.200.000	59.791.723	4	99.32	Dokumen	Harap disesuaikan prosentasnya	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.000.000	37.934.275	12	74.38	Laporan	74,38 %	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.200.000	73.298.230	4	76.19	Laporan	76,19%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.970.011.437	3.713.436.141	100	93.54	%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.743.011.437	3.513.325.900	12	93.86	Bulan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.000.000	66.903.241	12	89.20	Bulan		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000	133.207.000	12	87.64	Bulan		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.750.000	44.885.000	100	85.09	%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.750.000	44.885.000	12	85.09	Bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141.002.500	131.902.460	100	93.55	%		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	61.002.500	54.880.000	90	89.96	Stel		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000	77.022.460	10	96.28	Orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.409.533	387.222.208	100	96.71	%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.950.000	50	99.00	Buah		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.994.133	28.717.000	200	95.74	Buah		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.454.000	4.192.000	24	94.12	Bulan		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.004.000	150.475.000	1,8	97.08	kotak		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000	6.890.000	12	98.43	Bulan		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	3.835.000	12	95.88	bulan		
		Penyediaan Bahan/Material	29.988.000	29.285.000	12	97.66	Bulan		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	89.969.400	89.540.000	12	99.52	Bulan		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	69.338.208	60	92.45	orang		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	497.964.410	466.258.000	100	93.63	%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000	36.350.000	1	95.66	Unit		
		Pengadaan Mebel	47.489.000	46.970.000	4	98.91	Buah		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.489.410	333.988.000	10	92.14	unit		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.986.000	48.950.000	3	97.93	buah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.101.500	402.571.961	100	90.24	%		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.970.000	100	99.40	Buah		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.382.500	89.429.211	12	82.51	Bulan		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.990.000	11.550.000	12	57.78	Bulan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.729.000	296.622.750	12	94.85	Bulan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.980.795	271.286.852	100	69.56	%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.000.000	127.074.852	12	94.13	Bulan		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	-	12	-	Bulan	kurang optimal dalam menginventarisasi barang yang kondisinya rusak	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000	14.220.000	12	47.40	Bulan	kurangnya pengecekan barang yang harus diberikan perawatan setiap bulannya	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	214.980.795	129.992.000	12	60.47	Bulan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	424.981.000	368.338.066	100	86.67	%		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	180.000.000	165.462.650	100	91.92	%		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.000.000	33.805.000	10	96.59	Kampung		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	145.000.000	131.657.650	10	90.80	Kampung		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	144.981.000	117.305.416	100	80.91	%		
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	45.000.000	40.022.316	10	88.94	Kampung		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.981.000	77.283.100	10	77.30	Kampung		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.000.000	85.570.000	100	85.57	%		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.000	85.570.000	10	85.57	Kampung		
		3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	119.995.000	83.001.746	100	69.17	%		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	119.995.000	83.001.746	100	69.17	%		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	119.995.000	83.001.746	10	69.17	Kampung	Kurang nya personil di bidang Trantrib dalam melaksanakan kegiatan di masing-masing kampung	
		4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	225.245.500	204.572.543	100	90.82	%		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	225.245.500	204.572.543	100	90.82	%		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	117.250.000	113.440.370	10	96.75	Kampung		
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	107.995.500	91.132.173	10	84.39	Kampung		
		5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	881.100.000	838.441.768	100	95.16	%		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	881.100.000	838.441.768	100	95.16	%		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	157.600.000	152.964.100	10	97.06	Kampung		
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.000.000	51.562.662	10	64.45	Kampung		
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	643.500.000	633.915.006	10	98.51	Kampung		
JUMLAH				7.756.941.675	7.082.940.973	100	91,3	Persen		
7	KECAMATAN PULAU DERAWAN	1 .	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.966.694.025	4.183.007.678					

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	203.887.100	149.226.132		73,19			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.382.000	31.439.680	32	79,83	dok	kegiatan dinas luar yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan anggaran yang tersisa tidak cukup	lebih cermat dalam merencanakan anggaran ditahun berikutnya
		koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikstisar realisasi kinerja SKPD	61.303.100	41.721.452	12	68,06	bulan	kegiatan dinas luar dan dinas dalam daerah yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya pejabat yang ditunjuk namun berbenturan dengan kegiatan lain	lebih cermat dalam merencanakan anggaran ditahun berikutnya dan lebih cermat dalam pelaksanaan kegiatan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.202.000	76.065.000	5	73,7	kegiatan	terdapat anggaran BBM pawai dan expo yang sudah dilaksanakan namun pembayarannya menggunakan anggaran rutin dan belanja sewa pakaian expo sesuai dengan kebutuhan	lebih cermat dalam pelaksanaan kegiatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.746.587.025	3.425.833.842		91,44			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.154.027.025	2.863.116.642	12	90,78	bulan	Anggaran yang tersedia melebihi dari kebutuhan	Menghitung lebih cermat kebutuhan dana yang diperlukan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	544.820.000	533.391.000	12	97,9	bulan		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	47.740.000	29.326.200	12	61,43	bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.279.000	87.331.451		96,74			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.279.000	28.600.000	26	94,45	stel		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	60.000.000	58.731.451	6	97,89	orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	472.754.000	353.846.453		74,85			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	1.539.000	5	30,78	jenis		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.096.000	138.450.700	12	80,92	jenis		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	2.425.000	12	60,63	bulan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.248.000	51.592.000	12	43,26	orang	pengadaan belanja Natura sesuai dengan kebutuhan dilapangan	lebih cermat dalam merencanakan anggaran di tahun berikutnya dan lebih cermat dalam pelaksanaan kegiatan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000	1.848.000	3	73,92	lembar		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	910.000	-	2	-	buku		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000	157.991.753	12	92,94	bulan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.687.000	6.070.000		44,35		Beri alasan dan tindak lanjut pada tahun berikutnya	
		Pengadaan Mebel	13.687.000	6.070.000	2	44,35	unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.999.900	35.820.600		44,78			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.428.000	175	97,12	lembar		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	23.380.400	12	46,76	bulan	penggunaan listrik Sesuai dengan kebutuhan dikarenakan belum teasang pendingin ruangan AC,	pengadaan belanja modal AC pada anggaran perubahan 2024 dan alat elektronik lainnya
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000	7.281.000	2	41,61	kegiatan	minimnya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	lebih cermat dalam merencanakan

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya seperti piring, sabit dll	anggaran ditahun berikutnya
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.999.900	2.731.200	12	27,31	kegiatan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.500.000	124.879.200		34,74		Beri alasan dan tindak lanjut pada tahun berikutnya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	184.500.000	124.879.200	8	67,69	unit	minimnya kerusakan pada kendaraan dinas roda 4 dan terdapat kendaraan dinas roda 4 yang rusak berat yang tidak bisa diperbaiki	lebih cermat dalam merencanakan anggaran ditahun berikutnya
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	-	3	-	unit	minimnya peralatan mesin yang ingin diperbaiki	lebih cermat dalam merencanakan anggaran dan pelaksanaan kegiatan
		Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-	3	-	jenis	pembangunan toilet pendopo tidak bisa dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu	direncanakan bersamaan pembangunan rumah dinas camat di tahun berikutnya
		PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66.000.000	54.243.000		82,19			
2									

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.000.000	54.243.000	12	82,19	kegiatan		
		3 . PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	309.912.000	304.517.680		98,26			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	309.912.000	304.517.680		98,26			
		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	25.000.000	24.994.000	5	99,98	kampung		
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	284.912.000	279.523.680	6	98,11	orang		
		4 . PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.478.000	39.199.140		-			
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	49.478.000	39.199.140		79,23			
		Sinergeritas Dengan Kepolisian Republik	49.478.000	39.199.140	12	79,23	bulan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		5 . PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	180.610.000	126.959.000		-			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	180.610.000	126.959.000		70,29			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	180.610.000	126.959.000	1	70,29	kali		
		6 . PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	458.328.700	339.327.319		-			
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	458.328.700	339.327.319		74,04			
		<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan</i>	66.410.000	50.068.800	5	75,39	kampung		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	207.200.000	144.435.250	5	69,71	kampung	Honor Tim Pendamping ADK & Tim Evaluasi APBK Tidak Dapat Direalisasikan Karena Terjadi Kesalahan Dalam Pembuatan SK	Membuat SK sesuai PERBUP yakni menggunakan SK Sekretaris Daerah

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.650.000	-	5	-	kampung	tahun 2024 tidak ada pelaksanaan pemilihan kepala kampung maupun kepala kampung PAW	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	167.068.700	144.823.269	5	86,68	kegiatan		
JUMLAH			6.031.022.725	5.047.253.817	100	83,7	Persen		
8	KECAMATAN BATU PUTIH	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	5.270.963.188	5.093.367.276		96,63%			
		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.188.900	278.126.604		99,26%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000	59.075.004	12	98,46%	dok		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.500.000	33.420.000	12	99,76%	bln		
		Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	186.688.900	185.631.600	12	99,43%	bln		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.329.857.288	3.165.626.331		95,07%			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.760.527.288	2.601.764.964	12	94,25%	bln	Anggaran yang tersedia melebihi dari kebutuhan	Menghitung lebih cermat kebutuhan dana yang diperlukan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	569.330.000	563.861.367	12	99,04%	bln		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	159.975.000	159.820.000		99,90%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.975.000	49.975.000	12	100%	bln		
		Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	110.000.000	109.845.000	12	99,86%	bln		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	470.472.300	466.929.399		99,25%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.500.000	15.500.000	12	100%	bln		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.994.200	99.994.200	12	100%	bln		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.499.100	18.499.100	12	100%	bln		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.979.000	154.883.000	12	99,94%	bln		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.500.000	11.500.000	12	100%	lbr		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	4.680.000	12	93,60%	bln		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	12	100%	bln		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.000.000	141.873.099	12	97,84%	bln		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	389.582.900	386.527.105		99,22%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	111.000.000	107.944.205	4	97,25%	unit		
		Pengadaan Mebel	64.694.700	64.694.700	3	100%	bh		
		Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantpr atau Bangunan Lainnya	213.888.200	213.888.200	1	100%	keg		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.681.400	208.705.720		99,06%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.198.000	8.022.000	2	97,85%	lap		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.498.500	80.729.820	12	97,86%	bln		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.984.900	119.953.900	12	99,97%	bln		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	430.205.400	427.632.117		99,40%			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	189.900.000	187.326.717	12	98,64%	bln		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.360.000	30.360.000	12	100%	bln		
		Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	209.945.400	209.945.400	12	100%	bln		
		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.998.100	39.726.740		99,32%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		#DIV/0!			
		Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-		#DIV/0!			
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit	39.998.100	39.726.740		99,32%			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		kerja persngkat daerah yang ada di Kecamatan							
		Perencanaan Percepatan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	39.998.100	39.726.740	10	99,32%	bln		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	788.160.800	772.485.790		98,01%			
		3 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	788.160.800	772.485.790		98,01%			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	11.000.000	10.760.000	7	97,82%	bln		
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	532.161.800	516.861.220	12	97,12%	kegiatan		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	244.999.000	244.864.570	12	99,95%	bln		
		4 PROGRAM KOORDINASI UPAYA	20.000.000	19.800.000		99%			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	20.000.000	19.800.000		99%			
		Sinergisitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	19.800.000	12	99%	bln		
		5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	238.246.100	237.929.100		99,87%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	238.246.100	237.929.100		99,87%			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	213.248.000	213.175.000	200	99,97%	org		
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	24.998.100	24.754.100	7	99,02%	kampung		
		6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	351.248.500	292.579.480		83,30%			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		PEMERINTAHAN DESA							
		Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	351.248.500	292.579.480		83,30%			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34.350.000	29.686.200	7	86,42%	keg		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	196.999.400	162.002.400	7	82,23%	kampung	Honor Tim Pendamping ADK & Tim Evaluasi APBK Tidak Dapat Direalisasikan Karena Terjadi Kesalahan Dalam Pembuatan SK	Membuat SK sesuai PERBUP yakni menggunakan SK Sekretaris Daerah
		Fasilitasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	64.900.000	59.115.100	12	91,09%	bln		
		Fasilitasi Penataan,Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	54.999.100	41.775.780	12	75,96%	bln	Honor Tim Kegiatan Pemerintahan Tidak Dapat Direalisasikan Karena Terjadi Kesalahan Dalam Pembuatan SK	Membuat SK sesuai PERBUP yakni menggunakan SK Sekretaris Daerah
JUMLAH			6.708.616.688	6.455.888.386	100	96,23	Persen		
9	Kecamatan Biduk-Biduk	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.953.271.969	5.593.726.520		93,96			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292.692.400	275.730.641		94,20			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	49.680.224	5	99,36	Dok		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.992.400	47.897.913	5	93,93	Keg		
		Evaluasi Perangkat Daerah	191.700.000	178.152.504	3	92,93	Dok		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.168.234.386	3.985.044.589		95,61			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.724.914.386	3.562.796.461	14	95,65	Bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	443.320.000	422.248.128	12	95,25	Bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	133.849.800	118.345.484		88,42			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	63.849.800	63.800.000	31	99,92	Stel		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000	54.545.484	10	77,92	Orang		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	817.119.183	760.228.454		93,04			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.000.000	15.850.000	8	93,24	Jenis		
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	402.919.983	387.914.100	12	96,28	Bulan		
		Penyediaan peralatan rumah tangga	33.499.200	29.014.000	12	86,61	Bulan		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.900.000	123.870.000	12	82,64	Bulan		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.800.000	20.644.000	12	90,54	Bulan		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	2.400.000	12	26,67	Bulan	Sumberdaya manusia yang masih kurang	Meningkatkan koordinasi serta pemilihan PPTK yang faham kegiatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.000.000	180.536.354		99,20			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.383.700	195.208.352		97,42			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.011.700	138.328.352	2	96,73	Buah		
		Pengadaan Mebel	57.372.000	56.880.000	3	99,14	Buah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.992.500	58.308.000		69,42			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.996.000	6.660.000	2	66,63	Jenis		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.999.500	24.695.000	12	52,54	Bulan	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik anggarannya tidak terserap dengan baik dikarenakan waktu ABT yang begitu singkat dan juga adanya pergantian bendahara di waktu pertengahan tahun berjalan.	Kedepannya menganggarkan dana pelatihan atau bimtek PPTK dan bendahara pengeluaran
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.997.000	26.953.000	5	99,84	Jenis		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.000.000	200.861.000		78,16			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190.000.000	147.361.000	12	77,56	Bulan		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000	3.500.000	12	20,59	Bulan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terserap sepenuhnya karena kurang memahami pengelolaan kegiatan yang ada	Kedepannya memberikan pelatihan atau bimtek pengelolaan keuangan

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	12	100	Bulan		
		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54.999.600	49.899.600		90,73			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	54.999.600	49.899.600		90,73			
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.999.600	49.899.600		90,73			
		3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	544.331.900	518.206.887		95,20			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	544.331.900	518.206.887		95,20			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	-	6	0	Kampung	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa tidak terealisasi sepenuhnya di karenakan tidak memahami sistem SIPD yang ada sekarang ini	Meningkatkan koordinasi dengan bagian terkait

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	332.825.000	324.384.528	12	97,46	Bulan		
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	196.506.900	193.822.359	12	98,63	Bulan		
		4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	79.999.450	78.179.450		97,72			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	79.999.450	78.179.450		97,72			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	79.999.450	78.179.450	12	97,72	Bulan		
		5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	219.347.000	218.294.000		99,52			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	219.347.000	218.294.000		99,52			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	164.349.000	163.849.000	1	99,70	Kegiatan		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	54.998.000	54.445.000	12	98,99	Bulan		
		6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	318.441.800	241.330.100		75,78			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	318.441.800	241.330.100		75,78			
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	84.499.900	63.737.900	6	75,43	Kampung		
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	178.448.500	124.952.000	2	70,02	Kampung		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	55.493.400	52.640.200	12	94,86	Bulan		
		JUMLAH	7.170.391.719	6.699.636.557	100	93,43	Persen		
10	Kecamatan Teluk Bayur	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN	8.930.962.950	8.259.702.295	100%	92,48			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.900.000	141.059.189					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	22.619.430	5	75,40	Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.700.000	19.859.230	4	71,69	Dokumen		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.200.000	98.580.529	4	87,09	Dokumen	Honor pengguna barang tidak dibayarkan karena sudah termasuk di honor pengguna anggaran	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.172.031.450	6.599.640.350	100%	92,02			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.869.031.450	6.356.026.090	12	92,53	Bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	153.000.000	101.114.260	12	66,09	Bulan		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000	142.500.000	12	95	Bulan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.000.000	12.930.000	100%	99,46			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.000.000	12.930.000	5	99,46	Dokumen		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.740.000	133.554.030	100%	99,120			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.740.000	59.740.000	25	100	Stel		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	73.814.030	3	98,42	Orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.452.000	389.824.132	100%	92,50			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	9	100	Jenis		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.998.900	99.305.000	5	99,31	Jenis		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.999.100	14.999.100	2	100	Janis		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.496.000	111.340.000	48	94,76	Rapat		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000	16.000.000	3	100	Jenis		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	3.520.000	2	88,89	Jenis	hanya satu eksemplas seharusnya di rumah dinas dan di kantor Kecamatan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000	213.462.661	96	97,03	Kali		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.957.200	115.885.600	100%	96,61			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.282.400	43.180.000	2	95,36	Unit	Kendaraan Roda 2	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-					
		Pengadaan Mebel	59.685.900	57.754.000	4	96,76	Jenis		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.988.900	14.951.600	2	99,75	Jenis		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.382.300	376.665.694	100%	95,99			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.992.000	2	99,87	Jenis		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.482.300	79.483.070	12	85,02	Bulan		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.900.000	27.840.000	6	99,78	Jenis		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.000.000	263.350.624	12	99,38	Bulan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.500.000	503.073.300	100%	96,84			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.500.000	129.631.300	12	90,97	Bulan		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	377.000.000	373.442.000	4	99,06	Gedung		
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	172.000.000	131.826.376	100%	76,64			Untuk Tahun 2025 akan lebih maksimal untuk merlisasikan anggaran yang telah tersedia untuk kegiatan kegiatan Pelayanan kepada masyarakat
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	132.000.000	92.571.000		70,13			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	72.000.000	59.751.000	12	82,99	Bulan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.000.000	32.820.000	4	54,70	Kampung		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.000.000	39.255.376	100%	98,14			
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000	39.255.376	4	98,14	Kampung		
		3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.151.408.600	5.860.785.981	100%	95,28			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	491.499.500	342.942.156	100%	69,77		Ini Jumlah Kegiatan Yang Terdiri dari 4 Sub Kegiatan (sebagian anggaran diperoleh dari ABT) sehingga waktunya pendek	Untuk Tahun 2025 akan di laksanakan di awal tahun sehingga anggaran dapat terealisasi
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.500.000	15.660.000	4	94,91	Kampung		
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan	264.000.000	202.759.656	5	76,80	Orang	Tenaga Pejuang Sigap yang tidak teenuhi	Untuk Tenaga Pejuang Sigap pada

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							Tahun 2025 menjadi tenaga P3K. Keamatan Teluk Bayur hanya dapat 2 orang tenaga Pejuang Sigap yang menjadi P3K dan kekurangannya (3 Orang) sudah dikoordinasikan dengan DPMPK Kab Berau
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	199.999.500	113.522.500	12	56,76	Bulan		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11.000.000	11.000.000	12	100	Bulan		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.659.909.100	5.517.843.825	100%	97,49			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-					
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Bayur	3.286.403.500	3.198.926.215	12	97,34			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rinding	2.373.505.600	2.318.917.610	12	97,70	Bulan		
		4 PROGRAM KOORDINASI	42.750.000	42.710.000	100%	99,91			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.750.000	42.710.000	12	99,91	Bulan		
		5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.250.000	101.929.480	100%	91,62			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.250.000	101.929.480		91,62			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	80.750.000	79.210.000		98,09			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.500.000	22.719.480	12	74,49	Bulan		
		6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	120.000.000	102.452.880	100%	85,38			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120.000.000	102.452.880					

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	95.000.000	77.732.880	4	81,82	Kampung		
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	0	0			
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000	24.720.000	20	98,88	Kali		
JUMLAH			15.528.371.550	14.499.407.012	100	93,37	Persen		
11	Kecamatan Maratua	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.006.264.493	7.812.354.520	100%	86.74%	Persen		Lebih cermat dan teliti dalam penyusunan anggaran serta lebih intens dalam berkoordinasi ke bidang/kasi terkait realisasi/serapan anggaran kedepannya.
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.750.000	198.347.681	100%	70.15%	Persen		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.350.000	37.629.080	4 Dokumen	4	Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.550.000	38.193.400	7 Dokumen	7	Dokumen		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.850.000	122.525.201	4 Laporan	4	Laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.142.138.863	3.723.298.706	100%	89.89%	Persen		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.857.910.863	3.509.634.456	12 Bulan	12	Bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.800.000	82.984.250	12 Bulan	12	Bulan		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	146.428.000	130.680.000	12 Bulan	12	Bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127.000.000	97.942.997	100%	77.12%	Persen		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.000.000	38.500.000	32 Orang	30	Orang		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85.000.000	59.442.997	5 Orang	5	Orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	780.643.100	540.091.550	100%	69.19%	Persen		Lebih teliti dalam menyusun rincian anggaran karena kurang cermat dalam penyusunan anggaran pada sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu sehingga

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									realisasi/serapan anggaran rendah.
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.470.000	12.470.000	8 Jenis	8	Jenis		
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	76.951.100	76.866.100	26 Jenis	26	Jenis		
		Penyediaan peralatan rumah tangga	14.500.000	7.000.000	1 Jenis	1	Jenis		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218.170.000	122.795.000	12 Bulan	12	Bulan		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.552.000	4.482.000	3 Jenis	3	Jenis		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	5.999.500	1 Jenis	1	Jenis		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	225.000.000	100.165.000	12 Bulan	12	Bulan		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.000.000	210.313.950	12 Bulan	12	Bulan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.136.916.230	1.110.591.150	100%	97.68%	Persen		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000	280.600.000	1 Unit	1	Unit		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650.000.000	644.993.250	4 Unit	4	Unit		
		Pengadaan Mebel	40.000.000	38.200.000	7 Unit	7	Unit		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.022.430	77.021.900	8 Jenis	8	Jenis		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.893.800	69.776.000	1 Tahun	1	Tahun		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.226.300	508.298.453	100%	89.61%	Persen		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	5.530.000	1 Jenis	1	Jenis		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.500.000	62.480.794	12 Bulan	12	Bulan		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.940.000	1.615.000	15 Unit	1	Unit		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	442.786.300	438.672.659	12 Bulan	12	Bulan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670.000.000	602.304.400	100%	89.90%	Persen		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000	73.148.000	11 Unit	11	Unit		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	345.000.000	329.736.400	11 Unit	11	Unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	340.000	15 Unit	1	Unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.000.000	199.080.000	1 Tahun	1 Tahun	Tahun		
		2 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.346.000	40.972.000	89%	40.83%	Persen		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.934.000	15.613.000	100%	46.01%	Persen	Adanya pergantian/mutasi jabatan pada bidang tersebut sehingga terkendala pelaksanaan program kerja di tahun 2024	Lebih berkoordinasi lagi dengan bidang/kasi yang membidangi pada sub kegiatan tersebut
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.934.000	15.613.000	12 Bulan	12	Bulan		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	66.412.000	25.359.000	100%	38.18%	Persen	Adanya pergantian/mutasi jabatan pada bidang tersebut sehingga terkendala pelaksanaan program kerja di tahun 2024	Lebih intens berkoordinasi dengan bidang tersebut

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.820.000	-	1 Tahun	0	Tahun		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.592.000	25.359.000	12 Bulan	12	Bulan		
		3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	607.660.000	519.416.303	100%	85.48%	Persen		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	607.660.000	519.416.303	100%	85.48%	Persen		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	9.990.000	4 Kampung	4	Kampung		
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	363.760.000	328.622.903	12 Bulan	12	Bulan		
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	228.900.000	180.803.400	12 Bulan	12	Bulan		
		4 PROGRAM KOORDINASI	77.630.000	70.406.800	100%	90.70%	Persen		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	77.630.000	70.406.800	100%	90.70%	Persen		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	77.630.000	70.406.800	12 Bulan	12	Bulan		
		5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	371.328.000	327.964.480	100%	88.32%	Persen		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	371.328.000	327.964.480	100%	88.32%	Persen		
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	338.482.000	308.107.000	1 Kegiatan	1	Kegiatan		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32.846.000	19.857.480	12 Bulan	12	Bulan		
		6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	142.626.000	72.720.000	100%	50.99%	Persen		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	142.626.000	72.720.000	100%	50.99%	Persen	Terkendalanya Kegiatan Ke Kampung Karena banyak menerima Kunjungan Kabupaten maupun Luar Kabupaten yang berkunjung Ke Maratua sehingga Agenda tersebut tidak sesuai rencana kerja	Kedepannya Lebih teliti atau cermat lagi dalam menyusun anggaran pada sub kegiatan tersebut disesuaikan dengan rencana kerja/jadwal yang lebih sistematis
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	103.460.000	51.730.000	4 Kampung	4	Kampung		
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	-		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	39.166.000	20.990.000	12 Bulan	12	Bulan		
JUMLAH			1.504.710.000	1.159.420.464	100	77,05	Persen		
12	Kecamatan Segah	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.345.236.150	4.903.547.342	100	92%	Persen		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.038.000	182.317.308		88%	Persen		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.220.000	28.812.208	3	95%	dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.720.000	23.500.000	7	85%	dokumen		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.098.000	130.005.100	3	87%	kegiatan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.347.335.150	3.148.553.944		94%	Persen		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.205.459.150	3.022.398.311	12	94%	bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.354.000	33.940.000	12	84%	bulan		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	101.522.000	92.215.633	12	91%	bulan		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.620.000	48.751.180		93%	Persen		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	52.620.000	48.751.180	12	93%	bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.900.000	80.410.000		85%	Persen		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.900.000	24.050.000	24	97%	orang		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000	56.360.000	12	81%	kali		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	500.000.000	415.462.786		83%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	6	100%	jenis		
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	46.000.000	42.432.500	6	92%	jenis		
		Penyediaan peralatan rumah tangga	25.000.000	21.633.000	6	87%	jenis		
		Penyediaan bahan logistik kantor	147.500.000	127.255.000	48	86%	kali		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.000.000	13.000.000	3	100%	jenis		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.500.000	-	2	0%	jenis	tidak dilaksanakan dikarenakan tidak berlangganan surat kabar pada tahun 2024	Kedepanya akan digunakan untuk mengadakan Buku Bacaan dalam meningkatkan minat baca Baik Masyarakat dan ASN di Lingkup Kantor camat Segah
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.000.000	36.850.000	250	55%	orang	Keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan	Meningkatkan koordinasi serta

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									pemilihan PPTK yang faham kegiatan
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	190.000.000	166.292.286	250	88%	kali		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	173.585.000	168.338.408		97%	Persen		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.000.000	72.664.408	3	96%	unit	Pengadaan 2 Unit Motor dinas yang dipergunakan Pejabat Sebagai Penunjang Kegiatan TRANTIB	
		Pengadaan Mebel	41.895.000	41.232.000	2	98%	jenis		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.690.000	54.442.000	5	98%	jenis		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.758.000	413.709.306		86%	Persen		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.100.000	2.800.000	2	46%	jenis	Keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan	Meningkatkan koordinasi serta pemilihan PPTK yang faham kegiatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.225.000	48.311.800	12	52%	bulan	penggunaan listrik Sesuai dengan kebutuhan dikarenakan belum teasang pendingin ruangan AC, DAN Rencana penyediaan internet belum dapat dilaksanakan karena blm mendapatkan	pengadaan belanja modal AC pada anggaran perubahan 2024 dan alat elektronik lainnya, serta melakukan pencarian penyedia internet untuk mendukung kinerja kecamatan

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								rekanan yang dapat menyediakan internet stabil di wilayah segah	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000	27.951.490	5	76%	jenis		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346.433.000	334.646.016	12	97%	bulan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.000.000	446.004.410		91%	Persen		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	203.000.000	162.446.410	12	80%	unit		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	285.000.000	283.558.000	3548	99%	meter		
	2	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	224.000.000	141.296.621		63%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	145.000.000	90.336.141		62%			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	145.000.000	90.336.141	13	62%	Kampung	Kesalahan Pengggaran Honorarium Menggunakan SK Sekertaris Sedangkang SK Yang dibuat Menggunakan SK Camat	Meningkatkan koordinasi serta pemilihan PPTK yang faham kegiatan Lomba-lomba kampung
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	38.000.000	18.809.100		49%			
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	38.000.000	18.809.100	1	49%	kegiatan	Karena Kurang Pahamnya Pelaksana Kegiatan Sehingga tidak dapat dilaksanakan Biaya Perjalanan dinas Tidak diserap kurangnya Undangan dari dinas terkait dalam rangka peningkatan Kapasitas Pelayanan di tingkat kecamatan	Meningkatkan koordinasi serta pemilihan PPTK yang faham kegiatan Tugas dan fungsi dalam Pelayanan Paten
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	41.000.000	32.151.380		78%			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	41.000.000	32.151.380	1	78%	kegiatan	Keterbatasan Waktu dan Personil dalam rangka Pengukuran	Meningkatkan koordinasi serta pemilihan PPTK

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kewenangan lain yang dilimpahkan						lahan dan Mediasi Lahan Yang dilaksanakan di wilayah kecamatan seghah	yang faham kegiatan penyelesaian masalah pertanahan
		3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	940.400.000	817.508.240		87%			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	940.400.000	817.508.240		87%			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	52.000.000	51.620.000	13	99%	Kampung		
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	713.400.000	648.564.136	12	91%	bulan		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	175.000.000	117.324.104	7	67%	kegiatan	Keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan FORum Kecamatan Sehat dan Monitoring PKK, Pendataan Keluarga Miskis/Disabilitas belum dapat dilaksanakan dikarenakan	Meningkatkan koordinasi serta pemilihan PPTK yang faham kegiatan Forum Kecamatan sehat dan Pendataan Keluarga Miskin/disabilitas diwilayah kerrja kecamatan seghah

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								kurangnya tenaga dalam melaksanakan kegiatan ini	
		4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.500.000	48.200.000		71%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	67.500.000	48.200.000		71%			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	67.500.000	48.200.000	3	71%	kegiatan	Karena permasalahan Waktu dalam melaksanakan Kegiatan Monitoring Bersama dalam upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Menurunya Gangguan Kebakaran Hutan dan lahan diwilayah Kecamatan Segah	Meningkatkan koordinasi serta pemilihan PPTK yang faham kegiatan Sinergitas
		5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	297.250.000	233.429.000		79%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	297.250.000	233.429.000		79%			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	247.250.000	202.249.000	4	82%	kegiatan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000	31.180.000	4	62%	kegiatan	Keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dalam Pelaksanaan Rakor berbenturan dengan Kegiatan Pemilu dan Pilkada	Meningkatkan koordinasi serta pemilihan PPTK yang faham kegiatan Rakor kepala kampung dan menjadwalkan rutin pelaksanaan Rakor
		6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	342.125.000	259.800.676		76%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	342.125.000	259.800.676		76%			
		Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	45.125.000	34.968.400	13	77%	Kampung	Keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kampung	Meningkatkan koordinasi serta pemilihan PPTK yang faham kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kampung
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	240.000.000	179.804.237	13	75%	Kampung	Keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan Monev Penyerapan Dana Kampung	Meningkatkan koordinasi serta pemilihan PPTK yang faham kegiatan Pemberdayaan Desa
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	57.000.000	45.028.039	13	79%	Kampung	Keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan Monitoring Keamanan dan	Meningkatkan koordinasi serta pemilihan PPTK

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Ketertiban di Tingkat Kecamatan Segah	yang faham kegiatan Trantib
JUMLAH			7.216.511.150	6.403.781.879	100	88,74	Persen		
13	KECAMATAN KELAY	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.856.340.063	4.614.705.932	100%	95.02%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.500.000	147.832.680	100%	98.88%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.500.000	26.286.680	4	95.59%	Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.796.000	4	98.64%	Dokumen		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.000.000	106.750.000	6	99.77%	Kegiatan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.884.079.863	2.679.437.748	100%	92.90%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.753.484.263	2.581.934.748	12	93.77%	Bulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	64.330.600	38.223.000	12	59.42%	Bulan	Sumberdaya manusia yang masih kurang	Meningkatkan koordinasi serta pemilihan PPTK yang faham kegiatan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan	66.265.000	59.280.000	12	89.46%	Bulan		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.800.000	39.896.000	100%	97.78%			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.800.000	39.896.000	6	97.78%	Orang		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.000.000	129.343.600	100%	99.50%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000	60.000.000	26	100.00%	Orang		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000	69.343.600	8	99.06%	Kali		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	571.366.200	549.498.880	100%	96.17%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.980.000	12	99.87%	Jenis		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.990.000	83.335.000	7	98.05%	Jenis		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.988.200	43.788.200	4	99.55%	Jenis		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.388.000	131.890.000	50	99.62%	Kali		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.000.000	15.477.000	5	96.73%	Jenis		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	-	2	0.00%	Jenis	tidak dilaksanakan dikarenakan tidak berlangganan surat kabar pada tahun 2024	lebih cermat dalam merencanakan anggaran di tahun berikutnya dan lebih cermat dalam pelaksanaan kegiatan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	72.000.000	71.400.000	48	99.17%	Kali		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.000.000	188.628.680	100	92.01%	Kali		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.594.000	161.562.000	100%	98.76%			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.562.000	29.530.000	1	96.59%	Unit		
		Pengadaan Mebeler	48.245.000	48.245.000	2	100%	Jenis		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.787.000	83.787.000	4	100%	Jenis		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.000.000	408.829.024	100%	98.04%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	12	100.00%	Bulan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.000.000	86.565.000	12	99.50%	Bulan		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	16	100.00%	Jenis		

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303.000.000	295.264.024	12	97.45%	Bulan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000.000	498.306.000	100%	99.66%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	315.000.000	313.806.000	12	99.62%	Unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	185.000.000	184.500.000	12	99.73%	Bulan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000	56.952.000	100%	94.92%			
	2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000	20.000.000	100%	100.00%			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000	20.000.000	2	100.00%	Kegiatan		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh	15.000.000	14.200.000	100%	94.67%			

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	14.200.000	2	94.67%	Kegiatan		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.000.000	22.752.000	100%	91.01%			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25.000.000	22.752.000	2	98.60%	Kegiatan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	986.000.000	933.012.776	100%	94.63%			
		3 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	956.000.000	903.502.776	100%	94.51%			
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	736.000.000	727.970.776	12	98.91%	Bulan		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	220.000.000	175.532.000	4	79.79%	Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Meningkatkan koordinasi dengan bagian terkait

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Kecamatan tidak terealisasi sepenuhnya di karenakan tidak memahami sistem SIPD yang ada sekarang ini	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30.000.000	29.510.000	100%	98.37%			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.000.000	29.510.000	1	98.37%	Kegiatan		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.000.000	29.935.000	100%	49.89%			
4		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.000.000	29.935.000	100%	49.89%			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.000.000	29.935.000	2	49.89%	Kegiatan	Karena permasalahan Covid-19 sudah berkurang sehingga anggaran yang digunakan hanya Makanan dan Minuman	lebih cermat dalam merencanakan anggaran ditahun berikutnya
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	227.750.000	226.266.000	100%	99.35%			
5									

NO.	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (.)	REALISASI (.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	227.750.000	226.266.000	100%	99.35%			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	192.750.000	192.340.000	1	99.79%	Kegiatan		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	35.000.000	33.926.000	2	96.93%	Kegiatan		
	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	330.000.000	278.650.800	100%	84.44%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	330.000.000	278.650.800	100%	84.44%			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.000.000	25.000.000	12	100.00%	Bulan		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	275.000.000	223.900.800	14	81.42%	Kegiatan		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000	29.750.000	14	99.17%	Kegiatan		
JUMLAH			6.520.090.063	6.139.522.508	100%	94,16	Persen		

3.2. KABIJAKAN STRATEGI YANG DITETAPKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Kebijakan Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Adapun strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau Tahun 2021–2026, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3.12
Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Berau 2021-2026

Sasaran	Strategi
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Upaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pendidikan, dilakukan melalui: 1. Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, penyediaan beasiswa dan biaya personil peserta didik yang tidak mampu, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa serta Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik yang lebih kondusif.
	2. Peningkatan kualitas dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan, baik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, maupun Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
	3. Pengembangan unsur muatan lokal (mulok) dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal dalam upaya membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Upaya meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan di Kab. Berau akan dilaksanakan melalui:
	1. Peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
	2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan;
	3. Penyediaan dan pendistribusian farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman; dan
	4. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
	5. Meningkatkan status akreditasi Puskesmas menjadi akreditasi Utama
Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau	6. Memberikan dukungan penuh terhadap penanganan pandemi covid 19
	Upaya menurunkan angka pengangguran di Kab. Berau akan dilakukan melalui:
	1. Peningkatan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal;
	2. Peningkatan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada upaya menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha;
	3. Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis, optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif;
	4. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.
	Upaya menurunkan angka kemiskinan akan dilakukan melalui upaya:

Sasaran	Strategi
Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi melalui pemberian bantuan tunai langsung khususnya bagi fakir miskin, yatim piatu & orang tua jompo yang terlantar termasuk warga terdampak COVID-19, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, dan bantuan perumahan;
	2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin berupa Pemberian Bantuan Stimulan (Sapronak, Saprodi, Alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju berbasis teknologi, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) bagi warga miskin dan warga terkena dampak COVID-19;
	3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain ada program pengembangan industri kreatif, pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan BUMKampung, dan pengembangan wirausahaan;
	4. Pendataan dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antar berbagai pihak yang berperan.
Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dilakukan melalui:
	1. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor IKM dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja IKM, memberikan insentif kepada pelaku usaha IKM;
	2. Melakukan akselerasi upaya pemulihan aktivitas usaha IKM dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha IKM dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha dan pekerja IKM dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor IKM, mengembangkan dan membangun kepercayaan pasar produk IKM;
Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>	3. Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan pelaku usaha IKM yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku usaha IKM, peningkatan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah besar, inkubasi usaha, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola usaha IKM.
	Upaya pengembangan pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i> akan dilakukan melalui:
	1. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja wisata, wisatawan dan masyarakat, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan budaya;
	2. Melakukan akselerasi upaya pemulihan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha pariwisata dan pekerja pariwisata dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan fiskal kepada pelaku

Sasaran	Strategi
	usaha dan pekerja di sektor pariwisata, pengembangan pasar pariwisata, serta membangun kepercayaan pasar di sektor pariwisata; 3. Menyiapkan sumberdaya pariwisata pasca pandemi dengan meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM pariwisata yang berdaya saing tinggi, memperkuat tata kelola pariwisata dan manajemen krisis, mengakselerasikan transformasi dan inovasi digital di sektor pariwisata, mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, mendorong pengembangan pasar dan destinasi, memperkuat pariwisata untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem industri dan investasi pariwisata. Upaya pengembangan sektor ekonomi kreatif akan dilakukan melalui: 1. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor ekonomi kreatif dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang terkait pengembangan ekonomi kreatif, pemberian bantuan likuiditas bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, pembeian insentif kepada pelaku usaha dan pekerja ekonomi kreatif, dan percepatan pemulihan "lingkungan" ekonomi kreatif; 2. Melakukan percepatan dan stimulus untuk pemulihan dampak pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, penyediaan akses permodalan dan insentif yang kompetitif, penguatan infrastruktur fisik dan digital ekonomi kreatif serta penciptaan, perluasan dan peningkatan kepercayaan pasar bagi karya, usaha dan individu ekonomi kreatif; 3. Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku ekonomi kreatif, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola ekonomi kreatif.
Meningkatnya produksi sektor primer	Upaya peningkatan produksi sektor primer akan dilakukan melalui: 1. Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terutama yang berkaitan dengan penyediaan, pengawasan dan pengendalian bibit unggul usaha pertanian dalam artian luas dan penyediaan, pengawasan dan pengendalian pakan ternak; 2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian dalam artian luas; 3. Memanfaatkan dan memperluas basis produksi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan hidup; 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian; 5. Pengembangan dan penguatan kemitraan yang ideal antar petani/pekebun dengan swasta, termasuk di dalamnya penyuluhan, penerapan <i>good agriculture practices</i> dan meningkatkan efisiensi rantai pasok masing-masing komoditas unggulan; 6. Peningkatan efisiensi rantai pasok masing-masing komoditas unggulan;

Sasaran	Strategi
	7. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna; 8. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dalam artian luas, terutama terkait dengan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), kebakaran, bencana alam dan non alam, serta penanganan pasca bencana pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan	Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan keragaman konsumsi pangan, akan dilakukan melalui upaya: 1. Meningkatkan diversifikasi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; 2. Mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani; 3. Melakukan penanganan secara cepat dan tepat terhadap daerah rawan pangan; dan 4. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam upaya menciptakan keamanan pangan.
Meningkatnya Kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	Upaya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar akan dilakukan melalui: 1. Pembangunan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan; 2. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi wilayah; 3. Pengembangan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif; 4. Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah; 5. Peningkatan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; 6. Peningkatan pelayanan jaringan air minum; 7. Peningkatan penanganan sampah perkotaan dan perdesaan terpadu; 8. Pengembangan sistem jaringan air limbah dan drainase; 9. Pengembangan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana; 10. Mengurangi luasan lahan kumuh; 11. Mewujudkan kolaborasi penanganan kawasan kumuh dari berbagai stakeholder; 12. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, dan 13. Memaksimalkan tugas dan fungsi POKJA PKP dan Forum PKP Kabupaten Berau dalam mendukung kebijakan pengurangan luasan Kawasan kumuh.
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Upaya peningkatan konektivitas antar wilayah akan dilakukan melalui: 1. Pembangunan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan; 2. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi wilayah; dan 3. Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah.
Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung	Upaya meningkatkan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan dilakukan melalui: 1. Pengawasan dan pengendalian, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas berbagai kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup;

Sasaran	Strategi
lingkungan hidup	2. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM serta sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keanekaragaman hayati, meliputi pengembangan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
	3. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
	4. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
	5. Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
	6. Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
	7. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
	8. Optimalisasi upaya pengelolaan persampahan, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pihak swasta.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah akan dilakukan melalui:
	1. Upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
	2. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat;
	3. Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan secara umum.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	Upaya meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah akan dilakukan melalui:
	1. Peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum; dan
	2. Peningkatan kinerja layanan yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel terutama dengan pemanfaatan secara tepat penggunaan Teknologi Informasi.

Sumber : RPJMD Berau, 2024

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi

permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh OPD yang terlibat di dalamnya.

Mengacu pada strategi pembangunan di atas, maka dapat dirumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Pada sisi lain, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Berau juga harus sinergis dan selaras dengan 5 (lima) sasaran prioritas nasional tahun 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam gambar 3.1 di bawah ini:

GAMBAR 3.1

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026



Sumber : RPJMD Berau, 2024

Arah kebijakan di atas merupakan target indikatif menuju tercapainya visi pembangunan RPJMD Kabupaten Berau di akhir periode perencanaan tahun 2026. Secara teknokratik, arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain itu, arah kebijakan tahunan ini juga disesuaikan dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Arah kebijakan Kabupaten Berau dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Tahapan Resistensi/Bertahan. Tahapan ini berada pada tahun pertama (2021) periode pembangunan. Pembangunan pada tahapan ini akan lebih difokuskan pada upaya untuk bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Karena itu, maka strategi pembangunan akan lebih ditekankan pada upaya untuk:
 - a. Pemulihan terhadap kondisi masyarakat yang terdampak langsung secara ekonomi dan sosial akibat pandemi (kelompok rentan (di bawah garis kemiskinan), pekerja yang kena PHK, pelaku usaha yang terpaksa menutup usaha mereka karena permintaan produk menurun terutama pada sektor pariwisata, perdagangan, manufaktur dan pertanian;
 - b. Mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19: pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, APD, masker, obat-obatan dan vaksin (angka kesakitan dan penyebaran penyakit menular), mengurangi tingkat kematian penduduk yang terkena COVID-19 (angka kematian);
 - c. Menjaga daya beli masyarakat dengan cara mempercepat belanja Pemda dan dana desa, BLT, subsidi, relaksasi pajak;
 - d. Mendorong aktivitas produksi;
 - e. Mendorong dan mempercepat belanja padat karya untuk kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti belanja infrastruktur;
 - f. Ketersediaan pangan; serta
 - g. Pemulihan kepercayaan masyarakat.

2. Tahapan Pemulihan (*Recovery*). Tahapan ini berada pada periode 2023-2024. Pada tahapan ini, pembangunan akan lebih difokuskan pada upaya untuk bertahan dari dampak pandemi. Sejalan dengan hal tersebut, maka strategi pembangunan akan lebih ditekankan pada upaya untuk:
 - a. Memberikan stimulus ekonomi dan investasi guna mempercepat pulihnya sektor pariwisata, UMKM, pertanian, perdagangan, investasi dan penguatan sistem ketahanan pangan;
 - b. Mempercepat penajaman program kredit usaha, termasuk perluasan sasaran;
 - c. Reformasi sistem perlindungan sosial;
 - d. Reformasi sistem ketahanan bencana;
 - e. Reformasi sistem kesehatan nasional (penguatan germas, *health security* dan sumber daya).
3. Tahapan Percepatan/Akeselerasi. Tahapan ini berada pada periode 2024-2026 yang merupakan periode akhir dari RPJMD 2021-2026. Pada tahapan ini, pembangunan akan lebih difokuskan pada upaya:
 - a. Percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat (*no one left behind*).
 - b. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Pola afirmatif diarahkan untuk perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana

perumahan, air bersih dan sanitasi, listrik, peningkatan konektivitas dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital, juga perluasan kerja sama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan.

- c. Pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan.

Arah kebijakan yang sudah ditetapkan setiap tahunnya, diikuti dengan fokus pembangunan daerah supaya pencapaian visi Kepala Daerah di akhir periode bisa terwujud. Adapun fokus pembangunan dari masing-masing arah kebijakan di atas adalah sebagai berikut:

TABEL 3.13

Fokus Pembangunan Kabupaten Berau 2022-2026

ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN					
ERA RESISTENSI/BERTAHAHAN	ERA PEMULIHAN (RECOVERY)		ERA PERCEPATAN/AKSELERASI		
2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Pengendalian pandemi COVID-19 sebagai langkah awal pemulihan ekonomi daerah, dengan fokus pembangunan berupa:</i> 1. Mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terutama pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, APD, masker, obat2an dan vaksin serta sosialisasi protokol kesehatan; 2. Perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dan rentan berupa bantuan langsung tunai dan non tunai; 3. Subsidi beban biaya secara langsung dalam kendali pemerintah (pusat dan	<i>Pengembangan sektor unggulan daerah (UMKM, pariwisata dan pertanian) dan peningkatan daya saing investasi dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah, dengan fokus pembangunan berupa:</i> 1. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; 2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan secara merata 3. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas	<i>Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menguasai iptek dan imtak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal, dengan fokus pembangunan berupa:</i> 1. Penyediaan beasiswa dan biaya personil peserta didik yang tidak mampu; 2. Meningkatkan kualitas dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan baik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, maupun Pendidikan Nonformal	<i>Pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, dengan fokus pembangunan berupa</i> 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, baik formal maupun non formal; 2. Pemerataan mutu pendidikan	<i>Penguatan tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pembangunan berupa:</i> 1. Upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.	<i>Mewujudkan visi Kabupaten Berau yaitu menjadikan Berau maju dan sejahtera dengan sumber daya manusia yang handal untuk transformasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan fokus pembangunan:</i> 1. Pemantapan kualitas SDM di semua bidang; 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar 3. Pemantapan Konektivitas telekomunikasi;

ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN					
ERA RESISTENSI/BERTAHAN	ERA PEMULIHAN (RECOVERY)		ERA PERCEPATAN/AKSELERASI		
2021	2022	2023	2024	2025	2026
daerah) bagi masyarakat yang terdampak; 4. Melakukan relaksasi pajak dan retribusi daerah; 5. Memastikan dan mengawasi kecukupan dan kelancaran distribusi sembako; 6. Mendukung aktivitas dunia usaha atau aktivitas masyarakat yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan untuk menangani COVID-19; 7. Mendorong dan mempercepat belanja pemerintah pada kegiatan padat karya untuk kegiatan produktif dan kegiatan yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti belanja infrastruktur;	pelayanan pendidikan seluruh lapisan masyarakat; 4. Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pelayanan pendidikan; 5. Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); 6. Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri kerakyatan dan usaha kecil menengah; 7. Pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata daerah; 8. Perwujudan	/Kesetaraan; 3. Mengembangkan unsur muatan lokal (mulok) dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; 4. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh daerah Kab. Berau; 5. Melakukan upaya pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha pariwisata dan pekerja pariwisata dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan	sampai ke daerah pelosok; 3. Pembangunan rumah sakit tipe B; 4. Penyusunan jaringan infrastruktur yang terintegrasi satu sama lain, khususnya yang menghubungkan antar kampung/kelurahan/kecamatan dengan Ibukota Kabupaten; 5. Pembangunan prasarana dan sarana sosial yang merata dan	2. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat 3. Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan secara umum; 4. Peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan	4. Memperkuat pasar-pasar dalam memasarkan hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan industri rumah tangga; 5. Menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat; 6. Meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan lingkungan; 7. Mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani; 8. Melakukan pengawasan dan

ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN					
ERA RESISTENSI/BERTAHAN	ERA PEMULIHAN (RECOVERY)		ERA PERCEPATAN/AKSELERASI		
2021	2022	2023	2024	2025	2026
8. Mengefektifkan APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan penanganan dampak COVID-19.	kemitraan antara pemerintah dan swasta; 9. Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya; 10. Memperkuat pasar-pasar dalam memasarkan hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM dan ekraf 11. Menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat; 12. Peningkatan sarana prasarana utilitas daerah, khususnya kelistrikan dan air minum; 13. Peningkatan pemerataan dan kualitas jaringan	stimulus fiskal dan fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata, pengembangan pasar pariwisata, serta membangun kepercayaan pasar di sektor pariwisata; 6. Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan; 7. Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat; 8. Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian, pangan, perkebunan rakyat dan perikanan; 9. Peningkatan infrastruktur pelayanan ekowisata; 10. Peningkatan fungsi	berkeadilan antara daerah perkotaan dan perdesaan 6. Pembangunan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan; 7. Pengembangan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif; 8. Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah; 9. Peningkatan sistem	pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum 5. Peningkatan kinerja layanan yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel terutama dengan pemanfaatan secara tepat penggunaan Teknologi Informasi 6. Memaksimalkan fungsi balai	pembinaan dalam upaya menciptakan keamanan pangan; 9. Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan pelaku usaha IKM yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku usaha IKM, peningkatan kemitraan antara usaha kecil dan

ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN					
ERA RESISTENSI/BERTAHAN	ERA PEMULIHAN (RECOVERY)		ERA PERCEPATAN/AKSELERASI		
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	jalan Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup; 14. Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh Perangkat Daerah; 15. Peningkatan kualitas kinerja SDM aparatur dari sisi kompetensi dan penempatan kerja 16. Penggunaan sistem informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik 17. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor IKM dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, pelaku	jaringan irigasi, pengembangan listrik dan jaringan telekomunikasi serta jalan produksi; 11. Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan hasil hutan non kayu; 12. Memberikan pelatihan secara intens kepada para pelaku usaha dalam memberikan branding/nilai tambah terhadap produk yang dijual. 13. Menyediakan "wadah" pasar, baik offline maupun online guna memasarkan produk kearifan lokal masyarakat; 14. Mempermudah	jaringan prasarana sumberdaya air; 10. Peningkatan pelayanan jaringan air minum; 11. Peningkatan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu; 12. Pengembangan sistem jaringan air limbah dan drainase; 13. Pengembangan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana;	pelatihan kerja (BLK) dalam menjaring tenaga kerja yang profesional dan siap bekerja dengan keahlian yang dibutuhkan di dunia usaha. 7. Mempermudah proses perizinan dunia usaha dan industri	usaha menengah besar, inkubasi usaha, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola usaha IKM; 10. Menyiapkan sumberdaya pariwisata pasca pandemi dengan meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM pariwisata yang berdaya saing tinggi, memperkuat tata kelola pariwisata dan manajemen krisis, mengakselerasikan transformasi dan inovasi digital di sektor pariwisata,

ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN					
ERA RESISTENSI/BERTAHAN	ERA PEMULIHAN (RECOVERY)		ERA PERCEPATAN/AKSELERASI		
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	usaha, dan pekerja IKM, memberikan insentif kepada pelaku usaha IKM; 18. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja wisata, wisatawan dan masyarakat, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan budaya; 19. Mengelola krisis	proses perizinan dan perbantuan modal usaha bagi pelaku usaha; 15. Modernisasi Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi dalam mempermudah pekerjaan; 16. Penguatan sentra-sentra industri/manufaktur di setiap kampung/kecamatan sebagai basis ekonomi rakyat; 17. Peningkatan budaya inovatif yang berorientasi IPTEKS sehingga masyarakat Berau mampu bersaing di era global.	14. Peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum; 15. Peningkatan kinerja layanan yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel terutama dengan pemanfaatan secara tepat penggunaan		mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, mendorong pengembangan pasar dan destinasi, memperkuat pariwisata untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem industri dan investasi pariwisata.

ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN					
ERA RESISTENSI/BERTAHAN	ERA PEMULIHAN (RECOVERY)		ERA PERCEPATAN/AKSELERASI		
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor ekonomi kreatif dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang terkait pengembangan ekonomi kreatif, pemberian bantuan likuiditas bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, pemberian insentif kepada pelaku usaha dan pekerja ekonomi kreatif, dan percepatan pemulihan "lingkungan" ekonomi kreatif; 20. Peningkatan kualitas pelayanan		Teknologi Informasi; 16. Penyesuaian pembangunan infrastruktur sesuai RTRW Berau. 17. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh khususnya perkotaan. 18. Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar air minum , sanitasi masyarakat di		

ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN					
ERA RESISTENSI/BERTAHAN	ERA PEMULIHAN (RECOVERY)		ERA PERCEPATAN/AKSELERASI		
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	perhubungan guna memastikan kelancaran distribusi orang dan barang; 21. Memaksimalkan fungsi pasar sebagai sentra perdagangan produk unggulan daerah. 22. Identifikasi produk potensial ekspor minimal 1 produk yang dibarengi dengan pendampingan		Kawasan kumuh sesuai standard kualitas yang berlaku. 19. Peningkatan Peran dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan Pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh.		

Sumber : RPJMD Berau, 20

1. Prioritas Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dan PERDA Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 7 Februari 2020 tentang perubahan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, telah memuat Program pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh OPD untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Berau mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2021 serta telah dilakukan revisi dan disesuaikan dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.

Program pembangunan daerah tersebut juga secara langsung dimaksudkan untuk mencapai Renstra OPD yang antara lain sebagai fungsi pelayanan OPD kepada masyarakat. Program-program ini dalam perumusannya dijabarkan langsung dari Renstra OPD dengan tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Berau. Dengan memperhatikan kaidah tersebut dan berdasarkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan diatas, maka Program pembangunan daerah Kabupaten Berau sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- **Program Prioritas I: Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar**

Kebijakan belanja daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan seperti:

- a) Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b) Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c) Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- d) Pemenuhan belanja pegawai atas belanja gaji dan tunjangan dan rencana pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Berau.

- **Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah**

Program prioritas pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari visi politik kepala daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Kabupaten Berau. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi program prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan janji politik pada saat kampanye.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau periode 2021-2026, Hj. Sri Juniarsih, M.Pd. dan H. Gamalis, S.E. memiliki 18 janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Berau. 18 janji kampanye tersebut antara lain:

- 1) Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP;
- 2) Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT;
- 3) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis;
- 4) Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu;
- 5) Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
- 6) Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung;
- 7) Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota;

- 8) Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu;
- 9) Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD);
- 10) Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung;
- 11) Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat;
- 12) Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19;
- 13) Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain-lain);
- 14) Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) Serta Mewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi;
- 15) Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata;
- 16) Menyediakan Fasilitas Pembinaan, Pelatihan serta Kredit Lunak Kepada UMKM;
- 17) Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih & Berkualitas Melalui SDM Yang Profesional Berbasis Digital Teknologi;
- 18) Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Program prioritas pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian program prioritas II meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.14 dan Program Perangkat Daerah yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.14 sebagai berikut;

TABEL 3.14

Integrasi Janji Kampanye ke dalam Program Perangkat Daerah

No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggara
1	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
2	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
3	Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Distanah
4	Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
5	Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
		Program Hubungan Industrial	
6	Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
7	Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Disperkim
8	Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
9	Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD)	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
10	Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		Program Tentang Kelistrikan Masuk dalam Program Urusan Provinsi	Distamben Prop

No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggara
		(Program Pengelolaan Ketenagalistrikan)	
11	Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK
12	Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
13	Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain-lain)	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
14	Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) Serta Mewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
15	Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
16	Menyediakan Fasilitas Pembinaan, Pelatihan serta Kredit Lunak Kepada UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskoperindag
17	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih & Berkualitas Melalui SDM Yang Profesional Berbasis Digital Teknologi	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Perangkat Daerah
		Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
18	Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Program Pengembangan Perumahan	Disperkim
		Program Kawasan Pemukiman	
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	

Sumber : RPJMD Berau, 2023

TABEL 3.15

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

KODE				MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur														
Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing				Indek Pembangunan Manusia	74,71	74,99	75,1	75,5	75,89	76,29	76,69	76,69		
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan				Harapan Lama Sekolah	13,32	13,53	14,1	14,29	14,47	14,65	14,83	14,83		
				Rata-rata Lama Sekolah	9,52	9,69	9,7	9,84	9,98	10,12	10,26	10,26		
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	75,14	76,17	77,22	78,28	79,35	80,44	81,54	81,54	Dinas Pendidikan	
				Angka partisipasi kasar SD/MI	104,29	105,33	106,39	107,45	108,52	109,61	110,71	110,71		
				Angka partisipasi kasar SMP/MTS	95,82	96,78	97,75	98,72	99,71	100	100	100		
				Angka Partisipasi Murni SD/MI	95,79	96,18	96,58	96,97	97,37	97,77	98,17	98,17		
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTS	76,53	78,37	80,25	82,18	84,15	86,17	88,24	88,24		
				Angka partisipasi sekolah SD/MI	100,34	101,34	102,36	103,38	104,41	105,46	106,51	106,51		
				Angka partisipasi sekolah SMP/MTS	91,85	92,77	93,7	94,63	95,58	96,54	97,5	97,5		
				Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0		
				Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0	0		
				Angka Kelulusan	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100		
				Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	100		
				Angka Melanjutkan Sekolah SD ke SMP	105,59	100	100	100	100	100	100	100		
				Angka melek huruf	99,42	99,46	99,49	99,53	99,56	99,6	99,64	99,64		
				Sekolah dalam kondisi bangunan baik	65	68,25	71,66	75,25	79,01	82,96	87,11	87,11		
1	1	4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
				PAUD	33,13	33,46	33,8	34,13	34,48	34,82	35,17	35,17		
				SD	76,36	77,12	77,89	78,67	79,46	80,26	81,06	81,06		
				SMP	94,38	95,32	96,28	97,24	98,21	99,19	100	100		
				Rasio murid/guru sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Rasio murid/guru SD Negeri	15	15	15	15	15	15	15	15		
				Rasio murid/guru SD Swasta	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19		

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Rasio murid/guru SMP Negeri	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	
				Rasio murid/guru SMP Swasta	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan				Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,06	72,17	72,28	72,38	72,49	72,6	72,71	72,71	
				Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	9,30%	19,70 %	29,60 %	44,90%	66,60%	99,90 %	100%	100%	
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi kurang	7,3	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	22	22	20	19	18	18	18	18	
				Jumlah kematian ibu melahirkan	8	10	10	9	8	8	7	7	
				Angka kematian anak balita	15	17	16	15	15	15	15		
				Persentase desa/ kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) /ODF	30	60	80	90	95	98	100	100	
				Persentase Pemenuhan Kualitas Kesehatan Lingkungan	60	67	70	75	80	83	85	85	
				Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah < 24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan Desa/ kelurahan (%)	59	110	110	110	110	110	110	85	
				Universal Child Immunization (UCI)									
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	94	95	95	95	95	95	95	95	
				presentasi unit kerja melaksanakan upaya kesehatan terhadap PTM sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Persentase Imunisasi Dasar lengkap	87,9	93,6	94,1	94,6	95	95	95	95	
				Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	79	85	87	90	95	100	100	100	
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0,84	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,85	0,85	
				Angka kejadian Malaria	0	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
				Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan balita	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	79	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	80	85	90	95	100	100	100	100	
				Jumlah Tenaga Dokter Umum dan Dokter Gigi	103	110	120	125	135	140	145		
				Jumlah Tenaga Bidan	303	310	320	325	330	335	340		
				Jumlah Tenaga Perawat	584	600	615	630	645	660	675		

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
				persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan	65,65	70	73	76	80	82	85	85	
				Persentase IRTP Yang dilakukan Pengawasan Memenuhi Syarat	57,14	60	65	70	75	80	85	85	
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan	59	83,8	87,9	91,6	95	95	95	95	Dinas Kesehatan
				Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga) (%)	3,8	35	45	50	55	55	55	55	
				Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah ditanggulangi kurang dari 24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD dr. Abdul Rivai
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan dan Mutu Tenaga Teknis Kesehatan Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD dr. Abdul Rivai
2	14	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) 1	19 per 1000 kelahiran	18 per 1000 kelahiran	17 per 1000 kelahiran	16 per 1000 kelahiran	15 per 1000 kelahiran	14 per 1000 kelahiran	13 per 1000 kelahiran	13 per 1000 kelahiran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE				MISI/TUJUAN/SASARA N/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal														
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing				Laju Pertumbuhan ekonomi	-3,35	1,29	2,29	3,79	4,29	4,79	5,29	5,29		
Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau				Tingkat Pengangguran terbuka	5,08	4,96	4,84	4,73	4,62	4,51	4,41	4,41		
2	7	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase Angkatan Kerja Lokal yang berkompeten	70%	70%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang ditempatkan	20%	20%	25%	25%	30%	30%	35%	35%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	7	5	Program Hubungan Industrial	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Menurunnya Angka Kemiskinan				Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	5,19	5,13	5,07	5,01	4,95	4,9	4,84	4,84		
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	
				Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				pelayanan kesehatan sosial										
1	6	5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
2	13	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	TAD	50	80	100	120	150	160	160	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
				Persentase LPM Berprestasi	TAD	100	100	100	100	100	100	100	
				Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Persentase Posyandu aktif	26,4	26,4	100	100	100	100	100	100	
				Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	TAD	10	15	20	25	30	35	35	
4	1	2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan
				Persentase Meningkatnya kualitas dan pendalaman agama ,mental Spritual dan capaian kinerja sosial serta masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesra
				Prosentase pelayanan bidang hukum dan kerjasama yang terfasilitasi & terkoordinir.	-	87%	90%	92%	95%	97%	98%	98%	Bagian Hukum dan Perundangundagan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan
Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan				PDRB Per Kapita (Juta Rp)	148,9	151,45	154,04	156,67	159,35	162,08	164,85	164,85	
Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)				Presentase Usaha mikro dan kecil	24%	0%	6%	3%	2%	2%	3%	40%	
2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Aktif	45%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	70%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
2	17	8	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM Naik Kelas	3000 UMKM	5 UKM	5 UKM	10 UKM	15 UKM	20 UKM	25 UKM	25 UKM	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah SKA yang diterbitkan	250 SKA	100 SKA	120 SKA	150 SKA	180 SKA	200 SKA	220 SKA	1220 SKA	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dikelola	2 Pasar	2 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	4 Pasar	4 Pasar	4 Pasar	4 pasar	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	0,20%	0	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	1%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		0,97	0,98	0,99	1	-	-	1,03	
3	26	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan	127.396 Orang	177.418 Orang	195.159 Orang	214.674 Orang	236.141 Orang	259.755 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Lama kunjungan Wisata	2 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	
3	26	3	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dipasarkan	5 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
3	26	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	60 Orang	90 Orang	120 Orang	150 Orang	150 Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 Event	5 Event	6 Event	7 Event	7 Event	7 Event	7 Event	7 Event	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Menigkatnya Produksi Sektor Primer				Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,64	11,71	11,79	11,86	11,94	12,01	12,09	12,09	
3	27	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	Ton	2.235.000	2.250.000	2.317.500	2.385.000	2.475.000	2.520.000	2.520.000	Dinas Perkebunan
				Kelapa Dalam	3.483	4.071	5.571	6.871	8.371	9.471	9.980	9.980	
				Kakao	788	900	1.200	1.400	1.700	1.950	2.100	2.100	
				Karet	82	185	205	255	300	400	515	515	
				Lada	827	919	1.019	1.219	1.340	1.455	1.500	1.500	
3	27	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Kebun yang dikembangkan		50	60	100	100	100	100	100	Dinas Perkebunan
3	27	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas ANKT di lokasi Usaha Perkebunan yang dikelola/ dibina (Hektar)	3.000	5000	6000	7500	10000	12500	15000	15000	Dinas Perkebunan
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Penerapan Ijin Usaha yang dibina dan diawasi	15	15	15	20	20	25	25	130	Dinas Perkebunan
3	27	7	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani yang mendapatkan pelatihan /pembinaan	30 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	60 Kelompok Tani	Dinas Perkebunan

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
3	27	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)	3	3,07	3,15	3,26	3,37	3,49	3,62	3,62	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Produktivitas Jagung	5	5,55	5,65	5,75	5,85	5,95	6	6	
				Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)	4	3,62	3,77	3,9	4,02	4,17	4,25	4,25	
				Produksi Daging Sapi	470	472,35	474,71	477,09	479,47	481,87	484,28	484,28	
				Produksi Telur Ayam Ras	1.753	1805,59	1859,76	1915,55	1973,02	2032,21	2093,17	2093,17	
3	27	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	230	265	300	400	450	550	550	550	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	312	500	2535	3305	4000	4700	5000	5000	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi		33	33	40	42	44	45	45	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	7	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	83	84	85	86	87	88	89	89	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	25	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan Tangkap	20.448,98 ton	23.399,74 ton	24.101,3 ton	24.824,78 ton	25569,53	26336,61	27126,71	27126,71	Dinas Perikanan
3	25	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan Budidaya		2.379.90 ton	2.403,7 ton	2.427,74 ton	2.452.01 ton	2.476,53 ton	2.501.30 ton	2,501.30 ton	Dinas Perikanan
3	25	6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan			4,486.31 ton	4,620.90 ton	4,759.53 ton	4,902.32 ton	5,049.39 ton	5,049.39 ton	Dinas Perikanan

KODE				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan					Score Pola Pangan Harapan	78,05	78,05	80	82	83	84,1	85,1	85,1	
2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		Jumlah Ketersediaan pangan utama (beras)	26.694 ton	20.000 ton	20.500 ton	21.000 ton	21.500 ton	22.000 ton	22.500 ton	22.500 ton	Dinas Pangan
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,05	78,05	80	82	83	84,1	86	86	Dinas Pangan
					Persentase Penguatan cadangan pangan	50%	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	40, 15 %	45%	50%	60%	60%	60%	60%	60%	Dinas Pangan
Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan														
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah					Indeks Gini	0,3	0,3	0,3	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar					Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	68,5	
					Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	9,70%	10,20 %	10,70 %	11,20%	11,70%	12,70 %	13,70%	13,70%	
					Capaian Akses Air Minum Layak	73,28	79	83	86	90	93	97	97	
					Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19,00%	7,00%	13,00 %	21,00%	23,00%	25,00 %	30,00%	30,00%	
					Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,54	99,59	99,64	99,69	99,74	99,84	99,94	99,94	

KODE				MISI/TUJUAN/SASARA N/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Rasio rumah layak huni	0,195	0,195	0,196	0,197	0,198	0,199	0,2	0,2	
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19,10%	7,19%	13,09 %	21,25%	22,97%	24,95 %	29,76%	32,61 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	73%	79%	83%	86%	90%	93%	97%	97%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	71%	77%	80%	83%	87%	89%	94%	94%		
1	3	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	40,00%	15,00 %	19,00 %	37,00%	38,00%	39,00 %	40,00%	40,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Infrastruktur Bangunan Gedung yang terbangun dan ditingkatkan	66 unit	71	78	85	92	99	106	106	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	10	Program Penyelenggaraa n Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	66	66	66,5	67	67,5	68	68,5	68,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	0,195	0,195	0,196	0,197	0,198	0,199	0,2	0,2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	79%	85%	88%	91 %	94%	97%	100%	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase lingkungan permukiman kumuh	14,00%	14,00 %	11,00 %	8,00%	5,00%	3,00%	0,00%	0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	46,4	52	61,3	71	80,7	90,3	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

KODE			MISI/TUJUAN/SASARA N/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
			Utilitas Umum (PSU)										
2	10	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Kasus ganti rugi dan santunan Tanah			100%	100%	100%	100%	100%	100	Dinas Pertanahan
Meningkatnya konektivitas antar wilayah			Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	39	50	55	60	65	70	75	75		
			Indeks SPBE	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6		
2	15	2	Program Penyelenggara an Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas antar wilayah di Kabupaten	39	50	55	60	65	70	75	75	Dinas Perhubungan
2	15	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun	57	2	2	2	2	2	2	12	Dinas Perhubungan
2	16	2	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE		1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup			Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca	416.564	403.90 3	391.46 6	379.179	366.998	354.90 6	342.901	342.901		
Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup			Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	56,19	56,29	56,39	56,49	56,59	56,69	56,79	56,79		
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	85,87	85,97	86,07	86,17	86,27	86,37	86,47	86,47		
			Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	89,78	89,79	89,79	89,8	89,8	89,81	89,81	89,81		
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	2,38	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah B3 dan Limbah B3 yang tertangani	2,38	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Terkelolanya sampah	97,58	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Misi 4: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel													
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN				Indeks Reformasi Birokrasi		B	B	A	A	A	A	A	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
				Nilai/Predikat AKIP	B (63,50)	B (64)	B (65)	B (67)	B (68)	B (70)	BB (72)	BB (72)	
				Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
				Persentase SILPA terhadap APBD	25,93	21,04	20	20	19	19	18	18	
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Aset yang terdata dengan baik	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Presentase Aset yang Tercatat dengan baik	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	
				Presentase Aset yang sudah dinilai	65%	70%	75%	80%	85%	95%	100%	100%	
				Presentase Aset yang termanfaatkan	65%	70%	75%	80%	85%	95%	100%	100%	
				Presentase penghapusan aset	65%	70%	75%	80%	85%	95%	100%	100%	
5	2	4	Program Pengelolaan	Kontribusi PAD dalam APBD	10.01 %	10,50 %	10,50 %	11%	11%	11,50 %	12%	12%	

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
			Pendapatan Daerah	Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Keuangan Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase konsistensi program RPJMD dan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
6	1	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	80%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	Inspektorat
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Presentase Cakupan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	Inspektorat
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Prosentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	90%	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	1	4	Program Administrasi Umum	Persentase Tertatanya Administrasi Umum		80%							Sekretariat daerah
2	13	2	Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	5000%	50	65	70	75	80	90	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah				Indek Kepuasan Masyarakat	A (89,36)	A (89,66)	A (90,12)	A (92,16)	A (94,06)	A (96,26)	A (98)	A (98)	
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN		10	12	15	18	20	25	25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	4	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM			993 Orang	993 Orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	5979 Orang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan									Kecamatan
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan
2	13	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa mandiri	800%	9	10	11	12	13	14	14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
				Persentase desa maju	3100%	41	50	54	58	62	71	71	
				Persentase desa berkembang	600%	49	40	35	30	25	15	15	
				Persentase desa tertinggal	100%	1	0	0	0	0	0	0	

Sumber : RPJMD Berau, 2024

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Berau, pada tanggal 29 April 2023, merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran dan pelaksanaan amanat dari Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ Bupati Berau Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun ke-4 (empat) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau terkait Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Berau Tahun 2023. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati Berau Tahun Anggaran 2023 Terlampir sebagai berikut.

Berkaitan dengan Rekomendasi Ketua DPRD, bersama ini dijabarkan dan disampaikan Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Berau Terhadap Rekomendasi Ketua DPRD Nomor 02 Tahun 2024 sebagai berikut :

3.3.1. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT,

1. Struktur Keuangan Daerah

A. Sisi Sumber-Sumber Pendapatan

Berdasarkan tabel 2.1 di halaman 87, LKPJ Bupati Berau 2023, mengenai Kinerja Keuangan Daerah (Realisasi Pendapatan Daerah) Kabupaten Berau

Tahun	2021	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	204.910.181.475,26	209.120.844.508,96	287.111.921.000,00
Pendapatan Transfer	1.207.962.445.204,00	1.404.807.100.747,00	4.406.411.170.400,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Lain	43.249.000.000,00	0,00	7.200.000.000,00

Sumber : RAPJMD Berau 2023

Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ada beberapa pertanyaan diperjelas kembali sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 sebesar Rp.287.131.921.005,02, Pendapatan Transfer Rp.4.406.411.710.669,00, sedangkan pendapatan lain-lain yang sah Rp.7.360.543.200,00, Selanjutnya didalam APBD Perubahan tahun 2023 adalah sebesar Rp.5.177.879.482.000, tapi realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp.4.608.337.316.737,56 atau mencapai 89%.
- Dilihat dari kinerja keuangan daerah kabupaten Berau tentang pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar Rp.299.529.844.588,90 turun di tahun 2023 sebesar Rp.287.131.921.005,02
- Terkait dengan uraian lain-lain pendapatan yang sah di tahun 2021 sebesar Rp.43.269.084.000,00 sementara tahun 2022 Rp. 0 dan 2023 hanya sebesar Rp.7.360.543.200,00
- Terkait dengan Pendapatan Hasil Daerah (PAD) justru terjadi kenaikan pada saat lepas Pandemi terjadi kenaikan dan setelah pandemi tahun 2023 mengalami penurunan.
- Berdasarkan dokumen LKPJ Bupati Berau tahun 2023 Bab II tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di halaman 83 sub bab 2.1 Arah kebijakan Pengelolaan APBD poin g) Optimalisasi pengelolaan aset daerah/BUMD dan Dinas atau lembaga penghasil agar makin mampu menampilkan kinerja yang efisien, transparan serta mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi pendapatan daerah halaman 84, terkait dengan point g tersebut pertanyaan kita adalah seberapa besar potensi Sumber-sumber PAD yang berasal dari Perusda (BUMD) selama ini mulai dari tahun 2021 s/d 2023 kami di DPRD belum pernah mendapat gambaran secara detail atas kinerja masing-masing Perusda dan ada berapa sumber PAD yang potensial yang berasal dari atau BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Berau. Dengan melihat gambaran tersebut di atas maka sangat dimungkinkan kami dari DPRD Kabupaten Berau dalam waktu dekat akan mendorong untuk dapat dibentuk pansus evaluasi kinerja Perusda atau BUMD Kabupaten Berau

secara keseluruhan.

- Sumber pajak apa saja yang masih potensial untuk di gali dan di kembangkan oleh pemerintah Kabupaten Berau
- Apakah selama ini pemerintah Kabupaten Berau Melalui Bapenda, sudah mempunyai peta potensi sumber-sumber PAD yang ada di Kabupaten Berau minimal 5 sampai 10 tahun kedepan
- Dana perimbangan terlalu besar sehingga tingkat ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat terlalu besar hampir 93,32% atau kemandirian kecil sekali, kenapa bisa seperti ini struktur kabupaten Berau karena ekonomi masih berbasis ekonomi sumber daya alam, karena tingkat transfer dana dari pusat ke daerah tinggi (selalu dalam jumlah besar maka sesungguhnya akan berbanding lurus dengan semakin meningkat eksplorasi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Berau yang biasanya juga akan diikuti dengan peningkatan kerusakan lingkungan atau ekologi dalam bentuk banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, susah mendapatkan air bersih jalanan rusak dan lain-lain
- Kondisi ini tentu saja tidak aman bagi kesehatan serta kemandirian keuangan di Kabupaten Berau karena ketika suatu saat dana transfer pusat tersebut menurun seiring dengan menurunnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Berau.
- Dan kondisi tersebut di atas tentu saja tidak bisa dipertahankan dan dijadikan fundamental ekonomi Kabupaten Berau secara jangka panjang, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Berau harus segera memikirkan cara melakukan transformasi ekonomi sebelum sumber daya alam yang kita miliki habis, tentu tidak mudah merancang transformasi ekonomi pasca sumber daya alam sebaiknya pemerintah Kabupaten Berau harus segera mengambil langkah-langkah yang lebih kongkrit dan segera mungkin untuk bisa menyusun grand desain atau cetak biru untuk mempersiapkan transformasi ekonomi yang kita maksudnya menggeser ekonomi sumber daya alam ke ekonomi pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi pertanian dalam arti luas, seperti ekonomi kelautan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan dan lain-lain. Jika pemerintah

gagal melakukan transformasi ekonomi maka kita akan meninggalkan situasi dan kondisi yang teramat buruk bagi generasi anak cucu kita kedepan karena sumber daya alam tidak dapat di perbaharui.

- Jangan sampai kita meninggalkan pekerjaan rumah untuk cuci piring (banjir,tanah longsor, kubangan tambang, kesulitan air bersih, udara kotor, jalanan rusak dan lain-lain) setelah selesai pesta ekonomi Sumber daya alam yang dilakukan oleh para kapitalis dan para oligarki.

Tindak Lanjut :

Setuju, ditindaklanjuti dengan peningkatan kinerja OPD yang kurang efektif bahkan yang kurang efektif. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau segera melakukan evaluasi kinerja BUMD untuk memastikan transparansi serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, optimalisasi sumber-sumber pajak yang belum tergarap secara maksimal menjadi prioritas, disertai dengan penyusunan peta potensi PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pemerintah juga akan menyusun strategi transformasi ekonomi yang berfokus pada pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta pertanian dan perikanan guna menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Regulasi yang lebih ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam harus diterapkan untuk mencegah dampak lingkungan jangka panjang. Langkah konkret yang segera dilakukan meliputi penyusunan *Grand Design Transformasi Ekonomi*, peningkatan investasi di sektor non-SDA, serta kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

B. Pengeluaran/ Belanja

1. Belanja Operasi

Terkait dengan realisasi belanja menurut klasifikasi belanja daerah yang terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi;
- 2) Belanja Modal;
- 3) Belanja Tidak Terduga; dan
- 4) Belanja Transfer

Dari semua realisasi belanja daerah Kabupaten Berau tahun 2023 mulai dari halaman 71, TABEL 1.61 Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Belanja Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020 – 2023, TABEL 1.62 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023, TABEL 1.63 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023, TABEL 1.64 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Modal Kabupaten Berau Tahun 2023, TABEL 1.65 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Berau Tahun 2023, TABEL 1.66 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kabupaten Berau Tahun 2023, TABEL 1.67 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar Kabupaten Berau Tahun 2023, TABEL 1.68 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Berau Tahun 2023, TABEL 1.69 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Kabupaten Berau Tahun 2023, dan TABEL 1.70 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Pembiayaan dan Pengeluaran, Penunjang, Pengawasan Kabupaten Berau Tahun 2023.

Untuk berbagai komponen belanja pemerintah daerah Kabupaten Berau tahun 2023 kami memberikan apresiasi dan luar biasa atas capaian, realisasi, daya serap anggaran disemua bidang pada tabel-tabel di atas, karena hasil capaian hasil serapan anggaran di atas rata-rata 80% bahkan ada yang 100%.

Tindak Lanjut :

Setuju, ditindaklanjuti dengan peningkatan kinerja OPD yang kurang efektif. Pemerintah akan mempertahankan kinerja ini dengan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, optimalisasi belanja daerah diarahkan pada program yang lebih berdampak bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan layanan dasar, infrastruktur, serta penguatan sektor ekonomi non-SDA guna mendukung kemandirian daerah. Evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan anggaran diperlukan agar belanja daerah semakin efisien dan tepat sasaran.

2. Belanja Operasi

Terkait dengan realisasi belanja menurut klasifikasi belanja daerah yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer

Dari semua realisasi belanja daerah Kabupaten Berau tahun 2023 mulai dari halaman 71, TABEL 1.61 Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Belanja Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020 – 2023, TABEL 1.62 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023, TABEL 1.63 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023, TABEL 1.64 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Modal Kabupaten Berau Tahun 2023, TABEL 1.65 Komponen Tingkat Capaian/Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Berau Tahun 2023, TABEL 1.66 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kabupaten Berau Tahun 2023, TABEL 1.67 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar Kabupaten Berau Tahun 2023, TABEL 1.68 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Berau Tahun 2023, TABEL 1.69 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Kabupaten Berau Tahun 2023, dan TABEL 1.70 Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Pembiayaan dan Pengeluaran, Penunjang, Pengawasan Kabupaten Berau Tahun 2023. Untuk berbagai komponen belanja pemerintah daerah Kabupaten Berau tahun 2023 kami memberikan apresiasi dan luar biasa atas capaian, realisasi, daya serap anggaran disemua bidang pada tabel-tabel di atas, karena hasil capaian hasil serapan anggaran di atas rata-rata 80% bahkan ada yang 100%.

Tindak Lanjut :

Setuju, ditindaklanjuti dengan peningkatan kinerja OPD yang kurang efektif.

3.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pembangunan ekonomi Kabupaten Berau semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan yang signifikan, tercatat sebesar 7,28 persen, sebuah percepatan yang cukup berarti dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya tumbuh 5,44 persen. Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp50,82 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2020 sebesar Rp33,87 triliun. PDRB per kapita juga mengalami peningkatan, tercatat sebesar

Rp194,08 juta. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, yang kemungkinan besar didorong oleh sektor-sektor unggulan di Kabupaten Berau, seperti pertambangan, perikanan, dan pariwisata. Percepatan ekonomi ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama jika diiringi dengan distribusi yang merata, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur. Dengan adanya peningkatan PDRB per kapita, diharapkan masyarakat Kabupaten Berau dapat menikmati peningkatan pendapatan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup mereka. Namun, untuk memastikan dampak positif yang maksimal, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini juga menciptakan pemerataan dan mengatasi ketimpangan sosial di wilayah tersebut.

3.4.2. Persentase Penduduk Miskin

Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang terjadi hampir di banyak negara. Kemiskinan menjadi topik bahasan yang menarik baik di media massa, dunia akademis, maupun pemerintahan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, karena terkait erat berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya global.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang selalu menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting yang mendukung kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah

tersedianya data kemiskinan yang akurat.

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh BPS, 2024;

- 1). Persentase penduduk miskin pada tahun 2024 sebesar 5,08 persen, menurun 0,46 persen dari tahun 2023.
- 2). Jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 sekitar 12,35 orang, menurun sekitar 100,00 orang terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2023.
- 3). Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 0,41, mengalami perbaikan sebesar 0,25 poin terhadap indeks kedalaman kemiskinan tahun 2023.
- 4). Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 0,07, mengalami perbaikan sebesar 0,6 poin terhadap indeks keparahan kemiskinan tahun 2023.
- 5). Garis kemiskinan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 731.250,-/kapita/bulan meningkat dibandingkan dengan garis kemiskinan tahun 2023 sebesar Rp 677.819,-/kapita/bulan.

Capaian Kabupaten Berau ini masih lebih bagus dari capaian tingkat provinsi, capaian Persentase Penduduk Miskin masih diatas capaian provinsi yaitu sebesar 3,11. Dibandingkan dengan Kabupaten Lain di Provinsi Kalimantan Timur persentase penduduk miskin Kabupaten Berau menduduki Peringkat ke 5 dari yang tertinggi. Secara Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbanyak adalah Kota Samarinda dengan Persentase penduduk miskin sebesar 8,97 persen, sedangkan Kabupaten dengan persentase penduduk miskin paling sedikit adalah Kabupaten/kota Balikpapan dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,31 persen.

3.4.3. Indeks Gini

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Meningkatnya pendapatan penduduk ini diharapkan dapat merata dan dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat. Indeks gini merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh Angka gini rasio merupakan

suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Kabupaten Berau memiliki gini ratio yang cukup tinggi, seperti yang terlihat pada gambar di bawah yakni 0,377 dan angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,3 artinya menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Berau berada pada tingkat ketimpangan yang rendah, karena terletak diantara nilai 0,3 dan 0,4 atau dibawah angka 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pendapatan tergolong rendah. Koefisien Gini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memrepresentasikan ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang terjadi semakin merata. Nilai Koefisien Gini Berau yaitu 0,33, artinya menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Berau berada pada tingkat ketimpangan yang rendah.

3.4.4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama. Demikian pula, pengeluaran per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Berau selama tahun 2019-2023 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Namun capaian IPG Berau pada tahun 2019-2023 berada diatas capaian Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Berau melalui program pembangunannya, berupaya untuk memningkatkan IPM perempuan, khususnya pada indeks pendidikan dan indeks kesejahteraan. Untuk menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan dibutuhkan suatu pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender)

3.4.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (along and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Pembangunan manusia di Kabupaten Berau yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun masih dibawah Provinsi

Kalimantan Timur. IPM Kabupaten Berau pada tahun 2024 adalah 77,17, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 76,71.

3.4.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur) terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK bermanfaat untuk melihat penduduk yang potensial memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan data BPS, TPAK Kabupaten Berau Tahun 2024 sebesar 67,70 persen. Dibandingkan dengan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, capaian TPAK Kabupaten Berau masuk 5 urutan terbaik. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Berau sulit diprediksi, karena partisipasi angkatan kerja mengalami kondisi yang cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu 6 tahun kebelakang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ada masa mengalami peningkatan dari periode tahun 2022 sampai dan Mengalami kenaikan pada tahun 2024.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan sosial yang timbul dari bidang ketenagakerjaan adalah semakin banyaknya pengangguran. Segala bentuk pengangguran inilah yang mendorong tingginya angka kemiskinan di Bupati Kabupaten Berau. Pengangguran adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja sama sekali. Pengangguran merupakan salah satu indikator dalam bidang ketenagakerjaan, terutama pengangguran terbuka. Pengangguran Terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan.

Beberapa kategori yang termasuk dalam pengangguran terbuka adalah tidak punya pekerjaan dan yang mencari pekerjaan, tidak punya

pekerjaan dan yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin rendah.

Pada tahun 2022 sebesar 5,02%. Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun, mulai pada Tahun 2024 TPT Kabupaten Berau mengalami peningkatan menjadi 5,15%.

3.4.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku

PDRB Harga Berlaku menggambarkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam periode tertentu, dihitung dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Pada tahun 2021, PDRB wilayah tersebut tercatat sebesar 50,82 triliun rupiah, yang menunjukkan ukuran ekonomi wilayah pada tahun tersebut. Pada tahun 2022, PDRB mengalami sedikit kenaikan menjadi 51,28 triliun rupiah, yang mencerminkan sedikit pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023, PDRB mengalami lonjakan signifikan menjadi 60,16 triliun rupiah, meningkat hampir 8,9% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan yang cukup besar ini menunjukkan adanya percepatan dalam kegiatan ekonomi wilayah tersebut, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan sektor-sektor produktif, investasi, serta konsumsi masyarakat yang lebih tinggi.

3.4.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat pertumbuhan PDRB dalam persentase per tahun, yang menunjukkan seberapa cepat ekonomi suatu wilayah berkembang. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi tercatat 3,95%, yang relatif rendah. Namun, pada tahun 2022, laju pertumbuhannya meningkat menjadi 5,44%, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang lebih baik, setelah menghadapi tekanan ekonomi di tahun-tahun sebelumnya, seperti dampak dari pandemi atau krisis global. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi semakin menguat dengan angka 7,28%, sebuah peningkatan yang signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ekonomi wilayah tersebut tidak hanya pulih, tetapi juga berkembang dengan cepat, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan investasi, konsumsi domestik, dan ekspor.

3.4.9. PDRB Per Kapita Harga Berlaku

PDRB per kapita menggambarkan nilai rata-rata barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap individu di wilayah tersebut. Angka ini sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan atau tingkat pendapatan masyarakat. Pada tahun 2021, PDRB per kapita tercatat sebesar 194,08 juta rupiah, yang berarti rata-rata pendapatan per individu di wilayah tersebut berada pada tingkat tersebut. Pada tahun 2022, angka ini meningkat sedikit menjadi 198,53 juta rupiah, yang menunjukkan adanya sedikit peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat, beriringan dengan kenaikan PDRB.

Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan PDRB per kapita mencapai 236,23 juta rupiah. Ini berarti ada peningkatan sebesar hampir 19% dibandingkan dengan tahun 2021, yang menunjukkan bahwa pendapatan per individu di wilayah tersebut semakin meningkat, mengindikasikan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta kemampuan ekonomi yang lebih baik.

3.4.10. Inflasi (y-o-y)

Inflasi menggambarkan tingkat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam satu tahun. Inflasi yang terkendali biasanya mencerminkan stabilitas ekonomi yang lebih baik dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Pada tahun 2021, inflasi tercatat sebesar 5,35%, yang relatif tinggi dan mungkin menunjukkan adanya tekanan harga atau ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Pada tahun 2022, angka inflasi menurun menjadi 3,46%, yang menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dan moneter yang diterapkan mulai berhasil mengendalikan laju inflasi. Penurunan lebih lanjut terjadi pada tahun 2023, dengan inflasi yang tercatat hanya 2,69%. Penurunan inflasi yang konsisten ini menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian harga, menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik, serta memberikan dampak positif bagi daya beli masyarakat, karena harga barang dan jasa relatif lebih terjangkau.

3.4.11. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya optimalisasi percepatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 8 (delapan) area perubahan antara lain : manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai upaya Percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Berau menyusun Peraturan Bupati. Peningkatan ini mencerminkan birokrasi pemerintah Kabupaten Berau semakin profesional dengan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Keberhasilan penguatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Berau terutama disebabkan keberhasilan menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan sangat baik.

3.4.12. Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah dirumuskan pada tingkat global melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015. Agenda tersebut mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk termasuk penghapusan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 (lima) prinsip dasar yaitu People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras. Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169

Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

TABEL 3.16
Goal SDGs tentang Sosial, Lingkungan, Ekonomi, dan
Hukum dan Tata Kelola

No	Goal SDGs	Pilar
1.	<i>No Poverty</i>	Sosial
2.	<i>Zero Hunger</i>	Sosial
3.	<i>Good Health and Well-Being</i>	Sosial
4.	<i>Quality Education</i>	Sosial
5.	<i>Gender Equality</i>	Sosial
6.	<i>Clean Water and Sanitation</i>	Lingkungan
7.	<i>Affordable Energy</i>	Lingkungan
8.	<i>Decent Work and Economic Growth</i>	Lingkungan
9.	<i>Industry, inovation, and Infrastructure</i>	Lingkungan
10.	<i>Reduced and Inequalities</i>	Ekonomi
11.	<i>Sustainable Cities and Communities</i>	Lingkungan
12.	<i>Responsible Consumption and Production</i>	Lingkungan
13.	<i>Climate Action</i>	Lingkungan
14.	<i>Life Below Wate</i>	Lingkungan
15.	<i>Life on Land</i>	Lingkungan
16.	<i>Peace, Justice, and Strong Institution</i>	Hukum dan Tata Kelola
17.	<i>Partnership for the Goals</i>	Ekonomi

Sumber : BPS Berau, 2024

Mendasarkan urutan waktu, TPB dirumuskan di tingkat global pada akhir tahun 2015, sejalan dengan waktu penyusunan RPJMD 2021-2026. Hal tersebut memudahkan pengarustamaan TPB ke dalam dokumen RPJMD 2021-2026, sehingga sebanyak 84 target dari 169 target SDGs telah selaras dengan RPJMD. Sebagai tindak lanjut, telah disusun Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan untuk Kabupaten Berau, perumusan TPB di tingkat daerah pada akhir tahun 2021 dan pada saat penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 telah dilakukan penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, namun demikian indikator yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara garis besar sudah terakomodir dalam

RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Sehingga penyusunan pertama kali untuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Berau dilaksanakan dengan periodisasi 2021-2026.

Sehubungan dengan itu, maka metode yang digunakan untuk penyusunan RAD TPB Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 menggunakan tagging terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, sehingga dimungkinkan beberapa target dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau masih ada yang belum mengakomodir TPB.

1. SDGs MENYEMPURNAKAN MDGs

Ide atau gagasan tentang SDGs pertama kali disampaikan oleh pemerintah Kolombia dan Guatemala dalam pertemuan tidak resmi di Solo, Indonesia, Juli 2011. Usulan ini terus bergulir dan menjadi perdebatan di kalangan anggota PBB dalam berbagai pertemuan tidak resmi untuk menyempurnakan usulan tersebut. Di dalam usulannya, kedua negara menyebutkan ada 8 (delapan) tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- 1) *Combating Poverty*
- 2) *Changing Consumption Patterns*
- 3) *Promoting Sustainable Human Settlement Development*
- 4) *Biodiversity and Forests*
- 5) *Oceans*
- 6) *Water Resources*
- 7) *Advancing Food Security*
- 8) *Energy, including from renewable sources*

TPB/SDGs merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari MDGs dengan target dan tujuan yang lebih ambisius. Salah satu contoh adalah target kemiskinan: pada MDGs mensyaratkan untuk menurunkan kemiskinan setengah dari angka baseline, namun TPB/SDGs lebih berat yaitu mensyaratkan tanpa kemiskinan. Selanjutnya, target indikator MDGs yang telah tercapai agar dipertahankan, dan target indikator yang belum tercapai diupayakan tercapai pada pelaksanaan Agenda TPB/SDGs.

2. *SDGs* MENYEMPURNAKAN *MDGs*

Pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*) merupakan pembangunan yang bersifat universal dan inklusif. Universal, karena tidak hanya dilaksanakan oleh negara kurang berkembang namun juga negara maju untuk seluruh bangsa dunia. Inklusif, artinya manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh segala lapisan dan kelompok masyarakat meliputi masyarakat rentan/miskin, disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki.

Penetapan tujuan dan target dalam TPB/*SDGs* mempunyai keterkaitan yang komprehensif antar pilarnya yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelola. Tujuan akhir yang diharapkan dalam pencapaian TPB/*SDGs* yaitu: Menghilangkan kemiskinan, Menghilangkan kelaparan dan Berkurangnya kesenjangan. Untuk mempercepat pencapaian tujuan akhir tersebut terdapat tujuan-tujuan yang menjadi akselerasi/pemercepat yaitu Kehidupan sehat sejahtera, Pendidikan berkualitas, Kesetaraan gender, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Kota pemukiman yang berkelanjutan, Penanganan perubahan iklim serta Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Sedangkan tujuan-tujuan yang lain merupakan katalisator/daya ungkit yaitu: Air bersih dan sanitasi layak, Energi bersih dan terjangkau, Industri inovasi dan infrastruktur, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Ekosistem lautan, Ekosistem daratan dan Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Inklusif, tidak hanya dimaknai dari sisi penerima manfaat pembangunan, namun dimaknai juga bagi pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dalam mewujudkan TPB/*SDGs* bukan hanya pemerintah (eksekutif dan legislatif) namun juga melibatkan filantropi dan pelaku usaha, Akademisi dan Pakar, Organisasi Masyarakat Sipil bahkan Media. Setiap unsur tersebut memiliki peran masing-masing namun saling terkait. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/*SDGs*. Organisasi Masyarakat Sipil memberikan

advokasi, membangun kesadaran masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs. Filantropi dan pelaku usaha berperan untuk melakukan advokasi pada para pelaku usaha dan sektor bisnis. Peran akademisi bertumpu pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mengupayakan terwujudnya pencapaian TPB/SDGs.

TPB/SDGs merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja, sehingga perlu peran serta aktif seluruh pihak dalam fasilitasi, koordinasi, advokasi, sosialisasi dan diseminasi guna mewujudkan sinergitas pencapaian TPB/SDGs. Pembagian pola peran menjadi sangat penting dalam pelaksanaan TPB/SDGs, demikian halnya dengan pembiayaan yang dialokasikan untuk perwujudan pencapaian TPB/SDGs yang tidak hanya bersumber dari APBD namun juga sumber lainnya.

3.5. KENDALA-KENDALA DAN PEMBAHASAN PERMASALAHAN

3.5.1. Mal Pelayanan Publik (MPP)

Pengembangan inovasi pelayanan publik maka pemda berau sedang mengkaji perencanaan berdirinya pelayanan terpadu generasi ketiga, yakni mal pelayanan publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan



bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. Berdirinya mpp juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi 4.0, yaitu percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

3.5.2. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah

Pembangunan gedung baru RSUD dr. Abdul Rivai telah mencapai 100 persen dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2024. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas



layanan kesehatan bagi masyarakat Berau dan sekitarnya. Gedung baru ini dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk ruang rawat inap yang lebih nyaman, unit gawat darurat yang lebih luas, serta peralatan medis canggih untuk menunjang layanan spesialis. Selain itu, rumah sakit ini juga memiliki laboratorium dan ruang operasi yang lebih lengkap guna memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan bahwa dengan adanya gedung baru ini, masyarakat dapat memperoleh pelayanan medis yang lebih baik, cepat, dan efisien. RSUD dr. Abdul Rivai sebagai rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Berau kini semakin siap melayani pasien dengan standar kesehatan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan kesehatan dengan menambah tenaga medis profesional dan memperkuat sistem rujukan. Diharapkan, keberadaan gedung baru ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Berau dan sekitarnya.

3.6. PENGHARGAAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2024

TABEL 3.17

Penghargaan Keberhasilan OPD Kabupaten Berau Tahun 2024

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Berau (Akreditasi "A", Kegiatan Penerbitan dan Kegiatan lomba-lomba bersama Perpustakaan binaan)	1).	Juara 1, Klaster III Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2024 diberikan kepada Perpustakaan Garlib SMA Negeri 1 Berau, Tahun 2024	Juara 1 Lomba Perpustakaan Tingkat SMA/SMK/MA terbaik Provinsi Kaltim Tahun 2024	
		2).	Terbaik 1, Inovasi layanan Digital terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diberikan kepada perpustakaan sanggam, Desa Maluang, Kabupaten Berau		
		3).	Inovasi Layanan Digital Terbaik dalam implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diberikan kepada Perpustakaan Sanggam, Desa Maluang, Kabupaten Berau Tahun 2024		

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
		4).		Destia Salsabila (SDN 015 Berau) Juara Favorit Lomba bertutur Tingkat SD/MI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	Destia Salsabila (SDN 015 Berau) Juara 1 Lomba bertutur/bercerita Tingkat SD/MI se-Kabupaten Berau Tahun 2024
		5).		Nuraini Fadelia, Juara Harapan 2 Lomba Resensi Buku Tingkat SMA/SMK/MA Terbaik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		6).	Penghargaan diberikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Berau yang telah konsisten dalam menerbitkan buku-buku kearifan lokal berau di penerbit Deepublish		
		7).		Penghargaan diberikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Berau untuk Penyelenggaraan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial se Kalimantan Timur Tahun 2024	
		8).		Penghargaan sebagai pelaksana Akreditasi Perpustakaan Sekolah	

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
2.	DPMK			terbanyak se-Kalimantan Timur Tahun 2024	
		9).		Penghargaan Terbaik 2, Bidang Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Masyarakat se-Kalimantan Timur	
		10).		Penghargaan Terbaik 2, Bidang Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Masyarakat se-Kalimantan Timur	
		1).		Juara 1 Lomba BBGRM Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 (Kampung Bukit Makmur Kecamatan Segah)	
		2).		Juara 2 Lomba RT Teladan Kategori Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2024 (Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjung Redeb)	
		3).		Juara 2 Lomba RT Teladan Kategori Kampung Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2024 (Kampung Bukit Makmur Kecamatan Segah)	
		4).		Juara 1 Lomba BBMDes Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan	

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
				Timur Tahun 2024 (Kampung Inaran Kecamatan Sambaliung)	
		5).		Juara 1 Lomba BumDes Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Kategori KEUANGAN dan ASET (Kampung Long Laung Kecamatan Tanjung Redeb)	
		6).		Juara 3 Lomba PRODUK UNGGULAN DESA Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		7).		Juara 3 Lomba PRODUK OLAHAN DESA Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Kampung Damring Kecamatan Talisayan)	
		8).		Piagam Penghargaan Atas Partisipasi Mengikuti lomba Cerdas Cermat Kader PKK dalam Rangka HKG PKK Ke-50 Tingkat Nasional dan Jambore Nasional Kader PKK di Kota Solo Tahun 2024	
		9).		Juara 3 Lomba Kategori Lomba Terb Administrasi PKK Tahun	

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
				2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	
		10).		Juara III Kategori Kabupaten Lomba Dasa Wisma PKK Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	
		11).		Juara Harapan I Kategori Kabupaten Lomba PAAR (Jambore) Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	
		12).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba Vlog Pokja I Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	
		13).		Juara III Kategori Kabupaten Lomba Administrasi Pokja I TP PKK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		14).		Juara I Kategori Menu Makan Siang B2SA Masakan Khas Daerah Non Beras Non Terigu dan Olahan Buah Lokal Pada Festival Pangan Lokal B2SA Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
		15).		Piagam Penghargaan Kategori Penyiapan/ Penampilan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		16).		Juara Harapan I Kategori Menu Keluarga Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		17).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba PKK-Bangga Kencana-Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		18).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		19).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		20).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
		21).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		22).		Juara 3 Lomba Produk Unggulan Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur)	
		23).		Juara 3 Lomba Produk Unggulan Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan)	
		24).		Juara II Lomba Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang PKK Kategori Kabupaten Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	
		25).		Juara III Kategori Kabupaten Lomba Dasa Wisma PKK Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	
		26).		Juara Harapan I Kategori Kabupaten Lomba PAAR Tahun	

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
				2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	
		27).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba Vlog Pokja PKK Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	
		28).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba Aku Hatinya PKK Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	
		29).		Juara Harapan I Kategori Menu Makan Siang B2SA Masakan Khas Daerah Non Beras Non Terigu dan Olahan Buah Lokal Pada Festival Pangan Lokal	
		30).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba Administrasi Pokja PKK Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	
		31).		Piagam Penghargaan Kategori Penyajian/ Penampilan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		32).		Juara Harapan I Kategori Menu Keluarga Lomba Masak Serba	

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
				Ikan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		33).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba PKK-Bangga Kencana-Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		34).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		35).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		36).		Piagam Penghargaan Kategori Penyajian/Penampilan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		37).		Juara Harapan I Kategori Menu Makan Siang B2SA Masakan Khas Daerah Non Beras Non Terigu dan Olahan Buah Lokal Pada Festival Pangan Lokal	

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
		38).		Piagam Penghargaan Kategori Penyajian/ Penampilan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		39).		Juara Harapan I Kategori Menu Keluarga Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		40).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba PKK-Bangga Kencana-Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		41).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		42).		Juara II Kategori Kabupaten Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	
		43).		Juara III Lomba Desa Teladan PKAD Tingkat Nasional di Regional III Tahun 2024 (Kampung Kayu Indah)	

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
3.		44).		Juara II Lomba Desa/ Kampung Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Kampung Kayu Indah)	
		45).		Juara I Lomba Pengelola KP-SPAMS Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Kampung Inaran)	
		46).		Juara 1 Lomba BBGRM Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 (Kampung Bukit Makmur Kecamatan Segah)	
		47).		Juara 2 Lomba RT Teladan Kategori Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2024 (Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjung Redeb)	
	DPPKBPPPA	1).		Terbaik 1 Bidang Sektor Dekranasda pada Peringatan Hut ke 67	
		2).		Penghargaan Atas Pencapaian Industri Kecil yang masuk SIINAS Tahun 2024	
		3).		Juara 2 Inovasi dan Kreatif Indovec Expo 2024 di Mega Mall Batam (14-17 November 2024)	

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
		4).		Juara 3 Stand Favorit Gebyar Kriva Nusa di Yogya (14-17 November 2024)	
		5).		Juara 3 Kategori Batik Dekranasda Award Tahun 2024	
		6).		Juara Harapan 2 Kategori Serat Alam Dekranasda Award Tahun 2024	
		7).		Stand Terbaik Bidang Perdagangan Jakarta Kreatif EXPO 2024 (5-8 Desember 2024)	
		8).		Penghargaan Primaniyarta Kategori Kepala Daerah Pendukung Ekspor	
		9).		Penghargaan yang bertajuk Apresiasi Daerah Peduli Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Potensi Sumber Daya Lokal	
		10).		Juara 1 Lomba Pawai Budaya Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Berau Tahun 2024	
		11).		Penghargaan Kategori Pembina UMKM pada Peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau	

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
4.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau	1).	Juara 2 Inovasi dan Kreatif Indovec Expo 2024 di Mega Mall Batam (14-17 November 2024)	Terbaik 1 Bidang Sektor Dekranasda pada Peringatan Hut ke 67	Juara 1 Lomba Pawai Budaya Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Berau Tahun 2024
		2).	Juara 3 Stand Favorit Gebyar Kriva Nusa di Yogya (14-17 November 2024)	Penghargaan Atas Pencapaian Industri Kecil yang masuk SIINAS Tahun 2024	Penghargaan Kategori Pembina UMKM pada Peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau
		3).	Stand Terbaik Bidang Perdagangan Jakarta Kreatif EXPO 2024 (5-8 Desember 2024)	Juara 3 Kategori Batik Dekranasda Award Tahun 2024	
		4).	Penghargaan Primaniyarta Kategori Kepala Daerah Pendukung Ekspor	Juara Harapan 2 Kategori Serat Alam Dekranasda Award Tahun 2024	
		5).	Penghargaan yang bertajuk Apresiasi Daerah Peduli Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Potensi Sumber Daya Lokal.	Penghargaan yang bertajuk Apresiasi Daerah Peduli Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Potensi Sumber Daya Lokal	
5.	Dinas Kesehatan	1).	Penghargaan Bebas Frambusia	Capaian PTM Terbaik se-Kaltim, Peningkatan dan Partisipasi dalam Rekor MURI Pengukuran Tekanan Darah Masal Hari Hipertensi Sedunia	

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
		2).	Berau Raih Universal Health Coverage	Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi	
		3).	Berau Raih STBM Pratama	Ombudsman Pelayanan Publik	
		4).		Lomba Asuhan Mandiri Penataan Toga & Pola Hidup Bersih & Sehat Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 202	
		5).		Kader, Yang Mencapai AFP non Polio Rate	
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan	1).		Juara 1 TPK dalam rangka Hari Keluarga Nasional	
		2).		Juara 2 Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor TK. Propinsi Kalimantan Timur dalam rangka Hari Keluarga Nasional Th 2023	
		3).		Duta Genre TK. Provinsi Kaltim untuk: Putra Juara Favorit, Putri Juara 3	
		4).		Juara 1 Panji Keberhasilan Bidang Kependudukan TK. Prov. Kaltim	
		5).		Juara 2 Tingkat SD 007 dalam Lomba Sekolah Siaga Kependudukan Tingkat Prov. Kaltim	

NO	OPD	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	TINGKAT LOKAL
		6).		SMPN 1 Tanjung Redeb Juara 3 Lomba Sekolah Siaga Kependudukan Jenjang SMP Tingkat Prov. Kaltim	
7.	DINAS PANGAN	1).	Sertifikat Apresiasi untuk Ukur Ukul Bagi Pangan Substansi Pelaksanaan Tertib Gizi dan Kesehatan Pangan	Juara 2 Penghargaan Kategori Keberhasilan Bidang Ketahanan Pangan	Juara 2 Penulisan Bahan Pangan Berbasis Sistem Sumber Daya Alam
		2).		Website Dinas Pangan Berau Website Dinas Pangan	
		3).		Website Dinas Pangan Berau - Postingan Media Sosial Dinas Pangan	
		4).		FSV (Forum Sistem Virtual) Pangan	
		5).		Penggunaan SPBE dan Digitalisasi	
8.	BDKAD	1).		Penghargaan untuk Inovasi se-Kalimantan tg Regional	Juara 1 Inovasi Koprasi se Kab. Berau

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau Kampung, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan/atau Kampung, serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Kampung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Kampung.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah dan/atau Kampung meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh Daerah dan/atau Kampung akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom kepada Kabupaten dan/atau Kampung meliputi sebagian tugas-tugas Provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/ Kota memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah

diserahkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui anggaran Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah “Penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah atau Kampung dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Kampung serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kampung untuk melaksanakan tugas tertentu. Pemerintah Kabupaten Berau mendapatkan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa Kementerian yang langsung ditujukan ke Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Tugas Pembantuan.

A. Tugas Pembantuan yang diterima

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Tugas Pembantuan tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang merupakan implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian yang terkait.

Untuk tahun 2020 Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau :

1) Tugas Pembantuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air (DAK NON FISIK).

- Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya.

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan untuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air adalah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya
Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber : APBN

Jumlah Anggaran : Rp. 600.000.000,00

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air adalah adanya kekeliruan dalam mencantumkan kode belanja sehingga tidak dapat direalisasikan, disamping itu kondisi Pandemi Covid 19 tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan lomba di museum sebagaimana yang tercantum pada dokumen anggaran.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi adalah selanjutnya perlu lebih teliti dalam penentuan jenis maupun kode belanja agar sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (DAK Non Fisik)

a. Dasar Hukum :

Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan untuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber : APBN

Jumlah Anggaran : Rp. 664.050.000,00

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata adalah terlambatnya pelaksanaan dikarenakan Pandemi Covid 19. Solusi yang dilaksanakan terhadap kendala tersebut adalah pelaksanaan kegiatan segera setelah keadaan membaik dan pembagian tugas yang melibatkan bidang lain agar pelaksanaan berjalan sesuai apa yang telah direncanakan.

3. Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dana HIBAH)

a. Dasar Hukum :

Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan untuk Dana Hibah Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber : APBN

Jumlah Anggaran : Rp. 2.445.013.250,00

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan untuk Dana Hibah Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota adalah keterbatasan waktu pelaksanaan revitalisasi karena dana hibah yang diterima menjelang akhir tahun, selain itu lokasi pelaksanaan revitalisasi sarana dan prasarana tersebar di kecamatan-kecamatan yang cukup jauh. Solusi yang dilakukan terhadap kendala yang dihadapi adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk dapat diselesaikan tepat waktu.

4. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi (Dana HIBAH)

a. Dasar Hukum :

Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020.

c. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan untuk Dana Hibah Kegiatan Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta

pengawasan standarisasi adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber : APBN

Jumlah Anggaran : Rp. 493.421.750,00

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan untuk Dana Hibah Kegiatan Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi adalah keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi di 11 kecamatan karena dana hibah yang diterima menjelang akhir tahun, selain keterbatasan narasumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengingat narasumber harus membagi waktu untuk kabupaten/kota lain yang menerima dana hibah. Solusi yang dilakukan terhadap kendala yang dihadapi adalah mengatur jadwal pelaksanaan sebaik mungkin agar kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal.

5. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Dana HIBAH)

a. Dasar Hukum :

Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah

Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020.

d. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan untuk Dana Hibah Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber : APBN

Jumlah Anggaran : Rp. 530.000.000,00

f. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada kendala dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan untuk Dana Hibah Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dari 2 pelatihan yang ditargetkan terlaksana keduanya, yaitu Pelatihan Selam dan Pelatihan Bahasa Inggris.

2. Tugas Pembantuan yang Diterima Dinas Perkebunan :

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor : SP DIPA-018.05.4.160461/2020 Tanggal 11 November 2019

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemberi Tugas adalah Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian Ta.2020

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Satuan kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

d. Program dan Kegiatan Yang di Terima dan Pelaksanaannya

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perkebunan Kabupaten Berau mendapatkan bantuan dari dana Pemerintah Pusat kepada daerah berupa kegiatan:

- a. Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perkebunan Rp. 282,680,000
- b. Pengembangan Tanaman semusim dan Rempah sebesar Rp. 103,500,000
- c. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan sebesar Rp. 1.000.000.000

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota biasanya bersumber dana dari APBN Kementerian. Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perkebunan Kabupaten Berau mendapatkan dana bantuan dari pemerintah pusat kepada daerah dan pada Tahun 2020 sebagai satker mandiri dengan bantuan sebesar Rp 1,386,180,000 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.

f. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan pada Kegiatan Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perkebunan sebesar Rp. 282,680,000, anggaran yang terserap sebesar Rp. 238,658,000,- sisa anggaran tidak dapat terserap sebesar Rp. 44,022,000,- sisa honorarium (pagu di atas standarisasi) dan perjalanan dinas

akibat pandemi Covid 19. Sehingga solusinya adalah untuk Pagu disesuaikan dengan standar karena standarisasi honor Pagu lebih tinggi dari standar sehingga tidak terserap.

- 2) Permasalahan pada kegiatan Pengembangan Tanaman semusim dan Rempah sebesar Rp. 103,500,000 anggaran yang terserap sebesar Rp. 102,100,000 sisa anggaran tidak dapat terserap Rp. 1,400,000,- dari sisa pengadaan barang dan jasa, telah sesuai peraturan sistem pengadaan barang dan jasa
- 3) Permasalahan pada Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan sebesar Rp. 1,000,000,000 anggaran yang terserap sebesar Rp. 972,720,000,- sisa anggaran tidak dapat terserap Rp. 27,280,000,- , telah sesuai peraturan sistem pengadaan barang dan jasa.

BAB V

P E N U T U P

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sesuai ketentuan Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, disebutkan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi : (a). capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan; (b). kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan (c). tindaklanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya. Kemudian secara teknis, penyusunan LKPJ mengacu ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang LPPD. Oleh karenanya, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 baik format, sistematika, maupun muatan substansinya mengacu ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun ke-4 (Empat) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Berau 2021-2026 yang di dalamnya menggambarkan beberapa capaian keberhasilan pembangunan dan kendala yang masih memerlukan perhatian untuk mencapai

kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus melanjutkan, meningkatkan dan menuntaskan persoalan-persoalan pembangunan terutama kebutuhan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Berau akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan merealisasikan program dan kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintah Daerah yaitu jajaran Eksekutif (baik di Tingkat Kabupaten), Legislatif (DPRD) dan masyarakat secara luas. Pemerintah Kabupaten Berau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Berau yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dapat dilihat dari keberhasilan Kabupaten Berau Meraih berbagai penghargaan di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional, antara lain :

1. Penghargaan Tanda Mata Kemenag RI

- Diberikan kepada bupati yang peduli terhadap program **Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (PPG PAI)**.
- Penghargaan ini diberikan karena bupati memberikan **bantuan terbesar kelima** dalam program tersebut.

2. Penghargaan 7 Panji Keberhasilan Pembangunan dari Pemprov Kaltim

- Penghargaan ini diberikan oleh **Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim)** kepada daerah yang berhasil dalam berbagai aspek pembangunan.
- Menerima **7 panji keberhasilan**, menunjukkan pencapaian luar biasa dalam berbagai sektor pembangunan.

3. Camat Talisayan, Peringkat III Terbaik Tingkat Kaltim

- Camat Talisayan mendapatkan **peringkat III terbaik** dalam kategori tertentu di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

4. Terbaik I Pelaporan Ranham Tingkat Kaltim

- Ranham adalah **Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)** yang bertujuan untuk menegakkan dan memajukan HAM di daerah.
- Kabupaten ini mendapat **peringkat pertama** dalam pelaporan Ranham di tingkat Kaltim.

5. Penghargaan Ombudsman RI atas Capaian Pelayanan Publik

- Ombudsman RI memberikan penghargaan ini karena pemerintah daerah berhasil mencapai standar pelayanan publik yang tinggi.
- Menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan publik.

6. Penghargaan TOP Pembina BUMD 2024

- Diberikan kepada kepala daerah yang berhasil membina **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** agar berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
- Penghargaan ini menunjukkan bahwa BUMD yang dibina memiliki kinerja keuangan yang baik, tata kelola yang baik, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

7. Terbaik Ke II Penghargaan Pembangunan Daerah

- Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang berhasil merencanakan, mengelola, dan merealisasikan pembangunan secara efektif.
- Mendapatkan **peringkat kedua terbaik** menunjukkan bahwa daerah ini memiliki perencanaan pembangunan yang strategis dan berdampak positif.

8. Opini WTP Hasil Pemeriksaan BPK RI

- **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** adalah opini tertinggi dalam audit laporan keuangan dari **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI**.

- Menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah dikelola dengan transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

9. Bupati Pendukung Zakat Terbaik – Baznas Award 2024

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan penghargaan ini kepada bupati yang paling mendukung program zakat.
- Penghargaan ini menunjukkan bahwa bupati memiliki komitmen dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat untuk kesejahteraan masyarakat.

10. Anugerah Bunda PAUD dari Menteri Pendidikan

- Penghargaan diberikan kepada bupati yang menunjukkan kepedulian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menunjukkan komitmen dalam pengembangan PAUD, baik dari segi fasilitas, program, maupun kesejahteraan tenaga pendidik PAUD.

Berbagai keberhasilan dan penghargaan tersebut tidak terlepas dari partisipasi semua elemen masyarakat Kabupaten Berau. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Melalui penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Berau membuka diri untuk menerima masukan-masukan untuk kemajuan Kabupaten Berau yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan Rahmat, Hidayah, Perlindungan dan Petunjuk Nya kepada kita semua untuk mewujudkan “Berau Sejahtera 2024”



LKPU 2024

**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BERAU**

